

SEJARAH PEMIKIRAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Disusun oleh :

Suradi Hp.

Mardanas Safwan

Djuariah Latuconsina

Samsurizal

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1986

PERPUSTAKAAN

DIREKTORAT PENINGGALAN PURBAKALA
DIREKTORAT JENDERAL SEJARAH DAN PURBAKALA
DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Milik Depdikbud
tidak diperdagangkan

**SEJARAH PEMIKIRAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Disusun oleh :

Suradi Hp.

Mardanas Safwan

Djuariah Latuconsina

Samsurizal

PERPUSTAKAAN	
DIREKTORAT PENINGGALAN PURBAKALA	
Nomor Induk :	9269
Tanggal :	20 DEC 2010

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1986

Minister of Education
Kementerian Pendidikan



SEJARAH PEMIKIRAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Disusun oleh

Dr. H. H. H.

Dr. H. H. H.

Dr. H. H. H.

Dr. H. H. H.

1980

THE ARABIAN WORLD IN THE HISTORY OF
CIVILIZATION AND CULTURE
BY THE ARABIAN WORLD IN THE HISTORY OF
CIVILIZATION AND CULTURE
BY THE ARABIAN WORLD IN THE HISTORY OF
CIVILIZATION AND CULTURE

**Koreksi naskah oleh :
Dharwono Hardjowidjono**



SAMBUTAN

DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, telah berhasil menerbitkan seri buku biografi dan kesejarahan. Saya menyambut dengan gembira hasil penerbitan tersebut.

Buku-buku tersebut dapat diselesaikan berkat adanya kerjasama antara para penulis dengan tenaga-tenaga di dalam proyek. Karena baru merupakan langkah pertama, maka dalam buku-buku hasil Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional itu masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Diharapkan hal itu dapat disempurnakan pada masa yang akan datang.

Usaha penulisan buku-buku kesejarahan wajib kita tingkatkan mengingat perlunya kita senantiasa memupuk, memperkaya dan memberi corak pada kebudayaan nasional dengan tetap memelihara dan membina tradisi dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebanggaan serta kemanfaatan nasional.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku-buku ini dapat menambah sarana penelitian dan kepustakaan yang diperlukan untuk pembangunan bangsa dan negara, khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan ini.

Jakarta, Oktober 1986.

Direktur Jenderal Kebudayaan,



Prof. Dr. Haryati Soebadio.

NIP. 130119123.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	viii
PENDAHULUAN	1
Bab I Periode Sebelum Kemerdekaan	4
1.1 Penyebaran Pendidikan oleh Pemerintah Kolo- nial	4
1.2 Pertumbuhan Sekolah Swasta Nasional	7
1.3 Pertumbuhan Kebudayaan Nasional	10
Bab II Periode Awal Kemerdekaan (1945–1950)	15
2.1 Perkembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Masa Pendudukan Jepang	15
2.2 Perkembangan Pendidikan	18
2.3 Perkembangan Kebudayaan	25
2.4 Usaha-usaha di Bidang Pendidikan dan Penga- jaran	28
2.5 Usaha-usaha Memajukan Kebudayaan	34
2.6 Usaha-usaha Memajukan olah raga	35
2.7 Struktur Organisasi	36

Bab III Periode Demokrasi Liberal (1950–1959)	41
3.1 Keadaan Negara pada Umumnya	41
3.2 Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	47
3.2.1 Pemikiran Konsepsi Pendidikan Nasional	49
3.2.2 Usaha-usaha di Bidang Pendidikan dan Pengajaran	51
3.2.3 Pemikiran dan Usaha-usaha Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan	79
3.3 Personalialia dan Struktur Organisasi	84
Bab IV Periode Demokrasi Terpimpin (1959–1966).	101
4.1 Latar Belakang Politik, Pendidikan, dan Kebudayaan	101
4.2 Lintasan Problematika Pendidikan	105
4.3 Arah Baru dari Pemikiran Pendidikan Nasional	108
4.4 Menuju ke Sistem Baru Pendidikan Nasional	115
4.5 Struktur Organisasi dan Keadministrasian Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan	122
4.6 Problematika dan Beberapa Kebijakan yang menonjol	127
4.7 Usaha-usaha Pengajaran dan Perbaikan yang Diselenggarakan	129
4.8 Penafsiran Baru terhadap Konsep Sistem Pendidikan Panca Wardhana dan Pergolakan Internal di Lingkungan Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan	142
Bab V Periode Orde Baru sampai dengan Akhir Pelita III (1966–1983)	150
5.1 Latar Belakang Politik, Pendidikan, dan Kebudayaan	150
5.1.1 Konsepsi Pendidikan pada Masa Demokrasi Terpimpin	151
5.1.2 Konsepsi Pendidikan pada Masa Orde Baru	153
5.2 Pembaharuan Pendidikan	154
5.2.1 Periode Kabinet Ampera (1966–1968)	154
5.2.2 Periode Kabinet Pembangunan I (1968–1973)	163

5.2.3	Periode Kabinet Pembangunan II (1973–1978)	177
5.2.4	Periode Kabinet Pembangunan III (1978–1983)	187
5.3.	Kebijaksanaan dan Usaha-usaha Pendidikan dan Kebudayaan	203
5.3.1	Kebijaksanaan Kabinet Ampera.	210
5.3.2	Kebijaksanaan Kabinet Pembangunan I.	213
5.3.3	Kebijaksanaan Kabinet Pembangunan II.	221
5.3.4	Kebijaksanaan Kabinet Pembangunan III.	240
5.4	Struktur Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan	263
5.4.1	Susunan Organisasi Berdasarkan Keppres No. 39 Tahun 1969, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0141 Tahun 1969.	264
5.4.2	Susunan Organisasi Berdasarkan Keppres No. 44 tahun 1974, dan No. 45 Tahun 1974, serta Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 079/0/1975.	267
5.4.3	Susunan Organisasi Berdasarkan Keppres No. 27 dan No. 40 Tahun 1979, dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0149/0/1979	269
5.4.4	Perubahan Susunan Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Berdasarkan Keppres No. 47 Tahun 1979	270
Bab VI	Penutup/Rangkuman	274
6.1	Periode Akhir Penjajahan Belanda.	274
6.2	Periode Pendudukan Tentara Jepang.	275
6.3	Periode Revolusi Fisik.	276
6.4	Periode Liberal.	277
6.5	Periode Demokrasi Terpimpin.	278
6.6	Periode Orde Baru sampai dengan Akhir Pelita III	278
DAFTAR PUSTAKA		283
LAMPIRAN		283
FOTO		345

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Halaman
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk Seluruh Indonesia . . .	288
2. Instruksi Penyelenggaraan Tata Tertib di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.	298
3. Instruksi Penyelenggaraan Kegiatan Kesenian dan Olah Raga di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan	301
4. Instruksi Penyelenggaraan Usaha Halaman di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. .	303
5. Instruksi Kewajiban Menabung oleh Murid Sekolah di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.	309
6. Instruksi Penyelenggaraan Koperasi Sekolah di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan	310
7. Instruksi Penyelenggaraan Kelas Masyarakat di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan	312
8. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 2.	315

9.	Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3.	317
10.	Gambar Piramida Penduduk Indonesia Tahun 1961-1980.	319
11.	Tabel Perbandingan Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan Tahun 1961-1980.	320
12.	Tabel Laju Perkembangan Penduduk Indonesia Tahun 1961-1980.	322
13.	Tabel Banyaknya Sekolah, Guru, Murid, menurut Jenis Sekolah tahun 1979/1980.	324
14.	Tabel Sekolah, Guru, dan Murid Indonesia Tahun 1981-1984.	326
15.	Tabel Banyaknya Perguruan Tinggi Negeri, Fakultas, dan Mahasiswa Tahun 1982/1983.	327
16.	Program Pendidikan Tinggi dalam Lingkungan Departemen P. dan K.	328
17.	Bagan Struktur Organisasi Kelembagaan Mahasiswa Intra Universitas Tahun 1978.	329
18.	Bagan Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1980.	330
19.	Daftar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Masa Jabatannya sejak Tahun 1945-1983.	331
20.	Panca Wardhana.	335

PENDAHULUAN

Sebagaimana telah tercantum dalam Mukadimah UUD 1945 bahwa salah satu tujuan negara yang merdeka adalah mencerdaskan bangsa termasuk melestarikan kebudayaannya. Karena itu, sejak awal pembentukan negara dan penyusunan kabinet yang akan mengatur pemerintahan negara, telah diambil langkah-langkah untuk tujuan itu. Dalam susunan kabinet yang dibentuk tahun 1945, telah diangkat seorang menteri pengajaran. Sejak itu, proses pertumbuhan Kementerian Pengajaran berlangsung sampai kini yang kita kenal dengan Departemen Pendidikan Kebudayaan.

Informasi tentang proses pertumbuhan Kementerian Pengajaran sampai kini menjadi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tersebut masih sangat sedikit, dan kalau ada biasanya hanya meliputi segi tertentu saja, dan juga dalam kurun waktu tertentu pula, jadi tidak mencakup kebijakan dan usaha-usaha Kementerian/Departemen tersebut di segala bidang dalam kurun waktu yang menyeluruh, padahal sebagai Kementerian/Departemen yang mempunyai tugas mencerdaskan bangsa dan mengembangkan kebudayaannya seharusnya memiliki data yang lengkap untuk mengungkap semua aspek dari peranan dan fungsinya dalam masyarakat.

Mengingat pemikiran serta permasalahan tersebut, maka dirasa perlu untuk mengadakan perekaman serta penyusunan

sejarah tentang pertumbuhan dan perkembangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, terutama mengenai pemikiran-pemikiran tentang pendidikan dan kebudayaan yang ditujukan bagi pemberian informasi kesejarahan kepada masyarakat luas.

Dengan adanya perekaman dan penulisan sejarah pemikiran pendidikan dan kebudayaan ini diharapkan semua aspek dari peranan dan fungsi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam mencerdaskan bangsa serta membina dan mengembangkan kebudayaan bangsa dapat diketahui dengan jelas, sehingga dapat dipergunakan oleh masyarakat yang ingin mempelajari masalah pendidikan dan kebudayaan Indonesia. Di samping itu dapat dipakai pula sebagai bahan pertimbangan kebijakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk masa yang akan datang.

Lingkup penulisan sejarah pemikiran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ini mencakup periode sejak awal kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan tahun 1983 atau akhir Pelita III. Periode tahun 1983 sampai kini tidak ditulis di sini karena masih banyak program yang sedang berjalan atau masih dalam percobaan. Untuk mengetahui atau membandingkan pemikiran pendidikan pada masa sebelum kemerdekaan, maka diberikan pula gambaran singkat keadaan pendidikan pada masa kolonial Belanda dan pendudukan tentara Jepang, yang membuka bab awal dari buku ini.

Penulisan buku ini dilaksanakan oleh sebuah tim yang terdiri atas enam orang yaitu: Drs. Abdurrahman Surjomihardjo, Dr. Djoko Surjo, Drs. Suradi Hp., Drs. Mardanas Safwan, Dra. Djuariah Latuconsina, dan Drs. Samsurizal.

Team penulis setelah menerima tugas dan mengikuti pengarahan serta mengadakan rapat team telah menghasilkan kerangka penulisan sebagai berikut.

- Bab I : Periode sebelum Kemerdekaan
- Bab II : Periode Awal Kemerdekaan (1945–1950)
- Bab III : Periode Demokrasi Liberal (1957–1959)
- Bab IV : Periode Demokrasi Terpimpin (1959–1966)
- Bab V : Periode Orde Baru sampai Akhir Pelita III (1966–1983).

Untuk kelancaran tugas diadakan pembagian tugas tim sebagai berikut.

1. Drs. Abdurrachman Surjamihardjo, dan
2. Dr. Djoko Surjo, sebagai konsultan dan penyempurnaan naskah.
3. Drs. Suradi Hp., sebagai ketua tim, menulis Bab III, dan sebagian Bab II.
4. Drs. Mardanas Safwan, sebagai anggota, menulis Bab I dan Bab II.
5. Drs. Samsurizal, sebagai anggota, menulis Bab IV.
6. Dra. Djuariah Latuconsina, sebagai anggota, menulis Bab V.

Penulisan buku ini dapat terlaksana berkat adanya sponsor dan bantuan beberapa pihak. Untuk itu, maka tim penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Soenjata Kartadarmadja, Pemimpin Proyek IDSN, sebagai sponsor dan pembina.
2. Bapak Drs. Subroto, Humas Depdikbud, yang telah memberi informasi yang sangat berharga.
3. Perpustakaan Balitbang Depdikbud, LIPI – LKN, IKIP Jakarta, dan Ditjenbud, yang telah dengan senang hati meminjamkan buku-buku yang diperlukan.
4. Semua pihak yang telah membantu terlaksananya penulisan ini.

Team penulis merasa bahwa mungkin masih banyak hal-hal yang belum terliput dalam tulisan ini, oleh karena itu, usul penyempurnaan dari para pembaca akan kami terima dengan senang hati.

Semoga buku ini bermanfaat bagi pengembangan usaha-usaha pendidikan dan kebudayaan di negara kita.

Jakarta, 28 Februari 1986
Team Penulis, •

BAB I PERIODE SEBELUM KEMERDEKAAN

1.1 *Penyebaran Pendidikan oleh Pemerintah Kolonial*

Kebijaksanaan dan usaha melestarikan dominasi Belanda di Indonesia dilakukan melalui usaha pendidikan. Menurut sistem pendidikan kolonial, sekolah dibagi menjadi tiga golongan, yaitu sekolah untuk anak-anak Eropa (Belanda), untuk anak-anak Timur Asing, dan untuk anak-anak pribumi. Anak-anak pribumi keturunan bangsawan hanya bisa masuk ke sekolah untuk anak-anak Eropa dengan izin khusus dari penguasa kolonial.¹

Sekolah yang mula-mula diperkenalkan adalah *Sekolah Kelas Dua* yang mendidik calon-calon pegawai rendah, dan *Sekolah Kelas Satu* yang diperuntukkan bagi anak-anak dari golongan masyarakat atasan. Di samping itu ada pula Sekolah Rendah yang terutama disediakan bagi anak-anak Eropa. Sejak awal abad ke-20 diperkenalkanlah sistem *Sekolah Desa (Volksschool)*, yang pendiriannya tergantung atas kemauan masyarakat setempat dan subsidi serta bimbingan pemerintah.

Setelah menyelesaikan sekolah ini kepandaian yang diperoleh hanya membaca, menulis, dan berhitung. Murid-murid yang terpilih dapat melanjutkan pendidikannya ke sekolah sambungan (*Vervolgschool*) untuk masa dua tahun. Secara berangsur-angsur sistem ini menggantikan Sekolah Kelas Dua sebagai lembaga pendidikan yang terpenting bagi anak negeri.²

Untuk keperluan anak-anak dari masyarakat kelas atasan didirikan pula *HIS (Hollandsch Inlandsche School)*. Dalam sekolah ini secara berangsur dipakai bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Setelah menyelesaikan pelajaran selama 7 tahun di *HIS*, anak yang pandai dan orang tuanya cukup mampu dapat melanjutkan sekolahnya ke *MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs)*, dan selanjutnya bisa terus ke *AMS (Algemeene Middelbare School)*.

Selain jalur *HIS*, *MULO*, dan *AMS*, ada jalur lain yaitu dari *HIS* melanjutkan ke *HBS (Hoogere Burger School)* yang masa belajarnya 5 tahun. Sebelum masuk *HBS* pada umumnya anak-anak Belanda dan anak-anak pribumi pilihan masuk terlebih dulu ke *Europeese Lagere School (ELS)* yang telah berdiri di Jakarta (Batavia) sejak tahun 1817. Sekolah ini seluruhnya memakai sistem dan tingkat pelajaran yang sama dengan yang berlaku di negeri Belanda.³

Dalam pada itu pemerintah kolonial juga menyediakan sekolah-sekolah vak (kejuruan), seperti Sekolah Dokter Hindia (*STOVIA*), Sekolah teknik (*Ambachtsschool*), dan Sekolah Guru (*Kweekschool*). *Kweekschool* di Bukittinggi terkenal dengan nama Sekolah Raja, yang bukan hanya mendidik guru tetapi mendidik juga calon-calon pamong praja.⁴

Kemudian pemerintah kolonial juga mendirikan Sekolah Guru (*Normaal School*), Sekolah Mantri Kesehatan, Sekolah Pertukangan, Sekolah Perkebunan, dan Sekolah *Magang*. Pada tahun 1924 pemerintah memperkenalkan Sekolah *Schakel*, yang menghubungkan sekolah bumiputra dan sekolah Belanda. Sampai tahun 1930 jumlah murid pribumi di sekolah kejuruan sebanyak 15.716 orang; jumlah murid Belanda hanya 5.233 orang.⁵

Dalam pertumbuhan jumlah murid sekolah menengah umum seperti *MULO*, *AMS*, dan *HBS*, antara tahun 1910 dan 1930 juga terjadi kenaikan yang besar. Pada tahun 1910 jumlah murid pribumi dari ketiga jenis sekolah tersebut hanya 5 orang, sedang pada tahun 1930 jumlahnya telah menjadi 7.776 orang.

Dari ketiga jenis sekolah tersebut *HBS* tetap lebih sulit dimasuki, sedangkan *AMS* lebih terbuka.⁶

Di samping sekolah dasar dan sekolah menengah, sekolah tinggi juga didirikan oleh pemerintah kolonial, yang juga dapat dimasuki oleh anak pribumi. Pada tahun 1924 Sekolah Teknik di Bandung ditingkatkan menjadi *Technische Hooge School (THS)*. Pada waktu yang bersamaan Sekolah Hakim di Jakarta (Batavia) dijadikan *Rechtskundige Hooge School" (RHS)*.⁷

Mulai tahun 1927 *STOVIA* di Jakarta mulai ditransformasikan menjadi *Geneeskundige Hooge Schools (GHS)*, dan perguruan tinggi yang sama juga dibuka di Surabaya dengan nama *NIAS*. Pada tahun 1930 juga dibuka Akademi Pemerintahan atau *Bestuurs Academie (BA)*. Tahun 1940 Sekolah Pertanian di Bogor ditingkatkan menjadi *Landbouwkundige Faculteit*.⁸

Sejak dibukanya perguruan tinggi di Indonesia, jumlah mahasiswa Eropa tetap lebih banyak daripada mahasiswa pribumi. Pada tahun 1927 keadaannya agak berbeda, karena jumlah mahasiswa pribumi menjadi lebih banyak daripada mahasiswa Eropa, yaitu pribumi 30 dan Eropa 28 orang. Perkembangan selanjutnya menunjukkan keadaan yang bervariasi, kadang-kadang pribumi lebih banyak, dan ada kalanya Eropa lebih banyak. Pada tahun 1934 jumlah mahasiswa yang menyelesaikan pelajarannya di perguruan tinggi sebanyak 34 orang, dengan perincian 14 pribumi, 12 Cina dan 8 Eropa.⁹

Di samping belajar di dalam negeri, anak-anak pribumi juga diberi kesempatan untuk belajar di luar negeri, khususnya di negeri Belanda. Sampai tahun 1932 jumlah mahasiswa pribumi yang mendapat kesempatan belajar di negeri Belanda berjumlah 344 orang, sedangkan dari golongan Cina sebanyak 360 orang. Selain di negeri Belanda mahasiswa Indonesia ada juga yang belajar di Jerman dan Belgia serta Amerika Serikat.¹⁰

Selain dari itu mahasiswa Indonesia juga ada yang menuntut ilmu di Universitas al Azhar Kairo dan di Mekah. Sampai tahun 1930 jumlah mahasiswa Indonesia dan Semenanjung Melayu yang belajar di Kairo dan Mekah 350 orang. Mahasiswa Indonesia yang menuntut ilmu di Kairo dan Mekah umumnya berasal dari Sumatra.¹¹

1.2 *Pertumbuhan Sekolah Swasta Nasional*

Sistem pengajaran kolonial yang dijalankan pada waktu itu mendapat tantangan dari beberapa golongan masyarakat Indonesia, terutama golongan pendidik. Mereka umumnya tidak puas karena di sekolah-sekolah pemerintah tidak diberikan pelajaran agama. Perasaan tidak puas itu diperkuat lagi karena titik berat pelajaran terutama mengenai bangsa Belanda. Pelajaran yang diberikan di antaranya adalah: bahasa Belanda, sejarah Belanda, geografi negeri Belanda, dan nyanian Belanda. Di sekolah pemerintah sangat kurang diberikan pelajaran mengenai Indonesia dan kebudayaannya. Keadaan yang tidak memuaskan inilah yang mendorong para pendidik Indonesia untuk memberikan pendidikan yang bersifat nasional.^{1 2}

Sekolah-sekolah pemerintah Hindia Belanda hanya menghasilkan tenaga pegawai atau tenaga buruh untuk pemerintah kolonial dan perusahaan swasta Belanda. Pendidikan yang bersifat nasional harus lebih mengutamakan pelajaran mengenai Indonesia dan kebudayaannya termasuk pergerakan nasionalnya. Sekolah-sekolah swasta nasional yang didirikan pada waktu itu di antaranya adalah: Sekolah Muhammadiyah, IMS Kayutanam, Taman siswa, Ksatrian Instituut, Perguruan Rakyat dan lain-lain.

Tamansiswa didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 oleh R.M. Suwardi Suryaningrat yang kemudian dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Asas Tamansiswa adalah Pancadarma, yaitu: kemerdekaan, kodrat alam, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Hubungan antara kelima dasar itu dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai berikut:

"Berilah kemerdekaan dan kebebasan kepada anak-anak kita, bukan kemerdekaan yang leluasa, namun yang terbatas oleh tuntutan-tuntutan kodrat alam yang khas atau nyata dan menuju ke arah kebudayaan, yakni keluhuran dan kehalusan hidup manusia. Agar kebudayaan tadi dapat menyelamatkan dan membahagiakan hidup dan penghidupan diri dan masyarakat, maka perlulah dipakai dasar kebangsaan, akan tetapi jangan sekali-kali dasar ini melanggar atau bertentangan dengan dasar yang lebih luas yaitu dasar kemanusiaan."¹³

Selanjutnya pokok-pokok pikiran Tamansiswa dirumuskan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai berikut: "Pengajaran berarti mendidik anak menjadi manusia yang merdeka, merdeka pikirannya dan merdeka tenaganya."

Salah seorang tokoh pendidik Indonesia yang berusaha mencari sistem pendidikan yang cocok bagi rakyat Indonesia adalah Mohammad Syafei dari Sumatra Barat. Setelah mempelajari sistem pendidikan di Indonesia dan negeri Belanda, maka Muhammad Syafei merumuskan pemikirannya sebagai berikut:

"Hidup sekarang dan hidup kemudian ada sambungannya, di mana tiap perbuatan dipertanggungjawabkan. Pendidikan berusaha mencapai Indonesia Mulia Sempurna, pendidikan umum dan pendidikan kejuruan sedapat mungkin disatukan. Bahasa Indonesia harus sebagai bahasa pengantar, bahasa Belanda hanya sekedar dimengerti, dan bahasa Inggris harus aktif. Kebudayaan nasional sangat dipentingkan, bakat harus dikembangkan, dan pemusatan pikiran lebih diutamakan.

Pendidikan harus mengarah kepada percaya diri dan berusaha atas tenaga sendiri, lingkungan pendidikan harus mempunyai rasa kekeluargaan yang mendalam. Anak-anak dibiasakan hidup sederhana, sebanyak mungkin pekerjaan diserahkan kepada pelajar, agar mereka selalu menjadi objek juga dibentuk menjadi subjek.

Pendidikan mendidik manusia susila, bertubuh sehat dan kuat, cerdas dan logis serta ulet atau gigih dan berbadan sehat. Anak harus mempunyai rasa kebangsaan dan kemanusiaan, aktif dan mempunyai sifat emosional yang sehat. Mereka harus dapat bekerja sama (kooperasi). Cara mengajar yang dipergunakan adalah auditorif, visual, dan motorik-taktik.¹⁴

Dalam pelaksanaannya sekolah dibagi menjadi dua, yaitu: "Sekolah Rendah" dan "Sekolah Dewasa". Ruang belajar merangkap menjadi tempat bekerja. Murid-murid dibiarkan membuat sesuatu menurut pikirannya sendiri. Jika ada sesuatu soal yang tidak bisa dipecahkan, baru diserahkan kepada majelis guru. Dengan berbekal ilmu umum dan kejuruan yang memadai, diharapkan murid dapat mencari pekerjaan di masyarakat.¹⁵

Sekolah swasta nasional yang lebih berorientasi pada masalah politik adalah Sekolah Sarekat Islam yang didirikan atas inisiatif Tan Malaka. Sekolah ini didirikan di Semarang pada tanggal 21 Juni 1921. Menurut Tan Malaka, kekuasaan kaum feodal berdiri atas didikan yang berdasarkan kefeodalan, sedangkan kemerdekaan rakyat hanya bisa diperoleh dengan didikan kerakyatan. Melalui sekolahnya ia ingin mencapai tiga tujuan, yaitu: memberi bekal yang cukup agar anak didik dapat mencari penghidupannya dalam dunia kapitalis dengan memberi pelajaran berhitung, menulis, membaca, sejarah, ilmu bumi, bahasa Jawa, bahasa Melayu, dan bahasa Belanda. Tujuan yang kedua adalah memberi hak kepada murid-murid untuk bersuka ria melalui kehidupan perkumpulan-perkumpulan. Tujuan yang ketiga adalah menunjukkan kewajiban kepada murid terhadap penderitaan berjuta-juta rakyat jelata. Murid harus sanggup berpikir merdeka dan mencari jalan sendiri. Perkumpulan anak-anak merupakan sekolah tersendiri yang besar artinya untuk mendidik rasa dan pikiran mereka.

Kuangan sekolah harus terlepas dari administrasi politik SI, walaupun semua anggota panitia adalah anggota SI. Ikatan politik perlu dibina karena murid-murid SI adalah para anggota SI. Cara Tan Malaka mendirikan sekolah ialah dengan menggunakan media pers dan propaganda langsung ke kampung-kampung.¹⁶

Sekolah swasta nasional yang lain adalah Ksatrian Instituut yang didirikan oleh Dr. E.F.E. Douwes Dekker, yang kemudian terkenal dengan nama Danudirdja Setiabudhi, di Bandung pada bulan November 1924. Menurut Setiabudhi yang terpenting di sekolahnya adalah rasa harga diri dan kepercayaan kepada diri sendiri sebagai bahagian dari pendidikan untuk membina watak. Batin sekolah ini berbeda dengan sekolah-sekolah penjajah.

Dalam arti susila, maka pengajaran selalu bertalian dengan kegembiraan hidup dan diarahkan untuk memperkuat dan menciptakan rasa harga diri. Dalam arti kecerdasan otak, maka pengajaran terutama ditujukan untuk menambah pengetahuan tentang sumber-sumber bantu bagi perkembangan tanah air

sendiri. Pengajaran berdasarkan jiwa nasional dan pendidikan mengarah kepada manusia yang berpikir merdeka.¹⁷

Dalam pelaksanaannya murid-murid Ksatrian Institut mendapat sarapan pagi yang bergizi di sekolah, karena tidak ada jiwa yang sehat dalam tubuh yang sakit. Sekolah juga merencanakan untuk menerbitkan sendiri buku-buku pelajarannya. Pelajaran yang diberikan adalah psikologi perdagangan, yaitu untuk mengenal langganan dan pembeli. Di samping itu juga diberikan pelajaran teknik perdagangan yang meliputi pengetahuan tata buku, pengetahuan dagang, ilmu perusahaan, dan ilmu biaya.

Sekolah Ksatrian Institut menghindari persamaan dengan sekolah-sekolah pemerintah. Lulusan sekolah ini diharapkan menjadi pekerja yang sanggup berdiri sendiri.

Perguruan swasta nasional lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah Perguruan Rakyat yang didirikan pada tanggal 11 Desember 1928 di Jakarta. Sekolah ini didirikan oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional, di antaranya Mr. Sunario dan Mr. Dr. Muhammad Mazif. Dasar Perguruan Rakyat adalah kebangsaan Indonesia yang menyatukan dunia pemuda dengan dunia yang lebih besar. Perguruan ini juga mengutamakan pendidikan jasmani, pembentukan watak, pengetahuan yang berdasarkan kenyataan, dan pendidikan yang dapat menimbulkan haluan hidup.¹⁸

Pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial kemudian menghasilkan kaum terpelajar yang sadar akan nasib bangsanya. Kaum terpelajar yang sadar ini memelopori pergerakan nasional Indonesia. Sebagai salah satu wadah untuk menampung pergerakan nasional adalah perguruan swasta nasional yang umumnya didirikan oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional.

1.3 Pertumbuhan Kebudayaan Nasional

Pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan nasional telah mulai semenjak timbulnya pergerakan nasional di Indonesia. Salah satu aspek penting yang ditimbulkan oleh pergerakan nasional adalah persatuan nasional. Alat yang penting untuk

mewujudkan persatuan adalah bahasa nasional yang dapat diterima oleh seluruh penduduk Indonesia.

Bahasa Melayu yang aslinya merupakan bahasa kelompok suku bangsa di Kepulauan Indonesia telah lama menjadi bahasa perdagangan di daerah pelabuhan di Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya bahasa Melayu telah berkembang menjadi bahasa persatuan. Perkumpulan dan partai politik kebangsaan telah menggunakan bahasa Melayu sebagai salah satu pengantar dalam bahasa perkumpulan mereka seperti: Budi Utomo, *Indische Partij* dan Sarekat Islam.¹⁹

Sejak tahun 1924 elite baru yang terdiri atas mahasiswa Indonesia di Negerland memimpin dan mengarahkan ide Indonesia sebagai pengertian politik. Organisasi mereka berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia (PI) dan majalahnya adalah *Indonesia Merdeka*. Kata "Indonesia" yang semula hanya dikenal mereka dalam kepustakaan etnologi, ditingkatkan sebagai istilah bagi identitas mereka. Sebagai kelanjutan dari ide "Indonesia" itu, maka di Indonesia pada tahun 1927 didirikan Partai Nasional Indonesia (PNI).

Elite Indonesia baru yang semula pandai dalam bahasa daerah atau bahasa Belanda melihat kemungkinan pemakaian bahasa Melayu sebagai alat komunikasi politik. Pada bulan Oktober 1928 pemuda Indonesia mengadakan kongres, yang salah satu keputusannya menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Keputusan ini merupakan perumusan yang tepat sekali dari kesadaran yang secara lambat berkembang pada tahun-tahun sebelumnya. Semenjak itu penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai kesempatan sejalan dengan kesadaran identitas Indonesia.²⁰

Majalah *Pujangga Baru* yang terbit sejak tahun 1933 merupakan untaian kegiatan intelektual baru yang dengan sadar menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi modern di tengah-tengah perkembangan ilmu dan teknologi. Pada tahun 1938 di Surakarta diadakan kongres bahasa Indonesia, dan salah satu keputusan penting dalam kongres itu ialah gagasan untuk mendirikan sebuah lembaga dan sebuah fakultas untuk mempelajari bahasa Indonesia.²¹

Mulai saat itu bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa hukum dan sebagai alat pertukaran pikiran di dalam dewan-dewan perwakilan. Fraksi nasional di dalam *Volksraad* di bawah pimpinan M.H. Thamrin melancarkan aksi penggunaan bahasa Indonesia di dalam pidato di muka sidang *Volksraad*.²²

Sejalan dengan perkembangan bahasa Indonesia, satu aspek yang penting pula ialah perjuangan pemakaian kata istilah "Indonesia" untuk menunjukkan identitas bangsa Indonesia yang dicita-citakan oleh para cendekiawan Indonesia. *Indische Vereeniging* yang didirikan pada tanggal 15 November 1908, pada tahun 1922 berganti nama menjadi *Indonesische Vereeniging*. Kemudian pada tahun 1924 diubah menjadi "Perhimpunan Indonesia" (PI), dan majalahnya yang semula bernama *Hindia Putera* berubah menjadi *Indonesia Merdeka*. PI-lah yang pertama kali menggunakan kata Indonesia di dalam pengertian politik ketatanegaraan.²³

Dalam pada itu, perkembangan pers nasional pada waktu itu juga ikut memajukan dan memperkembangkan kebudayaan nasional. Perkembangan pers berbahasa Melayu yang kemudian menggunakan bahasa Indonesia ikut memajukan kebudayaan nasional. Salah satu surat kabar nasional yang menonjol pada waktu itu adalah *Bintang Timur* yang dipimpin oleh Parada Harahap. Suksesnya terletak pada keuletan Parada Harahap sebagai pengusaha dan organisator. Keberhasilan *Bintang Timur* terletak pada corak surat kabar tersebut yang membawakan politik umum, jadi, bukan merupakan surat kabar partai, yang dapat dikategorikan sebagai pers nasional yang dapat mencapai massa yang lebih luas untuk mengembangkan kebudayaan nasional.²⁴

CATATAN BAB I

1. Anwar Yasin, *Pembaharuan Kurikulum Sekolah Dasar di Indonesia*, Fakultas Pasca Sarjana IKIP Jakarta 1983, hal. 87.
2. Yusmar Basri (ed.), *Sejarah Nasional Indonesia V*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta 1982, hal. 125.
3. *Ibid.*, hal. 129.
4. M.D. Mansur, at al., *Sejarah Minangkabau*, Bharatara Jakarta 1970, hal. 189.
5. Yusmar Basri, *op cit.*, hal. 133.
6. *Ibid.*, hal. 133.
7. *Ibid.*, hal. 135.
8. *Ibid.*, hal. 135.
9. *Ibid.*, hal. 136.
10. *Ibid.*, hal. 139.
11. *Ibid.*, hal. 140.
12. M. Said, *Pendidikan Abad Keduapuluh dengan Latar Belakang Kebudayaan*, Mutiara Jakarta 1981, hal. 49.
13. *Ibid.*, hal. 56.
14. *Ibid.*, hal. 62.
15. *Ibid.*, hal. 67.
16. Yusmar Basri, *op. cit.*, hal. 266.
17. *Ibid.*, hal. 269.
18. *Ibid.*, hal. 281.

19. *Ibid.*, hal. 284.
20. *Ibid.*, hal. 286.
21. *Ibid.*, hal. 287.
22. *Ibid.*, hal. 289.
23. *Ibid.*, hal. 292.
24. *Ibid.*, hal 314.

BAB II PERIODE AWAL KEMERDEKAAN (1945–1950)

2.1 *Perkembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Masa Pendudukan Jepang*

Kebijaksanaan pendidikan pada zaman pendudukan Jepang berbeda dengan kebijaksanaan pada zaman kolonial Belanda. Pendidikan pada zaman Hindia Belanda terlalu diskriminatif dan sangat membatasi pendidikan bagi rakyat banyak. Pemerintah pendudukan tentara Jepang mementingkan pendidikan dan pengajaran rakyat dengan dasar kebudayaan dan kemasyarakatan Indonesia. Di lain pihak penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran diawasi secara ketat; semangat militer Jepang digiatkan, bahasa dan sejarah Jepang dimasukkan dalam kurikulum, dan sekolah-sekolah swasta umumnya dilarang. Sungguhpun demikian, kebijaksanaan yang mementingkan pendidikan dan pengajaran rakyat sangat dihargai oleh tokoh pendidikan nasional Ki Hajar Dewanrara,¹ yang antara lain mengatakan sebagai berikut.

*"Sikap pemerintah pada permulaan, teristimewa dalam pendidikan kanak-kanak, pendidikan pemuda, pendidikan para calon guru, buat kita adalah bukti yang nyata bahwa pendidikan rakyat sungguh dipentingkan oleh pemerintah Bala Tentara Dai Nippon."*²

*"Sikap pemerintah pada permulaan, teristimewa dalam pendidikan kanak-kanak, pendidikan pemuda, pendidikan para calon guru, buat kita adalah bukti yang nyata bahwa pendidikan rakyat sungguh dipentingkan oleh pemerintah Bala Tentara Dai Nippon."*²

Pada zaman pendudukan tentara Jepang pendidikan dan pengajaran mengalami perubahan yang cukup berarti jika ditinjau dari aspirasi dan kepentingan bangsa Indonesia yang telah diperjuangkan sejak zaman penjajahan Hindia Belanda. Perubahan yang patut dicatat antara lain:

- 1). Pendekatan : pendidikan dilaksanakan tanpa diskriminasi golongan dan sebagainya.
- 2). Penyederhanaan : susunan sekolah disederhanakan, yaitu Sekolah Rakyat (3 tahun dan 6 tahun), Sekolah Lanjutan (SMP dan SMT), Sekolah Guru Laki-laki (SGL), Sekolah Guru Putri (SGP), Sekolah Teknik, Sekolah Teknik Tinggi, dan Sekolah Kedokteran Tinggi; sedangkan penyelenggaraan sekolah swasta dilarang.
- 3). Larangan pemakaian bahasa Belanda.
- 4). Keharusan pemakaian bahasa Indonesia di semua tingkat sekolah.
- 5). Buku pelajaran diterjemahkan dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia.
- 6). Istilah-istilah baru dalam bahasa Indonesia mulai disusun dan dikembangkan.
- 7). Pendidikan jasmani dan semangat militer digiatkan.
- 8). Bahasa dan sejarah Jepang dimasukkan dalam kurikulum sekolah.
- 9). Di Sumatra Barat pendidikan Agama Islam mulai dimasukkan dalam kurikulum sekolah negeri.³

Perubahan pendidikan yang diadakan pada zaman pendudukan tentara Jepang sebagian besar merupakan rintisan ke arah pembangunan dan pengembangan pendidikan nasional selanjutnya, dan merupakan langkah pertama penggantian sistem pendidikan dan pengajaran kolonial.

Perkembangan kebudayaan pada zaman pendudukan tentara Jepang juga mengalami perubahan, walaupun seluruh komunikasi dikendalikan oleh pemerintah militer Jepang. Surat kabar dan radio turut menyebarkan pemakaian bahasa Indo-

nesia. Lenyapnya bahasa Belanda dari dunia perguruan dan dari pergaulan sehari-hari memberikan kesempatan yang baik bagi pemakaian dan pengembangan bahasa Indonesia. Orang Belanda sendiri dilarang memakai bahasa mereka.⁴

Orang Jepang sendiri tidak jual mahal mengenai bahasa mereka, tetapi sebaliknya malahan diobral. Hal itu bertolak belakang dengan keadaan pada masa pemerintahan Hindia Belanda, di mana bahasa Belanda hanya diberikan pada sekolah tertentu, dan tidak semua orang Indonesia diizinkan memakai bahasa Belanda terhadap orang Belanda.⁵

Perkembangan bahasa Indonesia ketika itu boleh dikatakan dipaksakan, agar dalam waktu secepat-cepatnya dapat menjadi alat komunikasi yang dapat digunakan untuk semua bidang seluruh pelosok tanah air. Penguasa Jepang tidak dapat lagi menahan pertumbuhan bahasa Indonesia. Pada tanggal 30 Oktober 1943 didirikan Komisi Bahasa Indonesia yang dipimpin oleh Kepala Kantor Pengajaran Jepang yang bernama Mori. Di dalam komisi juga duduk tokoh-tokoh bahasa, kebudayaan dan politik, di antaranya: Mr. R. Suwandi, Mr. St. Takdir Alisyahbana, Abas St. Pamuncak, Armen Pane, Husein Jayadiningrat, Sanusi Pane, Purbacaraka, Priyono, H.A. Salim, Moh. Hatta, dan Soekarno. Sampai akhir masa pendudukan Jepang Komisi telah dapat menetapkan kira-kira 7.000 istilah.⁶

Sastra pada masa pendudukan tentara Jepang juga berkembang, walaupun perkembangannya diarahkan oleh Jepang. Hasil sastra dipergunakan untuk membangkitkan jiwa nasionalisme Indonesia dengan mengatakan bahwa nasionalisme Indonesia itu sejajar dengan nasionalisme Asia. Karya sastra sesuai dengan anjuran pemerintah Jepang, yaitu ditujukan ke arah usaha memenangkan Perang Asia Timur Raya.

Untuk mengarahkan agar karya seniman, seperti roman, sajak, lagu, sandiwara, dan film, tidak menyimpang dari tujuan Jepang, maka didirikanlah Pusat Kebudayaan pada tanggal 1 April 1943. Di dalam Pusat Kebudayaan kegiatan para sastrawan diawasi oleh Jepang. Karya sastra yang mendukung politik Tiga A diizinkan sesuai dengan keinginan Jepang.

Pada zaman pendudukan tentara Jepang sandiwara merupakan satu-satunya tontonan, karena film luar negeri dilarang pemutarannya oleh Jepang. Itulah sebabnya banyak dari kalangan generasi muda menceburkan diri ke dunia sandiwara atau menjadi pengarang. Kedudukan masyarakat sastrawan relatif baik karena terdapat fasilitas bagi perkembangan sastra. Cabang-cabang seni, seperti seni drama, seni film, seni musik, dan seni rupa, menerima fasilitas yang sama.⁷

Sebaliknya, karya sastra dan karya seni yang bertentangan atau menentang Jepang tidak boleh terbit dan beredar. Kalau penciptanya diketahui pasti mendapat hukuman, bahkan ada yang disiksa sampai meninggal.⁸

2.2 *Perkembangan Pendidikan*

Bangsa Indonesia memasuki kemerdekaannya tidaklah dengan rencana yang kosong dalam bidang pendidikan, sebab bersamaan dengan penyusunan Undang-undang Dasar (UUD), bekerja pula dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) suatu Sub-Panitia Pendidikan dan Pengajaran dengan susunan: Ki Hajar Dewantara sebagai ketua, dengan anggota-anggotanya yaitu: Prof.Dr. Husein Jayadiningrat, Prof. Dr. Asikin, Prof. Ir. Rooseno, Ki Bagus Hadikusumo dan K.H. Mas Mansur. Panitia ini ditugaskan menyusun rencana pengajaran bagi Indonesia merdeka nanti. Setelah diadakan perubahan sedikit, kerja panitia ini diterima oleh panitia yang dipimpin oleh Ir. Soekarno sebagai ketua PPKI. Pokok-pokok perumusan panitia ini adalah sebagai berikut:⁹

- 1). Perlu membuat undang-undang kewajiban belajar atau peraturan lain.
- 2). Pemerintah memelihara "Pendidikan Kecerdasan Akal Budi" untuk segenap rakyat dengan cukup dan sebaik-baiknya, (kemudian ditetapkan dalam UUD 45 pasal 31).
- 3). Sebagaimana garis-garis adab perikemanusiaan seperti yang terkandung dalam pengajaran agama, maka pendidikan dan pengajaran nasional harus bersendikan agama dan kebudayaan bangsa, serta menuju ke arah keselamatan dan kebahagiaan masyarakat.

- 4). Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi daya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju kemajuan adab dan budaya dari persatuan bangsa dengan tidak menolak bahan dari kebudayaan asing yang dapat memperkaya kebudayaan sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia (kemudian tertuang dalam UUD 45 pasal 32).
- 5). Masyarakat diberi kesempatan mendirikan sekolah swasta yang penyelenggaraannya sebagian atau sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah.
- 6). Tentang susunan pelajaran harus ditetapkan antara pengetahuan umum, pendidikan budi pekerti, pendidikan semangat bekerja, kekeluargaan, cinta tanah air serta keprajuritan. Syarat itu diwajibkan untuk semua sekolah baik negeri maupun swasta.
- 7). Susunan sekolah diatur sebagai berikut:
 - a). Mulai sekolah dasar sampai menengah diadakan sekolah pengetahuan umum dan kepandaian khusus.
 - b). Untuk murid yang tidak meneruskan pelajaran di setiap sekolah dasar, diadakan kelas sambungan yang memberikan keahlian khusus seperti: pertanian, pertukangan, perdagangan, pelayaran, dan perikanan.
 - c). Tiap sekolah pengetahuan umum mempunyai hubungan lanjutan dengan sekolah kepandaian khusus.
 - d). Sekolah menengah dan menengah atas dibagi menjadi dua bagian A (Alam) dan B (Budaya) sesuai dengan bakat anak-anak.
 - e). Lama pelajaran di sekolah menengah pertama dan menengah tinggi masing-masing 3 tahun.
 - f). Di samping itu perlu diadakan sekolah khusus seperti sekolah: Tani, Tukang, Tari dan Musik, dan Kesusasteraan.
 - g). Sekolah untuk mendidik guru harus dipentingkan, baik untuk guru biasa maupun pendidikan kilat. Perguruan swasta juga harus didorong membuka sekolah ini.

- h). Untuk tenaga pimpinan perlu dibuka universitas dan sekolah tinggi yang cukup, serta sekolah tinggi untuk keprajuritan.
 - i). Biaya belajar harus rendah, dengan pembebasan uang belajar untuk mereka yang tidak mampu.
- 8). Tentang pelajaran bahasa Indonesia:
- a). Bahasa Indonesia harus diajarkan dengan cukup di seluruh Indonesia dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi sebagai bahasa pengantar.
 - b). Di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri dapat diberikan sampai kelas tiga sekolah dasar, dan mulai kelas empat harus memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
 - c). Di Sekolah Menengah Tinggi bahagian budaya dipelajari bahasa Arab dan bahasa Sanskerta.
 - d). Bahasa asing yang diperlukan untuk menuntut pelajaran diberikan di sekolah menengah dan menengah tinggi.
- 9). Pendidikan masyarakat diberikan dengan jalan:
- a). Latihan keprajuritan untuk pemuda pemudi.
 - b). Pendidikan untuk orang dewasa.
 - c). Pendidikan khusus untuk kaum ibu.
 - d). Memperbanyak perpustakaan, penerbitan, surat kabar dan majalah.
- 10). Mendirikan Balai Bahasa Indonesia.
- 11). Mengirimkan pelajar ke seluruh dunia.

Pemikiran yang telah dihasilkan oleh tokoh-tokoh pendidikan dan kebudayaan ini, kemudian dipakai sebagai dasar kebijaksanaan pendidikan dan kebudayaan sesudah Indonesia merdeka. Pada permulaan kemerdekaan diangkatlah tokoh pendidik terkemuka Ki Hajar Dewantara menjadi menteri pengajaran pertama. Sebagai bekas ketua Sub-Panitia Pendidikan dan Pengajaran PPKI, ia berusaha untuk melaksanakan konsep yang telah dihasilkan itu dalam alam kemerdekaan.

Dalam pada itu BP KNIP dalam sidangnya tanggal 29 Desember 1945 mengusulkan kepada Kementerian Pengajaran untuk secepat mungkin mengusahakan pembaharuan pendidikan

dan pengajaran sesuai dengan UUD. Sebagai pedoman pelaksanaan usul BP KNIP antara lain adalah:

- 1). Perlu disusun pedoman pendidikan dan pengajaran baru yang sesuai dengan dasar negara. Jiwa pendidikan kolonial harus diganti secara revolusioner.
- 2). Untuk memperkuat kesatuan rakyat hendaklah diadakan satu macam sekolah untuk segala lapisan masyarakat.
- 3). Metodik yang berlaku di sekolah hendaklah berdasarkan sistem sekolah kerja.
- 4). Pengajaran agama hendaklah mendapat tempat yang teratur, seksama, dan mendapat perhatian semestinya dengan tidak mengurangi kemerdekaan pemeluk agama. Madrasah telah lama berakar dalam masyarakat Indonesia, oleh sebab itu, perlu mendapat bantuan dan tuntunan serta bantuan materiil dari pemerintah.
- 5). Kewajiban belajar yang lamanya 6 tahun dilaksanakan secara berangsur dan dalam waktu 10 tahun tiap anak Indonesia sudah bersekolah.
- 6). Di sekolah rendah tidak dipungut uang sekolah.^{1 1}

Usul BP KNIP ini tidak segera dapat dilaksanakan oleh pemerintah karena keadaan negara yang tidak mengizinkan. Kementerian PP dan K (Kementerian Pengajaran pada tahun 1946 berganti nama menjadi Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan), yang berkantor di Jalan Cilacap No. 4 Jakarta, setelah Jakarta diserbu oleh Belanda, terpaksa dipindahkan ke Surakarta pada tahun 1946. Selanjutnya waktu Belanda melancarkan Aksi Militer I pada tahun 1947, Kementerian PP dan K di bawah pimpinan Menteri Mr. Ali Sastroamijoyo mengungsi ke suatu tempat di Madiun sampai penyerahan kedaulatan.^{1 2}

Bersama-sama dengan kepindahan Kementerian PP dan K dipindahkan pula Fakultas Kedokteran ke Klaten, Fakultas Pertanian ke Solo, Fakultas Teknik ke Yogyakarta. Fakultas Hukum dan sebagian Fakultas Kedokteran masih tetap tinggal di Jakarta. Kegiatan pendidikan boleh dikatakan berhenti sesudah Belanda melancarkan Aksi Militer II pada tahun 1948.^{1 3}

Selama Perang Kemerdekaan, Sumatra yang kelihatannya terlepas dari Jawa sebenarnya tidak terlepas. Urusan pendidikan di daerah Sumatra dilakukan oleh seorang kepala jawatan, yang selalu menyesuaikan pendidikan dengan ketentuan-ketentuan dari pusat (Jawa). Di luar kedua pulau itu Belanda menyusun pemerintahan sendiri dengan organisasi pendidikan sendiri pula yang sesuai dengan kemauan dan tujuan Belanda.¹⁴

Selama Perang Kemerdekaan yang diangkat menjadi Menteri PP dan K adalah: Ki Hajar Dewantara (19 Agustus 1945 sampai 14 November 1945), Mr. Dr. T.S.G. Mulia (14 November 1945 sampai 12 Maret 1946), Moh. Syafei (12 Maret 1946 sampai 2 November 1946), Mr. Suwandi (2 November 1946 sampai 26 Juni 1947), Menteri Muda PP dan K adalah Ir. Gunarso, Mr. Ali Sastroamijoyo (3 Juli 1947 sampai 4 Agustus 1949), Mr. Teuku Moh. Hasan (19 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949), dan S. Mangunsarkoro (4 Agustus 1949 sampai 20 Desember 1949).¹⁵

Menteri PP dan K kedua dan ketiga, yaitu T.S.G. Mulia dan Moh. Syafei, belum sempat dilantik karena susahnya hubungan pada waktu itu antara Sumatra dan Jawa. Tetapi walaupun begitu, kedua Menteri PP dan K itu tetap melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan ketentuan dan petunjuk dari pemerintah pusat di Jakarta.¹⁶ Bahkan Menteri PP dan K Moh. Syafei tetap berkedudukan di Kayu Taman di Sumatra Barat. Tenaganya di daerah itu juga dibutuhkan untuk memimpin perjuangan melawan penjajah Belanda.¹⁷

Mr. Ali Sastroamijoyo menjadi Menteri PP dan K dalam tiga kali Kabinet yaitu Kabinet Amir Syarifuddin I, Kabinet Amir Syarifuddin II dan Kabinet Hatta I. Mr. Teuku Moh. Hasan menjadi Menteri PP dan K dalam kabinet "Pemerintah Darurat Republik Indonesia" (PDRI) di bawah pimpinan Mr. Syafruddin Prawiranegara yang berkedudukan di daerah Sumatra Barat.

Melihat keadaan yang seperti ini, di waktu negara berada dalam Perang Kemerdekaan, tentu sangat sukar menyusun struktur dan personalia departemen yang waktu itu bernama Kementerian PP dan K. Pokoknya, pada waktu itu pemerintah-

an berjalan sebagaimana adanya sesuai dengan situasi dan kondisi pemerintahan yang berpindah-pindah (mobil). Semuanya serba darurat dan anggaran untuk membiayai pemerintahan boleh dikatakan tidak ada. Para pejabat mulai dari pejabat tinggi sampai pejabat rendah bekerja dengan penuh dedikasi dan pengabdian untuk kemerdekaan bangsa dan tanah air. Mereka bekerja tidak mendapat gaji, malahan ada yang mengorbankan milik pribadi untuk kepentingan bersama.

Tetapi walaupun negara berada dalam suasana Perang Kemerdekaan, program Kementerian PP dan K tetap disusun dan disempurnakan sesuai dengan saran BP KNIP tanggal 27 Desember 1945. Pada tanggal 12 Mei 1947 Menteri PP dan K Mr. Suwandi mengesahkan para anggota Panitia Penyelidik Pengajaran RI yang beranggotakan 52 orang, yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantara.¹⁸

Tugas Panitia Penyelidik Pengajaran adalah :

- 1). Merencanakan susunan persekolahan baru untuk semua tingkat dan jenis.
- 2). Menetapkan bahan pengajaran dengan memperhatikan keperluan praktis dan tidak terlalu berat bagi murid.
- 3). Menyiapkan rencana pelajaran untuk tiap tingkat dan jenis sekolah yang diperinci tiap kelas.

Susunan persekolahan yang diusulkan oleh Panitia Penyelidik ialah: Sekolah Rendah 6 tahun, Sekolah Menengah Pertama 3 tahun, Sekolah Menengah Tinggi 3 tahun, Sekolah Kejuruan 3-6 tahun sesudah Sekolah Rakyat, dan Sekolah Tinggi 4-6 tahun. Perlu dicatat bahwa rencana pelajaran Sekolah Rakyat adalah salah satu hasil kerja panitia tersebut.¹⁹

Di samping itu di Solo pada tahun 1947 juga diadakan "Permusyawaratan Pendidikan". Pertemuan ini dihadiri oleh tokoh-tokoh pendidikan, dan masalah yang dibicarakan adalah mencari dasar-dasar dan memecahkan soal-soal pendidikan. Usaha yang dihasilkan oleh pertemuan ini kemudian digabungkan dengan hasil Panitia Penyelidik Pengajaran, yang kemudian menghasilkan Undang-undang Pokok Pendidikan, yang selanjutnya terkenal dengan Undang-undang No. 4 tahun 1950 tentang dasar dan tujuan pendidikan dan pengajaran serta organisasi sekolah.²⁰

Mengenai pendidikan tinggi, pada bulan Agustus 1945 telah berdiri "Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia" dengan Fakultas-fakultas Sastra, Kedokteran, Farmasi, Hukum, yang dipimpin oleh Prof. dr. Sarwono Prawirohardjo. Panitia Penyelidik Pengajaran kemudian menyarankan agar pendidikan tinggi dibagi menjadi 5 fakultas yaitu: Sastra, Ilmu Alam, Teknik, Kedokteran, dan Ekonomi.^{2 1}

Sementara itu, di Yogyakarta pada tanggal 17 Februari 1946 didirikan Sekolah Tinggi Teknik. Kemudian pada tanggal 3 Maret 1946 oleh Yayasan Perguruan Tinggi Gadjah Mada di-remikan berdirinya "Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada" yang terdiri atas Fakultas Hukum dan Fakultas Kesusasteraan yang bertempat di Pagelaran Yogyakarta.^{2 2}

Pada tanggal 25 September 1946 di Jakarta juga dibuka Fakultas Hukum dan Kesusasteraan. Kemudian Perguruan Tinggi Kedokteran dan Kedokteran Gigi juga dibuka di kota Malang. Perguruan Tinggi Kedokteran Bahagian II pada tanggal 4 Maret 1946 dibuka di Solo dan pada tanggal 5 Maret 1946 juga dibuka di Klaten Fakultas Kedokteran Bagian I. Pada bulan November 1946 di kota Bogor juga dibuka Perguruan Tinggi Kedokteran Hewan. Dengan meletusnya Aksi Militer I Belanda pada bulan Juli 1947 perguruan tinggi tersebut dipindahkan ke Klaten, sama halnya dengan perguruan tinggi yang di Malang, sebagian juga mengungsi ke Klaten dan Yogyakarta.^{2 3}

Sementara itu pemerintah pendudukan Belanda dalam tahun 1947 telah mendirikan *Universitas van Indonesie*, sebagai gabungan dari perguruan tinggi yang didirikan sebelum tahun 1942 yang berpusat di Jakarta, yang terdiri atas Fakultas-fakultas; Hukum, Kedokteran, Ekonomi, dan Sastra; di Bogor Fakultas Pertanian dan Kedokteran Hewan, di Bandung Fakultas Teknik, kemudian diperluas lagi dengan Fakultas Kedokteran Gigi di Surabaya dan Fakultas Ekonomi di Makasar. Di pihak Republik diresmikan berdirinya Universitas Negeri Gadjah Mada pada tanggal 19 Desember 1949 di Yogyakarta yang terdiri atas 6 fakultas.^{2 4}

Hasil dari Panitia Penyelidik Pengajaran yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara tidak semata-mata memikirkan pendi-

dikan reguler, namun ingin pula mengembangkan suatu sistem pendidikan masyarakat berlandaskan keadilan sosial. Metode yang digunakan adalah metode sekolah kerja dengan aktivitas yang dipusatkan pada suatu pekerjaan atau keterampilan tertentu. Pendidikan masyarakat itu direncanakan ada 4 macam yaitu: pertanian, perdagangan, kerajinan, dan kewanitaian. Pendidikan ini diutamakan bagi anak-anak yang tidak melanjutkan ke sekolah lanjutan, dan lama pendidikannya ditetapkan 1 tahun. Kebijakan ini diambil karena banyak anggota masyarakat Indonesia yang masih lemah keadaannya. Menurut catatan pada waktu itu jumlah murid tamatan Sekolah Rakyat tahun 1944/1945 yang tidak melanjutkan pelajarannya ke sekolah lanjutan berjumlah 80.050 orang.²⁵

Berdasarkan angka tersebut, maka direncanakan akan dibuka paling sedikit 1.000 buah pendidikan (kelas) masyarakat. Untuk menyelenggarakan kelas masyarakat itu perlu kerja sama dengan Kementerian Perdagangan dan Pekerjaan Umum.

Panitia Penyelidik Pengajaran juga memikirkan pemberantasan buta huruf. Di Jawa pada tahun 1946 diperkirakan 5 sampai 6 juta penduduk yang buta huruf. Masalah ini bisa diatasi dengan cepat, apabila pemerintah berhasil menyusun rencana yang terkoordinasi dengan mengikutsertakan masyarakat. Peranan masyarakat sangatlah menentukan karena akan sangat mahal apabila biaya bagi pendidikan dan gaji guru bagi pemberantasan buta huruf harus ditanggung oleh pemerintah sendiri.²⁶

2.3 Perkembangan Kebudayaan

Sejak Indonesia mencapai kemerdekaan bidang kebudayaan secara formal termasuk dalam bidang pendidikan, yaitu dengan dibentuknya Departemen/Kementerian Pengajaran dan Kebudayaan (PP Dan K). Dengan demikian, pengembangan kebudayaan nasional termasuk tugas Departemen PP Dan K. Pengembangan kebudayaan nasional pada masa awal kemerdekaan merupakan kelanjutan dari zaman pemerintahan Jepang.

Salah satu bidang kebudayaan yang mengalami perkembangan pada zaman ini adalah bahasa dan sastra Indonesia. Per-

kembangan bahasa dan sastra Indonesia didorong oleh bangkitnya semangat kebangsaan yang telah mengatasi batas kedaerahan dan kesukuan. Sejak awal zaman kemerdekaan bahasa Indonesia sudah memenuhi fungsi dan menerima sikap yang diperlukan sebagai bahasa baku. Teks Proklamasi ditulis dalam bahasa Indonesia.^{2 7}

Pada tanggal 18 Juni 1947 Menteri PP Dan K, Mr. K. Suwandi, membentuk suatu komisi yang diberi tugas untuk:

- 1). Menetapkan istilah-istilah dalam bahasa Indonesia.
- 2). Menetapkan tata bahasa Indonesia.
- 3). Menetapkan kamus baru atau menyempurnakan kamus yang telah ada untuk keperluan pelajaran bahasa Indonesia di sekolah.

Hasil kerja panitia ini melahirkan ejaan Republik yang disebut "Ejaan Suwandi", serta dapat membuat 5.000 istilah baru. Kerja panitia ini mempunyai makna yang luas dalam rangka memantapkan persatuan, karena di Indonesia terdapat lebih kurang 200 macam bahasa daerah. Pembakuan ejaan merupakan salah satu segi dari politik bahasa nasional yang mendukung perkembangan kebudayaan nasional.

Dalam pada itu kehidupan sastra pada masa awal kemerdekaan juga makin berkembang. Studi sastra dunia lebih dipergiat sehingga mempengaruhi para pengarang Indonesia. Orientasi sastrawan Indonesia sejak kemerdekaan meliputi seluruh dunia, jadi, horisonnya menjadi lebih luas.^{2 8}

Mengenai perkembangan sastra Indonesia pada masa Perang Kemerdekaan dapat dibagi dua, yaitu di daerah RI di pedalaman dan di daerah yang dikuasai oleh Belanda. Di pedalaman nada patriotisme lebih tegas terdengar, bahkan sebagian sastrawan menggantikan penanya dengan senapan. Di kota pendudukan lebih terdengar semboyan universalisme atau humanisme universal.

Pertumbuhan seni lukis yang telah mulai sejak zaman pendudukan Jepang, pada masa awal kemerdekaan makin berkembang. Pada awal tahun 1946 atas inisiatif Sujoyono, Trisno Sumarjo, dan lain-lainnya didirikan organisasi "Seniman Indonesia Muda" (SIM). Pelukis lain yang tergabung dalam SIM antara

lain: Zaini, Nasyah, Syahri, dan Nahar. Pada tahun 1947 atas inisiatif Affandi dan Hendra di Yogyakarta didirikan "Perkumpulan Pelukis Rakyat"(PPR).^{2,9}

Perkembangan seni lukis pada waktu itu dibantu oleh tokoh-tokoh pemerintah. Para seniman berkesempatan menjual banyak lukisan, malahan lapangan kerja diperluas dengan seni patung. Di kota-kota lain di Indonesia juga terjadi perkembangan seni lukis, seperti di Jakarta yang dipimpin oleh Sutikno, di Bandung dipimpin oleh Barli, di Medan dipimpin oleh Ismail Daulay dan Tino Sidin, di Padang dipimpin oleh Zetka.^{3,0}

Di samping melukis dan mematung, para pelukis juga ada yang membuat poster, ilustrasi, dan gambar kulit buku. Di Jakarta Zaini membuat dekor sandiwara, Effendi membuat desain seni kerajinan. Di Yogyakarta Surono menghasilkan cukilan kayu yang paling baik. Kecuali itu para pelukis mulai membuat percobaan lukisan batik.^{3,1}

Perkembangan seni tari pada masa awal kemerdekaan juga mengalami kemajuan. Seni tari Indonesia mengalami pembaharuan pada teknik penyajian, yaitu dengan menyingkat waktu dan menyederhanakan cerita.

Seni suara pada masa permulaan kemerdekaan telah mengalami kemajuan dengan menciptakan langgam baru. Jiwa revolusi telah mendorong perkembangan pesat dalam penggubahan lagu. Jiwa revolusi menimbulkan kebebasan serta menghilangkan rasa rendah dan sebaliknya menimbulkan keberanian.

Selama Revolusi muncul penulis musik dan penulis lagu ke-roncong, seperti Syaiful Bahri dan Iskandar dari RRI Jakarta. Kemudian muncul Ismail Marzuki yang menulis aransemenn untuk Orkes Studio Jakarta. Cornel Simanjuntak sebagai tokoh Revolusi banyak menghasilkan lagu perjuangan, seperti "Maju Tak Gentar".^{3,2}

Perkembangan seni drama juga mengalami kemajuan pada permulaan zaman Revolusi walaupun menemui banyak hambatan. Ada anggapan pada waktu itu bahwa seni pada zaman perjuangan adalah suatu kemewahan, lebih-lebih seni drama (sandiwara). Tetapi, setelah berlangsungnya kongres kebudayaan

an pada bulan Juni 1949 di Magelang, mulai timbul suatu politik kebudayaan yang hampir pasti.³³

Perkembangan cinematografi pada zaman Revolusi telah dimulai. Di Yogyakarta terdapat dua perusahaan film, yaitu "Cinedrama" dan "Yayasan Hiburan Mataram". Kemudian Usmar Ismail dengan kawan-kawannya, seperti Suryosumanto dan Jayakusuma, mendirikan "Perusahaan Film Nasional" (Perfini). Selanjutnya Jamaluddin Malik mendirikan "Persatuan Artis Republik Indonesia" (PERSARI) yang berasal dari rombongan sandiwara Pancawarna di zaman pendudukan Jepang.

Sebaliknya, perkembangan seni bangunan menunjukkan hal yang tidak menggembirakan. Bangunan di kota-kota berkembang tidak teratur dan bangunan di desa menunjukkan lemahnya ekonomi rakyat.

2.4 Usaha-usaha di Bidang Pendidikan dan Pengajaran

2.4.1 Pendidikan Umum

2.4.1.1 Sekolah Taman Kanak-kanak

Pada waktu ini Sekolah Taman Kanak-kanak sudah ada, tetapi yang menyelenggarakan pihak swasta.

Pemerintah dalam hal ini ingin ikut membina Sekolah Taman Kanak-kanak ini sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pada inspeksi pengajaran dibentuk bagian yang mengurus Sekolah Taman Kanak-kanak. Selanjutnya pada tahun 1950 pemerintah mendirikan Sekolah Guru Taman Kanak-kanak di Yogyakarta.

2.4.1.2 Sekolah Rakyat

Dalam masalah Sekolah Rakyat ini pemerintah baru mulai melaksanakan membuka sekolah atau merubah Sekolah Rakyat yang sudah ada pada zaman Jepang menjadi Sekolah Rakyat RI. Lama pendidikan SR adalah 6 tahun. Murid-murid SR tidak dipungut biaya apa pun, dan pintu terbuka lebar untuk anak siapa pun.

Kemudian pada tahun 1947 Kementerian PP dan K mengeluarkan Rencana Pelajaran Sekolah Rakyat sehingga pelajaran yang pokok-pokok di seluruh SR dapat seragam.

2.4.1.3 Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Pemerintah meneruskan atau mengambil alih SMP-SMP yang sudah ada sejak zaman Jepang. Lama pendidikannya 3 tahun.

Pada tahun 1946 Kementerian PP dan K mengeluarkan peraturan pembagian jurusan di SMP, yang dimulai di kelas II. Sejak kelas II murid-murid dibagi menjadi dua jurusan A dan B. Jurusan A mengutamakan bahasa dan administrasi, sedang jurusan B mengutamakan ilmu alam dan ilmu pasti.

2.4.1.4 Sekolah Menengah Atas (SMA)

Pada waktu awal kemerdekaan Sekolah Menengah Atas (SMA) masih bernama Sekolah Menengah Tinggi (SMT) dan masih meneruskan rencana yang sudah berlaku sejak zaman Jepang. Lama pendidikan 3 tahun setelah SMP.

Pada tahun 1947 nama Sekolah Menengah Tinggi (SMT) diganti menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA). Sejak tahun itu juga telah diusahakan menyeragamkan suatu pendidikan SMA dengan mengadakan ujian negara, walaupun pemerintah belum mengeluarkan rencana pelajaran. Pada waktu itu pemerintah hanya mengeluarkan ketentuan: (1) Isi pelajaran SMA harus memenuhi kebutuhan nasional, (2) Harus menggunakan pengantar bahasa Indonesia, dan (3) Mutu pelajaran agar setingkat dengan AMS tahun 1942.

Dengan dasar ketentuan ini disusunlah rencana pelajaran minimal di SMA.

2.4.2 Pendidikan Kejuruan

2.4.2.1 Pendidikan guru

Pada waktu itu pendidikan guru diprioritaskan untuk pengadaan guru SR. Untuk itu, diadakan beberapa macam pendidikan guru, yaitu Sekolah Guru A, Sekolah Guru B, Sekolah Guru

C, dan Kursus Pengajaran untuk Kursus Pengantar Kewajiban Belajar.

1) Sekolah Guru A (SGA)

Sejak awal kemerdekaan telah dicita-citakan oleh para tokoh pendidikan Indonesia bahwa guru SR adalah lulusan Sekolah Guru 6 tahun sesudah SR. Untuk itu, maka didirikan Sekolah Guru A (SGA). Yang diterima di SGA adalah tamatan SMP dan SGB (Sekolah Guru B). Lama pendidikan 3 tahun (6 tahun sesudah SR).

2) Sekolah Guru B (SGB)

Untuk memperoleh tenaga guru SR dengan cepat, maka untuk sementara dibuka Sekolah Guru B (SGB). Lama pendidikannya 4 tahun sesudah SR. Pada kelas III diadakan ujian pelajaran umum, dan di kelas IV ujian didaktik-metodik. Oleh karena itu, anak-anak tamatan SMP dapat pula diterima di SGB kelas IV.

3) Sekolah Guru C (SGC)

Dengan SGA dan SGB kebutuhan akan guru SR belum tercukupi, maka didirikan Sekolah Guru C (SGC). Lama pendidikan 2 tahun sesudah SR.

Tapi SGC ini hanya berumur tidak lebih dari 2 tahun, lalu dibubarkan karena dianggap kurang sesuai.

2.4.2.2 Pendidikan ekonomi

Pada awal kemerdekaan ini pemerintah baru dapat membuka Sekolah Dagang. Lama pendidikannya 3 tahun sesudah SR. Sekolah ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga administrasi atau pembukuan.

2.4.2.3 Pendidikan teknik

Untuk memenuhi tenaga-tenaga teknik, maka pemerintah membentuk: Kursus Kerajinan Negeri, Sekolah Teknik Pertama, Sekolah Teknik, dan Sekolah Teknik Menengah.

1) Kursus Kerajinan Negeri (KKN)

Kursus ini terutama untuk mendidik tenaga tukang yang terampil. Lama pendidikan 1 tahun sesudah SR. KKN ter-

diri atas jurusan-jurusan antara lain: Jurusan Kayu, Besi, Sepeda, Anyaman, Perabot Rumah, Las, dan Batu.

- 2) Sekolah Teknik Pertama (STP)
Sekolah Teknik Pertama (STP) juga bertujuan mendapatkan tenaga tukang yang terampil, tetapi disertai pengetahuan teori. Lama pendidikannya 2 tahun sesudah SR. STP juga terdiri atas jurusan-jurusan antara lain: Jurusan Kayu, Batu, Perabot Rumah, Anyaman, Besi, Listrik, Mobil, Keramik, Cetak, Tenun, Kulit, Motor, Ukur Tanah, dan Cor.
- 3) Sekolah Teknik (ST)
Sekolah Teknik (ST) bertujuan mendidik tenaga-tenaga pengawas bangunan. Lama pendidikannya 2 tahun sesudah STP atau SMP bagian B. ST meliputi Jurusan-jurusan: Bangunan Gedung, Bangunan Air dan Jalan, Bangunan Mesin, Bangunan Listrik, Bangunan Radio, Bangunan Kapal, Percetakan, dan Pertambangan.
- 4) Sekolah Teknik Menengah (STM)
Sekolah Teknik Menengah (STM) dimaksudkan untuk mendidik tenaga-tenaga ahli teknik dan pejabat-pejabat teknik menengah.

Lama pendidikannya 4 tahun sesudah SMP/B atau ST. STM juga terdiri atas jurusan-jurusan antara lain: Jurusan Bangunan Gedung, Bangunan Sipil, Bangunan Kapal, Bangunan Mesin, Bangunan Listrik, Bangunan Mesin Kapal, Kimia, dan Pesawat Terbang.

2.4.2.4 Pendidikan kewanitaan

- 1) Sekolah Kepandaian Putri
Sekolah Kepandaian Putri (SKP) yang telah didirikan sejak zaman Jepang diteruskan. SKP bertujuan mendidik calon ibu-ibu rumah tangga yang baik dan tenaga-tenaga terampil dalam kerumahtangaan. Lama pendidikannya 3 tahun sesudah SR.
- 2) Sekolah Guru Kepandaian Putri
Sekolah Guru Kepandaian Putri (SGKP) bertujuan mendidik calon guru-guru SKP. Lama pendidikannya 3 tahun

setelah SMP. Tamatan SGKP dapat pula mengajar di SMP atau SGB sebagai guru kejuruan khusus.

2.4.3 Pendidikan Agama

Sejak Indonesia merdeka, Menteri Pengajaran telah menyatakan bahwa pendidikan agama perlu diberikan di sekolah-sekolah negeri.

Untuk itu, pada tahun 1946 Menteri PP dan K mengeluarkan ketetapan bersama dengan Menteri Agama, yang isinya menetapkan bahwa mulai 1 Januari 1947 di SR diadakan pelajaran agama.

2.4.4 Pendidikan Luar Biasa

Di bidang ini pemerintah baru sampai pada taraf pemikiran perlunya ada pendidikan luar biasa bagi anak-anak cacat yang memerlukan. Antara tahun 1945 – 1950 Sekolah Luar Biasa diselenggarakan oleh pihak swasta atau yayasan-yayasan.

2.4.5 Pendidikan Kepanduan

Sejak bulan Oktober 1945 telah dibentuk Panitia Pendirian Organisasi Kepanduan Indonesia.

Pada bulan Desember 1945 berhasil dibentuk Pandu Rakyat di Surakarta, yang mendapat sambutan hangat di masyarakat.

Pada tahun 1947 organisasi kepanduan ini disahkan oleh Menteri PP dan K sebagai satu-satunya organisasi yang disertai penyelenggaraan kepanduan Indonesia.

2.4.6 Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi amat diperlukan untuk menghasilkan tenaga pimpinan. Di samping itu perguruan tinggi merupakan tempat yang amat baik untuk menanamkan kader revolusi. Perguruan tinggi menggembeleng para pemuda. Perguruan tinggi erat kaitannya dengan Revolusi Kemerdekaan. Oleh karena itu, pada awal kemerdekaan telah diusahakan untuk mendirikan perguruan tinggi.

2.4.6.1 Balai Perguruan Tinggi

Pada tanggal 19 Agustus 1945 didirikan Balai Perguruan Tinggi RI yang terdiri atas 3 *faculteit*, yaitu: *Faculteit* Kedokteran, *Faculteit* Hukum, dan *Faculteit* Sastra yang berkedudukan di Jakarta.

2.4.6.2 Sekolah Tinggi Teknik

Karena tenaga teknik amat langka dan sekolah teknik ini diharapkan untuk dapat membuat senjata sebagai alat untuk menegakkan kemerdekaan, maka pada 17 Februari 1946 di Yogyakarta didirikan Sekolah Tinggi Teknik.

2.4.6.3 Universitas Gadjah Mada

Pada tanggal 3 Maret 1946 di Yogyakarta didirikan Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada, yang terdiri atas *Faculteit* Hukum dan *Faculteit* Sastra.

Pendirinya ialah Yayasan Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada. Baru pada 7 Desember 1949 perguruan tinggi tersebut diserahkan kepada pemerintah dan diberi nama *Universiteit* Gadjah Mada.^{3 4}

2.4.6.4 Perguruan Tinggi Kedokteran Malang

Dalam bulan Februari 1946 didirikan Perguruan Tinggi Kedokteran di Malang.

3.4.6.5 Perguruan Tinggi Kedokteran Solo

Pada tanggal 4 Maret 1946 dibuka Perguruan Tinggi Kedokteran di Solo.

2.4.6.6 Perguruan Tinggi Kedokteran Klaten

Pada tanggal 5 Maret 1946 didirikan Perguruan Tinggi Kedokteran di Klaten.

2.4.6.7 *Faculteit* Pertanian dan *Faculteit* Farmasi

Pada tanggal 27 September 1946 Balai Pendidikan Tinggi Indonesia membuka cabangnya di Klaten, yaitu *Faculteit* Pertanian dan *Faculteit* Farmasi.

Untuk menghimpun kekuatan mahasiswa dalam mempertahankan kemerdekaan, baik secara fisik maupun secara politik,

maka pada tahun 1947 didirikan: Perserikatan Perhimpunan-perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI).

2.5 *Usaha-usaha Memajukan Kebudayaan*

Pada awal kemerdekaan pemikiran tentang kebudayaan Indonesia tercantum dalam UUD 1945 pasal 32 dengan penjabarannya. Dengan demikian, usaha-usaha memajukan kebudayaan sudah barang tentu berpedoman pada konsepsi yang tercantum dalam UUD 1945 tersebut.

Sehubungan dengan itu, maka dalam usaha memajukan kebudayaan Indonesia, di samping menerima kebudayaan asing yang sesuai untuk Indonesia, juga harus membina dan mengembangkan kebudayaan asli yang mempunyai nilai luhur. Puncak-puncak kebudayaan daerah merupakan bahan-bahan untuk pembentukan kebudayaan nasional.

Usaha-usaha pemerintah dalam memajukan kebudayaan antara lain meliputi bidang-bidang: kesenian, bahasa, kepurbakalaan, dan permuseuman.

2.5.1 *Kesenian*

Di bidang kesenian dalam periode 1945–1950 ini belum banyak yang dikerjakan. Usaha-usahanya baru bersifat pembinaan terhadap organisasi kesenian yang tumbuh di masyarakat dengan memberi subsidi.

Hal yang perlu dicatat dalam periode ini ialah berdirinya Lembaga Kebudayaan Indonesia (LKI) dan dirintisnya pendirian Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI). Juga tak dapat diabaikan timbulnya perkumpulan komponis-komponis Indonesia yang banyak menciptakan lagu-lagu perjuangan.

Kesenian-kesenian yang tampak maju dengan pesat ialah: seni tari, seni rupa, dan seni musik.

2.5.2 *Bahasa dan Sastra*

Bahasa Indonesia merupakan alat pemersatu dan bahasa nasional. Oleh karena itu, bahasa Indonesia perlu diperlihara dan dikembangkan. Untuk itu, maka pada tahun 1947 Menteri PP dan K (Mr. Soewandi) mendirikan Panitia Pekerja untuk

meneliti bahasa Indonesia. Tugas Panitia Pekerja ini antara lain: menetapkan peristilahan, menetapkan tata bahasa, dan menyusun kamus. Panitia Pekerja ini dipimpin oleh St. Takdir Aliyahbana dengan anggota sejumlah 5 orang.

Pada tahun 1948 di Yogyakarta didirikan Balai Bahasa oleh Menteri PP dan K (Mr. Ali Sastroamidjojo). Balai Bahasa diketuai oleh P.F. Dahler dan mempunyai 4 seksi yaitu: Seksi Bahasa Indonesia, Bahasa Jawa, Bahasa Sunda, dan Bahasa Madura.

Tugas Balai Bahasa ialah: meneliti bahasa Indonesia dan daerah, memberi bimbingan kepada masyarakat tentang penggunaan bahasa Indonesia dan daerah, dan mengusahakan adanya kesatuan dalam segala persoalan bahasa Indonesia.

Dalam kegiatannya Balai Bahasa ini menerbitkan *Majalah Medan Bahasa*.

2.5.3 *Permuseuman dan Kepurbakalaan*

Antara tahun 1945 – 1950 pemerintah tidak sempat berbuat banyak. Waktu itu museum masih dikelola oleh pihak swasta, seperti Museum Jakarta, Museum Zoologi Bogor, Museum Geologi Bandung, dan Museum Sono Budoyo Yogyakarta. Demikian juga

Demikian juga kepurbakalaan baru dimulai dibenahi pada tahun 1949 setelah dibentuk Bagian Kepurbakalaan pada Jawatan Kebudayaan. Usaha-usaha Bagian Kepurbakalaan ini antara lain: pemugaran Candi Prambanan (baru selesai tahun 1952) dan penggalian peninggalan prasejarah di Kelumpang dan seum Geologi Bandung, dan Museum Sono Budoyo Yogyakarta.

Demikian juga kepurbakalaan baru dimulai dibenahi pada tahun 1949 setelah dibentuk Bagian Kepurbakalaan pada Jawatan Kebudayaan. Usaha-usaha Bagian Kepurbakalaan ini antara lain: pemugaran Candi Prambanan (baru selesai tahun 1952) dan penggalian peninggalan prasejarah di Kelumpang dan Leang (Sulawesi).^{3 5}

2.6 *Usaha-usaha Memajukan Keolahragaan*

Pada awal kemerdekaan para pemimpin bangsa beranggapan bahwa olah raga adalah alat perjuangan nasional dan internasional.

Sebagai alat perjuangan nasional, karena olah raga ini dapat memelihara fisik rakyat, membina rasa optimisme dan persatuan guna membentuk kekuatan nasional untuk mengusir penjajah.

Sebagai alat perjuangan internasional, karena dengan mengikuti pertandingan internasional dapat diperkenalkan eksistensi Indonesia di dunia internasional.

Untuk itu, maka pada tahun 1946 didirikan Persatuan Olah raga Republik Indonesia (PORI), dan Komite Olah raga Republik Indonesia (KORI).

PORI mengurus kegiatan olah raga antardaerah, sedang KORI mempunyai tugas yang lebih luas, di antaranya mengadakan hubungan dengan luar negeri di bidang olah raga.

Pada tahun 1948 PORI berhasil menyelenggarakan Pekan Olah raga Nasional I (PON I). Pada tahun 1948 PORI berhasil membentuk Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI), bahkan pencak silat ini diajarkan di sekolah, mulai kelas V SR sampai SMP.

Pada tahun 1948 KORI berusaha keras untuk ikut mengirim atlet-atlet Indonesia ke *Olympic Games* di London, tetapi belum berhasil karena mendapat rintangan keras dari pihak Belanda.

Kegiatan olah raga di sekolah-sekolah mulai maju setelah berlakunya UUPP tahun 1950.³⁶

2.7 Struktur Organisasi

Pada waktu Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bernama: *Kementerian Pengajaran*.

Kemudian pada tahun 1946, setelah pindah ke Surakarta, diganti menjadi: *Kementerian Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan*.

Pada tahun 1948 diganti lagi menjadi: *Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan*.

Pada tahun 1959 nama kementerian disesuaikan dengan UUD 1945 menjadi departemen, sehingga sejak tahun itu nama

kementerian selengkapnya menjadi Departemen Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan. Terakhir, sejak tahun 1966 diganti lagi menjadi *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, dengan pengertian kata pengajaran telah tercakup dalam kata pendidikan.

2.7.1 *Kementerian Pengajaran (1945)*

Kementerian ini terdiri atas 4 bagian:

- a). Bagian A : mengurus pengajaran.
- b). Bagian B : mengurus tata usaha.
- c). Bagian C : mengurus keuangan.
- d). Bagian D : mengurus alat-alat.

2.7.2 *Kementerian Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan (1946-1947)*

Ada tambahan bagian baru yaitu: Bagian Kebudayaan dan Bagian Pendidikan Masyarakat.

2.7.3 *Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (1948-1959)*

Di sini terjadi beberapa perubahan. Tahun 1948 Bagian A yang semula masih bersifat umum diperinci menjadi:

- a) Inspeksi Sekolah Umum.
- b) Inspeksi Sekolah Guru dan Sekolah Rakyat.
- c) Inspeksi Sekolah Kepandaian Putri.
- d) Inspeksi Sekolah Teknik.
- e) Inspeksi Sekolah Dagang.
- f) Inspeksi Sekolah Pendidikan Jasmani.

Tahun 1949 bagian-bagian ditingkatkan menjadi jawatan sesuai dengan tugas Kementerian PP dan K, yaitu menjadi:

- a) Jawatan Inspeksi Pengajaran.
- b) Jawatan Pendidikan Masyarakat.
- c) Jawatan Kebudayaan.

Dalam tahun 1950 (Negara Kesatuan RI) terjadi perubahan lagi dengan penambahan jawatan-jawatan sehingga strukturnya menjadi:

- a) Kantor Pusat:
 - 1) Sekretariat.
 - 2) Urusan Pegawai.
 - 3) Perbendaharaan.
 - 4) Penerangan.
 - 5) Hubungan Luar Negeri.
 - 6) Perguruan Tinggi.
- b) Jawatan Pengajaran:
 - 1) Inspeksi Sekolah Menengah Umum.
 - 2) Inspeksi Sekolah Guru dan Sekolah Rakyat.
 - 3) Inspeksi Sekolah Kepandaian Putri.
 - 4) Inspeksi Sekolah Teknik.
 - 5) Inspeksi Sekolah Dagang.
 - 6) Inspeksi Sekolah Pendidikan Jasmani.
- c) Jawatan Pendidikan Masyarakat:
 - 1) Bagian Umum.
 - 2) Bagian Inspeksi.
 - 3) Bagian Penyelenggaraan.
 - 4) Bagian Pemuda.
- d) Jawatan Kebudayaan:
 - 1) Bagian Kesenian.
 - 2) Bagian Kepurbakalaan.
 - 3) Bagian Bahasa.
 - 4) Arsip Negara.^{3 7}

(Perkembangan struktur selanjutnya lihat Bab III, IV, dan V).

CATATAN BAB II

1. Anwar Yasin, *Pembaharuan Kurikulum Sekolah Dasar di Indonesia*, Fakultas Pasca Sarjana IKIP Jakarta 1983, hal. 105.
2. *Ibid.*, hal. 106.
3. *Ibid.*, hal. 107.
4. Bugroho Notosusanto (ed.), *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta 1983, hal. 58.
5. *Ibid.*, hal. 54.
6. *Ibid.*, hal. 61.
7. *Ibid.*, hal. 64.
8. *Ibid.*, hal. 62.
9. M. Said, *Pendidikan Abad Keduapuluh dengan Latar Belakang Kebudayaanannya*, Mutiara Jakarta 1981, hal. 10.
10. *Ibid.*, hal. 11–13.
11. Anwar Yasin, *op. cit.*, hal. 122.
12. M. Said, *op. cit.*, hal. 14.
13. *Ibid.*, hal. 14.
14. *Ibid.*, hal. 15.
15. *Almanak Pers Antara 1976*, hal. 57.
16. *Ibid.*, hal. 58.
17. M. Said, *op. cit.*, hal. 15.
18. Anwar Yasin, *op. cit.*, hal. 123.
19. *Ibid.*, hal. 124.

20. M. Said, *op. cit.*, hal. 18.
21. Nugroho Notokusanto (ed.), *op. cit.*, hal. 144.
22. *Ibid.*, hal. 145.
23. *Ibid.*, hal. 146.
24. *Ibid.*, hal. 147.
25. *Ibid.*, hal. 147.
26. *Ibid.*, hal. 148.
27. *Ibid.*, hal. 148.
28. *Ibid.*, hal. 150.
29. "Perkembangan Seni Lukis di Indonesia," *Majalah Kebudayaan Indonesia*, Tahun I 1949, hal. 593.
30. Nugroho Notokusanto, *op. cit.*, hal. 152.
31. Trisno Sumarjo, "Kedudukan Seni Rupa Kita," *Almanak Seni* 1957, hal. 132.
32. Nugroho Notokusanto, *op. cit.*, hal. 154.
33. *Ibid.*, hal. 155.
34. *Seperempat Abad Departemen P dan K*, hal. 138–162.
35. *Ibid.*, hal. 164–170.
36. *Ibid.*, hal. 176–179.
37. *Ibid.*, hal. 121–127.

BAB III MASA DEMOKRASI LIBERAL (1950 – 1959)

3.1 Keadaan Negara pada umumnya

Masa liberal ini diawali dengan terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS) pada akhir tahun 1949 sebagai pelaksanaan hasil-hasil Konferensi Meja Bundar. Terpilih sebagai presiden Ir. Soekarno dan sebagai perdana menteri Drs. Moh. Hatta. Negara RIS ini terdiri atas 16 negara bagian yang berbeda luas dan jumlah penduduknya. Dengan pembentukan Negara RIS ini Belanda bermaksud agar ia tetap berkuasa di Indonesia. Sebenarnya sebagian besar negara-negara bagian lebih senang pada bentuk negara kesatuan; hanya beberapa negara bagian yang pro Belanda sajalah yang menghendaki Negara RIS itu.

Ada beberapa kelompok yang merasa khawatir akan kehilangan kekuasaannya jika Belanda meninggalkan Indonesia. Mereka mengadakan gerakan yang bersifat merongrong RIS. Gerakan-gerakan itu antara lain: Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) pimpinan Kapten Raymond Westerling. APRA tidak setuju dengan bentuk gabungan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS). Mereka menginginkan tiap negara bagian mempunyai angkatan perangnya sendiri. Itulah maka APRA menyerang APRIS di Bandung. Akan tetapi akhirnya APRIS, meskipun banyak korban yang jatuh di pihaknya, dapat menumpas gerakan APRA ini.

Gerakan lainnya yaitu petualangan Kapten Andi Azis. Latar belakangnya adalah rasa khawatir terdesak oleh tentara APRIS yang akan masuk ke Sulawesi Selatan. Petualangan ini pun dapat diatasi.

Rongrongan lain datang dari gerakan separatis yang dipimpin oleh Mr. Dr. C.R.S Soumokil, yang ingin membentuk negara sendiri yang disebut Republik Maluku Selatan (RMS). Untuk menumpasnya RIS mengirimkan pasukan APRIS ke Maluku. Meskipun RMS dapat dikalahkan, tetapi sisa-sisanya belum dapat ditumpas seluruhnya.

Selain menghadapi beberapa rongrongan tersebut, RIS masih menghadapi masalah-masalah yang cukup meminta perhatian, yaitu: masalah ekonomi yang buruk, prasarana banyak yang rusak akibat perang, bidang kepegawaian, bidang militer, kependudukan, dan pendidikan.

Dalam masalah ekonomi yang semakin memburuk, pemerintah harus menghadapi inflasi dan defisit dalam anggaran belanjanya. Semuanya ini harus segera ditanggulangi, sebab rakyat sudah lama menderita. Untuk menanggulangi inflasi, diadakan penggantian uang (19 Maret 1950). Kemudian ekspor barang-barang ke luar negeri ditingkatkan.

Di bidang kepegawaian dan militer diadakan rasionalisasi agar dapat menghemat anggaran belanja negara. Untuk menampung mereka yang terkena rasionalisasi, dibuka lapangan kerja bidang pembangunan, transmigrasi, dan pendidikan, untuk memberi peluang bagi karier atau profesi baru bagi mereka.

Di bidang pendidikan diperlukan pula perhatian yang sungguh-sungguh, terutama pemberantasan buta huruf dan peningkatan pendidikan dasar (sekolah rakyat).

Pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS dibubarkan untuk diganti menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara kesatuan ini menggunakan UUD 1950 Republik Indonesia yang disusun oleh panitia gabungan RIS dan RI.

Menurut UUDS 1950 ini kekuasaan legislatif dipegang oleh Presiden, Kabinet, dan DPR. Pemerintah mempunyai hak untuk membuat undang-undang darurat atau peraturan peme-

rintah, tetapi kemudian harus disahkan oleh DPR. Presiden mempunyai hak untuk mengeluarkan dekrit jika perlu.

DPR mempunyai hak untuk menjatuhkan kabinet seluruhnya atau memberhentikan menteri secara perorangan.

Dalam UUDS 1950 ini kedaulatan rakyat disalurkan melalui banyak partai. Parlemen dapat menjatuhkan kabinet bila kelompok oposisi dalam parlemen kuat.

Dengan demokrasi model Eropa Barat ini kestabilan pemerintahan sukar dicapai. Dari tahun 1950–1955 terjadip pergantian kabinet 4 kali, yaitu Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Karena umur tiap-tiap kabinet pendek, maka program-programnya tidak sempat dilaksanakan secara tuntas. Hal ini tentunya menimbulkan banyak masalah baik di bidang ekonomi, sosial, politik, maupun keamanan. Banyak urusan negara yang terkatung-katung atau terbengkalai.

Di samping itu Negara Kesatuan RI ini juga menghadapi rongrongan dari daerah-daerah seperti: Darul Islam Kartosuwiryo di Jawa Barat, Daud Beureueh di Aceh, dan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan.

Salah satu hasil yang menonjol pada waktu Kabinet Ali I adalah terselenggaranya Konferensi Asia Afrika di Bandung (1955).

Selama periode 1955–1959, yang ditandai dengan pemilihan umum, tetap saja pemerintah jatuh bangun. Selama 4 tahun itu terjadi pergantian kabinet 3 kali, yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastroamidjojo II, dan Kabinet Djuanda.

Kabinet Burhanuddin Harahap setelah berhasil melaksanakan pemilihan umum segera menyerahkan mandatnya kepada Presiden.

Kabinet Ali Sastroamidjojo II merupakan kabinet koalisi. Kabinet ini dianggap kabinet yang kuat, tetapi juga tidak berumur lama. Daerah-daerah banyak yang tidak senang dan di kota-kota besar timbul masalah anti Cina. Pada tanggal 14 Maret 1957 Kabinet Ali jatuh.

Penggantinya adalah kabinet Djuanda. Kabinet ini tidak mengambil orang-orang partai. Pengangkatan menteri berdasarkan keahliannya (*zaken kabinet*). Kabinet Djuanda segera menghadapi masalah-masalah yang berat, yaitu pergolakan daerah, merebut Irian Barat, ekonomi dan keuangan yang buruk, merosotnya devisa dan rendahnya ekspor. Keadaan buruk makin memuncak tatkala pecah pemberontakan PRRI di Sumatra Barat dan Permesta di Sulawesi Utara. Di bidang politik juga terasa gawat karena DPR hasil pemilihan umum tidak berfungsi dengan baik. Juga konstituante hasil pemilihan umum gagal membuat undang-undang.

Berdasarkan itu semua maka Presiden mengeluarkan dekrit pada tanggal 5 Juli 1959, yang berisi pembubaran Konstituante hasil pemilihan umum dan berlakunya kembali UUD 1945 menggantikan UUD 1950.¹

Dari uraian di atas jelaslah bahwa pada periode 1950 – 1959 (masa liberal) keadaan politik tidak stabil. Dalam waktu sembilan tahun ini terjadi pergantian kabinet 8 kali yaitu: Kabinet Hatta/RIS (20 Desember 1949 s.d. 6 September 1950); Kabinet Natsir (6 September 1950 s.d. 27 April 1951); Kabinet Sukiman (27 April 1951 s.d. 3 April 1953); Kabinet Wilopo (3 April 1953 s.d. 12 Agustus 1955); Kabinet Burhanuddin (12 Agustus 1955 s.d. 24 Maret 1956); Kabinet Ali II (24 Maret 1956 s.d. 9 April 1957); Kabinet Djuanda/Kabinet Karya (9 April 1957 s.d. 10 Juli 1959).²

Yang menyebabkan kurang stabilnya pemerintahan ini adalah karena penerapan sistem "demokrasi liberal". Dalam sistem ini di Indonesia tumbuh partai-partai yang cukup banyak, yang mempunyai wakil-wakilnya dalam DPR.

Menurut UUDS 1950 yang dianut oleh Indonesia waktu itu, kekuasaan legislatif dipegang oleh Presiden, kabinet, dan DPR. Pemerintah mempunyai hak untuk mengeluarkan undang-undang darurat atau peraturan pemerintah, walaupun perlu juga disetujui oleh DPR pada sidang berikutnya. Presiden dapat mengeluarkan dekrit. Kabinet bertanggung jawab kepada DPR. DPR mempunyai hak untuk menjatuhkan kabinet seluruhnya atau memberhentikan menteri-menterinya secara individual.

Kecuali sistem liberal yang menjadi sebab jatuh banggunya pemerintah (kabinet) adalah timbulnya beberapa kerusuhan, antara lain: APRA pimpinan Westerling, pemberontakan Andi Axis, RMS pimpinan Mr. Dr. C.R.S. Soumokil, DI pimpinan Kartosuwirjo, DI pimpinan Kahar Muzakar, PRRI pimpinan Ahmad Husein, dan Permesta pimpinan Sumual.

Dengan kurang stabilnya pemerintahan dan adanya kekacauan di dalam negeri, maka banyak program-program pemerintah yang berantakan atau terkatung-katung, keadaan keuangan dan perekonomian yang semakin memburuk.

Meskipun di bidang politik tidak stabil yang mengakibatkan banyak kemunduran di bidang perekonomian, akan tetapi di bidang pendidikan dan pengajaran dari segi kuantitatif ada kemajuan jika dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Dalam hal ini jumlah sekolah mengalami kenaikan yang berlipat ganda. Kalau dibandingkan keadaan tahun 1940 dan 1956, tambahan sekolah menanjak sangat besar. Sekolah Rakyat bertambah 75%, Sekolah Menengah Pertama bertambah 1200%, Sekolah Menengah Atas bertambah 700%, Sekolah Tinggi bertambah 700%.³

Kemajuan ini disebabkan karena pemerintah RI memperhatikan masalah pembangunan di bidang pendidikan, dan membuka pintu bagi setiap warga negara yang berbakat tanpa diadakan diskriminasi seperti pada zaman penjajahan. Jika diperhatikan kemajuan di bidang pendidikan itu baru berjalan sejak tahun 1950. Pada tahun-tahun sebelumnya kemajuan sangat sedikit karena adanya pergolakan dan perang kemerdekaan. Hal ini dikemukakan oleh Dr. Bahder Djohan (Menteri PP dan K tahun 1951 dalam Kabinet Natsir) bahwa pendidikan pada waktu itu masih sangat kurang. Keadaan guru, gedung sekolah, sarana pelajaran sangat kurang.⁴

Demikian pula Dr. Abu Hanifah (Menteri PP dan K tahun 1950 – RIS) menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia antara tahun 1940–1950 mengalami vakum yang agak parah, terutama untuk pendidikan dasar.⁵

Dari segi kuantitatif di bidang pendidikan memang banyak dicapai kemajuan, tetapi dari segi kualitatif, lebih-lebih menge-

nai isinya, dikatakan menyimpang dari Revolusi. Mereka menganut liberalisme, sehingga cita-cita Revolusi yang ingin menuju masyarakat adil berdasarkan Pancasila mulai kabur. Paham liberalisme dalam bidang pendidikan dan kebudayaan menimbulkan beberapa hal yang kurang menguntungkan, yaitu:

- a). Pendidikan dan kebudayaan menjadi ajang pertengkarahan paham. Karena banyaknya partai politik di Indonesia, maka mereka saling menanamkan pengaruhnya pada tujuan pendidikan. Pengiriman tenaga pengajar ke luar negeri mengakibatkan banyak sistem pengajaran yang mereka pelajari di luar negeri kemudian diterapkan di Indonesia, yang menimbulkan pertentangan-pertentangan pula.
- b). Timbulnya intelektualisme dan verbalisme
Pada masa liberal pendidikan selalu berorientasi ke negara-negara Barat (terutama Eropa Barat). Akibatnya pelajaran hanya bersifat verbalistik. Intelektualisme dan feodalisme makin meluas. Sekolah-sekolah umum selalu dikejar-kejar, sedang sekolah kejuruan kurang mendapat perhatian.
- c). Timbulnya individualisme
Pada umumnya para pemuda ingin mencapai ijazah negeri yang setinggi-tingginya agar nanti dapat menjadi pegawai tinggi. Ini mengakibatkan mereka mementingkan diri sendiri dan hanya mementingkan pelajaran bahan ujian. Kegiatan kemasyarakatan diabaikan. Demikian juga pelajaran kesenian dan olah raga belum mendapat tempat yang wajar.
- d). Timbulnya orang-orang yang mencari untung lewat pendidikan
Karena adanya kebebasan pihak swasta untuk menyelenggarakan pendidikan dan kurangnya pengetahuan menyebabkan timbulnya sekolah swasta yang banyak jumlahnya, tetapi kurang dapat dipertanggungjawabkan mutu pendidikannya. Pendiri sekolah swasta hanya ingin mengeruk keuntungan pribadi semata-mata.
- e). Timbulnya rongrongan terhadap kebudayaan nasional
Dengan adanya sistem liberal ini, masyarakat bebas mengusahakan kebudayaan. Akibatnya kebudayaan Indonesia

terancam dan masuklah kebudayaan asing, yang tidak sesuai dengan kebudayaan kita, dengan mudah.⁶

3.2 *Kebijaksanaan Pemerintah dalam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan*

Di dalam menelusuri kebijakan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan RI, banyak kesulitan yang dihadapi sehubungan dengan kurangnya data. Seperti diketahui bahwa umur setiap kabinet sangat pendek, sehingga tidak semua menteri PP dan K sempat mengeluarkan kebijakan baru. Kemungkinan kebijakan menteri hanya meneruskan kebijakan menteri sebelumnya, bahkan kadang-kadang suatu kabinet tidak mengumumkan programnya. Oleh karena itu, dalam pembahasan masalah ini tidak dibahas setiap periode kabinet yang singkat itu, tetapi sifat pembahasannya menyeluruh dari tahun 1951 sampai dengan 1959.

Program kabinet dari tahun 1951 sampai dengan 1959 yang ada kaitannya dengan pendidikan dan kebudayaan adalah sebagai berikut.

- 1) Kabinet RIS
Menteri PP dan K : Dr. Abu Hanifah.
Program Pendidikan: menyempurnakan perguruan tinggi sesuai dengan keperluan masyarakat Indonesia dan membangun pusat kebudayaan nasional serta mempergiat pemberantasan buta huruf di kalangan masyarakat.
- 2) Kabinet Natsir
Menteri PP dan K : Dr. Bahder Djohan.
Program kabinet yang ada kaitannya dengan pendidikan dan pengajaran: membatasi pembangunan perumahan rakyat serta memperluas usaha-usaha yang meninggikan derajat dan kecerdasan rakyat.
- 3) Kabinet Sukiman
Menteri PP dan K : Mr. Wongsonegoro.
Program kabinet yang ada kaitannya dengan pendidikan dan pengajaran: tidak ada.

- 4) **Kabinet Wilopo.**
Menteri PP dan K : Prof. Dr. Bahder Djohan.
Program pendidikan dan pengajaran: mempercepat usaha-usaha perbaikan untuk pembaharuan pendidikan dan pengajaran.
- 5) **Kabinet Ali Sastroamidjojo I**
Menteri PP dan K : Mr. Moh. Yamin.
Program kabinet yang ada kaitannya dengan pendidikan dan pengajarannya: tidak ada.
- 6) **Kabinet Burhanuddin Harahap**
Menteri PP dan K : Prof. B.M. Suwandi.
Program kabinet yang ada kaitannya dengan pendidikan dan pengajaran: tidak ada.
- 7) **Kabinet Ali Sastroamidjojo II**
Menteri PP dan K : Sarino Mangunpranoto.
Program pendidikan dan pengajaran: memperluas dan mempertinggi mutu pendidikan rakyat di sekolah dan luar sekolah, baik jasmani maupun rokhani atas dasar kepentingan nasional:
 - a) menyiapkan berlakunya wajib belajar dalam jangka waktu tertentu.
 - b) memperluas pendidikan teknik dan ekonomi yang praktis, umumnya pendidikan kejuruan, sesuai dengan kepentingan pembangunan.
 - c) menyelesaikan perundang-undangan pendidikan nasional hingga tercapai dasar yang sama dan koordinasi yang baik di seluruh lapangan pendidikan dari sekolah rendah sampai sekolah tinggi.
 - d) menyelenggarakan usaha-usaha yang pokok dan merata untuk memberi dasar yang kuat bagi pertumbuhan kebudayaan nasional.
- 8) **Kabinet Karya**
Menteri PP dan K : Prof. Dr. Priyono.
Program kabinet yang ada kaitannya dengan pendidikan dan kebudayaan: tidak ada.

Dari program-program kabinet ke-8 periode tersebut dapat diketahui bahwa tidak semua kabinet mempunyai program

khusus dalam bidang PP dan K, kecuali Kabinet RIS, Kabinet Wilopo, dan Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Dari semua program tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 kegiatan, yaitu:

- a) Mengusahakan konsepsi sistem pendidikan nasional dengan undang-undangnya.
- b) Mengusahakan pendidikan dan pengajaran secara luas dan merata dalam rangka mencerdaskan bangsa.
- c) Mengusahakan konsepsi kebudayaan nasional serta usaha-usaha pembinaan dan pengembangannya.
- d) Mengusahakan struktur organisasi yang sesuai guna mencapai usaha-usaha yang telah direncanakan.

3.2.1 Pemikiran Konsepsi Pendidikan Nasional

Salah satu faktor yang diperlukan untuk memajukan bangsa adalah pendidikan. Pendidikan mempunyai peranan utama dalam kehidupan tiap-tiap bangsa. Kebudayaan suatu bangsa meningkat sejalan dengan perkembangan budi, yaitu akal pikiran serta perasaan dari bangsa itu. Pendidikan serta pengalaman hidup adalah unsur pengisi lubuk kebudayaan dalam arti luas.

Pendidikan nasional adalah suatu pendidikan yang disesuaikan dengan kenyataan yang berlaku dalam masyarakat, atau dengan perkataan lain berkaitan dengan kodrat alam dan keadaan bangsa yang menghuni alam itu.

Hasrat serta cita-cita nasional harus diproyeksikan dalam alam pendidikan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara-cara serta mata-mata pelajaran yang sesuai dengan pembangunan dan kebutuhan bangsa Indonesia.

Mengingat bahwa masalah pendidikan ini merupakan faktor yang amat penting guna memajukan suatu bangsa, lebih-lebih untuk Indonesia yang baru bebas dari penjajahan, maka dipandang perlu adanya suatu sistem pendidikan nasional yang berlaku secara menyeluruh di pelosok tanah air.⁸

Pemikiran perlunya ada sistem pendidikan nasional sebenarnya telah dirintis oleh para tokoh bangsa, khususnya yang menangani bidang pendidikan pengajaran dan kebudayaan, sejak sebelum kemerdekaan, yaitu oleh seluruh panitia yang

merupakan bagian dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Panitia yang dipimpin oleh Ki Hadjar Dewantara ini telah menghasilkan konsepsi pendidikan yang akan dipakai sebagai pedoman jika kemerdekaan telah dicapai. Bunyi naskah hasil panitia ini seperti yang telah dikemukakan pada Bab II.

Pada tanggal 12 April 1946 Menteri PP dan K Mr. Suwandi membentuk Panitia Penyelidik Pendidikan dan Pengajaran Indonesia (PPPKI), yang bertugas meninjau usaha-usaha pendidikan dan pengajaran, yang pada waktu itu telah berjalan dengan pedoman hasil panitia bagian PPKI tersebut di atas.

Selanjutnya pada tahun 1948 Menteri PP dan K Mr. Ali Sastroamidjojo membentuk Panitia Pembantu Pembentuk Undang-undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran. Panitia ini telah menghasilkan Rencana Undang-undang Pokok Pendidikan.⁹

Pada bulan April 1950 Rencana Undang-undang Pokok Pendidikan ini diusulkan oleh Menteri PP dan K, waktu itu Ki Mangunsarkoro, kepada pemerintah agar dapat disahkan sebagai undang-undang.

Setelah mengalami beberapa perbaikan dan penyempurnaan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, maka rencana itu disahkan menjadi Undang-undang Pokok Pendidikan oleh Acting Presiden Mr. Assaat, yang diundangkan oleh Menteri Kehakiman A.G. Pringgodigdo, dan berlaku untuk seluruh wilayah RI (pada waktu itu RI menjadi negara bagian RIS).¹⁰

Bulan Juni 1950 Menteri PP dan K – RIS mengadakan perundingan dengan Menteri PP dan K RI, yang menghasilkan persetujuan: sistem pendidikan RI untuk sementara berlaku pula di seluruh wilayah RIS sambil menunggu penyempurnaan lebih lanjut. Akan tetapi, pemerintah RIS belum sempat memperbaikinya sampai negara RIS menjelma menjadi Negara RI Kesatuan.

Pada tanggal 17 Agustus 1950 Negara RIS menjelma menjadi Negara Kesatuan RI. Sistem pendidikan yang berlaku ialah sistem seperti yang telah ditetapkan Negara RIS.

Pada tahun 1954 Pemerintah Negara Kesatuan RI mengumumkan bahwa UUPP – RI tahun 1950 dinyatakan berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pernyataan itu ditandatangani Presiden Soekarno bersama Menteri PP dan K Mr. Moh. Yamin, dan djundangkan oleh Menteri Kehakiman Djody Gondokusumo. UUPP ini merupakan UU No. 12 tahun 1954, yang sampai sekarang belum dicabut.

Undang-undang No. 12 tahun 1954 yang mencerminkan cita-cita dan sistem pendidikan nasional itu selengkapnya dapat dibaca pada lampirannya.

Meskipun UUPP ini baru diresmikan/diundangkan pada tahun 1954, akan tetapi pada hakikatnya jiwa dari dasar-dasar pendidikan dan pengajaran kita sudah dilaksanakan. Segenap mata pelajaran yang memberi kemungkinan untuk mengisi apa-apa yang terkandung dalam pokok-pokok pendidikan nasional diresapkan dalam jiwa murid-murid, yakni Pancasila.^{1 1}

UUPP 1954 lahir dalam suasana liberal, sehingga tujuan pendidikan dan pengajarannya mencerminkan sifat liberal itu. Oleh karena itu, dapat dimengerti jika pada masa Demokrasi Terpimpin dan masa Orde Baru, tujuan pendidikan dan pengajaran ini selalu disoroti dan disesuaikan.

Selain itu UUPP ini juga tidak mengatur tentang pendidikan masyarakat, sehingga untuk pendidikan masyarakat diperlukan peraturan pemerintah tersendiri.

Suatu hal yang perlu ditonjolkan dalam UUPP tahun 1954 ini ialah:

- a). Diletakkannya dasar dan tujuan pendidikan dan pengajaran yang semata-mata berorientasi kepada rakyat, tanah air, dan bangsa.
- b). Adanya niat untuk meratakan pendidikan bagi segenap rakyat, tanpa diskriminasi.

3.2.2 Usaha-usaha di Bidang Pendidikan dan Pengajaran

Masalah-masalah pokok yang dihadapi Kementerian PP dan K untuk membawa rakyat Indonesia kepada suatu tingkatan kecerdasan ialah kegiatan dalam lapangan pendidikan dalam

sekolah, pendidikan luar sekolah, serta usaha-usaha dalam lapangan kebudayaan.

Tugas dan pelaksanaan pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan yang oleh pemerintah dilaksanakan serta diserahkan kepada Kementerian PP dan K diberi ketentuan oleh Undang-undang Dasar Sementara RI pasal-pasal 30, 40, dan 41 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30 : (1) tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
 (2) memilih pengajaran yang akan diikuti adalah bebas.
 (3) mengajar adalah bebas, dengan tidak mengurangi pengawasan yang dilakukan terhadap itu menurut Undang-undang.

Pasal 40 : (1) penguasa melindungi kebebasan menggunakan kebudayaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan.
 Dengan menjunjung asas ini, maka penguasa memajukan sekuat tenaga perkembangan kebangsaan dalam kebudayaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan.

Pasal 41 : (1) penguasa wajib memajukan perkembangan rakyat baik rohani maupun jasmani.
 (2) penguasa teristimewa berusaha selekas-lekasnya menghapuskan buta huruf.
 (3) penguasa memenuhi kebutuhan akan pengajaran umum yang diberikan atas dasar memperdalam perasaan perikemanusiaan, memperdalam keinsyafan kebangsaan, memperkuat perikemanusiaan yang sama terhadap keyakinan agama setiap orang dengan memberikan kesempatan dalam jam pelajaran untuk mengajarkan pelajaran agama sesuai dengan keinginan orang tua murid-murid.

- (4) terhadap pengajaran rendah, maka penguasa berusaha melaksanakan dengan lekas kewajiban belajar yang umum.
- (5) murid-murid sekolah partikelir yang memenuhi syarat-syarat kebaikan menurut Undang-undang bagi pengajaran umum, sama haknya dengan murid-murid sekolah umum.

Garis politik pendidikan umumnya dari Kementerian PP dan K didasarkan atas jiwa dari pasal-pasal UUD Sementara tersebut. Sudah barang tentu segalanya disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan pokok.

Masalah pokok yang dihadapi pada waktu itu bukanlah masalah bagaimana menyelenggarakan pendidikan dan kebudayaan, tetapi masalah dana dan sarana. Hal ini menyebabkan usaha-usaha pendidikan tidak dapat merata, tetapi menggunakan prioritas. Bidang-bidang yang amat diperlukan mendapat prioritas.^{1 2}

Usaha-usaha pendidikan dan pengajaran dari tahun 1951—1954 belum memiliki program jangka panjang. Program jangka panjang baru ada sejak tahun 1955. Dalam tahun ini dikeluarkan program usaha-usaha di bidang pendidikan dan pengajaran selama 5 tahun, yaitu 1955 — 1960. Rencana tersebut meliputi:

- 1) Pendidikan rendah untuk anak umur 6—12 tahun, dengan biaya 440 juta rupiah.
- 2) Pendidikan menengah kejuruan dan umum dengan biaya 450 juta rupiah.
- 3) Pendidikan tinggi dengan biaya 120 juta rupiah.
- 4) Pendidikan masyarakat dengan biaya 40 juta rupiah.

Jumlah seluruhnya 1.050 juta rupiah.

3.2.2.1 Pendidikan umum

1) Taman Kanak-kanak

Taman Kanak-kanak pada dasarnya diserahkan kepada masyarakat, dan pemerintah memberikan bimbingan, bantuan, dan pengawasan, yang berupa:

- bimbingan teknis edukatif

- bantuan guru
- bantuan gedung
- bantuan alat-alat
- pengawasan pelaksanaannya.

Perkembangannya, dalam tahun 1950 baru terdapat 1 TK negeri dan 40 TK swasta. Dalam tahun 1954 menjadi 5 TK negeri dan 364 TK swasta.

2) Balai Persiapan Kewajiban Belajar

Dalam rangka melaksanakan kewajiban belajar pada tahun 1954. Berdasarkan SK Menteri No. 41076/Keb tanggal 19 Juli 1955, Jawatan Pengajaran membentuk Balai Persiapan Kewajiban Belajar. Balai ini bertugas menyusun rencana kewajiban belajar, menyusun rancangan undang-undang kewajiban belajar, melaksanakan percobaan pelaksanaan kewajiban belajar, memberikan penerangan kepada masyarakat tentang rencana kewajiban belajar, dan melaksanakan kewajiban belajar.

Dalam pelaksanaannya ada dua macam penyelenggara, yaitu Biro Pusat Pembangunan Masyarakat Desa dan usaha masyarakat sendiri. Dalam hal ini Dinas PP dan K setempat bertugas menyelenggarakan teknis edukatif, bantuan peralatan, serta tenaga pengajar.

Sampai tahun 1959 daerah-daerah yang telah melaksanakan kewajiban belajar ialah: Jawa Timut, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatra Selatan, Sumatra Barat, Sumatra Utara, Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi, dan Bali.^{1 3}

3) Sekolah Rakyat/Dasar

UUPP tahun 1950 (1954) menyatakan bahwa semua anak umur 8 tahun ke atas wajib belajar sedikitnya 6 tahun lamanya. Oleh karena itu, PP dan K sejak tahun 1950/1951 selalu memprioritaskan program kewajiban belajar. Karena kewajiban belajar itu adalah pendidikan Sekolah Rakyat (SR), maka penyelenggaraan SR mendapat prioritas utama.

Pada tahun 1950 baru terdapat sekitar 24.000 SR, yang terasa masih sangat kurang. Oleh karena itu, jumlah SR akan senantiasa ditambah sehingga pada tahun 1960 diperkirakan mencapai sekitar 50.200 buah.

Dalam hubungan ini Kementerian PP dan K telah menyusun rencana 10 tahun (1950–1960), dengan tujuan menyelesaikan pondamen bagi bangunan raksasa ini yaitu kewajiban belajar.¹⁴

Di samping peningkatan jumlah SR, juga dipikirkan perbaikan mutunya. Oleh karena itu, pada tahun 1951 didirikan Balai Penyelidikan dan Perancang Pendidikan dan Pengajaran, yang bertugas:

- a) menyelidiki secara sistematis soal-soal pendidikan dan pengajaran dengan memakai bahan-bahan dari dalam dan luar negeri.
- b) merencanakan usaha mencapai perbaikan dan penambahan kesempatan mendidik dan mengajar.¹⁵

Kemudian sebagai usaha perbaikan mutu pelajaran di SR, maka pada tahun 1952 kurikulum SR tahun 1947- dibuatkan penjabarannya dalam bentuk Rencana Pelajaran Terurai. Dengan demikian, terdapat keseragaman mutu pelajaran di seluruh tanah air dan memudahkan bagi guru-guru SR.¹⁶

Dalam rangka menjamin pelaksanaan program pendidikan dasar (SR), pemerintah mengikutsertakan partisipasi daerah dengan menyerahkan penyelenggaraan pendidikan dasar (SR) tersebut kepada propinsi dengan bimbingan teknis edukatif dari pusat. Untuk mengatur hal ini maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951.

Dalam PP No. 65 tahun 1951 ini propinsi diberi wewenang untuk:

- a) mendirikan dan menyelenggarakan SR.
- b) memberikan subsidi kepada SR swasta.
- c) mendirikan kursus-kursus umum (KPU) tingkat B dan C.
- d) mendirikan perpustakaan rakyat.
- e) memimpin dan memajukan kesenian daerah.
- f) menyesuaikan rencana pelajaran sesuai dengan keadaan setempat.
- g) menetapkan dan mengusahakan buku-buku pelajaran.¹⁷

Untuk melaksanakan ketentuan ini maka di propinsi dibentuk Dinas PP dan K oleh pemerintah daerah, yang selalu

bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Kementerian PP dan K di daerah bersangkutan.¹⁸

4) Sekolah Menengah Pertama

Dengan adanya ketentuan tidak ada diskriminasi murid untuk masuk sekolah dan dibukanya SR secara luas serta para murid dibebaskan dari segala biaya, maka animo anak-anak tamatan SR untuk masuk SMP (Sekolah Lanjutan Pertama) menjadi besar pula. Oleh karena itu, pemerintah harus berusaha membuka SMP secara luas pula. Dalam pengembangan SMP ini, karena terbatasnya keuangan pemerintah, maka pihak swasta diberi kesempatan membuka SMP seluas-luasnya. Kemudian pada tahun 1958/1959 dengan adanya ketentuan guru SR adalah tamatan SGA 6 tahun, maka SGB 4 tahun yang jumlahnya ratusan itu diubah menjadi SMP.

Perkembangannya adalah sebagai berikut: pada tahun 1950 hanya terdapat 216 SMP Negeri, dan jumlah ini pada tahun 1959 membengkak menjadi 551 SMP negeri, 111 SMP bersubsidi, 229 SMP berbantuan, dan 2698 SMP swasta, sehingga jumlah SMP negeri dan swasta menjadi 3.589 buah.

Sekolah Menengah 4 tahun (zaman Jepang) dirubah menjadi Sekolah Menengah Pertama 3 tahun, yang dimulai sejak tahun ajaran 1951/1952. Murid-murid setelah di kelas III dibagi menjadi dua jurusan, yaitu bagian A yang mengutamakan bahasa dan sosial-ekonomi dan bagian B yang mengutamakan ilmu pasti dan alam. Untuk menjamin mutu maka diadakan ujian negara secara serentak dan seragam.

Untuk peningkatan didaktik-metodik dan bahan pelajaran pada tahun 1953 diadakan Konferensi Inspektur SMP Seluruh Indonesia untuk menyempurnakan kurikulum SMP tahun 1947. Hasilnya dilaksanakan sejak tahun ajaran 1954/1955.¹⁹

5) Sekolah Menengah Atas

Sama halnya dengan SMP, pemerintah harus membuka Sekolah Menengah Atas (SMA) yang cukup banyak karena makin banyaknya minat murid-murid lulusan SMP yang ingin meneruskan ke sekolah yang lebih tinggi dan juga untuk penampungan bekas tentara pelajar.

Usaha pertama yang dilakukan ialah menegerikan SMA-SMA di bekas wilayah RIS, dan SMA-SMA swasta federal yang kuat, kemudian membuka SMA-SMA negeri baru. Tetapi karena terbatasnya anggaran, maka pihak swasta diberi kesempatan luas untuk membuka SMA swasta.

Perkembangan jumlah SMA adalah sbb.: tahun 1950 hanya ada 49 SMA negeri. Jumlah itu pada tahun 1959 membesar menjadi 157 SMA negeri, 39 SMA bersubsidi, 62 SMA bantuan, dan 531 SMA swasta, sehingga jumlah seluruhnya menjadi 989 SMA.

Untuk penyeragaman dan jaminan mutu mulai tahun 1951 diadakan ujian negara. Penyusunan soal ujian dilakukan dengan mengikutsertakan pihak swasta, terutama bekas pengelola SMA Federal.

Pada tahun 1955 diadakan usaha penyempurnaan SMA sesuai dengan keperluan. Untuk itu diadakan konferensi inspektur SMA dan kepala-kepala SMA, baik negeri maupun swasta, seluruh Indonesia. Adapun yang dibahas adalah:

- konsepsi SMA yang diinginkan.
- rencana pelajaran.
- penyempurnaan sistem ujian.

Hasil yang nyata dan terus dilaksanakan sejak itu adalah tentang pembagian jurusan. Sejak tahun 1955/1956 SMA di bagi menjadi tiga jurusan, yaitu:

- a) SMA Bagian A, untuk jurusan sastra.
- b) SMA Bagian B, untuk jurusan eksakta.
- c) SMA Bagian C, untuk jurusan sosial-ekonomi.²⁰

3.2.2.2 Pendidikan kejuruan

Bidang pendidikan kejuruan ini meliputi pendidikan guru, pendidikan ekonomi, pendidikan teknik, pendidikan kewanita-an, dan pendidikan kejuruan lain-lain.

1) Pendidikan guru

Guru merupakan salah satu faktor yang diperlukan untuk menyelenggarakan suatu pendidikan di samping gedung dan murid.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan di segala bidang yang seluas-luasnya untuk mencerdaskan bangsa, maka keperluan akan guru yang memenuhi persyaratan dan mencukupi jumlahnya merupakan keharusan untuk pengadaannya yang ditempuh dengan jalan mengadakan pendidikan guru dan kursus pendidikan guru.

Untuk meningkatkan mutu guru diadakan penataran guru dalam bidang mata pelajaran tertentu dan diadakan pula kursus tertulis di Bandung sejak tahun 1952.²¹

Berikut ini dipaparkan beberapa usaha pengadaan guru menurut tingkatannya.

a) Sekolah Guru Taman Kanak-kanak

Pada tahun 1954 Inspeksi Pendidikan Taman Kanak-kanak mengadakan pertemuan dengan perkumpulan penyelenggara Sekolah Taman Kanak-kanak, dan menghasilkan rencana pelajaran Sekolah Guru Taman Kanak-kanak (SGTK).

Karena Taman Kanak-kanak ini penyelenggaraannya diserahkan kepada masyarakat dan pemerintah hanya memberi bimbingan dan bantuan, maka pengadaan guru Taman Kanak-kanak banyak diusahakan oleh swasta.

Sampai tahun 1959 pemerintah hanya mempunyai 4 SGTK, sedang pihak swasta memiliki 2 SGTK bersubsidi dan 24 SGTK swasta. Jadi, jumlah seluruhnya hanya 30 sekolah. Dalam rangka peningkatan mutu pada tahun 1954 diadakan pembaharuan rencana pelajaran 1954. Perubahan itu antara lain pendidikan anak umur 3—6 tahun agar lebih mementingkan aktivitas anak. Di samping itu guru lulusan SGTK diperbolehkan pula mengajar pada tiga kelas pertama SR.²²

b) Kursus Pengajaran untuk Kursus Pengantar ke Kewajiban Belajar

Dalam rangka pelaksanaan kewajiban belajar pemerintah telah membentuk Balai Persiapan Kewajiban Belajar. Balai ini membuat "Rencana Sepuluh Tahun" pelaksanaan kewajiban belajar, yaitu tahun 1950 — 1960. Berhubung pada tahun 1951 terasa sangat kekurangan guru SR maka dalam rangka melaksanakan kewajiban belajar itu didirikan Kursus Pengajar untuk

Kursus Pengantar ke Kewajiban Belajar (KPKPKB) dua buah di setiap kabupaten. Lama kursus hanya 1 tahun. Lulusan kursus ini langsung mengajar di SR.

Perkembangan selanjutnya, pada tahun 1954 keperluan akan guru SR hampir terasasi; maka untuk menjaga mutu pendidikan, KPKPKB diintegrasikan menjadi Sekolah Guru B (SGB). Demikian pula guru-guru lulusan KPKPKB sedikit demi sedikit dikursus lagi sehingga memiliki pendidikan persamaan SGB atau SGA.^{2 3}

c) Sekolah Guru B

Sekolah Guru B (SGB) merupakan pendidikan calon guru SR yang dianggap memenuhi syarat sebelum tahun 1960. Lama pendidikannya 4 tahun sesudah SR. Pada kelas I s.d. III pelajaran umum lebih banyak diberikan, dan pada akhir tahun III diadakan ujian. Bagi anak-anak yang mempunyai nilai amat baik dapat meneruskan ke SGA. Pada tahun IV lebih banyak diberikan pendidikan didaktik, metodik, ilmu jiwa dan praktek mengajar.

Kurikulum SGB menggunakan kurikulum 1953. Kemudian kurikulum itu beberapa kali disempurnakan lewat konferensi ahli pendidik dan kepala-kepala SGB di Salatiga dan Malang. Sebagai kelanjutan perbaikan mutu ini di Tasikmalaya, Sumedang, Salatiga, dan Bangil didirikan SGB Pilot Proyek. Untuk tempat latihan mengajar para murid kelas terakhir SGB didirikan Latihan yang dikelola langsung oleh Inspeksi Pendidikan Guru. Tetapi sejak tahun 1959 SRL ini pun pengelolaannya diserahkan kepada Dinas PP dan K Daerah seperti SR biasa.

Perkembangan SGB pesat sekali. Ini disebabkan karena pada tahun 1953/1954 semua KPKPKB yang di setiap kabupaten terdapat dua buah itu, diintegrasikan/diubah menjadi SGB. Pada tahun 1954 jumlahnya melonjak dari 170 buah menjadi 483 buah. Kemudian pada tahun 1959 menjadi 539 SGB negeri dan swasta.

Pada tahun 1959 banyak lulusan SGB yang belum dapat diangkat karena kekurangan sekolah SR dan biaya. Jumlahnya cukup besar yaitu sekitar 43.000 orang. Hal ini tentu menjadi

masalah, sehingga pada tahun tersebut Kementerian PP dan K, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan mengadakan pertemuan untuk memecahkannya.^{2 4}

d) Sekolah Guru A.

Sekolah Guru A (SGA) direncanakan sebagai tempat sekolah calon guru SR yang baku, tetapi karena pada waktu tahun lima puluhan itu masih sangat kekurangan guru SMP, maka tamatan SGA terpaksa ditempatkan di SMP. Hal ini berjalan sampai tahun 1960. Sejak tahun ini tamatan SGA ditempatkan di SR. Guru-guru SMP yang berasal dari SGA ditingkatkan lagi ke kursus PGSLP. Lama pendidikan SGA adalah 6 tahun sesudah SR. Yang dapat diterima menjadi siswa SGA adalah tamatan SMP atau SGB (setelah ujian kelas III).

Perkembangan SGA baru pesat setelah SGB dihapuskan dan SGA merupakan satu-satunya sekolah bagi calon guru SR. Hal ini dimulai berangsur-angsur sejak tahun 1960. Jumlah SGA pada tahun 1956 hanya 71 buah. Pada tahun 1960, di setiap kabupaten terdapat satu SGA, maka diperkirakan jumlahnya sekitar 300 SGA negeri, belum terhitung SGA swasta.

Dalam rangka peningkatan mutu SGA telah dilakukan beberapa usaha. Bidang sarana: kelengkapan gedung, auditorium, perpustakaan, laboratorium, lapangan, dan alat-alat olah raga. Bidang kurikulum: pada tahun 1956 dan 1957 telah diadakan konferensi kepala SGA untuk membahas didaktik-metodik.

Hasilnya yang terpenting adalah pengajaran hendaknya jangan berpusat pada guru, tetapi pada anak; dan perlunya ada ekstra kurikuler untuk mengarahkan bakat anak-anak.

Bidang guru: meningkatkan guru-guru yang dipandang memenuhi syarat ke Kursus B II, atau ke luar negeri. ^{2 5}

e) Kursus Guru A

Kursus Guru A (KGA) bertujuan untuk memberi kesempatan kepada guru-guru SR yang belum berijazah SGA. Hal ini untuk memenuhi ketentuan bahwa guru SR yang baku adalah guru-guru tamatan SGA. Lama kursus 3 tahun.

Yang diterima menjadi siswa adalah lulusan SGB atau yang sederajat dan harus sudah bekerja sebagai guru. Karena itu kur-

susnya diselenggarakan siang hari, biasanya menempati gedung-gedung SGA. Guru-gurunya pun dari guru SGA.

Pada tahun 1959 terdapat 58 KGA negeri dan 69 KGA swasta.²⁶

f) Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama

Jika untuk menjadi guru SR disyaratkan berijazah SGA, tentunya untuk menjadi guru SMP harus lebih tinggi dari pada lulusan SGA. Oleh karena itu, pada tahun 1952 didirikan Kursus Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP), yang tujuannya dengan tegas mendidik calon guru SMP. Lama pendidikan mula-mula 1 tahun, kemudian pada tahun 1958 ditingkatkan menjadi 2 tahun. Mahasiswa yang diterima di PGSLP adalah tamatan SMA, SGA, dan guru-guru SMP yang belum memiliki ijazah PGSLP. Seperti diketahui bahwa pada waktu itu banyak guru SMP yang hanya lulusan SGA.

Oleh karena guru SMP adalah guru vak, maka PGSLP terdiri atas jurusan-jurusan yang disesuaikan dengan kebutuhan di SMP, yaitu:

- (1) Jurusan Bahasa Indonesia (A1)
- (2) Jurusan Bahasa Inggris (A2)
- (3) Jurusan Ilmu Pasti (B1)
- (4) Jurusan Ilmu Alam (B2)
- (5) Jurusan Sejarah (C1)
- (6) Jurusan Ilmu Bumi (C2)
- (7) Jurusan Ilmu Hayat (H)
- (8) Jurusan Menggambar (M)
- (9) Jurusan Ilmu Mendidik (P)

Perkembangan PGSLP adalah sbb.: pada tahun 1957 pada waktu pendidikannya masih 1 tahun, terdapat 27 buah. Pada tahun 1960 setelah waktu pendidikannya 2 tahun terdapat 31 buah dengan berbagai jurusan. Di samping itu sudah terdapat pula beberapa PGSLP swasta.²⁷

g) Kursus B I dan B II

Untuk memenuhi kebutuhan guru-guru SLTA (SMA, SGA, SMEA, dan sebagainya), maka pada tahun 1950 didirikan Kur-

sus B I, (PP No. 41 th. 1950). Lama pendidikan Kursus B I 2 tahun. Yang diterima menjadi mahasiswa adalah guru-guru yang berijazah SGA atau yang sederajat, yang sudah memiliki masa kerja 2 tahun ke atas. Karena pesertanya para guru, maka kursus dilaksanakan sore dan malam hari. Mata pelajaran yang diajarkan disesuaikan dengan pelajaran-pelajaran di SLTA. Sampai dengan tahun 1957 telah terdapat 75 Kursus B I negeri dan swasta yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia.

Karena dalam PP No. 41 tahun 1950 itu disebutkan bahwa lulusan Kursus B I hanya berwenang mengajar di kelas I dan II SLTA, maka untuk memenuhi itu pada tahun 1958 didirikan Kursus B II untuk menghasilkan guru-guru SLTA yang berhak mengajar pada kelas terakhir (kelas III). Lama kursus B II adalah 2 tahun sesudah B I. Yang dapat diterima di Kursus B II hanya para pemilik ijazah B I.

Kursus B II yang ada pada waktu itu baru di tiga kota yaitu: Jakarta (Jurusan Sejarah dan Jurusan Ilmu Bumi), Bandung (Jurusan Ilmu Bumi, Jurusan Pendidikan, dan Ilmu Pasti), dan Yogyakarta (Jurusan Pendidikan).

Untuk memberi kesempatan kepada guru-guru yang di kotanya tidak terdapat Kursus B I, dibuka pula Kursus B I tertulis yang diselenggarakan oleh Balai Pendidikan Guru di Bandung.²⁸

h) Balai Pendidikan Guru

Pada tahun 1950 dibentuk Balai Kursus Tertulis Pendidikan Guru (BKTPG), yang tugasnya menyelenggarakan kursus tertulis pendidikan guru. Mula-mula BKTPG melayani KPKPKB, kemudian berkembang melayani kursus guru lainnya seperti: KGB, KGA, B I.

Kemudian pada tahun 1954 BKTPG diubah menjadi Balai Pendidikan Guru (BPG).

Tugas BPG yaitu:

- (1) menyiapkan pelayanan-pelayanan untuk semua jenis pendidikan guru di lingkungan Kementerian PP dan K.
- (2) mengadakan penelitian dan percobaan yang berkaitan dengan pendidikan guru.

Mengingat tugasnya, maka BPG terdiri atas tiga seksi, yaitu: Seksi Sekolah Guru, Seksi B I dan B II, dan Seksi Pembaharuan.

Mula-mula BKTPG/BPG berkantor pusat di Bandung, tetapi akhirnya dipindahkan di Jakarta.²⁹

i) Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa

Kementerian PP dan K bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak yang tidak normal, yaitu: tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan anak cacat yang lain. Pendidikannya disebut Sekolah Luar Biasa.

Untuk itu, maka pemerintah membuka Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa (SGPLB). Lama pendidikannya 2 tahun setelah SGB. Kemudian ditingkatkan lagi menjadi 20 bulan setelah SGA.

Pusat kegiatan pendidikan luar biasa ini ada di Bandung. Sampai dengan tahun 1959 SGPLB telah menghasilkan 326 orang guru. Sebagian dari mereka ada yang dikirim ke luar negeri untuk memperdalam ilmunya.³⁰

2) Pendidikan ekonomi

Sesudah kemerdekaan dirasa adanya kekurangan tenaga ahli administrasi menengah bagi usaha-usaha pembangunan. Di samping itu juga banyak masyarakat yang mengelola bidang usaha mendapat kesulitan dalam bidang administrasi ini. Untuk mengatasi hal ini pemerintah membuka pendidikan ekonomi.

a) Sekolah Menengah Ekonomi Pertama

Sebelum tahun 1950 Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP) ini bernama Sekolah Dagang, yang kemudian diubah menjadi SMEP sejak tahun 1950. Lama pendidikannya 3 tahun sesudah SR. Jika telah selesai, tamatan SMEP ini diharapkan dapat membuka dan memimpin perusahaan sendiri, bekerja di kantor bagian pembukuan, dan dapat pula melanjutkan ke Sekolah Menengah Ekonomi Atas.

Perkembangannya adalah sbb.: pada tahun 1950 terdapat 33 SMEP. Kemudian pada tahun 1960 telah berkembang menjadi 228 SMEP negeri, 11 SMEP bersubsidi, 20 SMEP berbantuan, dan 115 SMEP swasta.^{3 1}

b) Sekolah Menengah Ekonomi Atas

Sebelum tahun 1950 sudah didirikan Sekolah Ekonomi Menengah yang merupakan kelanjutan dari Sekolah Dagang. Pada tahun 1950 Sekolah Dagang diubah menjadi SMEP dan Sekolah Ekonomi Menengah diubah menjadi Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA).

Lama pendidikan SMEA 3 tahun. Yang diterima menjadi siswa SMEA adalah tamatan SMEP dan SMP.

Tamatan SMEA, kecuali dapat memimpin perusahaan sendiri atau bekerja di kantor, juga dapat meneruskan ke fakultas ekonomi.

Perkembangannya adalah sbb.: pada tahun 1950 terdapat 6 SMEA. Pada tahun 1960 menjadi 39 SMEA negeri, 4 SMEA bersubsidi, 10 SMEA berbantuan, dan 58 SMEA swasta.^{3 2}

c) Kursus Dagang Pertengahan

Pada tahun 1951 timbul pemikiran lagi, yaitu adanya orang-orang lulusan SR yang sudah bekerja atau berusaha sendiri dalam bidang administrasi atau perusahaan. Mereka ini memerlukan peningkatan pengetahuan dan keterampilannya. Oleh sebab itu, dibukalah Kursus Dagang Pertengahan (KDP). Yang diterima menjadi murid KDP adalah mereka yang berumur 18-25 tahun dan berijazah SR.

Jika telah lulus para peserta kursus mendapat ijazah Perniagaan Pertengahan Tingkat Pertama, yang nilainya setingkat ijazah SMEP.

Perkembangannya adalah sbb.: pada tahun 1950 terdapat 9 KDP, tahun 1955 terdapat 18 KDP, dan sesudah itu ditiadakan.^{3 3}

3) Pendidikan teknologi

Pendidikan teknologi juga mendapat perhatian dari pemerintah, karena tenaga-tenaga terampil dan tenaga-tenaga mene-

ngah teknik amat diperlukan dalam pembangunan. Oleh sebab itu, didirikanlah Kursus Kerajinan, Sekolah Teknik Pertama, dan Sekolah Teknik Menengah.

a) Kursus kerajinan

Pada tahun 1950 Kursus Kerajinan yang lama pendidikannya 1 tahun ditingkatkan menjadi 2 tahun dan diganti nama menjadi Sekolah Kerajinan Negeri (SKN).

Sekolah ini mementingkan keterampilan. Para lulusan SKN ini dipersiapkan menjadi pekerja yang terampil, tidak untuk melanjutkan sekolah. Yang diterima menjadi murid SKN adalah tamatan SR.

SKN mempunyai 19 jurusan, yaitu: anyaman, besi, cor, kayu, kaleng, keramik, kulit, las, menjahit, mobil, listrik, perahu, percetakan, perabot rumah tangga, sepeda, tenun, tanduk, tukang batu, ukir.

Sampai dengan tahun 1959 terdapat 218 SKN dan 4 SK bersubsidi.^{3 4}

b) Sekolah Teknik

Sekolah Teknik (ST) mula-mula bernama Sekolah Teknik Pertama. Lama pendidikannya 2 tahun sesudah SR. Kemudian pada tahun 1950 ST disempurnakan menjadi Sekolah Teknik, yang lama pendidikannya 3 tahun setelah SR.

ST terdiri atas 20 jurusan, yaitu: bangunan air/jalan, bangunan gedung, bangunan kapal, cor, keramik, kulit, listrik, intertip, klise, menjahit, menyusun huruf, mencetak, mesin, mobil, perabot rumah tangga, radio, tambang, tenun, ukir, dan ukur tanah.

Sampai dengan tahun 1950 terdapat 220 STP negeri dan 2 STP bersubsidi.^{3 5}

c) Sekolah Teknik Menengah

Pemuda-pemuda lulusan STP yang ingin sekolah lebih tinggi lagi dapat meneruskan ke Sekolah Teknik Menengah (STM). Lama pendidikannya 3 tahun.

STM terdiri atas 15 jurusan, yaitu: bangunan jalan/air, bangunan gedung, bangunan kapal, kimia, listrik, mesin, mesin

kapal, radio, tambang, pemeliharaan mesin uap, memelihara mobil, pemeliharaan alat listrik, instrumen pesawat terbang, rangka motor dan pesawat terbang, dan ukiran.

Perkembangannya adalah sbb.: pada tahun 1950 terdapat 6 STM dan pada tahun 1958 berkembang menjadi 18 buah.^{3 6}

4) Pendidikan kewanitaan

Sejak awal kemerdekaan para pemikir bangsa telah berpendapat bahwa wanita perlu ditingkatkan pendidikannya. Wanita sebagai ibu rumah tangga memegang peranan penting dalam kesejahteraan rumah tangga. Oleh karena itu, dipandang perlu adanya pendidikan kwwanitaan. Untuk itu, oleh pemerintah didirikan Sekolah Kepandaian Putri dan Sekolah Guru Kepandaian Putri.

a) Sekolah Kepandaian Putri

Sekolah Kepandaian Putri (SKP) ada dua macam, yaitu SKP 2 tahun dan SKP 4 tahun. SKP 2 tahun menerima siswi lulusan SR. Pendidikannya khusus tentang kerumahtangaan. Setelah selesai dari SKP 2 tahun diharapkan seorang wanita dapat menjadi ibu rumah tangga yang baik.

Perkembangannya adalah sbb.: pada tahun 1955 terdapat 60 SKP 2 tahun, tetapi pada tahun 1960 menurun menjadi 46 buah.

SKP 4 tahun mempunyai jangkauan lebih luas. Para lulusannya di samping dapat menjadi ibu rumah tangga yang baik, mereka dapat pula bekerja mencari nafkah sesuai dengan jurusannya. Bagi yang ingin sekolah lagi, lulusan SKP 4 tahun dapat meneruskan ke SGKP, SGTK, dan Sekolah Bidan.

Melihat tujuan atau jangkauannya itu, maka pendidikan SKP 4 tahun ini pada 2 tahun pertama berisikan pendidikan kerumahtangaan, dan 2 tahun terakhir adalah spesialisasi kejuruannya, misalnya jurusan: memasak, menjahit, menghias kain, membatik, menenun. Perkembangannya adalah sbb.: pada tahun 1950 terdapat 63 buah dan pada tahun 1960 melonjak menjadi 121 buah.^{3 7}

b) Sekolah Guru Kepandaian Putri

Sekolah Guru Kepandaian Putri (SGKP) menerima siswa dari lulusan SMP dan SKP 4 tahun. Lama pendidikannya 4 tahun.

SGKP dibuka dengan tujuan untuk:

- mendidik tenaga guru kejuruan pada Sekolah Lanjutan Pertama.
- menyiapkan tenaga pembangunan bidang kerumahtanggaan.

SGKP terbagi menjadi dua jurusan yaitu:

- Kejuruan A : memasak, pemeliharaan rumah tangga, dan pengetahuan umum.
- Kejuruan B : menjahit dan pengetahuan umum.

Perkembangannya adalah sbb.: pada tahun 1950 terdapat 4 buah dan tahun 1960 berkembang menjadi 13 buah.^{3 8}

3.2.2.3 Pendidikan tinggi

Untuk melaksanakan pembangunan teresa sekali Indonesia kekurangan tenaga ahli dan tenaga pimpinan. Hal ini tentu akibat dari pendidikan masa penjajahan yang mengadakan diskriminasi pendidikan, sehingga sangat sedikit putra Indonesia yang berpendidikan tinggi.

Kekurangan tenaga ahli dan pimpinan ini sedikit demi sedikit diusahakan mengatasinya dengan menyelenggarakan pendidikan tinggi nasional. Ini berarti perguruan tinggi yang sudah ada sejak masa penjajahan itu segera dinasionalisasikan dan mendirikan universitas-universitas baru.

Pada 30 Januari 1950 dikeluarkan UU Darurat No. 7 tahun 1950, yang mewajibkan Menteri PP dan K mengambil tindakan untuk menasionalisasikan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pengawas kolonial.^{3 9}

1) Universitas Indonesia

Pada tanggal 2 Februari 1950 dilakukan pengambilalihan *Universiteit van Indonesie*. Setelah dinasionalisasikan namanya menjadi Universitas (Universitas) Indonesia dengan Presiden

(Rektor) Ir. Soerachman. Waktu itu Universitas Indonesia terdiri atas: Fakultas Kedokteran, Fakultas Sastra, Fakultas Ekonomi, semuanya berada di Jakarta; Fakultas Pertanian dan Fakultas Kedokteran Hewan berada di Bogor; Fakultas Teknik dan Fakultas Pasti Alam berada di Bandung; Fakultas Ekonomi berada di Makassar. Fakultas Kedokteran dan Lembaga Kedokteran Gigi berada di Surabaya.^{4 0}

2) Universitas Gadjah Mada

Pada tanggal 1 Agustus 1950 dengan PP No. 37 tahun 1950 dikeluarkan Peraturan Sementara tentang penyelenggaraan Universitas Gadjah Mada. Seperti telah diketahui bahwa Universitas Gadjah Mada didirikan tahun 1946 di Yogyakarta dengan 2 Fakultas, yaitu Fakultas Hukum dan Fakultas Kesusasteraan.^{4 1}

3) Universitas Airlangga

Dengan PP No. 57 tahun 1954, pada tahun 1954 didirikan Universitas Airlangga di Surabaya yang terdiri atas 4 fakultas, yaitu: Fakultas Kedokteran dan Lembaga Kedokteran Gigi di Surabaya (eks Universitas Indonesia); Fakultas Hukum dan Sosial Politik di Surabaya (eks Universitas Gadjah Mada); Fakultas Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di Malang; Fakultas Ekonomi di Surabaya.

Catatan: Sejak tahun 1954, karena ada istilah "Universiteit" dan "Universitet", maka oleh Menteri Mr. Moh. Yamin diseragamkan menjadi "Universitas".^{4 2}

4) Universitas Hasanuddin

Pada tahun 1956 didirikan Universitas Hasanuddin di Makassar berdasarkan PP No. 23 tahun 1956.

Fakultas-fakultasnya ada 4 yaitu: Fakultas Ekonomi di Makassar (eks Universitas Indonesia); Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Makassar (eks Universitas Indonesia); Fakultas Kedokteran di Makassar; Fakultas Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di Tondano.^{4 3}

5) Universitas Andalas

Pada tahun 1956 dengan PP No. 24 tahun 1956 tanggal 1 September 1956 didirikan Universitas Andalas di Bukit Tinggi. Universitas Andalas terdiri atas 5 fakultas yaitu: Fakultas Pertanian di Payakumbuh (eks Perguruan Tinggi Pertanian); Fakultas Kedokteran di Bukittinggi; Fakultas Ilmu Pasti Alam di Bukittinggi; Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Padang (eks Perguruan Tinggi Pancasila); Fakultas Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di Batusangkar.⁴⁴

6) Universitas Pajajaran

Universitas Pajajaran didirikan pada tahun 1957 dengan PP No. 37 tahun 1957 tanggal 11 September 1957. Fakultas-fakultasnya ada 4, yaitu: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (eks Universitas Merdeka); Fakultas Ekonomi (eks Universitas Merdeka); Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan; Fakultas Kedokteran.⁴⁵

7) Universitas Sumatra Utara

Berdasarkan PP No. 48 tahun 1957 tanggal 30 Oktober 1957, pada tahun itu didirikan Universitas Sumatra Utara yang terdiri atas 3 fakultas, yaitu: Fakultas Kedokteran, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.⁴⁶

8) Institut Teknologi Bandung

Pada tahun 1958 timbul pemikiran bahwa:

- a) Indonesia alamnya sangat kaya raya, tetapi belum tergarap karena kurangnya tenaga ahli di bidang itu.
- b) Perkembangan ilmu pengetahuan khususnya teknik, Ilmu Pasti, dan Ilmu Alam sangat pesat, maka diperlukan badan yang menjamin kemajuan ilmu-ilmu tersebut.
- c) Untuk itu perlu didirikan perguruan tinggi yang terdiri atas fakultas-fakultas yang sejenis, yaitu institut yang setingkat dengan universitas.

Untuk itu, maka pada tanggal 28 Februari 1959 berdasarkan PP No. 6 tahun 1959 didirikan Institut Teknologi di Bandung,

yang terdiri atas 3 departemen, yaitu: Departemen Ilmu Teknik, Departemen Ilmu Pasti dan Alam, dan Departemen Ilmu Kimia dan Hayat.^{4 7}

9) Organisasi Mahasiswa

Sebelum tahun 1957 telah ada organisasi mahasiswa yang cukup besar, yaitu: Perhimpunan-Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI). Tetapi PPMI ini dianggap belum mewadahi seluruh perguruan tinggi, karena masih ada beberapa universitas yang tidak mau masuk.

Untuk mempersatukan mahasiswa Indonesia ada pemikiran membuat organisasi mahasiswa yang bertaraf nasional sebagai kegiatan mereka; maka pada tahun 1957 dibentuklah Majelis Mahasiswa Indonesia (MMI) yang terdiri atas Himpunan Senat Mahasiswa setiap universitas. Organisasi ini merupakan induk organisasi mahasiswa yang bersifat khusus seperti:

- (a) Badan Keolahragaan Mahasiswa Indonesia (BKMI) yang mengorganisasi kegiatan latihan olah raga mahasiswa dan dalam waktu tertentu menyelenggarakan Pekan Olahraga Mahasiswa (POM).
- (b) Badan Kerja Sama Kesenian Mahasiswa Indonesia (BKSKMI), yang didirikan tahun 1958. Badan ini mengurus kegiatan kesenian mahasiswa tingkat nasional. Pada waktu tertentu menyelenggarakan Pekan Kesenian Mahasiswa (PKM).
- (c) Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI), yang didirikan tahun 1958. Badan ini terdiri atas Ikatan Wartawan Mahasiswa Indonesia dan Serikat Pers Mahasiswa Indonesia. Kegiatannya tentu saja meliputi bidang jurnalistik dan penerbitan.

Kecuali itu, MMI juga ikut berpartisipasi dalam menanggulangi masalah kekurangan guru SLA, terutama di luar Jawa. Pemikiran ini disambut baik oleh pemerintah. Bagi mahasiswa yang bersedia mengajar di SLA di luar Jawa sedikitnya 2 tahun dapat diangkat menjadi pegawai negeri, dan mereka boleh meneruskan kuliah kembali dengan status sebagai mahasiswa tugas belajar. Kegiatan ini dikenal dengan istilah Pengerahan Tenaga Mahasiswa (PTM).^{4 8}

3.2.2.4 Pendidikan Jasmani

Sebelum tahun 1950 pendidikan jasmani belum mendapat tempat yang layak. Waktu itu istilahnya bukan pendidikan jasmani, tetapi gerak badan/olah raga. Sebelum dikeluarkannya UU No. 4 tahun 1950 pendidikan jasmani dianggap remeh. Ia tidak merupakan kesatuan dengan pendidikan intelek/rohani. Akibatnya banyak sekolah yang tidak menyelenggarakan pendidikan jasmani, atau kadang-kadang tercantum pelajaran gerak badan tetapi tidak dilaksanakan, melainkan diganti dengan pelajaran lain yang bersifat intelektual.

Para ahli pendidik akhirnya bersepakat bahwa pendidikan rohani harus selaras dengan pendidikan jasmani. Pemikiran para ahli pendidik ini dituangkan dalam UU No. 4 tahun 1950 (UU No. 12 tahun 1954) Bab VI pasal 9, yang berbunyi:

"Pendidikan jasmani yang menuju keselarasan antara tumbuhnya badan dan perkembangan jiwa merupakan suatu usaha untuk membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sehat dan kuat lahir batin, diberikan pada segala jenis sekolah".

Sejak tahun 1950 inilah pendidikan jasmani sedikit demi sedikit mendapat perhatian. Sekolah-sekolah secara rutin menyelenggarakan pendidikan jasmani dalam jam pelajaran. Pertandingan-pertandingan olah raga antarsekolah, antardaerah, bahkan tingkat nasional (Panca Lomba SLA) sering dilaksanakan.

Untuk meningkatkan mutu olah raga dan menyiapkan guru-guru pendidikan jasmani didirikanlah Sekolah Guru Pendidikan Jasmani (SGPD). Lama pendidikannya 4 tahun sesudah SMP atau SGB. Tamatan sekolah ini pada umumnya menjadi guru pendidikan jasmani di SLTP, bahkan ada yang di SLTA.

Untuk mendapatkan guru-guru olah raga di SR, karena guru SR sifatnya guru kelas, maka murid-murid SGB dan SGA diberi pelajaran pendidikan jasmani secara intensif.

Di samping mulai mendapat tempat yang baik di sekolah, maka kegiatan olah raga di kalangan masyarakat pun makin meningkat pula. Hal ini dilandasi pemikiran adanya kenyataan

bahwa kegiatan olah raga itu dapat menyangkut nama baik bangsa dan negara, lebih-lebih jika mendapatkan prestasi yang tinggi.

Dilandasi pemikiran itu maka kegiatan olah raga di tingkat nasional maupun internasional selalu diusahakan. Dalam tahun 1951–1959 dapat dikemukakan kegiatan-kegiatan olah raga tingkat nasional dan internasional sebagai berikut:

- (a) Pekan Olahraga Nasional (PON)
 - PON II tahun 1952
 - PON III tahun 1954
 - PON IV tahun 1957.
 (PON I dimulai tahun 1948).
- (b) Ikut Asian Games (AG)
 - Asian Games I tahun 1951.
 - Asian Games II tahun 1954.
 - Asian Games III tahun 1958.
- (c) Ikut Olympiade
 - Olympiade XV tahun 1952.
 - Olympiade XVI tahun 1956.
 - Olympiade XVII tahun 1958.⁴⁹

3.2.2.5 Pendidikan agama

Para ahli pendidikan Indonesia berpendapat bahwa pendidikan agama mempunyai peranan penting dalam pendidikan manusia Indonesia seutuhnya. Ilmu pengetahuan hanya membentuk intelektualisme, tidak membentuk akhlak yang luhur. Berdasarkan pemikiran itu maka masalah pendidikan agama tercantum pula dalam UU No. 4 tahun 1950/UU No. 12 tahun 1954, pada pasal 20 yang berbunyi:

”dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran-pelajaran agama; orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut”.

Kemudian dalam pelaksanaannya, pada tahun 1951 Menteri PP dan K (waktu itu Dr. Bahder Djohan) mengeluarkan ”peraturan bersama” Menteri Agama, tertanggal 16 Juli 1951 No. 17678/Kab sebagai berikut:
K/I/9180

Pasal 1

Di tiap-tiap sekolah rendah dan sekolah lanjutan (umum dan vak) diberi pendidikan Agama.

Pasal 2

1. Di sekolah-sekolah rendah pendidikan Agama dimulai pada kelas 4 banyaknya 2 (dua) jam dalam 1 (satu) minggu.
2. Di lingkungan yang istimewa pendidikan Agama dapat dimulai pada kelas 1 dan jamnya dapat ditambah menurut kebutuhan tetapi tidak melebihi 4 jam seminggu dengan ketentuan bahwa mutu pengetahuan umum bagi sekolah-sekolah rendah itu tidak boleh dikurangi dibandingkan dengan sekolah-sekolah rendah di lain-lain lingkungan.

Pasal 3

Di sekolah-sekolah lanjutan tingkat pertama dan tingkat atas baik sekolah-sekolah umum, maupun sekolah-sekolah vak diberi pendidikan Agama 2 (dua) jam dalam tiap-tiap minggu.

Pasal 4

1. Pendidikan Agama diberikan menurut Agama murid masing-masing.
2. Pendidikan Agama baru diberikan pada suatu kelas yang mempunyai murid sekurang-kurangnya sepuluh orang yang menganut suatu macam agama.
3. Murid dalam suatu kelas yang memeluk Agama lain daripada Agama yang sedang diajarkan pada suatu waktu, boleh meninggalkan kelasnya selama jam pelajaran Agama itu.

Pasal 5

1. Guru-guru Agama diangkat, diberhentikan, diberhentikan sementara waktu, dipindahkan, diberi cuti serta dibiayai oleh Kementerian Agama.
2. Begitu pula segala biaya untuk pendidikan Agama itu menjadi tanggungan Kementerian Agama.

Pasal 6

1. Guru-guru Agama tunduk pada aturan-aturan umum yang ditetapkan oleh sesuatu sekolah.
2. Dalam hal itu ia wajib memahami, bahwa kuasa tertinggi di sekolah ada pada Kepala Sekolah.

Pasal 7

Dalam menjalankan kewajibannya sebagai guru, maka guru Agama dilarang mengajarkan segala sesuatu yang mungkin dapat menyinggung perasaan orang yang memeluk Agama atau memegang kepercayaan lain.

Pasal 8

Guru Agama yang diwajibkan mengajar di beberapa buah sekolah rendah sebelum memulai mengajar harus berunding dahulu tentang penetapan waktunya mengajar dengan penilik sekolah yang akan membicarakan hal ini dengan kepala sekolah di man pengajaran agama akan diberikan. Hasil perundingan itu oleh penilik sekolah dilaporkan kepada inspektur PP dan K yang bersangkutan untuk disahkan dan diberitahukan kepada Jawatan Pendidikan Agama.

Pasal 9

Juga untuk sebuah sekolah atau lebih dalam suatu daerah belum ada guru agama yang diangkat oleh Kementerian Agama, maka gubernur yang bersangkutan dapat mengusulkan calon guru agama kepada Kementerian Agama.

Pasal 10

Bahan pelajaran Agama ditetapkan oleh Kementerian Agama sesudah disetujui oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Pasal 11

Petunjuk-petunjuk bagi guru-guru agama tentang cara mengajarkan agama, ditetapkan oleh Kementerian Agama se-

sudah disetujui oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Pasal Penutup

- I. Peraturan-peraturan ini berlaku pula buat sekolah-sekolah partikelir yang mendapat subsidi atau sokongan lain dari pemerintah.
- II. Hal-hal mengenai pendidikan agama yang belum diatur dalam peraturan ini diputuskan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan bersama-sama dengan Menteri Agama.
- III. Peraturan ini mulai berlaku tanggal 1 Februari 1951.
- IV. Peraturan-peraturan dan instruksi-instruksi mengenai masalah ini yang telah ditetapkan sebelum tanggal 1 Februari 1951 akan diperbaharui dan disesuaikan dengan peraturan ini.
- V. Jika perlu untuk menjalankan peraturan-peraturan ini, maka akan dikeluarkan instruksi-instruksi tentang masalah ini oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dan/atau Menteri Agama sesudah antara dua menteri tersebut terdapat kata sepakat.

Demikianlah "Peraturan Bersama" antara Menteri PP dan K dan Menteri Agama yang ditandatangani oleh H. Wahid Hajsjim pada tanggal 20 Januari 1951 dan baru berlaku pada tanggal 1 Februari 1951. Dengan dikeluarkannya "Peraturan Bersama" itu dapatlah diatasi masalah pendidikan agama yang sangat peka sekali.⁵⁰

3.2.2.6 Pendidikan masyarakat

Sejak kemerdekaan hingga tahun 1950, situasi tanah air masih penuh pergolakan terutama untuk mempertahankan kemerdekaan dan memperjuangkan pengakuan kedaulatan.

Kedaulatan itu secara penuh baru diakui oleh penjajah pada tahun 1949; dengan demikian, peperangan kemerdekaan resminya telah berakhir dan sejak tahun 1950 perhatian beralih untuk memikirkan pembangunan.

Pada waktu ini sebagian besar pemuda terlantar pendidikannya karena mereka meninggalkan bangku sekolah untuk membela tanah air. Mereka sekarang telah kembali ke masyarakat dan merupakan tenaga-tenaga yang potensial untuk melaksanakan pembangunan. Mereka harus mendapatkan bimbingan/pendidikan kemasyarakatan.

Hal-hal inilah yang melandasi pemikiran perlu adanya peningkatan pada usaha-usaha pendidikan masyarakat.

Oleh karena itu, pada 1 Agustus 1949 Bagian Pendidikan Masyarakat ditingkatkan menjadi Jawatan Pendidikan Masyarakat.

Struktur Jawatan Pendidikan Masyarakat ini beberapa kali mengalami penyempurnaan, yaitu pada tahun 1951, tahun 1955, dan tahun 1957 (lihat pada uraian struktur).

Usaha-usaha Pendidikan Masyarakat meliputi:

- Pemberantasan Buta Huruf dan Perpustakaan Rakyat.
- Kursus-kursus Pengetahuan Umum dan Pendidikan Tenaga.
- Kepanduan dan Pemuda.^{5 1}

1) Pemberantasan buta huruf dan perpustakaan rakyat

Sebagai alat pendidikan yang mengarahkan tujuannya ke otonomi, maka PBH mendasarkan segala usahanya atas dasar swadaya atau aktivitas masyarakat.

Untuk pelaksanaan PBH telah dibuat rencana 10 tahun (1950—1960), tetapi rencana ini tidak seluruhnya terlaksana karena masalah biaya.

Lengkapnya usaha-usaha PBH itu meliputi tindakan-tindakan:

- (a). Mengajarkan huruf secara massal.
- (b). Melancarkan kecakapan membaca dan menulis.
- (c). Mempelajari pengetahuan sederhana.
- (d). Melatih pengetahuan dengan jalan perundingan (kelompok belajar).
- (e). Menyediakan bacaan-bacaan yang seluas-luasnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, dan juga sesuai dengan tingkat kemampuan mereka.

- (f). Melatih menggunakan semua kecakapan dan pengetahuan dalam bentuk organisasi guna mempertinggi kesejahteraan.

Untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam PBH maka diusahakan perpustakaan rakyat. Buku dicetak dalam berbagai bahasa daerah, misalnya Madura, Jawa, Sumbawa, Bali, Sunda, dan sebagainya. Di samping itu juga dicetak buku-buku konsumsi tamatan PBH itu ke dalam bahasa Indonesia.

Usaha masyarakat dalam hal PBH ini akan besar sekali manfaat dan keberhasilannya jika setiap desa mau mendaftarkan penduduknya yang buta huruf dan melaksanakan PBH sesuai dengan rencana 10 tahun yang telah digariskan oleh pemerintah. Menurut statistik waktu itu terdapat 47% penduduk yang buta huruf.^{5 2}

- 2) Kursus-kursus pengetahuan umum dan pendidikan tenaga

Dalam usaha menghasilkan kader-kader dalam lapangan pembangunan diselenggarakan Kursus Pengetahuan Umum (KPU).

Untuk daerah tingkat kecamatan diselenggarakan kursus KPU-A, yang mendidik pemuda-pemuda lulusan SR dan lama pendidikannya 1 tahun.

Untuk daerah tingkat kabupaten diselenggarakan KPU-B, yang mendidik pemuda-pemuda lulusan SLP dan juga lulusan KPU-A, yang lama pendidikannya 1 tahun.

Untuk daerah propinsi diselenggarakan kursus KPU-C, yang mendidik pemuda-pemuda lulusan SLA dan lulusan KPU-B, yang lama pendidikannya 1 tahun.

Menurut statistik pada tahun 1953 terdapat 1000 KPU-A, 50 KPU-B, dan 5 KPU-C.

Selain penyelenggaraan KPU juga diselenggarakan kursus-kursus keterampilan, kursus kader wanita, dan sebagainya.^{5 3}

- 3) Kepanduan dan pemuda

Untuk mendidik para pemuda di luar bangku sekolah sejak sebelum tahun 1950 sudah diadakan taman pendidikan di

luar sekolah yang disebut kependuan. Untuk membantu tercapainya tujuan kependuan, maka pemerintah memberi bimbingan dan bantuan seperlunya.

Untuk meningkatkan masalah kependuan ini, maka pada tahun 1953 Kependuan Putera Indonesia telah mengadakan hubungan dengan kependuan luar negeri.

Pemuda merupakan bagian penting dalam masyarakat, maka juga harus mendapat perhatian. Untuk itu, diselenggarakan pula kursus-kursus pemuda dan panti pemuda.

Yang menjadi objek dalam masalah pemuda ini ialah pemuda-pemuda sesudah masa puertas. Isi kursus pemuda terutama tentang pengertian dan pelaksanaan pekerjaan kemasyarakatan.^{5 4}

3.2.2.7 Pendidikan luar biasa

Yang dimaksud pendidikan luar biasa adalah pendidikan bagi anak cacat, yaitu tunanetra, bisu-tuli, dan lemah ingatan. Anak-anak ini juga seperti anak-anak lainnya berhak menerima pendidikan agar kelak dapat berdiri sendiri dalam masyarakat, tidak menggantungkan hidupnya pada orang lain.

Tentang pendidikan luar biasa ini telah diatur dalam UU Pendidikan tahun 1950 (1954) Bab V pasal 6 dan 7.

Pasal 6 : Pendidikan dan pengajaran luar biasa diberikan khusus untuk mereka yang membutuhkannya.

Pasal 7 : Pendidikan dan pengajaran luar biasa bermaksud memberi pendidikan dan pengajaran kepada orang-orang yang dalam keadaan kekurangan, baik jasmani maupun rohaninya, supaya mereka dapat memiliki kehidupan lahir batin yang layak.

Waktu itu ada 3 bagian Sekolah Luar Biasa (SLB), yaitu:
 SLB-A, untuk anak tunanetra.
 SUB-B, untuk anak bisu-tuli.
 SLB-C, untuk anak lemah pikiran.

Guru SLB dididik selama 2 tahun setelah SGB.

Untuk peningkatan penyelenggaraan SLB, pada tahun 1955 di Kantor Pusat Jawatan Pengajaran dibuka suatu bagian yang khusus mengurus SLB, disebut Urusan Pendidikan Luar Biasa. Seluruh SLB diurus langsung dari pusat oleh Urusan Pendidikan Luar Biasa ini.

Untuk peningkatan mutu pendidikan SLB, pada tahun 1959 kurikulum dan waktu pendidikan calon guru SLB ditingkatkan. Jika semula lama pendidikan guru SLB hanya 2 tahun sesudah SGB, sejak tahun 1959 ditingkatkan menjadi 20 bulan setelah SGA. Tamatan sekolah guru SLB gaya baru ini setingkat PGSLP. Kecuali itu, juga dilaksanakan pendidikan guru SLB ke luar negeri.^{5 5}

3.2.3 Pemikiran dan Usaha-usaha Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan

Indonesia penduduknya terdiri atas bermacam-macam suku yang berbeda-beda kebudayaannya. Agar supaya rakyat Indonesia dapat bersatu dengan kokoh, maka harus ada suatu kebudayaan yang bersifat nasional.

Tentang konsepsi kebudayaan nasional telah digariskan dalam UUD 1945 pasal 32 :

"Pemerintah memajukan kebudayaan bangsa". Dalam penjelasan pasal 32 disebutkan:

"Kebudayaan bangsa adalah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia".^{5 6}

Sayang sekali dalam hal pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional ini dari tahun 1945 – 1950 belum ada usaha yang berarti karena bangsa Indonesia masih berjuang menegakkan kemerdekaan.

Baru setelah pengakuan kedaulatan oleh pihak penjajah pada tahun 1950, maka pemerintah mulai melakukan usaha-usaha yang konkret dalam bidang pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional.

Akan tetapi, pada saat itu UUD yang dipakai bukan lagi UUD 1945 lagi. Yang berlaku saat itu adalah UUD Sementara tahun 1950, menggantikan UUD-RIS. Dalam UUDS 1950 tersebut konsepsi kebudayaan mengalami perubahan, tidak sama lagi dengan UUD 1945. Pada pasal 40 UUDS 1950 ditetapkan:

”Penguasa melindungi *kebebasan* mengusahakan kebudayaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan. Dengan menjunjung asas ini, maka penguasa memajukan sekuat tenaga perkembangan kebangsaan dalam kebudayaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan”.

Dengan adanya ketentuan dalam UUDS 1950 ini, maka masyarakat banyak sekali yang mengusahakan kebudayaan dengan mengimpor kebudayaan luar yang belum tentu sesuai dengan situasi Indonesia. Akibatnya timbullah gejala-gejala kemerosotan kebudayaan nasional. Rongrongan terhadap kepribadian dan kebudayaan Indonesia tampak jelas. Di mana-mana orang bersikap kebarat-baratan dan mulai meninggalkan kepribadian Indonesia. Lebih tampak jelas lagi dalam bidang tari, musik, film, bacaan, cara berpakaian, dan pergaulan.^{5 7}

Dalam buku *Dua Puluh Tahun Indonesia Merdeka* Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dikatakan bahwa periode 1951–1959 adalah periode yang penuh dengan paham liberal.

Di bidang kebudayaan liberalisme membawa kemerosotan. Nampak sikap orang kebarat-baratan, baik dalam cara berpakaian, penggunaan bahasa, pemilihan bacaan, maupun tontonan yang digemari. Dansa dihidupkan, musik ngak-ngik-ngok banyak diperdengarkan, para remaja suka berpakaian mini, suka bacaan cabul atau bermoral rendah. Pada umumnya mereka meremehkan yang serba asli Indonesia dan menjunjung tinggi yang serba luar negeri.^{5 8}

Dalam situasi seperti itu pemerintah tidak dapat membendungsanya karena usaha masyarakat tersebut dilindungi undang-undang.

Usaha-usaha pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional ternyata masih mengikuti konsepsi kebudayaan yang tercantum dalam UUD 1945. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Menteri PP dan K Mr. Moh. Yamin pada tahun 1954. Dikatakan bahwa kebudayaan nasional itu ibarat karangan bunga yang indah yang terdiri atas bermacam-macam bunga yang tersebar di seluruh daerah.

Kebudayaan Indonesia merupakan kumpulan segala kebudayaan daerah, yang harus digalang menjadi satu, sehingga merupakan suatu kesatuan untuk seluruh rakyat. Kesatuan alam, sejarah, zaman, dan masyarakat adalah faktor-faktor yang menentukan bagi terwujudnya kesatuan kebudayaan Indonesia. Puncak-puncak kebudayaan daerah adalah bahan-bahan untuk membangun kebudayaan nasional.

Untuk lebih memantapkan konsepsi tersebut di atas, maka pada tahun 1954 diselenggarakan Kongres Kebudayaan di Solo dan Kongres Bahasa Indonesia di Medan. Hasil-hasil kongres tersebut dipakai sebagai pertimbangan kebijakan pemerintah.

Kebijakan dan usaha-usaha pemerintah di bidang pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional meliputi: bidang kesenian, bidang bahasa Indonesia dan daerah, bidang purbakala, bidang museum, dan hubungan luar negeri.^{5 9}

3.2.3.1 Bidang kesenian

Di bidang kesenian dilaksanakan peningkatan kesenian daerah agar dapat diangkat menjadi kesenian nasional. Untuk kemudian ditingkatkan lagi menjadi salah satu kesenian internasional. Hal ini sudah terlihat hasilnya, misalnya Tari Srimpi, Tari Piring, Tari Regong, Tari Seudati.^{6 0}

Untuk memajukan seni musik, pada tahun 1952 didirikan Sekolah Musik Indonesia di Yogyakarta dengan jurusan-jurusan: piano, vokal, gesek, tiup, dan perkusi.

Untuk memelihara dan memajukan seni kerawitan, sejak tahun 1950 didirikan Konservatori Kerawitan Indonesia di Surakarta. Tahun 1958 dibuka pula Jurusan Karawitan Sunda di Bandung, dan tahun 1960 Jurusan Karawitan Bali di Denpasar.

Untuk memajukan seni rupa, pada tahun 1953 didirikan Akademi Seni Rupa Indonesia di Yogyakarta.

Selain didirikan sekolah-sekolah kesenian, tidak kalah pentingnya penyelenggaraan pameran. Pameran diselenggarakan pada tahun 1950 di Semarang, 1951 di Yogyakarta, dan 1952 di Bukittinggi. Kemudian berturut-turut diadakan pameran di Medan, Banjarmasin, dan Denpasar.^{6 1}

3.2.3.2 Bidang bahasa Indonesia dan daerah

Untuk membina dan mengembangkan bahasa Indonesia dan daerah, didirikan Lembaga Bahasa dan Budaya. Lembaga ini bertugas meneliti bahasa Indonesia dan bahasa daerah, menyusun kamus, menetapkan istilah-istilah baru yang berasal dari bahasa daerah maupun bahasa asing, menterjemahkan buku-buku kesusastraan daerah yang bermutu tinggi.

Untuk menyebarluaskan hasil penelitian, selain disebarluaskan lewat buku-buku yang diterbitkan oleh lembaga tersebut, juga diterbitkan *Majalah Bahasa dan Budaya*.^{6 2}

Kemudian pada tahun 1953 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia di Medan sebagai usaha menyempurnakan bahasa nasional yang harus dapat memenuhi segala segi keperluan hidup dan sebagai bahasa persatuan.^{6 3}

3.2.3.3 Bidang kepurbakalaan

Di Indonesia banyak terdapat peninggalan sejarah dan purbakala. Benda-benda itu perlu dirawat dan diteliti agar dapat mengungkap sejarah kebesaran nenek moyang kita masa lalu. Untuk ini, sejak tahun 1950 Kantor-kantor Pusat Purbakala yang tersebar di Jakarta, Prambanan, dan Bali dipersatukan dan ditingkatkan menjadi Dinas Purbakala, langsung di bawah Jawatan Kebudayaan.

Usaha-usaha yang telah dilakukan antara lain: pemugaran Candi Prambanan (1953), penggalian fosil binatang di Pacitan (1954), penggalian kubur batu purba di Bali (1954), penelitian peninggalan purbakala di Palembang (1954), penelitian peninggalan purbakala di Kediri (1955).^{6 4}

3.2.3.4 Bidang permuseuman

Sejak tahun 1955 pemerintah telah ada pemikiran tentang perluasan museum yang bersifat nasional di samping museum-museum daerah. Karena disadari bahwa museum bukan hanya sebagai tempat menyimpan barang-barang kuno saja, tetapi juga mempunyai nilai sejarah, maka museum diharapkan bermanfaat bagi pendidikan bangsa.

Usaha-usaha yang telah dilakukan antara lain: pada tahun 1955 telah didatangkan ahli permuseuman melalui bantuan Unesco, yaitu John Irwan dari London, untuk memberikan nasihat tentang permuseuman di Indonesia.

Sebelum kedatangan John Irwan, Indonesia juga telah mengirim Drs. Moh. Amir Sutaarga untuk melihat museum-museum di Belgia, Denmark, Jerman, Inggris, Nederland, Prancis, Swedia, dan Swiss.

Atas saran-saran kedua ahli permuseuman dari luar dan dalam negeri itu, museum-museum di Indonesia mengalami peningkatan, baik dari segi jumlahnya maupun kelengkapan koleksinya. Juga diadakan pendidikan bagi petugas-petugas museum.

Kemudian pada tahun 1957 pada Jawatan Kebudayaan dibentuk Urusan Museum yang bertugas khusus mengurus permuseuman.^{6 5}

3.2.3.5 Hubungan kebudayaan dengan luar negeri

Indonesia sejak tahun 1951 juga telah mengadakan hubungan kebudayaan dengan luar negeri. Tujuannya ialah untuk memperkenalkan kebudayaan Indonesia dan berarti juga memperkenalkan negara Indonesia.

Pada tahun itu telah dikirim misi kesenian ke Srilanka, tahun 1952 ke Amerika Serikat dan Eropa, tahun 1954 ke RRC, tahun 1955 ke Pakistan.

Tahun 1953 telah dikirim misi kebudayaan yang berintikan pameran seni rupa ke Brasilia, London, dan Muangthai.

Dalam rangka peningkatan hubungan luar negeri di bidang kebudayaan ini, di negara-negara tertentu direncanakan/sudah ditempatkan Atase Kebudayaan. Dengan adanya Atase Kebudayaan ini diharapkan tukar-menukar dosen, mahasiswa, dan pelajar dengan luar negeri menjadi lebih lancar.^{6 6}

3.3 Personalia dan Struktur Organisasi

3.3.1 Personalia Menteri

Para menteri pendidikan pengajaran dan kebudayaan selama periode Demokrasi Liberal ini adalah:

- 1) Dr. Abu Hanifah (Kabinet RIS, 2 Desember 1949 s.d. 6 September 1950).
- 2) Dr. Bahder Djohan (Kaabinet Natsir, 6 September 1950 s.d. 27 April 1951).
- 3) Mr. Wongsonegoro (Kabinet Sukiman, 27 April 1951 s.d. 3 April 1952).
- 4) Dr. Bahder Djohan (Kabinet Wilopo, 3 April 1952 s.d. 30 Juli 1953).
- 5) Mr. Moh. Yamin (Kabinet Ali I, 30 Juli 1953 s.d. 12 Agustus 1955).
- 6) Prof. Ir. R.M. Suwandi (Kabinet Burhanuddin, 12 Agustus 1955 s.d. 24 Maret 1956).
- 7) Ki Sarino Mangunpranoto (Kabinet Ali II, 24 Maret 1956 s.d. 9 April 1957).
- 8) Prof. Dr. Priyono (Kabinet Djuanda/Kabinet Karya, 9 April 1957 s.d. 10 Juli 1959).

3.3.2 Struktur Organisasi

Sejak Proklamasi Kemerdekaan sampai dengan tahun 1951 susunan organisasi dan pembagian tugas dalam Kementerian PP dan K sudah dua kali diadakan. Pertama, sesudah terbentuk-

nya Pemerintahan RI yang pertama. Kedua, sesudah terbentuknya Pemerintahan RIS. Pada waktu itu yang menjadi Menteri PP dan K sudah harus disesuaikan pula berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 1950 (Konstitusi Sementara RI).

Sesudah melalui berbagai pembicaraan dan pemikiran, akhirnya barulah pada bulan Februari 1951 dikeluarkan Putusan Menteri PP dan K yang menetapkan peraturan sementara tentang tempat kedudukan, lapangan pekerjaan, susunan, pembagian pekerjaan dan pembatasan tugas jawatan-jawatan dan bahagian-bahagian Kementerian PP dan K sebagai berikut:

Pasal 1

Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

Lapangan pekerjaan yang termasuk lingkungan pekerjaan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ialah:

- a. Menentukan corak, macam serta isi pendidikan dan pengajaran kepada warganegara, baik di dalam maupun di luar sekolah, kecuali hal-hal yang mengenai agama dan hal-hal yang diserahkan kepada Kementerian atau instansi-instansi Negara lain.
- b. Menyelenggarakan, memimpin, menyokong serta mengamati-amati semua macam pendidikan dan pengajaran tersebut dalam a.
- c. Mengamat-amati pendidikan dan pengajaran bangsa asing.
- d. Menyelidiki menurut syarat-syarat ilmu pengetahuan soal-soal pendidikan dan pengajaran.
- e. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi mengenai pendidikan dan pengajaran.
- f. Mengikuti serta membantu perkembangan gerakan pemuda.
- g. Menyelenggarakan bermacam-macam perpustakaan guna pendidikan dan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan negara.
- h. Menyelidiki, memelihara dan membantu perkembangan segala bentuk kebudayaan di Indonesia.

- i. Memelihara dan melindungi "bangunan" alam dan bangunan-bangunan kuno sebagai monumen nasional.
- j. Menyelenggarakan perlengkapan dalam arti yang luas untuk keperluan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan.
- k. Menyelenggarakan perhubungan internasional dalam lingkungan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan.
- l. Mengusahakan pengawasan film.
- m. Memperhatikan dan menyalurkan semua usaha di lapangan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan ke arah penyediaan dengan kepentingan negara.

Pasal 3 Susunan Kementerian

Kementerian terdiri atas:

- a. Kabinet.
- b. Kantor Pusat Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.
- c. Jawatan Pengajaran.
- d. Jawatan Pendidikan Masyarakat.
- e. Jawatan Kebudayaan.
- f. Jawatan Perlengkapan dan Bangunan.
- g. Balai Penyelidikan Pendidikan dan Pengajaran.
- h. Biro Perguruan Tinggi.
- i. Biro Unesco dan Urusan Luar Negeri.
- j. Biro Perpustakaan.

Pasal 4

Kabinet terdiri atas:

- a. Sekretariat.
- b. Bagian Perundang-undangan.
- c. Bagian Penerangan.
- d. Bagian Urusan Demobilisasi Pelajar.
- e. Bagian Statistik.
- f. Bagian Dokumentasi.

Pasal 5

Kantor Pusat Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan terdiri atas:

- a. **Bagian Umum.**
- b. **Bagian Urusan Pegawai.**
- c. **Bagian Perbendaharaan.**
- d. **Bagian Anggaran Belanja.**

Pasal 6

Jawatan Pengajaran terdiri atas:

- a. **Sekretariat.**
- b. **Bagian Penyelenggaraan Sekolah-sekolah dan Kursus-kursus.**
- c. **Inspeksi Pendidikan Taman Kanak-kanak.**
- d. **Inspeksi Pusat SD.**
- e. **Inspeksi Pusat SMP.**
- f. **Inspeksi Pusat SMA.**
- g. **Inspeksi Pusat Pengajaran Teknik.**
- h. **Inspeksi Pusat Pendidikan Guru.**
- i. **Inspeksi Pusat Pengajaran Ekonomi.**
- j. **Inspeksi Pendidikan Wanita.**
- k. **Inspeksi Pusat Pendidikan Jasmani.**
- l. **Bagian Naskah/Majalah.**
- m. **Bagian Kursus-kursus.**
- n. **Urusan Pengajaran Bangsa Asing.**
- o. **Pengajaran Konkordan.**

Pasal 7

Jawatan Pendidikan Masyarakat terdiri atas:

- a. **Sekretariat.**
- b. **Bagian Pemberantasan Buta Huruf.**
- c. **Bagian Kursus Pengetahuan Umum.**
- d. **Bagian Kepanduan.**
- e. **Bagian Pendidikan Jasmani.**
- f. **Bagian Kewanitaan.**
- g. **Bagian Perpustakaan Rakyat.**
- h. **Bagian Pemuda.**
- i. **Bagian Pendidikan Tenaga.**

Pasal 8

Jawatan Kebudayaan terdiri atas:

- a. Sekretariat.
- b. Bagian Kesenian.
- c. Bagian Dokumentasi Sejarah.
- d. Balai Bahasa.
- e. Dinas Purbakala.

Pasal 9

Jawatan Perlengkapan dan Bangunan terdiri atas:

- a. Bagian Pembelian.
- b. Bagian Persediaan.
- c. Bagian Bangunan.
- d. Bagian Penerbitan/Percetakan.
- e. Bagian Umum.

Pasal 10

Tiap-tiap bagian dapat dibagi lebih lanjut menurut keperluan.

PIMPINAN

Pasal 11
MENTERI

Menteri menentukan garis-garis besar politik Kementerian dan bertanggung jawab terhadap Dewan Perwakilan Rakyat dan Kabinet.

Pasal 12

SEKRETARIS JENDERAL

Sekretaris Jenderal memimpin Kabinet, Kantor Pusat Kementerian dan melakukan koordinasi semua jawatan dan bagian Kementerian.

Sekretaris Jenderal mewakili menteri jika beliau berhalangan, kecuali jika Dewan Menteri menunjuk menteri lain. Untuk mewakili dalam hal-hal yang khusus, menteri menunjuk pegawai lain.

Pasal 13

Sekretaris Kementerian pada umumnya membantu Sekretaris Jenderal dan terutama dalam melakukan pimpinan Sekre-

taris, Kantor Demobilisasi Pelajar dan Kantor Pusat Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, kecuali jika Menteri atau Sekretaris Jenderal menunjuk pegawai lain.

Pasal 14
PIMPINAN LAINNYA

- a. Kepala Jawatan-jawatan dan Organisasi-organisasi (Balai, Biro) memimpin bahagiannya masing-masing dan langsung bertanggung jawab terhadap Menteri dan Sekretaris Jenderal sebagai wakil Menteri.
- b. Kepala Bagian lainnya mempunyai inisiatif sendiri dalam lingkungannya masing-masing dan bertanggung jawab kepada pemimpin yang langsung di atasnya, ialah Kepala Jawatan dan Kepala Organisasi-organisasi.

Pasal 15
TUGAS

Kabinet:

- a. Menyiapkan rencana Undang-undang dan peraturan-peraturan lain.
- b. Menyiapkan segala urusan mengenai DPR, Dewan Menteri dan sebagainya.
- c. Menyelenggarakan penerangan.
- d. Mengusahakan pengawasan film (*filmcensuur*).
- e. Mengurus tata usaha berhubung dengan pengembalian pelajar pejuang ke sekolah dan pemberian sokongan kepada mereka.
- f. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.

Kantor Pusat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas:

- a. Bagian Umum:
 1. Mengerjakan surat-menyurat, mengurus penerimaan, pengiriman dan penyimpanan surat-surat.
 2. Mengurus kesejahteraan pegawai.
 3. Mengurus perlengkapan Kementerian.

4. Mengurus kendaraan bagian-bagian dan Jawatan-jawatan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.
 5. Mengurus perumahan Kantor Pusat dan pegawai-pegawai.
- b. **Bagian Urusan Pegawai:**
Menyelenggarakan urusan kepegawaian seluruh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, kecuali yang telah diserahkan kepada instansi lain, dan pemberian tugas belajar (*studieopdracht*).
- c. **Bagian Perbendaharaan:**
1. Memeriksa pengeluaran dan penerimaan.
 2. Mengurus kas seluruh Kementerian kecuali yang diserahkan kepada instansi lain.
- d. **Bagian Anggaran Belanja:**
1. Membuat anggaran Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.
 2. Menyelenggarakan otorisasi.
 3. Menyelenggarakan urusan *deviezen* yang tidak termasuk urusan Jawatan Perlengkapan.

Pasal 16

Jawatan Pengajaran mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, menyelenggarakan, memimpin dan/atau mengawasi pendidikan dan pengajaran tiap jenis sekolah, kecuali Perguruan Tinggi dan tidak termasuk lingkungan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.
- b. Menyelenggarakan kursus-kursus guna pendidikan guru dan lain-lain.
- c. Mengurus ujian dan ijazah.
- d. Mengawasi sekolah-sekolah partikelir, termasuk sekolah-sekolah partikelir bangsa asing.
- e. Mengurus pemberian subsidi atau tunjangan kepada sekolah-sekolah partikelir, kecuali sekolah-sekolah rendah dan sekolah tinggi.
- f. Mengurus pemberian sokongan kepada murid (ikatan dinas, tunjangan belajar) kecuali mahasiswa.

- g. Membuat peraturan-peraturan guna melaksanakan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan atau instansi yang lebih tinggi.
- h. Menyelenggarakan dokumentasi sekolah-sekolah.
- i. Mengusahakan buku-buku pelajaran dan majalah-majalah guna keperluan sekolah-sekolah.
- j. Mengawasi pemakaian kitab-kitab sekolah dan alat-alat pelajaran lain.
- k. Mengawasi kesehatan murid-murid dan asrama-asramanya.
- l. Memimpin, membantu dan mengawasi segala usaha yang ditujukan kepada kewajiban belajar.
- m. Menyelenggarakan perpustakaan sekolah.

Pasal 17

Jawatan Pendidikan Masyarakat (Pendidikan dan Pengajaran di luar sekolah) mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, memimpin, menggiatkan dan mengawasi pemberantasan buta huruf.
- b. Merencanakan, memimpin, menggiatkan dan mengawasi Kursus Pengetahuan Umum (KPU).
- c. Mengusahakan buku-buku untuk dan mengawasi Perpustakaan Rakyat.
- d. Mengikuti dan membantu perkembangan gerakan pemuda.
- e. Mengusahakan buku-buku pimpinan dan pelajaran untuk pemberantasan buta huruf, serta buku-buku dan majalah-majalah untuk memelihara dan memperdalam kecakapan membaca dan menulis.
- f. Memimpin dan mengawasi pendidikan jasmani di luar sekolah.
- g. Menyelenggarakan kursus-kursus kader untuk pendidikan masyarakat.
- h. Memajukan dan membantu gerakan kepanduan.
- i. Membantu inisiatif masyarakat untuk kemajuan kaum wanita.

Pasal 18

Jawatan Kebudayaan mempunyai tugas:

- a. Mempelajari, memimpin dan mengembangkan macam-macam kesenian asli atau asing yang hidup dalam masyarakat Indonesia.
- b. Mendidik guru untuk mengajar dan mengembangkan kesenian, baik di sekolah maupun di luar sekolah dan menyelenggarakan buku-buku pelajaran kesenian dan kebudayaan bagi guru-guru dan murid-murid.
- c. Memelihara dan menyempurnakan tumbuhnya bahasa dan kesusastraan Indonesia termasuk bahasa dan kesusastraan daerah.
- d. Memelihara dan menyelidiki bahan-bahan purbakala yang berguna buat sejarah dan kebudayaan Indonesia.
- e. Menyenggarakan dokumentasi sejarah (termasuk Arsip Negara).
- f. Menyenggarakan pengawasan dan perlindungan atas bangunan-bangunan alam dan bangunan-bangunan kuno sebagai monumen nasional.
- g. Menyelidiki dan membangun kembali candi-candi dan bangunan-bangunan purbakala lain yang sudah rusak dan memperluas penyelidikan dengan penggalian tanah.
- h. Menyelidiki, mengumpulkan dan memelihara segala peninggalan yang mengandung arti sejarah.

Pasal 19

Jawatan Perlengkapan dan Bangunan mempunyai tugas:

- a. Mengurus pembelian, penyimpanan dan pembagian buku-buku dan alat-alat pendidikan, pelajaran dan kebudayaan yang lain dengan usaha-usaha di dalam maupun di luar negeri.
- b. Mengurus pembelian, penyimpanan dan pembagian alat-alat kebutuhan kantor Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.
- c. Mengurus semua gedung-gedung di dalam lingkungan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan serta perlengkapannya.
- d. Menyenggarakan pencetakan dan penerbitan naskah kitab pelajaran, buku-buku pimpinan dan alat-alat guna ke-

- perluan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.
- e. Mengurus pembelian kendaraan dan alat-alat pengangkutan dalam lingkungan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.
 - f. Mengatur dan mengawasi pemakaian dan pemeliharaan serta menyelenggarakan inventarisasi seluruh kekayaan materil, termasuk bangunan dan lapangan di lingkungan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Pasal 20

Balai Penyelidikan dan Pengajaran mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan baik sendiri, maupun bersama-sama dengan instansi lain penyelidikan dan percobaan mengenai masalah-masalah pendidikan dan pengajaran atas dasar ilmu pengetahuan.
- b. Membantu usaha pihak lain mengenai masalah-masalah yang dimaksud.
- c. Memajukan laporan dan usul mengenai masalah yang dimaksud di atas kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Pasal 21

Biro Perguruan Tinggi mempunyai tugas:

- a. Mengurus keperluan Perguruan Tinggi yang harus diselesaikan oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, kecuali urusan kepegawaian.
- b. Mengurus ikatan dinas, tunjangan belajar kepada mahasiswa.
- c. Mengurus keperluan asrama-asrama mahasiswa yang harus diselesaikan oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Pasal 22

Biro Unesco dan Urusan Luar Negeri mempunyai tugas:
 Mengurus hal-hal yang timbul dari keanggotaan RI pada UNO dan hal-hal mengenai hubungan dengan luar negeri, ter-

masuk pengiriman mahasiswa dan pegawai-pegawai Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ke luar negeri.

Pasal 23

Biro Perpustakaan mempunyai tugas: mengurus penyelenggaraan:

- a. Perpustakaan guna kepentingan pemerintah negara (Perpustakaan Negara).
- b. Perpustakaan pengumpulan semua buah penerbitan dalam seluruh daerah Negara (*Depot-bibliothek*).
- c. Perpustakaan yang bersifat ilmu pengetahuan.

SUSUNAN KE BAWAH

Pasal 24

A. Jawatan Pengajaran:

- 1) Jawatan Pengajaran mengadakan Kantor Pusat Inspeksi Pengajaran daerah yang meliputi:
 1. Inspeksi SD Daerah.
 2. Inspeksi SMP Daerah.
 3. Inspeksi Pengajaran Teknik Daerah (Kecuali STM).
 4. Inspeksi Pendidikan Guru Daerah (Kecuali SGA).
 5. Inspeksi Pendidikan Wanita Daerah.
 6. Inspeksi Pendidikan Jasmani Daerah.
 7. Inspeksi Pendidikan Ekonomi Daerah.
- 2) Di daerah Keresidenan (lama) diadakan kantor Inspeksi Pengajaran Teknik dan untuk sementara Pendidikan Jasmani.
- 3) Di tiap-tiap Kabupaten diadakan Kantor Inspeksi Sekolah Rakyat dan Pendidikan Jasmani.

B. Jawatan Pendidikan Masyarakat:

- 1) Jawatan Pendidikan Masyarakat mengadakan Kantor Inspeksi Daerah menurut keperluan.
- 2) Di tiap kabupaten diadakan Kantor Inspeksi Pendidikan Masyarakat.

- C. Jawatan Kebudayaan:
Jawatan Kebudayaan dapat mengadakan perwakilan Kantor Cabang di daerah menurut keperluan.
- D. Jawatan Perlengkapan dan Bangunan:
Jawatan Perlengkapan dan Bangunan mengadakan Kantor Cabang di daerah menurut keperluan.

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku terhitung dari tanggal 1 Oktober 1950.

Demikianlah bunyi peraturan sementara tentang struktur organisasi Kementerian PP dan K untuk pertama kali setelah kembali di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.^{6 7}

Susunan organisasi sebagai tercantum di atas mengalami beberapa perubahan, ketika ternyata tidak sesuai lagi dengan keadaan dan tuntutan jaman.

- 1). Pada tahun 1954 Jawatan Perlengkapan dan Bangunan dihapuskan dan sebagai gantinya dibentuk Bagian Alat-alat. Di samping itu dibentuk instansi-instansi baru yaitu: Bagian Perpustakaan, Bagian Bangunan, Balai Persiapan Belajar dan Urusan Pengajaran Luar Biasa.
- 2). Pada tahun 1956 diadakan penyederhanaan dalam susunan Kantor Pusat Kementerian seperti berikut:
 - a). Kabinet dan susunannya dihapuskan.
 - b). Bagian Perundang-undangan Kabinet dijadikan Biro Perundang-undangan.
 - c). Bagian Penerangan, Statistik, dan Dokumentasi Kabinet digabung menjadi Bagian Penerangan yang menjadi Bagian Kantor Pusat Kementerian, dan kemudian bersama Bagian Urusan Penerangan.
 - d). Nama Bagian Umum diganti dengan Bagian Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga.
 - e). Nama Bagian Alat-alat diganti dengan Bagian Urusan Perbekalan.
 - f). Dengan mengubah nama Bagian-bagian, maka Kantor Pusat Kementerian PP dan K terdiri atas:

- (1) Sekretariat dengan Kode Surat-menyurat S
 - (2) Bagian Urusan Keuangan dengan Kode Surat-menyurat A
 - (3) Bagian Urusan Subsidi dengan Kode Surat-menyurat B
 - (4) Bagian Urusan Pegawai dengan Kode Surat-menyurat C
 - (5) Bagian Urusan Bangunan dengan Kode Surat-menyurat D
 - (6) Bagian Urusan Perbekalan dengan Kode Surat-menyurat E
 - (7) Bagian Urusan Penerangan dengan Kode Surat-menyurat F
 - (8) Bagian Urusan Tata Usaha dengan Kode Surat-menyurat G dan Rumah Tangga.
- g). Bagian Perpustakaan Perguruan diubah namanya menjadi Dinas Penerbitan Balai Pustaka (SK No. 11619/S tanggal 23 Januari 1956).
- 3). Perubahan-perubahan penting pada tahun 1957 ialah:
- (a). Pembentukan Kantor Perwakilan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan di tiap ibu kota Propinsi dan Daerah setingkat Propinsi mulai 1 Januari 1957 (SK No. 21577/S tanggal 23 Februari 1957).
 - (b). Pemecahan Jawatan Pengajaran menjadi Jawatan Pendidikan Umum dan Jawatan Pendidikan Kejuruan mulai 15 Maret 1957 (SK No. 27788/S tanggal 13 Maret 1957).

Jawatan Pendidikan Umum meliputi: Pendidikan Kanak-kanak, Pendidikan Rendah, Pendidikan Menengah Umum Tingkat Pertama, Pendidikan Menengah Atas dan Pendidikan Guru untuk tiap jenis pendidikan tersebut.

Jawatan Pendidikan Kejuruan meliputi: Pendidikan Teknik, Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Kejuruan, Pendidikan Kewanitaan, Pendidikan Kejuruan Lain dan Pendidikan Guru untuk tiap jenis pendidikan tersebut.

- 4). Perubahan-perubahan pada tahun 1959:
 - (a). Pembentukan Lembaga Bahasa Sejarah dan Antropologi.
 - (b). Pembentukan Lembaga Bahasa dan Kesusastraan.
 - (c). Pembentukan Dinas Purbakala dan Peninggalan Nasional.
 - (d). Pembentukan Biro Pemuda.
 - (e). Pembentukan Arsip Nasional.
 - (f). Penggantian nama Kementerian dengan Departemen mulai 1 September 1959, sesuai dengan Undang-undang Dasar RI 1945.
- 5). Perubahan pada tahun 1958/1959 :
Inspeksi Pusat Pendidikan Jasmani menjadi Jawatan Pendidikan Jasmani.^{6 8}

CATATAN BAB III

1. Sejarah Nasional IV, hal. 73 – 100.
2. Almanak Pers, Tahun 1976.
3. Seperempat Abad PP dan K, hal. 208 – 210.
4. Bahder Djohan, hal. 185.
5. Dr. Abu Hanifah, hal. 35.
6. Dua Puluh Tahun Kemerdekaan RI, Bidang Pendidikan, hal. 52 – 56.
7. Seperempat Abad PP dan K, hal. 27 – 39.
8. Usaha-usaha Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan/
Moh. Yamin, hal. 7.
9. Ki Hadjar Dewantoro, hal. 167 – 180.
10. Bahder Djohan, hal. 118.
11. Usaha-usaha Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan/
Moh. Yamin, hal. 8.
12. *Ibid.*, hal. 10 – 12.
13. Seperempat Abad PP dan K, hal. 233.
14. Usaha-usaha PP dan K/Moh. Yamin, hal. 13 – 14.
15. Bahder Djohan, hal. 185.
16. Pembaharuan Kurikulum SD/Anwar Yasin, hal. 139.
17. Usaha-usaha PP dan K/Moh. Yamin, hal. 27 – 27.
18. Seperempat Abad PP dan K, hal. 235.
19. *Ibid.*, hal. 237.
20. *Ibid.*, hal. 241.
21. Usaha-usaha PP dan K/Moh. Yamin, hal. 17.

22. Seperempat Abad Departemen PP dan K, hal. 244.
23. *Ibid.*, hal. 245.
24. *Ibid.*, hal. 247.
25. *Ibid.*, hal. 249.
26. *Ibid.*, hal. 250.
27. *Ibid.*, hal. 251.
28. *Ibid.*, hal. 253.
29. *Ibid.*, hal. 254.
30. *Ibid.*, hal. 256.
31. *Ibid.*, hal. 257.
32. *Ibid.*, hal. 258.
33. *Ibid.*, hal. 259.
34. *Ibid.*, hal. 260.
35. *Ibid.*, hal. 260.
36. *Ibid.*, hal. 261.
37. *Ibid.*, hal. 262.
38. *Ibid.*, hal. 263.
39. Sejarah Nasional VI, hal. 276.
40. *Ibid.*, hal. 277.
41. Seperempat Abad Departemen PP dan K, hal. 269.
42. *Ibid.*
43. *Ibid.*, hal. 270.
44. *Ibid.*
45. *Ibid.*, hal. 271.
46. *Ibid.*
47. *Ibid.*, hal. 272.
48. *Ibid.*, hal. 274 – 275.
49. *Ibid.*, hal. 298.
50. Bahder Djohan, hal. 118 – 120.
51. Usaha-usaha Departemen PP dan K/Moh. Yamin, hal. 21.
52. *Ibid.*, hal. 22.
53. *Ibid.*, hal. 23.
54. *Ibid.*, hal. 23.
55. Seperempat Abad Departemen PP dan K, hal. 280.
56. UUD 1945, pasal 32 dan penjelasannya.
57. Seperempat Abad Dep PP dan K, hal. 287.
58. Dua Puluh Tahun Dep PP dan K, hal. 47 dan 56.
59. Usaha-usaha Dep PP dan K/Moh. Yamin, hal. 24.

60. *Ibid.*, hal. 25.
61. Seperempat Abad Dep. PP dan K, hal. 290.
62. *Ibid.*, hal. 292.
63. Usaha-usaha Dep. PP dan K/Moh. Yamin, hal. 25.
64. Seperempat Abad Dep. PP dan K, hal. 297.
65. *Ibid.*, hal. 295.
66. Usaha-usaha Dep. PP dan K/Moh. Yamin, hal. 25.
67. Bahder Djohan, hal. 122 – 130.
68. Seperempat Abad Dep. PP dan K, hal. 193 – 195.

BAB IV PERIODE DEMOKRASI TERPIMPIN (1959 – 1966)

4.1 Latar belakang Politik, Pendidikan, dan Kebudayaan

Sebagai hasil kompromi Konferensi Meja Bundar, maka dibentuklah Negara Indonesia Serikat (RIS) pada tanggal 27 Desember 1949. Negara Republik Proklamasi 17 Agustus 1945 menjadi bagian dari RIS. Dengan sendirinya UUD 1945 tidak berlaku lagi dan diganti dengan Konstitusi RIS.

Pembentukan Negara RIS ini sebenarnya agak dipaksakan oleh Belanda. Sebenarnya sebagian besar negara-negara bagian RIS menghendaki Negara Kesatuan. Ternyata umur RIS ini tidak panjang, hanya kurang dari satu tahun sudah bubar, dan menjelma menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Untuk sementara Negara Kesatuan RI menggunakan konstitusi yang disusun atas hasil kompromi UUD 1945 dan UUD RIS, yang biasa disebut UUD 1950 atau UUD Sementara. Undang-undang ini rencananya akan diganti dengan undang-undang yang akan dibentuk oleh Dewan Konstituante hasil pemilihan umum.

Sejak tahun 1950 Indonesia mulai memasuki masa liberal. Partai-partai politik yang berdiri atas dasar Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 itu semakin banyak dan masing-masing meningkatkan kegiatan politik untuk memenangkan pemilihan umum tahun 1955. Dalam masa kampanye ini situasi

negara menjadi panas karena partai-partai saling menjelekkkan satu sama lain.

Dalam tahun 1955 berhasil dilaksanakan pemilihan umum (29 September untuk Parlemen, dan 15 Desember untuk Konstituante). Sebagai telah diketahui hasilnya didominasi oleh 4 partai besar, yaitu Masyumi, PNI, NU, dan PKI. Sejak tahun 1955 Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mempunyai Parlemen dan Dewan Konstituante hasil pemilihan umum.

Dewan Konstituante segera melaksanakan tugasnya menyusun UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menggantikan UUD 1950 yang masih bersifat sementara itu. Dalam pelaksanaannya selalu tersendat-sendat karena tidak ada kesepakatan para anggota yang mewakili partai-partai. Sampai awal tahun 1959, Dewan ini belum dapat menyelesaikan tugasnya, bahkan terjadi kemacetan sidang karena banyak anggota yang tidak mau menghadiri sidang.

Melihat hal ini maka Presiden Soekarno pada tanggal 22 April 1959 memberikan saran kepada Dewan Konstituante agar kembali saja kepada UUD 1945. Atas saran ini Dewan Konstituante juga tidak berhasil memberikan keputusan, bahkan terjadi pemogokan sebagian anggota Dewan tidak mau menghadiri sidang. Dengan kenyataan ini pemerintah menganggap Dewan tidak mampu melaksanakan tugasnya, bahkan membuat keadaan negara menjadi gawat, terancam perpecahan. Dengan keadaan seperti itu Presiden, Kabinet, Dewan Nasional, TNI, dan beberapa pimpinan partai sependapat untuk mengambil tindakan penyelamatan kesatuan negara dengan mengeluarkan Dekrit Presiden. Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang berisi: Pembubaran Konstituante, berlakunya kembali UUD 1945, dan tidak berlakunya lagi UUD 1950.

Dekrit ini disusul dengan pidato Presiden pada tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita", yang terkenal juga dengan nama "Manifesto Politik Republik Indonesia" (Manipol), dan dalam sidang MPRS tahun 1960 dinyatakan sebagai GBHN (Noegroho Notokusanto, *et al.*, 1976: 250-258).

Sejak Presiden Soekarno mengundang Dekrit kembali ke Undang-undang Dasar 1945 pada tanggal 5 Juli 1959, dan penegasan serta penjelasannya dalam Amanat Kenegaraan 17 Agustus 1959 yang kemudian terkenal dengan Manifesto Politik (MANIPOL), maka berakhirilah suatu masa, di mana masalah-masalah yang kita hadapi dewasa itu tidak dapat lagi ditampung dengan demokrasi parlementer ala Barat. Dekrit Presiden membawa perubahan fundamental dalam berbagai bidang kehidupan di negara kita, antara lain keinginan untuk mengembalikan stabilitas politik, yang selama tahun-tahun lima puluhan mengalami banyak guncangan sebagai akibat tak langsung dari perkembangan demokrasi liberal dan pergolakan-pergolakan daerah, yang membawa konsekuensi tidak dapat berjalannya roda pembangunan sebagaimana yang telah dicanangkan oleh pemerintah pada tahun 1955.¹

Apabila kita menengok ke belakang, khususnya selama periode berlakunya Undang-undang Dasar Sementara (UUDS), maka terasa terdapat satu kecenderungan yang umum, yakni bahwa penataan kebijaksanaan (*policy*) bidang pendidikan di tanah air selama masa demokrasi liberal berjalan tersendat-sendat. Hal ini rupanya sejalan dengan jatuh-bangunnya kabinet-kabinet yang menjalankan roda pemerintahan negara selama kurun waktu tersebut. Esensi dari keadaan yang demikian itu memang menimbulkan implikasi politik yang mendasar, di mana konsep pendidikan nasional – khususnya pemikiran pendidikan – seolah-olah telah kehilangan landasan pijaknya yang kokoh. Di sana-sini sangat terasa sentuhan paham liberal, baik dalam lapangan politik, sosial-ekonomis, maupun kebudayaan. Liberalisme dalam lapangan politik dapat terlihat pada sering terjadinya pergantian pemerintahan. Haluan tujuan revolusi Indonesia seakan-akan dobelokkan dari arahnya yang semula – yakni menuju masyarakat adil dan makmur – menuju terciptanya masyarakat yang kapitalistis. Dalam bidang pendidikan sifat liberal itu kelihatan secara nyata terutama di dalam pelaksanaan UU Pokok Pendidikan No. 4 tahun 1950, yang merumuskan tujuan pendidikan sbb.:

”Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis

serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air".²

Setelah berhasil disusun pemerintahan baru yang berlandaskan UUD 1945 dan ditentukannya mekanisme kerja kabinet yang memungkinkan terjaminnya stabilitas politik, ekonomi, dan kemasyarakatan, maka berdasarkan Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 telah ditetapkan Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961–1969. Pola Pembangunan yang berjangka waktu sepuluh tahun ini merupakan satu alternatif baru yang dijalankan pemerintah waktu itu sebagai jawaban terhadap stagnasi nasional yang terjadi selama era demokrasi liberal.

Perubahan peta politik di tanah air yang berhasil mengembalikan kedudukan politis Presiden Soekarno pada posisi sentral dalam mekanisme pengambilan keputusan mengenai haluan politik kenegaraan pada waktu itu, sangat mendukung bagi adanya orientasi baru – baik keluar maupun ke dalam – di lingkungan Kabinet Kerja I, yang secara khusus sebenarnya telah dimulai oleh Kabinet Karya (9 April 1957 – 10 Juli 1959). Perencanaan Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang sebenarnya sudah dirintis pada masa Kabinet Karya ini, sebenarnya adalah suatu strategi pembangunan dalam masa peralihan yang bersifat menyeluruh untuk menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila atau masyarakat Sosialis Indonesia, yang di dalamnya tidak terdapat penindasan atau penghisapan atas manusia oleh manusia, guna memenuhi Amanat Penderitaan Rakyat. Di dalamnya, berisikan pola-pola untuk meletakkan dasar-dasar pembangunan moral dan spiritual yang sehat dan kuat serta pembangunan tata perekonomian nasional yang mandiri dan tidak bergantung pada gelojak perekonomian dunia.³

Pola-pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana itu, antara lain mencakup:

- 1) Bidang Mental, Keagamaan, Kerohanian dan Penelitian.
- 2) Bidang Kesejahteraan.
- 3) Bidang Pertahanan-Keamanan (HANKAM).
- 4) Bidang Peningkatan Produksi.

- 5) Bidang Distribusi dan Perhubungan.
- 6) Bidang Keuangan dan Pembiayaan.

Dari urutan di atas, jelaslah bahwa Bidang Mental, Keagamaan, Kerohanian, dan Penelitian, yang di dalamnya meliputi pula kegiatan pendidikan dan kebudayaan dalam program pembangunan semesta berencana yang dicanangkan pemerintah pada waktu itu, memperoleh tempat dan prioritas utama.

Sebagai pedoman umum bidang pendidikan dan kebudayaan, MPRS menggariskan dengan Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Dasar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama (1961–1969) Bab II pasal 2, di mana di dalamnya terdapat Ketentuan Umum di Bidang Mental, Keagamaan, Kerohanian, dan Penelitian, yang pada dasarnya berisi:

- 1). Penekanan Manifesto Politik (MANIPOL) dalam pembinaan mental, keagamaan, kerohanian, dan kebudayaan, serta menetapkan: Pendidikan Agama, Pancasila, dan MANIPOL sebagai mata pelajaran di sekolah-sekolah rendah dan menengah sampai dengan tingkat perguruan tinggi.
- 2). Menyelenggarakan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan sistem pendidikan nasional yang tertuju ke arah pembentukan tenaga-tenaga ahli dalam lapangan pembangunan.
- 3). Mengusahakan agar segala bentuk kesenian menjadi milik seluruh rakyat dan menyebarkan sifat-sifat nasional.
- 4). Kebijakan penelitian disesuaikan dengan haluan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif serta mengikutsertakan masyarakat, tanpa meninggalkan syarat-syarat ilmiah.⁴

4.2 *Lintasan Problematika Pendidikan*

Sebagai kelanjutan dari pengakuan kedaulatan oleh pemerintah Belanda atas Indonesia, maka di bidang pendidikan dan pengajaran ditempuh langkah-langkah pengintegrasian sekolah-sekolah yang berasal dari daerah kekuasaan RI dan daerah pendudukan. Langkah integrasi itu selaras dengan isi yang termaktub dalam UU No. 4 tahun 1950, sehingga semua sekolah pe-

merintah pada dewasa itu harus ditampung dalam Sistem Persekolahan Negeri, yang mempergunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia. *Follow-up* yang demikian ini meminta banyak pikiran dan tenaga. Berbagai masalah rumit yang harus dipecahkan itu antara lain masalah-masalah pengintegrasian para petugas, guru, dan pelajar, penyeragaman mata pelajaran (kurikulum), buku-buku pelajaran, dan perpustakaan. Kesemuanya ini mengandung masalahnya sendiri-sendiri, belum lagi masalah ujian yang praktis harus diselenggarakan setiap tahun. Masalah lain yang tak kalah rumitnya adalah urusan penerimaan kembali para pelajar bekas pejuang, terutama di SMA-SMA. Masalah-masalah semacam ini memang membutuhkan satu pendekatan psikologis tersendiri di samping sekedar hanya penyelesaian administratif saja. Demikian pula usaha-usaha penyelarasan sekolah-sekolah tingkat bawah (waktu itu Sekolah Rakyat, SR), Sekolah Menengah, VHO (federal) dengan SMA-SMA negeri. Demikianlah gambaran singkat bagaimana bertimbunnya masalah-masalah teknis-paedagogis, administratif, dan psikologis yang dihadapi pemerintah, c.q. Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, yang harus segera diatasi secara bijaksana dan memuaskan.⁵

Yang tidak kalah penting di sini adalah tingkat perkembangan kuantitatif dan aspek keinginan memperoleh pendidikan dan pengajaran di setiap jenjang pendidikan. Ini adalah masalah faktual yang dihadapi RI dalam usianya yang relatif muda waktu itu. Setelah pengakuan kedaulatan RI pada akhir Desember 1949, praktis sejak saat itulah baru dimulai pembangunan dan penyelenggaraan sekolah-sekolah secara teratur. Pada fase awal perkembangan yang terjadi pada hakikatnya barulah bersifat kuantitatif, yakni kebijaksanaan memperbanyak jumlah sekolah dan jenisnya. Meningkatnya dengan cepat minat belajar masyarakat kita waktu itu telah dibuktikan lewat perkembangan jumlah yang melonjak dari sekolah murid, guru-guru, dan sarana gedung, mulai dari tingkat sekolah-sekolah rakyat sampai perguruan tinggi. Terdapat satu kecenderungan baru pada masa itu bahwa semangat dan minat belajar masyarakat tersebut malah sering tidak dapat tertampung oleh sekolah-sekolah yang ada. Sebagai ilustrasi, kita dapat melihat bahwa pada tahun

1959 SR yang ada 1,8 kali banyaknya dari masa pemerintahan Hindia Belanda dan 2,75 kali dari masa pendudukan Jepang. Sekolah Menengah dan sejenisnya berturut-turut 6,6 kali dan 341 kali. Sekolah Lanjutan Atas 47 kali dan 381 kali. Adapun lonjakan jumlah perguruan-perguruan tinggi berkisar sekitar 23 kali. Jumlah murid untuk SR melonjak sekitar 3,6 kali dan 5,4 kali; Sekolah Menengah Tingkat Pertama 16 dan 157 kali; Sekolah Lanjutan Tingkat Atas melonjak 24,4 dan 133,5 kali dibandingkan dengan angka-angka populasi di kedua kurun masa pemerintahan sebelumnya; sedangkan jumlah mahasiswa yang duduk di tingkat perguruan tinggi melonjak sebanyak 60 kali.⁶

Pada masa itu pemerintah memang memberikan peluang besar kepada masyarakat untuk mengenyam jenjang pendidikan tertentu, mulai dari tingkat rendah sampai atas. Penyebaran jumlah sekolah ini disertai pula dengan langkah-langkah untuk merangsang kesempatan belajar yang merata. Dengan ikatan dinas, tugas belajar, dan beasiswa lainnya masyarakat mendapat kesempatan untuk bersekolah sampai tingkat perguruan tinggi. Selain itu diselenggarakan pula pelbagai kursus. Dengan cara ini maka hasrat belajar bagi yang tidak berkesempatan atau tidak mungkin mengikuti sekolah-sekolah biasa dapat ditampung, umpamanya lewat: Kursus SMP tertulis, Kursus SMA tertulis, Kursus Pegawai Administrasi (KPA), kursus-kursus kope-rasi, dan kursus aplikasi tertentu. Pada masa itu dikenal pula Kursus Pengantar ke Kewajiban Belajar (Kp.Kb.), yakni yang banyak memberikan kesempatan belajar secara luas kepada masyarakat sebagai persiapan menuju pada kewajiban belajar. Fakta lain yang tak dapat disangkal dalam hal ini adalah peranan swasta. Golongan swasta pun banyak pula mendirikan sekolah-sekolah, sehingga keadaannya seolah-olah seperti jamur di musim hujan. Demikian juga kursus-kursus tertulis yang diselenggarakan oleh usaha swasta untuk persiapan ujian sekolah negeri, baik yang setaraf maupun yang bukan. Namun yang tak boleh dilupakan bahwa tidak semua partisipasi pihak-pihak swasta itu didorong oleh semangat pengabdian, tetapi lebih banyak pula yang sekedar mengambil kesempatan mengeruk keuntungan dari hasrat rakyat yang meluap-luap untuk belajar setinggi-tingginya.⁷

Langkah-langkah melipatgandakan jumlah guru juga banyak dilakukan pemerintah di mana-mana. Secara khusus dikemukakan di sini pelaksanaan kursus-kursus dari berbagai jenjang pendidikan, terutama yang ditujukan untuk melipatgandakan jumlah guru yang pada waktu itu sangat kurang. Untuk itu secara kilat diselenggarakan Kursus Pengajar untuk Kursus Pengantar ke Kewajiban Belajar (KPKpKb). Adapun Kursus B I dan Kursus B II diselenggarakan guna mengatasi kekurangan guru untuk mengajar pada jenjang SMTP dan SMTA. Selain itu, guna meningkatkan kualitas para pengajar di Sekolah-sekolah Rakyat, pemerintah juga menyelenggarakan Kursus Persamaan SGB dan Kursus Persamaan SGA, di samping SGB dan SGA yang ada. Pada masa ini mulai kelihatan banyak guru-guru yang mengajar di beberapa sekolah; hal ini semata-mata guna menanggulangi masalah kekurangan guru. Kebiasaan baru ini terlihat pula pada jenjang pendidikan tinggi, di mana banyak mahaguru dan para dosen terbang harus bolak-balik memberi kuliah ke berbagai universitas di tanah air. Pendidikan guru tingkat universitas diselenggarakan oleh Fakultas-fakultas Paedagogik dan Perguruan-perguruan Tinggi Pendidikan Guru, dan kepada mereka yang berprestasi baik biasanya langsung dikirim belajar ke luar negeri, baik dalam rangka tugas belajar maupun *fellowship* untuk meningkatkan kualitas, pengetahuan, dan kemampuan mereka. Terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah program "Pengerahan Tenaga Mahasiswa" (PTM) untuk mengatasi kekurangan tenaga guru di daerah-daerah. Langkah ini patut dihargani secara wajar dan ternyata telah banyak memberikan hasil dalam meningkatkan kualitas pengetahuan masyarakat di daerah-daerah, khususnya di luar Pulau Jawa. Mereka itu adalah para mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri – rata-rata pada tingkat bakaloreat – yang menghentikan untuk sementara waktu kegiatan perkuliahan mereka dan mengikuti program pemerintah pergi mengajar ke daerah-daerah.⁸

4.3 Arah Baru dari Pemikiran Pendidikan Nasional

Usaha-usaha pembalikan terhadap arus perkembangan politik yang terjadi di tanah air, khususnya pada akhir tahun-tahun lima puluhan, sebenarnya telah dimulai sejak Kabinet

Karya. Kita dapat melihat Program Kabinet tersebut yang pada garis besarnya terinci sebagai berikut:

- 1) Membentuk Dewan Nasional.
- 2) Normalisasi keadaan di dalam negeri RI.
- 3) Melanjutkan pelaksanaan pembatalan Konferensi Meja Bundar (KMB).
- 4) Memperjuangkan Irian Barat.
- 5) Mempertiat pembangunan.

Mulai tumbuhnya situasi revolusioner yang ramai dengan jargon-jargon politik adalah suatu konsekuensi logis dari apa yang memang sengaja dikembangkan oleh pemerintah dewasa itu. Pembatalan KMB dan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke pangkuan ibu pertiwi, secara implisit sebenarnya adalah suatu pernyataan unilateral bangsa Indonesia terhadap segala unsur yang berbau kebarat-baratan atau ke belanda-belandaan. Sebagai akibatnya, pada waktu itu telah dimulai usaha-usaha ke arah merevisi kembali kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam pendidikan dan pengajaran yang berlangsung selama ini. Secara singkat dapat dikatakan, bahwa, pemerintah waktu itu ingin membenahi arus liberalisme yang berjalan di dalam kebijaksanaan nasional di bidang pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Presiden Soekarno mensinyalir bahwa pendidikan dan pengajaran nasional pada era demokrasi liberal ini telah cenderung menjadi ajang pertarungan paham dan aliran politik. Dilema ini terjadi disebabkan oleh kurang tegasnya perumusan dalam UU Pokok Pendidikan No. 4 tahun 1950, sehingga sangat dimungkinkan munculnya pelbagai tafsiran yang berbeda tentang tujuan dan hakikat pendidikan nasional bangsa Indonesia. Sebagai ilustrasi dapat diketengahkan di sini, bahwa ada kalangan yang berpendapat bahwa sistem pendidikan nasional itu hanyalah sekedar peristilahan belaka dan merupakan penjumlahan keseluruhan usaha kegiatan pendidikan, baik di dalam maupun di luar sekolah; sedangkan di pihak lain ada yang tetap berpegang teguh bahwa Pancasila itu adalah dasar pendidikan nasional. Mereka yang tergolong kaum nasionalis ini menghendaki agar sistem pendidikan nasional kita waktu itu merupakan pelaksanaan "Amanat Penderitaan Rakyat" (AMPERA) di bidang

dan melalui pendidikan, sehingga apa yang diinginkan oleh mereka ini sebenarnya justru memberikan isi dan pengarahan bagi seluruh kegiatan pendidikan nasional di tanah air.

Undang-undang Pokok Pendidikan No. 4 tahun 1950, dan JO No. 12 tahun 1954 diakui oleh semua kalangan yang berkompeten memang belum sempurna sebagai perundang-undangan pendidikan nasional, sehingga di sana-sini perlu disempurnakan di kemudian hari. Dalam banyak hal memang terdapat kekaburan pada isi yang terkandung di dalamnya. Sebagai contoh, pengertian kesesuaian dan pengertian masyarakat umpamanya, dalam tujuan pendidikan pada Undang-undang tersebut terlalu bersifat umum, sehingga terbuka bagi tafsiran yang bermacam-macam. Lagi pula, UU Pokok Pendidikan No. 4 tahun 1950 tersebut hanya menitikberatkan pada pengajaran yang diselenggarakan dalam bentuk-bentuk perguruan (unit-unit sekolah); jadi, dalam hal ini jelas-jelas tidak mengatur kegiatan pendidikan dan pengajaran yang diselenggarakan di luar tata susunan sekolah.⁹ Selain itu, kekurangjelasan *stelling* ini membawa pengaruh pula ke arah penetapan jenis dan isi mata pelajaran yang diajarkan kepada para siswa. Terdapat kecenderungan bahwa setiap mata pelajaran itu selalu saja dilihat dari sudut pandangan tertentu, sehingga akibatnya yang paling terasa adalah tidak ada keseragaman dalam format mata pelajaran di tiap-tiap jenjang pendidikan. Isi setiap mata pelajaran terus-menerus bertambah sebagai konsekuensi logis dari masuknya saran-saran perbaikan dan penambahan yang terjadi secara periodik.

Kondisi yang kurang sehat muncul ke permukaan berupa persaingan dalam memperkenalkan paham-paham, orientasi, isi, maupun metode pendidikan. Keadaan yang demikian ini adalah eksese dari upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah, yakni yang dulu dilakukan lewat pengiriman petugas-petugas dan guru-guru keluar negeri. Sekembali dari sana, banyak dari mereka – mungkin karena terdorong oleh semangat pembaharuan yang diperoleh ketika belajar menyebarkan dan memformulasikannya secara bersemangat, sehingga kadangkadangkang tanpa mempertimbangkan segi-segi kepribadian bangsa dan kondisi dinamis yang terjadi di tanah air. Tak sedikit dari

fungsionaris dan para pendidik yang terpelajar itu secara terang-terangan menyatakan kiblat pendidikannya adalah Eropa Barat; sebaliknya, terdapat pula kalangan yang cenderung menganggap berorientasi ke Amerika, dan penataan pendidikan nasional meniru model Amerikalah yang terbaik. Demikian pula aspirasi dan paham-paham yang dibawa ke Indonesia dari negeri-negeri lainnya. Pendek kata, pada masa itu memang terdapat penajaman polarisasi dalam orientasi pendidikan. Selain segi-segi positif bahwa Indonesia menjadi tidak terasing di tengah-tengah lintasan kegiatan pendidikan manca negara dan menjadi penghimpun segala macam sistem pendidikan, yang tidak kalah penting di sini adalah bahwa dunia pendidikan Indonesia yang masih relatif muda itu telah mulai kehilangan identitas nasionalnya yang mandiri.

Orientasi pendidikan ke negara-negara Barat ini secara tanpa disadari mempercepat lahirnya visi baru di kalangan generasi muda. Kalangan orang-orang muda pada masa itu banyak yang mengagung-agungkan pelajaran-pelajaran yang bersifat verbalistis. Orang berlomba-lomba memperoleh kesempatan belajar itu semata-mata hanya ingin memperoleh status simbil; yang dikejar sebenarnya bukanlah keahlian, tetapi ijazah negeri. Demikianlah disadari atau tidak, intelektualisme yang tumbuh itu lebih mengacu pada sikap-sikap mental "priayi", yakni suatu sikap mental kolonial yang memandang rendah pekerjaan tangan, pertukangan, dan sebagainya. Satu ilustrasi untuk membenarkan sinyalemen di atas dapat terlihat pada membanjirnya minat masuk ke sekolah-sekolah umum seperti SMP dan SMA. Pilihan ini oleh masyarakat dianggap tepat sebagai kunci utama untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Inilah suatu anggapan keliru yang sampai sekarang pun masih tetap dominan di kalangan masyarakat awam. Minat masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah menengah vak/kejuruan dan teknologi sangat rendah, seakan-akan kurang mendapatkan penghargaan yang layak.

Sebagaimana telah sedikit disinggung di muka bahwa memang terdapat banyak faktor, baik internal maupun eksternal, yang menjadi penghambat pelaksanaan konsep pendidikan na-

sional sejak tahun 1950. Secara umum hambatan-hambatan itu dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Sistem pendidikan yang sebagian besar berlaku pada tahun-tahun lima puluhan itu sebagian besar, menurut dasarnya, masih menggunakan sistem lama, yaitu sistem pendidikan kolonial yang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan nasional.
- 2) Pendidikan yang diberikan secara umum itu memang memberikan pengetahuan kepada seseorang tentang berbagai macam ilmu, akan tetapi sangat terbatas sehingga sangat sukar untuk menuju pada diferensiasi, di mana tiap-tiap bidang ilmu pengetahuan ada ahli-ahlinya.
- 3) Tidak adanya literatur yang bernilai tinggi bagi para pemuda (generasi muda) kita. Keadaan inilah yang menyebabkan unsur-unsur yang baik dan tenaga kreatif dalam kebiasaan kita itu menjadi samar-samar.

Semuanya ini telah menambah kekurangan keahlian di kalangan bangsa kita yang seharusnya diperhatikan di dalam masa pembangunan semesta berencana yang sudah dicanangkan pada masa itu. Inilah gambaran yang sesungguhnya dari *out-put* tenaga ahli Indonesia yang sangat minim sekali jumlahnya, yang bersamaan waktunya negara ini memulai suatu proyek nasional besar yang ambisius. Pemerintah bukan tidak menyadari keadaan yang demikian ini dan biar bagaimanapun proses pembangunan itu tidak boleh ditanggihkan semata-mata karena faktor tenaga ahli terampil yang terbatas itu. Lewat slogan-slogan nasional, masyarakat di segala lapisan dipacu harus tetap bersemangat. disertai ajakan "Sambil membangun akan memperkaya keahlian dengan pengalaman yang dibutuhkan untuk melanjutkan pembangunan."¹ Di dalam *statement* pemerintah pada awal tahun 1960-an dinyatakan bahwa sekolah-sekolah vak/kejuruan, khususnya sekolah teknik, hendak ditinjau kembali. Sekolah-sekolah ini akan diarahkan menjadi lembaga-lembaga pendidikan yang menelorkan tenaga-tenaga pembangunan yang ahli dan berjiwa perjuangan dengan semangat 1945.

Konstataasi terhadap kebijaksanaan pendidikan nasional kemudian merangsang usaha-usaha baru ke arah penemuan kembali konsep dasar di bidang pendidikan. Sebagai kelanjutan dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 maka pada tahun yang sama, tepatnya pada Pidato Kenegaraan tanggal 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno melontarkan gagasannya ke arah penataan kembali jalannya politik kenegaraan kita. Penegasan dan penjelasan presiden mengenai arah Revolusi Indonesia itu kemudian terkenal dengan MANIPOL. Manipol yang kemudian dianggap sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), menurut terminologi politik yang berlaku pada waktu itu, bertujuan mengembalikan Revolusi Indonesia para rel Revolusi 17 Agustus 1945 untuk melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat. Langkah besar yang dihadapi oleh pemerintah pada masa itu meliputi pula usaha-usaha penataan di bidang mental dan kebudayaan bangsa, yang tercantum sebagai berikut:^{1 1}

- 1) Revolusi Indonesia bukan hanya revolusi material, tetapi juga revolusi mental.
- 2) Kita bangsa Indonesia harus berani membongkar alat-alat yang lama dan membangun yang baru untuk meneruskan perjuangan di atas rel Revolusi.
- 3) Revolusi kita tidak hanya meminta sumbangan keringat atau disiplin, tetapi yang tidak kurang penting ialah kebutuhan untuk menciptakan pikiran-pikiran dan konsepsi-konsepsi baru.
- 4) Kita harus berjuang menentang imperialisme kebudayaan dan pemerintah harus melindungi dan menjamin berkembangnya kebudayaan nasional.

Dari penegasan di atas sangat jelaslah posisi pendidikan nasional dalam era Demokrasi Terpimpin, yakni harus menjadi alat Revolusi dan bertugas menjabarkan dan melaksanakan tiga segi kerangka Revolusi Indonesia sebagaimana yang tertera di dalam konsepsi Manipol. Statuta mengenai pendidikan nasional ini tidak banyak berbeda arah dan tujuannya dengan konsepsi di bidang-bidang lainnya. Memang kebijaksanaan politik mulai

dari tingkat atas sampai ke tingkatan yang terendah harus dilaksanakan menurut Manipol dan diuraikan di dalam apa yang disebut USDEK. Setiap huruf singkatan USDEK adalah salah satu dari lima bentuk kebijaksanaan, yaitu:

- 1) Kembali ke Undang-undang Dasar 1945
- 2) Sosialisme Indonesia
- 3) Demokrasi Terpimpin
- 4) Ekonomi Terpimpin
- 5) Kepribadian Indonesia atau Kebudayaan Terpimpin

Secara khusus di dalam membicarakan Manipol, Presiden Soekarno mempertegas posisi Pancasila sebagai landasan ideal pendidikan nasional, dan hanya boleh diinterpretasikan secara tunggal, yakni dengan Manipol-Usdek. Dengan demikian berarti bahwa pendidikan nasional kita itu haruslah berdasarkan pandangan hidup dan pandangan dunia (kosmopolitan) bangsa Indonesia. Pancasila sebagai landasan ideal pendidikan nasional kita itu berarti bahwa melalui pendidikan — baik di dalam maupun di luar sekolah — kita menggembelng generasi muda Indonesia menjadi manusia Pancasila yang akan menunjang pembangunan bangsa menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur yang dicita-citakan.

Menurut visi Manipol, pendidikan, pengajaran, dan pengembangan kebudayaan nasional harus lebih intensif memelihara dan membina semangat kebangsaan (*Indonesian spirit*) serta patriotisme masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Bidang pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan harus merupakan instrumen yang dinamis di dalam proses pembentukan masyarakat yang adil dan makmur materil dan spiritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun segi yang ketiga, bidang pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan ini harus pula menjadi sarana dan wahana ke arah pembentukan satu suasana bersahabat yang harmonis antara RI dengan negar-negara Afrika-Asia atas dasar saling menghormati dan saling bekerja sama membentuk satu dunia baru yang lepas dari segala cengkeraman imperialisme dan kolonialisme, menuju perdamaian dunia yang abadi. Yang terakhir, bidang pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan harus dapat menjadi wahana bagi lahirnya

ide-ide dan konsepsi baru guna membina perkembangan kebudayaan nasional.^{1 2}

Sasaran optimal yang ingin dicapai oleh pemerintah pada waktu itu – khususnya di dalam lapangan pendidikan – adalah tersedia dan terciptanya kader-kader pembangunan yang terdidik, yang dapat memberikan sumbangsih mereka di dalam proses pembangunan masyarakat sosialisme Indonesia, dengan penekanan pada lenyapnya bentuk-bentuk penghisapan oleh manusia atas manusia dan oleh bangsa terhadap bangsa lain. Mendidik anak atau generasi muda pada umumnya menurut konsepsi Manipol ini bertujuan agar mereka kelak memiliki bekal dan mempunyai kegairahan bekerja serta untuk mengabdikan, menghadapi tantangan Revolusi Indonesia yang *multi-complex*. Di dalam penafsiran dan terminologi politik dari konsepsi ini sering dikatakan bahwa Revolusi Indonesia belum selesai, dan bidang pendidikan nasional harus dapat dijadikan sebagai wahana untuk menyuburkan doktrin-doktrin Revolusi Indonesia itu. Oleh karena itu, adalah logis kalau sejak saat itu Manipol-Usdek ditetapkan sebagai satu-satunya tafsiran Pancasila, yang sekaligus dijadikan doktrin Revolusi Indonesia. Beranjak dari ketentuan ini maka semangat dan jiwa Revolusi Indonesia yang dogmatis tersebut harus pula menjiwai segenap alur pendidikan dan pengajaran.^{1 3}

4.4 Menuju ke Sistem Baru Pendidikan Nasional

Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PP & K) sebagai badan pemerintah yang menyelenggarakan dan bertanggung jawab di dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, mengalami perubahan penting di sana-sini dan banyak kebijaksanaan serta produk-produknya diselaraskan dengan gejala politik yang berkembang ketika itu. Departemen PP & K yang waktu itu dipimpin oleh Menteri Prof. Dr. Prijono sebenarnya adalah kelanjutan dari Kementerian Pengajaran yang dibentuk oleh Kabinet Presidensiil pertama RI tanggal 2 September 1945. Perubahan nama dari Kementerian menjadi Departemen PP & K berdasarkan Surat Edaran Menteri Pertama No. 1/MPR/R.I. 1959 tanggal 26 Agustus 1959. Perubahan penting

yang menyangkut status departemen ini terjadi ketika keluar Keputusan Pemerintah c.q. Keppres No. 21 tanggal 18 Februari 1960, yang menegaskan bahwa Menteri PP & K di dalam Kabinet Kerja II (Prof. Dr. Prijono) adalah menteri anggota Kabinet Inti.

Secara singkat, Departemen PP & K ini tersusun atas: Biro Pendidikan Asing, Biro Pendidikan Jasmani, Biro Koordinasi Perguruan Tinggi, Biro Perundang-undangan, Biro Pemuda, Biro Perpustakaan, Lembaga Sejarah Antropologi, Lembaga Bahasa Kesusastraan, Arsip Nasional, Dinas Purbakala dan Peninggalan Nasional, Dinas Penerbitan Balai Pustaka, dan jawatan-jawatan yang terdiri atas Jawatan, Pendidikan Umum, Jawatan Kejuruan, Jawatan Pendidikan Masyarakat, dan Jawatan Kebudayaan.

Departemen PP & K ini mempunyai wewenang umum yang mencakup lapangan-lapangan:

- 1) Pendidikan dan pengajaran umum tingkat dasar, menengah dan tinggi, baik yang bersifat pengetahuan umum maupun kejuruan, kecuali yang bersifat keagamaan;
- 2) Pendidikan masyarakat;
- 3) Kebudayaan, antara lain kesenian, adat-istiadat, dan ilmu pengetahuan;
- 4) Bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah;
- 5) S e j a r a h;
- 6) A n t r o p o l o g i;
- 7) Kepurbakalaan dan peninggalan nasional;
- 8) Arsip Nasional;
- 9) Sensor Film;
- 10) Hubungan dengan luar negeri dalam lapangan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan.¹⁴

Tak lama sesudah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang disusul kemudian dengan pidato kenegaraan mengenai Manipol, maka di lingkungan Departemen PP & K dirumuskan langkah-langkah jangka pendek yang dengan segera harus dilaksanakan, yakni berupa Instruksi Menteri Muda PP & K No. 1/1959, yang kemudian disebut SAPTA USAHA TAMA yang isinya sebagai berikut:

SAPTA USAHA UTAMA *)

INSTRUKSI MENTERI MUDA PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN

No. 1

Para Pelajar dan Para Petugas dalam Lingkungan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan

Sesudah Presiden/Panglima Tertinggi pada tanggal 5 Juli 1959 mendekritkan, bahwa bangsa Indonesia kembali kepada Undang-undang Dasar '45, maka sudah sewajarnya bahwa kaum pendidik dengan para pelajar-nya wajib memiliki kembali semangat dan jiwa Proklamasi untuk dapat memberi contoh kepada seluruh masyarakat.

Para pendidik harus sanggup menjadi pelopor dari perubahan jiwa dan sikap bangsa.

Oleh karena itu saya dan pembantu-pembantu saya di Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan telah menyusun rencana jangka pendek yang akan disusul dengan rencana jangka panjang untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa lapangan pendidikan dapat membawa jiwa baru itu, dan dapat pula menyesuaikan dirinya dengan program Kabinet Kerja.

Untuk menjelmakan maksud di atas akan saya umumkan tindakan-tindakan jangka pendek yang segera harus dikerjakan dalam lingkungan Kementerian PP dan K dan dalam masyarakat, yang saya namakan SAPTA USAHA UTAMA, sebagai berikut:

- 1). Penertiban aparatur dan usaha-usaha Kementerian PP dan K.
- 2). Menggiatkan kesenian dan olah raga.
- 3). Mengharuskan "usaha halaman".
- 4). Mengharuskan penabungan.
- 5). Mewajibkan usaha-usaha koperasi.
- 6). Mengadakan "Klas Masyarakat".
- 7). Membentuk "Regu Kerja" di kalangan SLA dan Universitas.

Untuk ketujuh tindakan ini Kementerian PP dan K akan segera mengeluarkan pengumuman-pengumuman dan instruksi-instruksi yang diperlukan.

Agar terjamin pelaksanaan SAPTA USAHA UTAMA ini, maka saya telah menentukan tindakan-tindakan kepada mereka yang lalai dan peng-

*) Ejaan telah disesuaikan dengan EYD.

hargaan-penghargaan bagi mereka yang menunjukkan kesungguhan hati yang sebaik-baiknya.

Saya mengharapkan supaya para pendidik dan para pelajar mempunyai keuletan mengerjakan SAPTA USAHA UTAMA yang saya tentukan tadi.

Kepada para pengawas saya instruksikan supaya melakukan pengawasan yang sungguh-sungguh.

Mudah-mudahan kita semua berhasil mencapai maksud yang baik itu.

Jakarta, 17 Agustus 1959
Menteri Muda Pendidikan, Pengajaran
dan Kebudayaan,

ttd.

PRIJONO

Konsepsi yang terdiri atas tujuh ketentuan itu menurut pengakuan Dr. Prijono adalah dalam rangka usaha membuktikan kepada masyarakat bahwa lapangan pendidikan di tanah air mulai saat itu dan seterusnya telah mendapat jiwa baru dan diharapkan dapat pula menyelaraskan diri dengan program-program Kabinet Kerja.¹⁵ Gebrakan-gebrakan yang dilakukan pemerintah pada waktu itu tidak hanya sampai di sini saja. Kemudian sebagai *follow-up* dari Dekrit Presiden dan telah diterimanya Manipol sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara serta TAP MPRS No. I/MPRS/1960 dan TAP No. II/MPRS/1960, disadari atau tidak, sebenarnya telah terjadi satu perkembangan baru, yakni usaha-usaha modulasi dari kaidah-kaidah fundamental negara, khususnya terhadap UUD 1945 dan Pancasila sebagai falsafah negara. Oleh beberapa kalangan kebijaksanaan yang dilakukan pemerintah ini terasa ekstrem, karena tatanan kehidupan kemasyarakatan yang berlaku pada waktu itu ingin ditata dengan doktrin revolusi.

Penggalakan kegiatan *Studium Generale* dan *Civics* (kewarganegaraan) tampak di mana-mana. Kebijakan ini dijalankan berdasarkan keputusan pemerintah dan ditetapkan pada bulan Desember 1959 sebagai permulaan penyelenggaraan *Studium Generale* di perguruan-perguruan tinggi. Kegiatan ini dijalankan secara massal dengan tujuan ingin mendapatkan masukan dari masyarakat sebanyak mungkin tentang Pancasila sebagai landasan ideal bangsa serta Manipol-Usdek sebagai interpretasi tunggalnya. Format yang ditetapkan oleh pihak Departemen PP & K mengenai materi yang dihantarkan di dalam *Studium Generale* itu, antara lain:

- 1) Falsafah Negara Pancasila.
- 2) Makna Undang-undang Dasar 1945.
- 3) Rangkaian hubungan antarnegara dan antarbangsa, khususnya melalui pengertian Konferensi Asia-Afrika.
- 4) Konsepsi Presiden Manifesto Politik sebagai haluan negara.
- 5) Demokrasi dan Ekonomi Terpimpin sebagai dasar pembentukan masyarakat kekeluargaan, gotong-royong, musyawarah, mufakat (Masyarakat Sosialisme ala Indonesia yang pada pokoknya anti kapitalisme pada umumnya dan

monopoli kapitalisme pada khususnya, terlebih pula cenderung anti liberalisme).

Khusus tentang materi yang kelima di atas, pada sekolah-sekolah lanjutan diselenggarakan pula pelajaran *civics* (kewarganegaraan) sebagai mata pelajaran wajib, berdasarkan buku pedoman yang dikeluarkan oleh Departemen PP & K.

Sesudah Pidato Kenegaraan Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita" (*Rediscovery of Our Revolution*), yang juga terkenal dengan Manipol, disetujui oleh Dewan Pertimbangan Agung dan disahkan oleh MPRS (TAP NO. I/MPRS/1960 dan TAP No. II/MPRS/1960) maka sebagai kelanjutan dari Sapta Usaha Tama serta untuk memberikan dasar-dasar dalam pendidikan nasional yang sesuai dengan haluan negara, pada tanggal 10 Oktober 1960 Menteri PP & K Dr. Prijono mengeluarkan Instruksi No. 2, yang memuat konsepsi "Sistem Pendidikan Panca Wardhana". Instruksi Menteri PP & K ini antara lain memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menegaskan Pancasila dan Manipol sebagai pelengkap, sebagai asas Pendidikan Nasional;
- 2) Menetapkan Panca Wardhana sebagai sistem pendidikan yang berisikan prinsip-prinsip:
 - (a) Perkembangan cinta bangsa dan tanah air, moral nasional, internasional, dan keagamaan;
 - (b) Perkembangan kecerdasan;
 - (c) Perkembangan emosional-artistik atau rasa keharuan dan keindahan lahir-batin;
 - (d) Perkembangan keprigelan atau kerajinan tangan;
 - (e) Perkembangan jasmani;
- 3) Menyelenggarakan "Hari Krida" atau hari untuk kegiatan dalam lapangan kebudayaan, kesenian, olah raga, dan permainan pada tiap-tiap hari Sabtu.¹⁶ Mengenai Panca Wardhana, secara lengkap dapat dilihat pada lampiran.

Kedua Instruksi Menteri PP dan K di muka mulai awal tahun enam puluhan "diterima" sebagai satu kenyataan yang tidak terelakkan. Mengingat revolusionernya iklim politik kenegaraan kita waktu itu, memang tidak muncul oposisi terhadap

konsepsi tersebut. Banyak kalangan awam beranggapan bahwa konsepsi sistem pendidikan Panca Wardhana itu pada hakikatnya adalah penjabaran Pancasila dalam bidang pendidikan. Karena itu, apabila orang menyebut sistem pendidikan Pancasila pada masa itu, maka yang dimaksud pada umumnya adalah sistem pendidikan Panca Wardhana. Konsep ini pada intinya adalah pendidikan dengan pemusatan pada pertumbuhan dan perkembangan pribadi. Diakui atau tidak, konsep ini merupakan satu proses penggalan berpikir yang dapat dikatakan "murni" Indonesia dan apabila kita lihat lebih ke dalam lagi, konsep ini merupakan satu jawaban tak langsung dari satu pandangan pendidikan yang bercorak nasionalistis – yang muncul ke permukaan – sebagai reaksi setelah melihat banyaknya "keluaran" (*out-put*) yang dihasilkan oleh suatu proses belajar yang panjang dari sistem pendidikan lama (liberal) yang dinilai oleh penyelenggara negara pada masa itu sebagai kurang memenuhi tuntutan Revolusi Indonesia yang sedang berjalan.¹⁷

Jelaslah, hingga tahun 1963 persepsi awam mengenai sistem pendidikan Panca Wardhana adalah dianggap sebagai terjemahan falsafah negara Pancasila, khususnya di lapangan pendidikan. Konsepsi ini berjalan relatif mantap sampai tahun 1963. Selama masa ini pemikiran politik praktis sangat mendominasi alur pemikiran pendidikan yang ditangani oleh Departemen PP dan K. Banyak langkah kebijaksanaan seperti instruksi dan perubahan-perubahan terhadap kebijaksanaan terdahulu. Menteri Prijono juga melaksanakan penertiban di lingkungan departemennya dengan sasaran ingin menciptakan satu keseragaman gerak mulai aparat tingkat atas sampai ke aparat bawah, dari pusat sampai ke daerah-daerah (lihat lampiran).

Di tengah motto yang secara tanpa sadar didengungkan pada masa itu, yakni "politik adalah panglima" dan khususnya di lingkungan Departemen PP dan K sendiri, kecenderungan yang semacam di muka itu pun terjadi. Perkembangan ini tidak dapat tidak merupakan efek langsung dari peluang-peluang yang tercipta sebagai akibat suburnya retorika revolusioner pada masa itu. Di dalam departemen yang dipimpin oleh Prof. Prijono ini anasir kekuatan politik "kiri" pelan-pelan tumbuh men-

jadi kuat, seakan-akan tanpa mengalami hambatan serius dan motor penggeraknya waktu itu adalah organisasi Serikat Sekerja Pendidikan. Rupa-rupanya banyak kegiatan organisasi Serikat Sekerja Pendidikan (SSP) ini didukung oleh staf terdekat Menteri Prijono, seperti Mr. Soepardo (Pembantu Menteri PP dan K), yang kemudian diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Dep. PP dan K menggantikan pejabat lama, Hutasoit.^{1 8}

Harus diakui bahwa konsep pendidikan Panca Wardhana ini berjalan di tengah-tengah kemerosotan perekonomian yang melanda tanah air. Di mana-mana seakan terjadi perbenturan yang sangat menyolok antara ideal suatu konsepsi yang ingin dicapai dengan visualisasi kondisi sosial-ekonomi masyarakat pada masa itu, yang ditandai dengan arus inflasi yang semakin menajam dari waktu ke waktu dan lemahnya daya beli masyarakat. Gambaran umum kekalutan ekonomi ini membawa dampak serius terhadap kelangsungan kegiatan pendidikan masyarakat, baik di tingkat bawah, menengah, maupun atas. Mulai terlihat ketidakseimbangan angka pertumbuhan penduduk dengan pengadaan fasilitas pendidikan, terjadi overpopulasi dari para lulusan sekolah-sekolah tingkat dasar yang tidak dapat ditampung oleh sekolah-sekolah di tingkatan atasnya, dan juga tidak dapat diserap oleh lapangan-lapangan pekerjaan, yang kemudian menimbulkan eksesekses kemasyarakatan yang negatif. Memang satu hal penting yang tidak dapat disangkal bahwa pada masa itu orientasi pendidikan kita seakan-akan sengaja dibelokkan dari jalur yang semestinya – yakni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa – pada upaya demi mempercepat tercapainya tujuan revolusi masyarakat sosialisme Indonesia.

4.5 Struktur Organisasi dan Keadministrasian Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan

Setahun setelah keluarnya Keppres No. 21 yang menegaskan kedudukan Menteri PP dan K di dalam Kabinet Kerja II, maka pada tanggal 14 April 1961 keluar Keputusan Presiden No. 130 yang isinya mengatur pengelompokan baru organisasi kerja departemen tersebut. Departemen PP dan K dipecah menjadi dua, yakni Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan

(disingkat PD dan K) dan Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan selanjutnya (DEPARTIP), sedangkan pimpinan departemen tersebut populer dengan sebutan Menteri PTIP. Lewat keputusan yang sama Presiden juga menetapkan tugas dan wewenang kedua menteri yang bersangkutan beserta pokok-pokok susunan Sekretariat Menteri masing-masing.¹⁹

- 1) Tugas-tugas dan Tata Susunan Kesekretariatan Menteri Pendidikan, Pengetahuan dan Kebudayaan (selanjutnya disingkat PP dan K).
 - a). Mempersiapkan, menentukan, dan mengembangkan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, pengetahuan, dan kebudayaan.
 - b) Mengkoordinasikan dan mengawasi segala kegiatan di bidang pendidikan, pengetahuan, dan kebudayaan.
 - c) Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas pokok Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan.

Menteri PP dan K dalam menjalankan tugas-tugasnya sehari-hari selalu dibantu oleh Sekretariat Menteri; selain itu atas wewenang menteri dapat diangkat seorang atau beberapa orang pejabat untuk membantu menteri menyelesaikan pekerjaan tertentu.

Susunan Sekretariat Menteri PP dan K:

- (1) Biro Tata Usaha
 - (2) Biro Hukum dan Perundang-undangan
 - (3) Biro Hubungan Luar Negeri
 - (4) Biro Pendidikan Asing
- 2) Tugas-tugas dan Tata Susunan Departemen PD dan K :
 - (a) Mengatur, menyelenggarakan, membimbing, dan mengawasi semua usaha pendidikan dalam rangka persekolahan dari tingkat rendah sampai dengan tingkat lanjutan atas.
 - (b) Mengatur, menyelenggarakan, membimbing, dan mengawasi pendidikan jasmani, baik di dalam maupun di luar sekolah.

- (c) Mengatur, menyelenggarakan, membimbing, dan mengawasi pendidikan masyarakat.
- (d) Mengatur, menyelenggarakan, membimbing, dan mengawasi semua masalah kepemudaan.
- (e) Mengatur, membimbing, dan mengawasi semua masalah kebudayaan.
- (f) Mengeluarkan kebijakan politik yang secara teknis dalam hal ini ditetapkan oleh Menteri PD dan K bersama-sama Menteri PP dan K.
- (g) Mengeluarkan kebijaksanaan teknis yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Menteri PD dan K.

Guna membantu menteri menyelesaikan pekerjaan tertentu dapat diangkat seorang Pembantu Utama.

Susunan Biro dan Unit pelaksana lainnya di lingkungan Departemen PD dan K antara lain sebagai berikut. Biro dan setingkatnya yang dipimpin oleh seorang Kepala

Bagian terdiri atas:

- (1) Biro Urusan Keuangan
- (2) Bagian Urusan Pengawasan Keuangan
- (3) Bagian Urusan Subsidi
- (4) Bagian Urusan Pegawai
- (5) Bagian Urusan Bangunan
- (6) Bagian Urusan Perbekalan
- (7) Bagian Urusan Umum
- (8) Bagian Urusan Penerangan

Adapun unit-unit yang dipimpin oleh Kepala Jawatan/Lembaga/Dinas/Biro meliputi antara lain:

- (1) Jawatan Pendidikan Umum.
- (2) Jawatan Pendidikan Kejuruan.
- (3) Jawatan Pendidikan Teknik.
- (4) Jawatan Pendidikan Jasmani.
- (5) Jawatan Kebudayaan.
- (6) Jawatan Pendidikan Masyarakat.
- (7) Lembaga Sejarah Antropologi.
- (8) Lembaga Bahasa dan Kesusastraan.
- (9) Dinas Purbakala dan Peninggalan Nasional.

- (10) Dinas Penerbitan Balai Pustaka.
- (11) Biro Perpustakaan.
- (12) Biro Pemuda.

3) Tugas-tugas dan Tata Susunan Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan

- a). Mengatur, menyelenggarakan, membimbing, dan mengawasi semua usaha pendidikan tinggi dan yang bertalian dengan itu, baik negeri maupun swasta.
- b). Membimbing dan mengawasi perkembangan ilmu pengetahuan.

Semua kebijakan politis-teknis ditetapkan oleh Menteri PTIP bersama-sama Menteri PP dan K, sedangkan kebijakan teknis semata-mata pelaksanaannya ditetapkan oleh Menteri PTIP. Dalam menyelenggarakan kegiatan departemennya, Menteri PTIP dapat mengangkat seorang Pembantu Utama.

Departemen PTIP terdiri atas:

- (1) Biro Menteri PTIP.
- (2) Direktorat Pendidikan Tinggi.
- (3) Direktorat Ilmu Pengetahuan.

Biro Menteri PTIP dipimpin oleh seorang kepala biro, yang terinci atas beberapa bagian dan dipimpin oleh masing-masing kepala bagian, yaitu:

- (a) Bagian Urusan Keuangan
- (b) Bagian Urusan Pengawasan Keuangan
- (c) Bagian Urusan Subsidi
- (d) Bagian Urusan Pegawai
- (e) Bagian Urusan Bangunan
- (f) Bagian Urusan Perbekalan
- (g) Bagian Urusan Penerangan
- (h) Bagian Urusan Umum

Direktorat Pendidikan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala direktorat, dan bagian-bagian di dalamnya terdiri atas:

- (a) Bagian Urusan Perkembangan Pendidikan Tinggi.
- (b) Bagian Urusan Kemahasiswaan.

- (c) Bagian Urusan Pendidikan Tinggi Luar Negeri.
- (d) Bagian Urusan Tata Usaha.

Direktorat Ilmu Pengetahuan dipimpin seorang Kepala Direktorat dengan empat bagian di bawahnya yang masing-masing dipimpin seorang Kepala Bagian, antara lain:

- (a) Bagian Urusan Ilmu Kerohanian-Kebudayaan.
- (b) Bagian Urusan Ilmu Sosial.
- (c) Bagian Urusan Ilmu Hayat.
- (d) Bagian Urusan Teknologi.

Dalam menyelenggarakan kebijakan departemennya, Menteri PP dan K mengatur lebih lanjut perincian tugas-tugas dan wewenang menteri-menteri yang bersangkutan maupun tugas-tugas Sekretariat Menteri masing-masing dengan terlebih dahulu bermusyawarah dengan Menteri PD dan K dan Menteri PTIP.

Apabila kita melihat lebih ke belakang, maka satu hal yang pantas dicatat adalah bahwa pemekaran sayap Departemen PP dan K ini mempunyai implikasi politis tertentu, yakni ingin mengoptimalkan wewenang dan cakupan tugas yang sebelumnya diselenggarakan oleh Jawatan Pendidikan Tinggi departemen tersebut. Presiden menunjuk Mr. Iwa Kusumasumantri untuk menjabat Menteri PTIP.²⁰ Alasan kuat untuk mengadakan departemen ini adalah agar konsepsi Manipol-USDEK bisa dengan mudah diimplementasikan dalam lingkungan pendidikan tinggi, khususnya di perguruan-perguruan tinggi, universitas-universitas, akademi-akademi, dan sebagainya. Dengan demikian, diharapkan Departemen PTIP ini dapat merupakan unsur komplementaris Departemen PD dan K yang pada umumnya menuju ke arah tercapainya doktrin revolusi, yakni terciptanya masyarakat sosialisme Indonesia. Patokan ini sangat jelas terlihat dalam Undang-undang No. 22 tahun 1961 tentang perguruan tinggi, khususnya mengenai Pedoman Dasar Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, yang sampai sekarang masih berlaku. Undang-undang tersebut terdiri atas 10 Bab, 37 Pasal. Disebutkan di dalam penjelasan umumnya, antara lain:"Perguruan Tinggi adalah alat Revolusi. Tujuannya adalah membentuk manusia susila yang berjiwa Pancasila dan bertanggung jawab akan

terwujudnya masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan beradab.²¹

4.6 *Problematika dan Beberapa Kebijakan yang Menonjol*

Sejak tahun 1962 sistem pendidikan untuk jenjang SMP dan SMA mengalami perubahan sehubungan dengan dihasilkannya perumusan-perumusan terakhir mengenai rencana pelajaran (*leerplan*, bhs. Belanda) atau rencana pendidikan bagi kedua jenis sekolah tersebut. Rencana pelajaran bagi SMP Gaya Baru ini dijalankan mulai tanggal 1 Agustus 1962. Rencana baru ini menghapuskan pembagian, atas bagian A dan B di sekolah-sekolah, sehingga semua pelajar mendapat kesempatan menerima pelajaran yang sama. Dengan demikian, secara psikologis lenyaplah "perasaan kurang" yang sebelumnya sering dirasakan oleh siswa-siswa SMP/SMA bagian A. Dalam rencana pendidikan baru itu juga dimasukkan dua mata pelajaran baru, yaitu Ilmu Administrasi dan Kesejahteraan Keluarga. Maksud praktis untuk memasukkan kedua mata pelajaran itu semata-mata untuk memberikan bekal keterampilan kepada para pelajar, yang karena sebab-sebab tertentu tidak dapat melanjutkan pelajarannya, untuk terjun ke masyarakat.²² Rencana di atas tadi adalah salah satu wujud nyata dari Instruksi Menteri PP dan K Prof Dr. Prijono mengenai konsep Sapta Usaha Tama dan Panca Wardhana di dalam masa Demokrasi Terpimpin.

Melihat banyaknya instruksi-instruksi yang dikeluarkan Menteri PP dan K waktu itu, memang ada target tertentu yang ingin dicapai oleh departemen ini. Yang paling menonjol adalah penataan tata tertib umum dan pelaksanaan kegiatan apresiasi seni dan kebudayaan. Perumusan rencana pendidikan yang dilakukan secara bertahap sejak awal taun enam puluhan terus dilakukan dan menghasilkan apa yang kemudian dikenal dengan Rencana Pendidikan 1964. Ini merupakan suatu kemajuan besar dalam artian konseptual, setelah hampir tujuh belas tahun sejak munculnya Rencana Pelajaran tahun 1947. Sebagaimana juga telah disinggung di muka bahwa kurikulum yang disusun saat itu mengikuti sistem Panca Wardhana berdasarkan Pancasila dan Manipol-USDEK, yang kemudian lebih dipertegas lagi lewat Penpres No. 19/1965.

Di samping kebijaksanaan Menteri PP dan K untuk menerapkan konsep Panca Wardhana, memang terdapat beberapa pemikiran dan ikhtiar pembaharuan yang mendorong lahirnya Rencana Pendidikan 1964 itu. Yang pertama adalah pemikiran tentang bagaimana caranya mewujudkan maksud pendidikan sebagaimana yang tercantum di dalam UU Pendidikan No. 4 tahun 1950, yakni mendidik anak-anak menjadi warga negara yang susila, cakap, dan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat dan tanah air.²³ Ini berarti bukan saja diinginkan agar sekolah-sekolah dasar yang ada waktu itu harus relevan dengan kebutuhan masyarakat, tetapi juga harus sekaligus dapat menjadi alat guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ini berarti bahwa sekolah-sekolah itu harus menjadi bagian integral dari masyarakat sekitarnya.²⁴ Pemikiran yang kedua ialah tentang perlunya mewujudkan cita-cita yang menginginkan agar kebudayaan bangsa Indonesia ini menjadi alas pendidikan nasional, yang terwujud lewat pengajaran bahasa Indonesia, bahasa daerah, sejarah nasional, agama, adat-istiadat, dan lain-lain, memperluas wawasan, dan menyempurnakannya agar tumbuh nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.²⁵ Yang ketiga adalah tentang perlunya Indonesia mengejar ketertinggalannya di dalam perlembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu pengetahuan alam (*science*) dan matematika. Yang keempat ialah mengenai perlunya penataan didaktik-metodik pengajaran di sekolah-sekolah yang meliputi tingkat dasar, menengah, dan atas. Model yang ingin diterapkan di sini lebih banyak menempatkan anak didik sebagai subjek proses belajar, di mana ia mampu berpikir kritis dengan cara-cara ilmiah, mampu mengembangkan sifat-sifat kreatif – dengan melakukan sendiri dan memikirkannya sendiri – dan memecahkan sendiri segala persoalan yang dihadapinya.²⁶ Yang terakhir adalah evaluasi yang bersifat umum terhadap Rencana Pelajaran 1947 dan Rencana Pelajaran Terurai 1952, yang baik isi maupun susunannya dipandang perlu untuk disesuaikan dengan keadaan saat ini – yang sudah berbeda – dengan keadaan pada tahun-tahun pertama sesudah Proklamasi Kemerdekaan, yang isinya dinilai mengarah kepada "Jawa sentris" atau khususnya "Solo sentris". Namun satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah

Instruksi Menteri Muda PP dan K No. 1/1959 tentang Sapta Usaha Tama, yang isinya antara lain menggiatkan kesenian dan olah raga, mengharuskan usaha halaman dan kegiatan menabung, mewajibkan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan koperasi dan sebagainya. Kemudian juga Instruksi Menteri PD dan K No. 2/1961 tentang pelaksanaan Panca Wardhana dan Hari Krida, yang pada kenyataannya kemudian sangat mendorong keluarnya Rencana Pendidikan 1964.

4.7 *Usaha-usaha Pengajaran dan Perbaikan yang Diselenggarakan*

Usaha-usaha yang dijalankan oleh Departemen PD dan K semasa kepemimpinan Dr. Prijono memang lebih terpusat pada pemberian bentuk sistem pendidikan yang dikembangkan waktu itu, yakni sistem Panca Wardhana, yang artinya adalah lima segi perkembangan. Penataan pada tahap pertama adalah lewat instruksi-instruksi dan evaluasi secara menyeluruh terhadap produk-produk strategis bidang pendidikan yang telah ada sebelumnya. Yang paling menonjol pernah dilakukan oleh Menteri Prijono adalah penolakannya terhadap Undang-undang Pokok Pendidikan 1950, yang secara eksplisit hanya cocok untuk pelaksanaan pendidikan nasional di masa demokrasi liberal. Konsekuensi logis yang terjadi adalah perombakan kurikulum di semua tingkat dan jenis sekolah dalam lingkungan Departemen PD dan K dan menggantikannya dengan kebijaksanaan dan kurikulum baru yang lebih bisa mengikuti alur sistem pendidikan Panca Wardhana yang berdasarkan Pancasila-Manipol/Usdek.

Sebenarnya banyak kalangan para pendidik yang tidak menyetujui langkah "banting stir" dalam kebijaksanaan baru Menteri Prijono ini, tetapi suara-suara yang berlawanan itu jarang muncul sampai ke permukaan. Keluhan-keluhan mereka itu pada umumnya beranjak dari suatu evaluasi umum bahwa Undang-undang Pokok Pendidikan 1950, yang menetapkan dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah, sebagaimana tertera dalam pasal 4 undang-undang tersebut yang menyebutkan bahwa pendidikan dan pengajaran berdasarkan asas-asas yang termaktub dalam Pancasila, Undang-undang Dasar Negara

Republik Indonesia, dan atas kebudayaan kebangsaan Indonesia. Apa yang kemudian terurai dalam konsepsi pembaharuan pendidikan yang telah disiapkan oleh Jawatan Pendidikan Umum Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan pada tahun 1957, antara lain mengatur tujuan pembaharuan pendidikan dan pengajaran di sekolah dasar, fungsi umum sekolah-sekolah dasar, asas-asas didaktik rencana pelajaran, usaha-usaha yang harus dilaksanakan segera di dalam pembaharuan pendidikan dan pengajaran di jenjang pendidikan dasar, termasuk pula di dalamnya penyusunan rencana pelajaran baru, pendidikan guru, penyiapan sarana dan prasarana, serta organisasi dan kelengkapan administrasinya.²⁷

Yang jelas usaha yang dilakukan oleh Menteri Prijono adalah merombak secara total konsepsi pembaharuan pendidikan yang telah disiapkan oleh dapur kementeriannya sendiri. Kebijaksanaannya itu kelak dituangkan ke dalam program pengajaran departemen yang ditanganinya sendiri, yakni Departemen PD dan K, yang meliputi bidang-bidang pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan tinggi, pendidikan agama, dan pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa.²⁸

Kegiatan dalam lapangan pendidikan umum ini terutama diarahkan untuk menggalakkan:

1) Kegiatan pendidikan prasekolah

Pihak Departemen PD dan K menargetkan agar dalam waktu singkat dapat diselenggarakan sekurang-kurangnya sebuah Taman Kanak-kanak Negeri di tiap-tiap ibu kota kabupaten di seluruh Indonesia. Untuk merealisasikan rencana ini telah dilakukan beberapa kegiatan, seperti membuka TK-TK Teladan di ibu kota-ibu kota propinsi yang bertugas memantau kelayakan bagi usaha-usaha penyelenggaraan TK-TK di daerah-daerah kabupaten, kotamadya, dan kota-kota kecamatan lainnya.

2) Program kewajiban belajar

Langkah yang dijalankan Departemen PD dan K pada waktu itu, khususnya yang berhubungan dengan program ini, tidak hanya terbatas pada pencapaian sasaran pemberantasan buta

huruf (PBH) terutama pada anak-anak usia sekolah. Oleh karena itu, sejak tahun 1964 dicanangkan satu target nasional agar tiap-tiap desa di seluruh tanah air memiliki minimal sebuah Sekolah Dasar.

3) Program pembaharuan sekolah dasar

Di samping Sekolah-sekolah Dasar yang telah ada waktu itu, pemerintah c.q. Departemen PD dan K bermaksud menyelenggarakan Sekolah-sekolah Dasar Gotong Royong, yang menurut rencana akan diadakan tiap-tiap ibu kota kecamatan. Model sekolah dasar ini di waktu-waktu kemudian diharapkan akan menjadi model percontohan bagi SD-SD lain yang ada di sekitarnya. Penekanan materi pelajaran yang diberikan kepada anak didik disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat di tengah-tengah sekolah tersebut berada. Mata-mata pelajaran tambahan yang diberikan meliputi usaha-usaha tani, perikanan, peternakan, dan perbengkelan/pertukangan.

4) Program kelas masyarakat

Program Kelas Masyarakat ini sebenarnya tidak berbeda jauh dengan program kewajiban belajar di muka dan prioritas utama memang diberikan kepada mereka yang telah lulus dari jenjang Sekolah Dasar yang tidak tertampung oleh Sekolah-sekolah Lanjutan Pertama (SLTP). Lamanya program pendidikan ini antara satu sampai dengan tiga tahun. Sifat pendidikan ini sebenarnya adalah untuk menyiapkan kader-kader pembangunan yang terampil yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lingkungan masyarakat yang terdekat.

5) Program pembaharuan sekolah menengah pertama

Menyelenggarakan pembaharuan terhadap SMP-SMP yang ada pada masa itu ialah dengan membentuk SMP Gaya Baru, yang di dalamnya tidak terdapat lagi pembagian ke dalam Bagian A dan B di kelas III. Konsekuensi perubahan itu meliputi tata susunan mata pelajaran, materi pelajaran, penyelenggaraan bimbingan dan konseling terhadap anak-anak didik, sistem ujian akhir, dan sebagainya. Usaha-usaha pembaharuan ini didasarkan atas jiwa Pancasila dan Manipol serta sistem pendidikan Panca Wardhana.

Adapun tata susunan materi pelajaran yang diberikan kepada para anak didik itu meliputi:

- (a) Kelompok Dasar, yang terdiri atas *Civics* (Kewarganegaraan), Bahasa Indonesia, Sejarah Indonesia, Ilmu Bumi Indonesia, Pendidikan Agama/Budi Pekerti dan Pendidikan Jasmani.
- (b) Kelompok Cipta, yakni materi-materi pelajaran yang dapat memberi dasar-dasar pengetahuan guna membentuk tenaga-tenaga kejuruan yang ahli dan terampil.
- (c) Kelompok Rasa Karya: materi-materi pelajaran di dalam kelompok ini sebenarnya bertujuan ingin membiasakan anak didik memenuhi tuntutan sosialisme Indonesia, yang memiliki etos kerja yang tinggi, memiliki wawasan persatuan nasional yang kokoh, dan patriotisme.
- (d) Krida, yakni suatu kegiatan ekstra yang memberi kesempatan luas bagi pelaksanaan sistem Panca Wardhana, di mana para anak didik diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berkreasi dan mengembangkan hasil-hasil karya mereka, baik di lingkungan maupun di luar sekolah.

Satu hal yang merupakan kemajuan yang berarti adalah bahwa mulai saat itu di SMP-SMP diselenggarakan kegiatan bimbingan dan konseling (*guidance and counseling*), yang bertujuan menyerap dan mengetahui sebanyak mungkin segi-segi positif dan potensi mental yang berdaya guna dari tiap-tiap anak didik. Selain itu, diadakan pula perubahan-perubahan ke arah desentralisasi penyelenggaraan ujian, sehingga ujian-ujian negara tersebut akhirnya dapat diadakan di masing-masing sekolah.

6) Program Sekolah Menengah Atas Gaya Baru

Program pembaharuan di SMA-SMA ini juga meliputi perbaikan struktur, komposisi materi yang diajarkan, mata pelajaran, bimbingan dan konseling, dan pelaksanaan ujian-ujianya. Pembagian SMA ke dalam Bagian A, B, dan C dihapuskan serta digantikan oleh format gaya baru, di mana hanya ada satu kelompok untuk kelas I, empat kelompok (Budaya, Sosial, Ilmu Pasti, dan Ilmu Pengetahuan Alam) untuk kelas II dan III. Struktur baku untuk setiap SMA di seluruh Indonesia adalah 1-4-4.

Program pembaharuan di bidang pendidikan kejuruan yang dijalankan waktu itu meliputi perbaikan rencana pelajaran bagi semua jenis sekolah kejuruan, penetapan sistem Panca Wardhana sebagai sistem pokok pendidikan dan pengajaran, dan menetapkan *civics*, kesejahteraan keluarga, dan krida sebagai mata pelajaran wajib bagi semua sekolah, serta koperasi sesuai dengan Instruksi Presiden No. 3 tahun 1960. Selain itu ujian pusat diganti dengan ujian-ujian sekolah.

Prioritas utama di dalam program ini diletakkan pada keinginan meningkatkan pengadaan dan kualitas para pengajar, secara lebih khusus yaitu guru-guru yang mengajar pada jenjang Sekolah Dasar. Program tersebut dikenal dengan Pendidikan Guru untuk Sekolah Dasar. Untuk ini dilakukan penggabungan SGA dengan SGTk menjadi Sekolah Pendidikan Guru (SPG). Selain itu, ditempuh pula jalan pintas untuk mengatasi kekurangan tenaga guru ini dengan menyelenggarakan pendidikan-pendidikan guru khusus, yang pada masa itu dikenal dua macam:

a) Sekolah Pendidikan Guru Khusus I

Mereka yang diterima belajar dalam program ini adalah para lulusan SD dengan lama pendidikan enam tahun. Umumnya setelah para pelajar itu duduk di kelas V, mereka memperoleh kesempatan mengajar selama dua tahun dan setelah itu diberi kesempatan menyelesaikan pendidikannya.

b) Sekolah Pendidikan Guru Khusus II

Mereka yang diterima belajar dalam program ini adalah para lulusan SMP, yang setelah setahun belajar mereka dapat mengajar di SD, dan sesudah mengajar selama dua tahun mereka ini diperbolehkan mengikuti program kursus tertulis dari Balai Pendidikan Guru (BPG) di Bandung sampai memperoleh ijazah SPG.

Program yang cukup menonjol dan sudah dilaksanakan beberapa waktu sebelumnya adalah penggabungan kursus-kursus B I/B II dan Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP) dengan FKIP). Kebijakan ini dijalankan secara bertahap sejak tahun 1961, di mana waktu itu kursus-kursus

B I/B II diubah penyelenggaraannya menjadi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, dan kepada para kursis B I dan B II diberikan kesempatan menyelesaikan pendidikan mereka terakhir sampai tahun 1964. Tujuan integrasi ke dalam FKIP itu sebenarnya untuk menghapuskan berbagai ragam wadah pendidikan guru untuk sekolah-sekolah lanjutan. Tetapi kemudian karena alasan perlunya untuk mendidik guru-guru sekolah lanjutan yang pada masa itu memang masih kurang, maka pada tahun 1962 Departemen PD dan K mendirikan Institut Pendidikan Guru (IPG). Lembaga ini hanya sempat berjalan dua tahun karena pada tahun 1964 IPG dan FKIP dilebur menjadi satu ke dalam Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP). Sementara IKIP mulai berjalan, pemerintah juga menyelenggarakan kursus-kursus Dinas Akta Guru yang mendidik guru-guru yang akan mengajar di Sekolah-sekolah Lanjutan Pertama.

Usaha lain yang dilaksanakan waktu itu adalah kegiatan penataran dan peningkatan kembali kualitas guru. Kegiatan ini telah dimulai beberapa waktu sebelumnya dengan mengirimkan guru-guru Sekolah Dasar dari berbagai daerah untuk tugas belajar ke PGSLP, kursus-kursus B I/B II, dan kemudian ke IKIP. Sebagian dari mereka yang mengikuti program ini ada yang dikirim keluar negeri, sedangkan di dalam negeri pusat pendidikan ini, yang terdiri atas Balai Pendidikan Pengetahuan Alam, Balai Pendidikan Keperagaan, dan Balai Pendidikan Guru, kesemuanya berada di Bandung.

Dalam rangka menanggulangi kekurangan tenaga-tenaga guru, terutama di daerah-daerah di luar Pulau Jawa, proram Pengerahan Tenaga Mahasiswa – yang sudah dimulai sejak tahun 1951 – terus dijalankan sampai tahun 1963. Program ini sangat besar sahamnya dalam menjembatani kekosongan tenaga guru di daerah-daerah terpencil tersebut untuk sementara waktu sampai munculnya guru-guru yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga pendidikan guru yang ada. Pada mahasiswa yang sedikit-dikitnya telah mencapai tingkat *propaedeuse* yang ikut program PTM ini dapat diangkat menjadi guru di SMA dan sederajatnya untuk jangka waktu dua sampai tiga tahun. Rasa antusias para mahasiswa mengikuti program PTM Departemen

PD dan K kelihatannya cukup besar, dan di antara mereka yang ikut serta itu terdapat pula para mahasiswi.

Perubahan lain yang terjadi yakni di bidang pendidikan ekonomi, khususnya SMEA. Sekolah ini yang sebelumnya tidak terbagi dalam jurusan tertentu mengalami perubahan, yang disesuaikan dengan pola pendidikan ekonomi nasional yang berdasarkan Sosialisme Indonesia, sehingga dibagi ke dalam 3 jurusan, yakni: Jurusan Koperasi, Jurusan Tata Buku dan Jurusan Tata Usaha.

Pendidikan teknik, khususnya Sekolah Teknik Negeri (STN) dan Sekolah Teknik Menengah (STM) tak luput pula mengalami perbaikan-perbaikan sebagaimana yang dialami oleh sekolah-sekolah kejuruan lainnya. Pembaharuan yang dilakukan meliputi rencana kurikulum baru bagi STN dan STM serta pendidikan teknik menengah pada umumnya, yang berpedoman pada keinginan untuk menyiapkan anak-anak didik kelak menjadi tenaga-tenaga teknologi yang terampil, serta menyiapkan mereka untuk dapat meneruskan pendidikannya ke jenjang pendidikan teknik yang lebih tinggi. Langkah perbaikan dari segi pengadaan sarana belajar banyak dilakukan; juga dilakukan penggabungan Sekolah Kerajinan – yang lama pendidikannya dua tahun – ke dalam STN dengan lama pendidikan tiga tahun. Demikian juga dengan Sekolah Guru Pendidikan Teknik (SGPT) yang digabungkan ke dalam STM, yang kemudian menjadi STM Jurusan Khusus Instruktur. Perombakan dan pembaharuan yang dilaksanakan pemerintah terhadap sekolah-sekolah teknik ini semata-mata untuk mengejar target angka perimbangan antara sekolah vak teknologi dengan sekolah-sekolah umum (7 : 3) sebagaimana yang digariskan oleh TAP MPRS No. II/MPRS/1960. Namun karena keterbatasan dana yang ada maka skala perimbangan antara sekolah kejuruan dan sekolah umum seperti yang diinginkan di atas belum dapat terlaksana. Untuk mengatasi kesulitan ini, maka pihak Departemen PD dan K mengadakan kerja sama dengan beberapa lembaga dan instansi pemerintah lainnya, seperti Departemen Dalam Negeri c.q. beberapa Pemerintah Daerah Propinsi, Departemen Perindustrian Dasar, Perhubungan Laut, PN Dok Tanjung Priok, dan pihak Angkatan Udara.

Pendidikan kejuruan putri yang ada pada masa itu juga mengalami penyempurnaan, di mana Sekolah Kepandaian Putri (SKP) diubah menjadi Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama (SKKP) dengan lama pendidikan tiga tahun, dan untuk kelanjutannya diadakan Sekolah Kesejahteraan Keluarga Atas (SKKA), juga dengan lama pendidikan tiga tahun. Perubahan nama sekolah khusus putri ini didasarkan atas perubahan orientasi dari sistem pendidikan Panca Wardhana yang menempatkan pendidikan kesejahteraan keluarga itu ke arah kemajuan kehidupan keluarga dan masyarakat. Perubahan nama pendidikan putri menjadi kesejahteraan keluarga ini dimulai pada tahun 1962, dan terhitung sejak itu pula Sekolah Guru Kepandaian Puteri (SGKP) diubah menjadi SKKA, sedangkan setahun sebelumnya, yakni pada tahun 1961, Kursus B I Pendidikan Kepandaian Putri telah dimasukkan ke dalam FKIP menjadi Jurusan Kesejahteraan Keluarga.

Perubahan-perubahan lainnya terjadi pula pada pendidikan-kejuruan dan khusus lainnya, terutama yang diselenggarakan oleh Departemen PD dan K sendiri. Beberapa di antaranya, yakni Kursus Pendidikan Administrasi (KPA) dan Kursus Pendidikan Administrasi Tingkat Atas (KPAAT). Demikian juga dengan Kursus Karyawan Perusahaan (KKP) dan Kursus Karyawan Perusahaan Tingkat Atas (KKPAT), yang masing-masing terdiri atas dua jurusan, yakni Jurusan Tata Usaha dan Tata Buku. KKP ini adalah kelanjutan dari Kursus Dagang Pertengahan.

Pendidikan kejuruan yang berorientasi pada pekerjaan sosial yang pada masa itu ditangani oleh Departemen PD dan K antara lain: Sekolah Pendidikan Sosial Tingkat Atas (SPSA), Sekolah Hakim dan Jaksa, Sekolah Panitera Pengadilan, Sekolah Menggambar dan Pekerjaan Tangan, Akademi Pendidikan Pekerja Sosial, Akademi Hakim dan Jaksa, Akademi Administrasi Niaga (AAN). Sekolah Hakim dan Jaksa serta Sekolah Panitera Pengadilan adalah proyek kerja sama antara Departemen Kehakiman, Departemen PD dan K, dan pihak Kejaksaan Agung.

Menteri Prijono di masa akhir kedudukannya sebagai Menteri PD dan K pernah mengeluarkan satu kebijaksanaan yang

mengatur pelaksanaan kursus-kursus keterampilan tertentu yang memperoleh legalisasi (Ijazah Dep. PD dan K), yakni lewat SK Menteri PD dan K No. 69/1964 tertanggal 9 Juli 1964, yang isinya tentang penertiban penyelenggaraan kursus-kursus oleh pihak swasta itu ke dalam satu organisasi khusus dan tidak terpisah-pisah. Para kursis harus mengikuti silabus Departemen PD dan K, sedangkan ujian-ujian mereka ditentukan dari pusat dan demikian pula sertifikat kelulusan disahkan oleh Departemen PD dan K.

Dengan keluarnya Keputusan Presiden RI No. 97 tahun 1961 – dalam rangka penyempurnaan susunan Kabinet Kerja – terhitung mulai tanggal 3 Maret 1961 pemerintah mengangkat Prof. Mr. R. Iwa Kusumasumantri menjadi Menteri PTIP, sehingga semua wewenang pengaturan mengenai Perguruan Tinggi yang pada waktu Dr. Prijono menjabat sebagai Menteri PD dan K ditangani oleh Direktorat Pendidikan Tinggi, dialihkan di bawah Departemen PTIP. Namun sebelumnya telah banyak usaha perbaikan dan pembaharuan di lingkup pendidikan tinggi yang dilaksanakan pemerintah – seperti mendirikan universitas-universitas dan institut – setidak-tidaknya sejak tahun 1960. Tercatat beberapa di antaranya: Universitas Diponegoro (UNDIP) di Semarang, yang didirikan berdasar Peraturan Pemerintah No. 7/1960 terhitung sejak tanggal 15 Oktober 1960; Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin, yang berdiri berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41/1960, terhitung sejak tanggal 1 November 1960; Universitas Sriwijaya di Palembang, yang berdiri berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42/1960, terhitung sejak tanggal 3 November 1960; Institut Teknologi 10 November (kemudian berubah menjadi Institut Teknologi Surabaya=ITS) di Surabaya, berdiri terhitung sejak 3 November 1960 berdasarkan Surat Keputusan Menteri PP dan K No. 93367/UU jo. Peraturan Pemerintah No. 9/1961. (Mengenai ITS ini, pada waktu pendiriannya disepakati bahwa Dies Natalisnya kelak jatuh pada Hari Pahlawan 10 November); Universitas Syiah Kuala di Darussalam Banda Aceh, yang berdiri terhitung sejak 1 Juli 1961 berdasarkan SK Menteri PTIP No. 11/1961; Universitas Sam Ratulangi (yang semula bernama Universitas Sulawesi Utara dan Tengah) di Manado, yang berdiri terhitung

sejak 4 Juli 1961 berdasarkan SK Menteri PTIP No. 22/1961; Universitas Pattimura di Ambon, terhitung 1 Agustus 1962, berdasarkan SK Menteri PTIP No. 99/1962; Universitas Udayana di Denpasar Bali, terhitung sejak 17 Agustus 1962 berdasarkan SK Menteri PTIP No. 104/1962; Universitas Nusacendana di Kupang, terhitung sejak 1 September 1962 berdasarkan SK Menteri PTIP No. 111/1962; Universitas Mulawarman di Samarinda, terhitung sejak 27 September 1962 berdasarkan SK Menteri PTIP No. 130/1962; Universitas Riau di Pekanbaru, terhitung sejak 1 Oktober 1962, berdasarkan Sk Menteri PTIP No. 123/1962; Universitas Mataram di Mataram-Lombok (NTB), yang berdiri terhitung sejak 1 Oktober 1962 berdasarkan SK Menteri PTIP No. 139/1962; Universitas Cendrawasih di Jayapura, yang berdiri terhitung sejak 10 November 1962, berdasarkan Keputusan Bersama Wakil Perdana Menteri Koordinator Urusan Irian Barat dengan Menteri PTIP No. 140/PTIP tahun 1962; Universitas Brawijaya di Malang, terhitung sejak 5 Januari 1963 berdasarkan SK Menteri PTIP No. 1/1963; dan Universitas Jambi di Telanaipura-Jambi, terhitung sejak 1 April 1963 berdasarkan SK Menteri PTIP No. 25/1963.

Satu produk penting dari Departemen PTIP di tengah-tengah kemunculan universitas dan institut negeri pada awal tahun 1960-an itu adalah UU No. 22 tentang Pedoman Pokok Perguruan Tinggi yang diumumkan pada tanggal 4 Desember 1961. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa Perguruan Tinggi di Indonesia adalah lembaga ilmiah yang bertugas menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di atas perguruan tingkat menengah dan yang memberikan pendidikan serta pengajaran berdasarkan kebudayaan kebangsaan Indonesia dan dengan cara ilmiah, pada umumnya bertujuan: a. Membentuk manusia susila yang berjiwa Pancasila dan bertanggung jawab akan terwujudnya masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur, material dan spiritual; b. Menyiapkan tenaga yang cakap untuk memangku jabatan yang memerlukan pendidikan tinggi dan yang cakap berdiri sendiri dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan; c. Melakukan penelitian dan usaha kemajuan dalam lapangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan kehidupan masyarakat.²⁹

Prof. Mr. R. Iwa Kusumasumantri pada tanggal 12 Maret 1962 digantikan oleh Prof. Dr. Ir. Toyib Hadiwijaya. Selama masa Menteri PTIP yang kedua inilah keempat IKIP pertama yakni: IKIP Jakarta, IKIP Bandung, IKIP Yogyakarta, dan IKIP Malang berdiri, terhitung sejak tanggal 1 Mei 1963 berdasarkan SK Menteri PTIP No. 55/1963. Pada tahun ini juga dua universitas di Pulau Kalimantan berdiri, masing-masing Universitas Negeri Tanjungpura di Pontianak, yang berdiri terhitung sejak 20 Mei 1963 berdasarkan SK Menteri PTIP No. 53/1963, dan yang lain adalah Universitas Negeri Palangkaraya di Palangkaraya, yang berdiri sejak 10 November 1963 berdasarkan SK Menteri PTIP No. 141/1963. Adapun dua perguruan tinggi lainnya di Pulau Jawa yang berdiri pada tahun yang sama adalah Universitas Negeri Jendral Sudirman (UNSU) di Purwokerto, yang berdiri sejak tanggal 17 Agustus 1963 berdasarkan Keputusan Presiden No. 195/1963, dan Institut Pertanian Bogor (IPB) di Bogor, yang berdiri terhitung sejak 1 September 1963 berdasarkan SK Menteri PTIP No. 191/1963.

Problematika menonjol yang muncul sehubungan dengan berdirinya perguruan-perguruan tinggi negeri di beberapa kota di tanah air adalah masalah pengadaan tenaga pengajar yang bertugas di universitas dan institut tersebut. Menteri PTIP mengeluarkan Instruksi No. 11 tahun 1962 yang menunjuk beberapa universitas dan institut tertentu, antara lain Fakultas Kedokteran UI Jakarta, FKIP Universitas Pajajaran Bandung, ITB, Fakultas Kedokteran Hewan dan Fakultas Pertanian Universitas Indonesia (waktu itu belum menjadi IPB) di Bogor.

Di samping penataan struktur organisasi Departemen PTIP yang didasarkan atas prinsip mempertinggi daya efisiensi kerja, program mendirikan universitas dan institut negeri di beberapa tempat yang dinilai strategis tetap berlanjut. Sampai tahun 1965 – ketika Brigadir Jendral Dr. Sjarif Thajeb menjabat Menteri PTIP ketiga – terdapat sejumlah 26 Universitas Negeri, 2 Institut Teknologi, 1 Institut Pertanian dan 11 Institut Keguruan (IKIP).

Dalam sistem pendidikan nasional Panca Wardhana pada waktu itu memang terdapat ketentuan umum bahwa aspek aga-

ma harus memainkan peranan dalam proses pembentukan kader bangsa Indonesia yang terdidik. Penegasan ini lebih dipertajam lagi dalam TAP MPRS No. II/MPRS/1960, pasal 2 ayat (3), dan juga di dalam Undang-undang Perguruan Tinggi No. 22 Tahun 1961 (Lembaran Negara No. 302 Tahun 1961) pasal 9 ayat (2) sub. b. Beranjak dari dua landasan hukum tersebut, Menteri PTIP tak lama kemudian mengeluarkan Instruksi No. 3 Tahun 1962 pada tanggal 5 April 1962, serta penjelasannya No. 2 BPP/1962 tanggal 12 September 1962 yang antara lain berbunyi sebagai berikut:³⁰

- a. Ditetapkan Pendidikan Agama sebagai mata pelajaran untuk semua tingkatan pendidikan.
- b. Mata pelajaran Pendidikan Agama diberikan sebagai mata pelajaran untuk tentamen dan ujian-ujian.
- c. Setiap mahasiswa dapat dibebaskan dari kewajiban mengikuti kuliah dan menempuh tentamen serta ujian mata pelajaran tersebut asal saja yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa ia antara lain tidak menganut suatu agama.

Yang terakhir tak luput dari perhatian pemerintah adalah langkah perbaikan terhadap sekolah-sekolah khusus, baik SD maupun SMTP luar biasa untuk anak-anak didik tunarungu, Pemerintah berusaha meningkatkan fasilitas sekolah dan tenaga pengajarnya, dan memantapkan kedudukan sekolah-sekolah tersebut sebagai unit penerima subsidi dari pemerintah. Sampai pada awal tahun 1960-an jumlah sekolah-sekolah jenis ini yang dimiliki pemerintah baru enam buah, sedangkan yang telah diselenggarakan oleh pihak swasta berjumlah 43 buah yang tersebar di berbagai kota di tanah air.

Secara umum memang kelihatannya kebijaksanaan penataan yang dilakukan oleh Departemen PD dan K sejak awal tahun 1960 cenderung memberi prioritas kepada bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pendidikan dan pengajaran. Namun dari apa-apa yang telah dilakukan itu, tidaklah berarti bahwa bidang-bidang atau aspek lainnya – yang menjadi tanggung jawab departemen ini – dilupakan begitu saja, sama sekali tidak. Malahan selama lima tahun sejak dikeluarkan

Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sangat terasa adanya suatu usaha yang dilakukan secara serentak oleh pemerintah untuk memupuk dan mengembangkan kebudayaan nasional yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Pedoman pihak Departemen PD dan K dengan sistem Panca Wardhananya adalah menggalang usaha-usaha pendidikan dan pengajaran secara nasional agar sejalan dengan perkembangan Demokrasi Terpimpin. Dengan cara demikian diharapkan akan terbentuk satu wawasan kebudayaan nasional yang diinginkan. Prof. Prijono selaku Menteri PD dan K mengarahkan agar segala sesuatu yang berhubungan erat dengan lingkup bidang kebudayaan di departemennya harus dianggap sebagai alat Revolusi, dan kemudian diarahkan untuk kepentingan politik negara yang sedang digalakkan secara nasional pada waktu itu. Bentuk-bentuk kebudayaan yang kemudian dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan seni itu dimassalkan di pelbagai kegiatan kurikuler sekolah-sekolah, baik di tingkat dasar, menengah maupun atas. Kesemuanya itu merupakan paket pendukung bagi pemberian isi sesungguhnya pada sistem pendidikan nasional Panca Wardhana.

Pada waktu Dr. Prijono digantikan oleh Ny. Artati Marzuki Sudirdjo sebagai menteri PD dan K, menyusul terjadinya krisis intern yang melanda departemen tersebut. Boleh dikatakan patokan-patokan penting yang telah digariskan oleh menteri sebelumnya tidak mengalami perubahan. Hal ini antara lain disebabkan karena Dr. Prijono masih menjabat sebagai Menteri Koordinator yang membidangi Kompartimen Pendidikan dan Kebudayaan di dalam Kabinet Dwikora (27 Agustus 1964 – 21 Februari 1966). Tambahan pula memang prioritas utama Menteri PD dan K Ny. Artati Marzuki dalam jangka pendek adalah menertibkan lingkaran dalam departemennya dan menciptakan suasana kerja yang baik, yang terbebas dari suasana kerja yang tidak menentu dan mengerem pengaruh serta dominasi golongan kiri di lingkungan Departemen PD dan K. Dari Program Kerja yang disusun kita dapat melihat secara jelas tugas pokok yang diemban Menteri Ny. Artati Marzuki, yakni melaksanakan secara lebih intensif dan terinci apa-apa yang telah dimulai oleh Menteri Prijono, pendahulunya.

4.8 *Penafsiran Baru terhadap Konsep Sistem Pendidikan Panca Wardhana dan Pergolakan Internal di Lingkungan Departemen Pendidikan*

Suatu perkembangan baru sebagai kelanjutan dari benih-benih pertentangan politik mulai bersemi di lingkungan Departemen Pendidikan, Dasar dan Kebudayaan. Benih-benih anarkis di tempat ini menjadi subur lewat kegiatan-kegiatan oknum-oknum tertentu yang menjadi anggota organisasi mantel PKI, yang bekerja dan menjadi fungsionaris di departemen tersebut. *Cripto-cripto* politik di departemen ini acap kali menyerang lawan-lawan politik mereka sambil menyebarkan isu-isu yang kadang-kadang sempat menimbulkan krisis hubungan antar sesama fungsionalis dalam Departemen PD dan K dan Kompartimen Pendidikan dan Kebudayaan pada umumnya.

Inilah satu ironi yang terjadi di mana-mana pada masa Demokrasi Terpimpin, yang semula menginginkan dengan persatuan nasional, agama, dan komunis akan menciptakan persatuan nasional, namun yang terjadi malahan mempertajam pertentangan politik antara partai-partai dan golongan. Sejak awal tahun enam puluhan, di Departemen PP dan K terbentuk dua blok. Kelompok yang pertama terdiri atas para pejabat dan para pegawai yang menganut ideologi komunis dan para simpatisannya, yang tergabung di dalam organisasi Serikat Sekerja Pendidikan (SSP). Di pihak lain adalah mereka yang berideologi marhaenis (PNI) dan para anggota partai politik yang berideologi agama. Mereka ini bergabung dalam Serikat Sekerja Pendidikan dan Kebudayaan (disingkat SSPK). Organisasi profesi tertua yang sudah lama dikenal, yakni Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) juga mendapat saingan dari PGRI Non-Vaksentral, satu organisasi mantel dari PKI. Sebagai akibatnya dari hari ke hari PGRI semakin sulit mempertahankan sifat "independen"-nya. Baik kelompok SSP maupun SSPK berusaha keras ingin berlomba menguasai situasi, dalam arti memberi nuansa dan arah pada setiap kebijaksanaan departemen, khususnya yang berupa program pendidikan dan kebudayaan nasional. Keadaan yang demikian menempatkan Departemen PP dan K seakan-akan sebagai ajang perjuangan ideologi partai.²⁷

Pertentangan antara kedua kelompok itu sejajar dengan polarisasi kekuatan politik di lingkungan masyarakat, yakni yang mencerminkan persaingan antara aliran nasionalisme, Islam, dan komunisme. Sebagaimana kita ketahui bahwa pengaruh ideologi terhadap kehidupan politik pada waktu itu membuat suasana politik seperti "api di dalam sekam", dan ini mempunyai pengaruh dalam kehidupan sehari-hari, terlebih lagi bagi kehidupan berorganisasi. Persaingan dua blok di Departemen PP dan K ini semakin dipertajam ketika Prof. Prijono mengajukan konsep Panca Wardhana sebagai sistem pendidikan nasional, dan Manipol-USDEK sebagai dasar pendidikan nasional. Pada mulanya tidak banyak terjadi gejolak yang terjadi, karena kelompok marhaenis dan agama di lingkungan Departemen PP dan K bisa menerima konsep tersebut, dengan pengertian bahwa Pancasila di sini bukan hanya merupakan dasar, tetapi juga sistem pendidikan nasional, sehingga tercermin isi moral falsafah negara Pancasila di dalam sistem pendidikan Panca Wardhana tersebut. Pada tanggal 16 – 18 Februari 1963 Lembaga Pendidikan Nasional, organisasi yang berafiliasi kepada PKI, menyelenggarakan sebuah seminar mengenai "Pendidikan Mengabdi Manipol". Di dalam seminar itu diumumkanlah gagasan LPN lewat pembicaranya yakni Dr. Busono Wiwoho bahwa mereka memiliki sistem pendidikan tersendiri yaitu Panca Cinta, yang meliputi: Cinta nusa dan bangsa, Cinta ilmu pengetahuan, Cinta kerja dan rakyat yang bekerja, Cinta perdamaian dan persahabatan antarbangsa-bangsa, serta Cinta orang tua (ibu bapak). Kelompok marhaenis dan agama menuduh bahwa sistem Panca Cinta ini menghilangkan sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Busono Wiwoho juga mengetengahkan pendapatnya bahwa Panca Cinta itu sesungguhnya adalah isi moral yang dikandung Panca Wardhana.²⁸ Rumusan Panca Cinta yang dikaitkan dengan sistem Panca Wardhana itu berbunyi sebagai berikut:

"Wujud konkret daripada perjuangan ini di Indonesia pada tingkat sekarang adalah melaksanakan garis-garis Manipol secara konsekuen di bidang perjuangan pendidikan melaksanakan "Panca Wardhana" dengan isi moral Panca Cinta".²⁹

Menurut para pemikir LPN tersebut Panca Cinta adalah nilai-nilai moral yang harus diwariskan kepada anak-anak generasi penerus bangsa. Inilah wujud nyata dari perbuatan kita memberi isi pada sistem pendidikan Panca Wardhana.

Adapun kejadian yang sempat menggegerkan dunia pendidikan di tanah air waktu itu adalah sikap yang diperlihatkan Menteri PP dan K yang termuat di dalam majalah "Pendidikan Nasional" No. 7-8, di mana Dr. Prijono menyatakan bahwa Panca Wardhana dan Panca Cinta tidak saling bertentangan, tetapi saling mengisi.³⁰ Forum seminar itu ternyata sangat mengaburkan sila I Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai akibatnya terjadilah konflik antara para pendukung kelompok SSPK di satu pihak melawan kelompok SSP di pihak lain di bawah atap Departemen PP dan K. Kelompok marhaenis dan agama sempat juga menyelenggarakan forum seminar tandingan, dan musyawarah itu mereka namakan "Penegasan Pancasila sebagai Dasar Pendidikan Nasional", yang diselenggarakan pada tanggal 16-17 Juli 1963 di Jakarta. Musyawarah kemudian memutuskan untuk mengusulkan kepada pemerintah c.q. Presiden RI agar menetapkan putusan yang tegas mengenai dasar dan sistem pendidikan nasional. Tindak lanjut yang datang dari pihak pemerintah adalah keluarnya Penpres No. 19/1965 tentang Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila.³⁵

Menteri Prijono sendiri tidak pernah menolak bahwa dia pernah memberi komentar, sehingga menimbulkan krisis di tingkat atas departemennya; bahkan terus terang mengakui ucapannya tersebut, yang menyatakan bahwa Panca Wardhana dan Panca Cinta itu pada hakikatnya tidak saling bertentangan, tetapi saling mengisi dan melengkapi. Terdapat kesan seolah-olah Menteri PP dan K memang sengaja menciptakan peluang untuk munculnya visi baru di bidang pendidikan yang justru merupakan antitesis hasil pemikirannya sendiri. Kecenderungan semakin ke kirinya orientasi politik Dr. Prijono - seorang intelektual yang dianggap sebagai peletak dasar sistem pendidikan Panca Wardhana menandai semakin meredupnya konsep sistem pendidikan Panca Wardhana itu sendiri.

Sikap bertahan Menteri Prijono terhadap protes-protes, baik dari lingkungan Departemen PD dan K maupun dari luar

ini, menimbulkan krisis hebat bagi departemen tersebut, antara lain berupa pemberhentian secara sepihak banyak pejabat teras, pembantu dekat menteri yang menentang kebijaksanaan menteri mereka. Keadaan yang cenderung anarkis ini memaksa pemerintah kemudian turun tangan memberhentikan Dr. Prijono dari jabatannya selaku Menteri PD dan K dan menggantikannya dengan Ny. Artati Marzuki Sudirdjo pada tanggal 27 Agustus 1964. Dalam menyelesaikan berbagai kemelut besar tatkala memulai tugasnya sebagai Menteri PD dan K yang baru, Ny. Artati Marzuki banyak dibantu oleh pihak pimpinan Angkatan Darat. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya masalah yang terjadi pada waktu itu.

Di bawah Menteri PD dan K Ny. Artati Marzuki Sudirdjo disusunlah garis besar program departemennya, yakni sebagai berikut:

1) Dasar

- a) UUD 1945, khususnya Bab XIII – pasal 31 dan pasal 31.
- b. TAP MPRS No. I/MPRS/1960, terutama Keputusan DPA No. 3/Kpts/SD/II/59 (sebagai lampiran), khususnya mengenai Usaha-usaha Pokok (Program Umum), D. Bidang Mental dan Kebudayaan. TAP MPRS No. II/MPRS/1960, terutama Bab II – pasal 2, Bidang Mental/Agama/Kerokhanian/Penelitian dan Resolusi MPRS No. I/Res/MPRS/1965, beserta lampiran-lampirannya;
- c) Program Kerja Kabinet Dwikora (Tri Program Pemerintah);
- d) Pedoman Kerja Pelaksanaan Revolusi dalam tahapan perjuangan TAVIP, terutama dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.

2) Program pokok

- a) Bidang pendidikan kebudayaan

- (1) Mengintensifkan penanaman ideologi negara dengan melaksanakan Manifesto Politik di bidang pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh swadaya swasta rakyat, atas:
 - (a) Dasar dan moral pendidikan nasional Pancasila dengan haluan Manipol/Usdek;
 - (b) Dengan sistem pendidikan nasional Panca Wardhana, dengan pengkhususan Nasakom untuk sekolah-sekolah swasta.
 - (2) Mengintensifkan usaha pelaksanaan Ketetapan-ketetapan MPRS di bidang pendidikan, terutama:
 - (a) Menyempurnakan pelaksanaan perimbangan pendidikan kejuruan dan umum 7 : 3 (baik pemerintah maupun swadaya rakyat);
 - (b) Menyempurnakan pelaksanaan kewajiban belajar;
 - (c) Melanjutkan penyelesaian pemberantasan buta huruf, serta melanjutkan pelaksanaan *follow-up*-nya.
 - (3)
 - (a) Mengintensifkan pelaksanaan Manifesto Politik di bidang kebudayaan dan mengganng segala unsur-unsur kebudayaan yang menyimpang dari ideologi negara dan melemahkan Revolusi (a.l. Manikebu).
 - (b) Mengenal kebudayaan serta kepribadian sendiri guna membina kebudayaan nasional yang progresif revolusioner serta menolak/memberantas pengaruh-pengaruh buruk kebudayaan asing.
- b) Bidang organisasi dan tata kerja
- (1) Mengadakan *regrouping* aparatur departemen secara menyeluruh (integral);
 - (2) Menyempurnakan hubungan kerja antara aparatur departemen PD dan K, baik di pusat maupun di daerah, atas dasar prinsip dekonsentrasi kewenangan dan penyelenggaraan;

- (3) Menyempurnakan hubungan dan kerja sama antara aparatur Departemen PD dan K dengan aparatur departemen/instansi-instansi lain dalam rangka pengembangan pendidikan dan pelaksanaan desentralisasi pendidikan.
- c) Bidang personalia
- (1) Menyempurnakan pelaksanaan *retooling* mental dan personalia secara menyeluruh sejalan dengan pelaksanaan *regrouping* aparatur atas dasar ideologi negara, prinsip peremajaan, serta syarat-syarat lain yang telah ditentukan oleh pemerintah;
 - (2) Menertibkan organisasi-organisasi karyawan dalam lingkungan Departemen PD dan K;
 - (3) Melancarkan iklim bekerja dengan membina ketsetiaan pada Panca Satya.
- 3) Pelaksanaan

Untuk pelaksanaan program kerja ini disusun rencana tahapan kerja yang disesuaikan dengan ambeg-parama-artanya pemerintahan perjuangan.

CATATAN BAB IV

1. Pipitseputra, *Beberapa Aspek dari Sejarah Indonesia, Aliran Nasional-Islam-Katolik sampai Akhir Zaman Perbedaan Paham 1973*, hal. 413.
2. "20 Tahun Indonesia Merdeka" Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, hal. 47.
3. Chalid Rasjidi (*et. al.*), *Seperempat Abad Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, hal. 301.
4. *Ibid.*, hal. 302.
5. "20 Tahun Indonesia Merdeka", hal. 48-49.
6. *Ibid.*, hal. 49.
7. *Ibid.*, hal. 50.
8. *Ibid.*, hal. 51.
9. *Ibid.*, hal. 52-53.
10. Soepardo (*et al.*), *Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia (Civics)*, hal. 356.
11. "20 Tahun Indonesia Merdeka", hal. 58.
12. *Ibid.*, hal. 59.
13. *Ibid.*, hal. 60.
14. *Almanak Organisasi Negara Republik Indonesia 1960*, hal. 263.
15. "20 Tahun Indonesia Merdeka", hal. 60.
16. *Ibid.*, hal. 61-62.
17. Lihat Ceramah Menteri Prijono yang berjudul "Pelaksanaan Pendidikan Nasional Berdasarkan Pancasila"

- (EYD), ceramah di depan Kursus Kader Revolusi di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 1964.
18. Waskito Tjiptosasmito (*et al.*), *Perjuangan Menegakkan Pancasila dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan* (Peristiwa di Jalan Cilacap 4 Jakarta antara tahun 1964–1966), hal. 3.
 19. Chalid Rasjidi (*et al.*), *Seperempat Abad Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (et al.)*, *op. cit.*, hal. 318–322.
 20. Kronologi Pendidikan di Alam Kemerdekaan, *KOMPAS*, Jumat, 16 Agustus 1985, hal. IX, kolom 6–7.
 21. *Ibid.*
 22. Nugroho Notokusanto (ed.), *Sejarah Nasional Indonesia VI, Jaman Jepang dan Jaman Republik Indonesia*, hal. 276.
 23. Lihat *Pikiran-pikiran dalam Pembaharuan Pendidikan di Sekolah*, hal. 6.
 24. Anwar Jasin, *Pembaharuan Kurikulum Sekolah Dasar di Indonesia* (Disertasi), hal. 146.
 25. *Pikiran-pikiran dalam Pembaharuan Pendidikan di Sekolah*, hal. 7.
 26. Anwar Jasin, *op. cit.*, hal. 147, lihat juga *Pikiran-pikiran dalam Pembaharuan Pendidikan di Sekolah*, hal. 20–30.
 27. "20 Tahun Indonesia Merdeka", hal. 48–57.
 28. Chalid Rasjidi (*et al.*), *op. cit.*, hal. 350–371.
 29. *Ibid.*, hal. 366–367.
 30. *Ibid.*, hal. 382.
 31. Waskito Tjiptosasmito (*et al.*), *op. cit.*, hal. 2–3., lihat juga Anwar Jasin, *op. cit.*, hal. 144.
 32. Anwar Jasin, *Ibid.*
 33. Waskito Tjiptosasmito (*et al.*), *op. cit.*, hal. 5.
 34. *Ibid.*, hal. 5–7.
 35. Anwar Jasin, *op. cit.*, hal. 145.
 36. Chalid Rasjidi (*et al.*), *op. cit.*, hal. 344–346.

BAB V MASA ORDE BARU SAMPAI AKHIR PELITA III (1986 – 1983)

5.1 Latar Belakang Politik, Pendidikan, dan Kebudayaan

Pendidikan merupakan kegiatan yang khas bagi manusia karena hanya manusia yang secara sadar melakukan usaha pendidikan untuk sesamanya. Meskipun pendidikan merupakan usaha manusia yang pasti terselenggara di manapun manusia berada, akan tetapi usaha pendidikan tidak boleh dibiarkan sebagaimana adanya saja. Hal ini disebabkan karena pendidikan memegang peranan penting dalam membudayakan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Usaha-usaha pendidikan, perlu didasarkan atas pemikiran-pemikiran yang matang, baik yang menyangkut pemikiran teoretis maupun pertimbangan praktis, yang dapat digunakan untuk mencapai hasil dalam pengembangan dan pembudayaan manusia secara maksimal.

Di Indonesia pemikiran dan penyelenggaraan pola pendidikan tertentu sudah dilaksanakan sebelum Indonesia merdeka. Pemikiran dan penyelenggaraan pendidikan itu banyak yang secara langsung menerima pengaruh dari luar, khususnya pemikiran yang baru dan maju. Setelah Indonesia merdeka pemerintah Indonesia terus-menerus mengusahakan sistem pendidikan atas dasar Pancasila. Kalaupun selama ini Indonesia sudah menggunakan tiga undang-undang dasar, tetapi dalam setiap undang-

undang dasar tersebut dasar falsafah Pancasila tetap dijadikan dasar falsafah negara yang dengan sendirinya menjadi dasar dan landasan idiil pendidikan di Indonesia.¹ Namun demikian, falsafah negara Pancasila selalu ditafsirkan sesuai dengan selera politik pada setiap masa.

Orde Baru yang merupakan suatu tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara, ingin meluruskan kembali kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Sejak timbulnya Orde Baru telah memunculkan pemikiran-pemikiran baru tentang pembaharuan pendidikan dan kebudayaan. Hal ini disebabkan karena Orde Baru telah menetapkan Era Pembangunan dalam jangka waktu tertentu, suatu masa yang mempunyai ciri-ciri mental khusus dan memberikan pengaruh terhadap kehidupan bangsa yang diisi dengan pembangunan dan diarahkan pada suatu tujuan tertentu.²

Oleh karena pembangunan pada masa Orde Baru ini dilaksanakan secara bertahap tetapi berlanjut, maka pemikiran-pemikiran tentang dasar, isi dan, tujuan pendidikan pun disesuaikan dengan tahap-tahap pembangunan yang ada, dengan pengertian, tahap yang satu merupakan landasan bagi tahap pembangunan berikutnya. Konsep-konsep pemikiran tentang pendidikan dan kebudayaan serta kebijaksanaannya dapat diteliti tahap demi tahap sejak timbulnya Orde Baru sampai dengan akhir Pelita III.

5.1.1 Konsepsi Pendidikan pada Masa Demokrasi Terpimpin

Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mulai berlaku lagi UUD 1945 sebagai Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pancasila sebagai falsafah negara. Dalam kenyataannya Demokrasi Pancasila berubah menjadi Demokrasi Terpimpin, di mana tekanan diletakkan pada aspek terpinpinnya, sehingga dalam prakteknya sudah mendekati kekuasaan diktator. Gejala inkonstitusional timbul dan tata laksana pemerintahan berjalan dari satu peraturan ke peraturan lain. Undang-undang Dasar 1945 sebagai dasar negara banyak yang telah dilanggar. Indonesia berada di bawah gelora Manipol/Used, yang telah menjadi dewa dalam kehidupan politik di Indonesia dan dewa

dalam bidang kehidupan lainnya, termasuk bidang pendidikan. Pancasila ditafsirkan menurut Manifesto Politik, Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia atau disingkat Manipol/Usdek.

Ajaran-ajaran revolusi yang tidak pernah selesai lama-kelamaan melahirkan sikap tujuan menghalalkan cara. Nasionalisme, agama, dan komunisme yang disingkat Nasakom dijadikan poros dalam mencapai tujuan Revolusi. Dalam kehidupan kepartaian muncul pengkotak-kotakan ideologi yang makin lama makin meruncing dan mengakibatkan ketegangan sosial dalam masyarakat.

Sebagai kelanjutan dari Dekrit Presiden serta mengingat Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 dan No. II/MPRS/1960 dalam bidang pendidikan dikeluarkan instruksi yang memuat sistem pendidikan Panca Wardhana, sebagai sistem pendidikan nasional dengan Pancasila dan Manipol/Usdek sebagai pelengkap-punya, menjadi asas pendidikan nasional. Pemikiran ini merupakan usaha yang baru dalam meninjau kembali falsafah pendidikan nasional. Di samping Panca Wardhana terdapat pula konsep pendidikan yang berdasarkan Panca Cinta, yang diumumkan oleh Lembaga Pendidikan Nasional yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam seminarnya yang berlangsung dari tanggal 16 – 18 Februari 1963. Hubungan antara Panca Wardhana dengan Panca Cinta ialah Panca Wardhana sebagai sistem pendidikan nasional dan Panca Cinta sebagai isi moral Panca Wardhana.³

Kedua konsep pendidikan tersebut telah menimbulkan pertentangan antara dua golongan dalam masyarakat. Di satu pihak golongan komunis yang membela sistem pendidikan Panca Wardhana dan di pihak lain golongan nasionalis dan agama yang mementang sistem tersebut. Mereka menghendaki agar Pancasila bukan hanya sebagai dasar, tetapi juga sebagai sistem pendidikan nasional. Pada tahun 1964 rencana pendidikan telah disusun menurut sistem Panca Wardhana berdasarkan Pancasila dan Manipol/Usde. Hal inilah yang menyebabkan pengunduran diri dua puluh tujuh pegawai tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pada tahun 1965 keluarlah Penetapan Presiden (Penpres) No. 19 tahun 1965 yang menetapkan dasar-dasar pendidikan, tujuan, isi moral, dan politik pendidikan nasional yang ditafsirkan menurut Manipol/Usdek. Begitu pula kurikulum pendidikan/persekolahan nasional kesemuanya berdasarkan Pancasila yang ditafsirkan menurut Manipol/Usdek.⁴ Lahirnya Penpres ini merupakan suatu usaha untuk mengatasi pertentangan antara dua golongan yang telah dikemukakan di atas, akan tetapi seperti telah dikemukakan rencana pendidikan telah disusun menurut sistem Panca Wardhana berdasarkan Pancasila dan Manipol/Usdek pada tahun 1964.⁵

Setelah lahirnya Orde Baru semua ketetapan tentang dasar, tujuan, dan isi pendidikan yang dirumuskan dalam Demokrasi Terpimpin dinyatakan tidak berlaku lagi. Satu-satunya undang-undang yang masih berlaku yang ditetapkan pada masa Demokrasi Terpimpin adalah Undang-undang No. 22 tahun 1961 yaitu undang-undang tentang pendidikan tinggi.⁶

5.1.2 *Konsepsi Pendidikan pada Masa Orde Baru*

Krisis-krisis politik yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan inkonstitusional seperti yang dikemukakan di atas mencapai puncaknya pada saat meletusnya G 30 S/PKI pada tahun 1965. Gerakan ini ditumpas oleh ABRI bersama rakyat dan lahirlah Orde Baru. Kabinet Ampera dibentuk dan dipimpin oleh Jenderal Soeharto sebagai ketua Presidium Kabinet.

Pemerintah Orde Baru mulai menciptakan kondisi politik yang bisa memungkinkan pembangunan nasional seperti yang ditegaskan dalam Seminar Angkatan Darat tahun 1966:

"Orde Baru pada hakekatnya adalah suatu sikap mental, tujuannya ialah menciptakan kehidupan sosial, politik, ekonomi, kulturil yang dijiwai oleh moral Pancasila, khususnya oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Orde Baru menghendaki suatu tata fikir yang lebih realistik dan prahmatis, walaupun tidak meninggalkan idealisme perjuangan, menghendaki diutamakannya kepentingan nasional".⁷

Dengan lahirnya Orde Baru maka dasar, tujuan, dan isi pendidikan nasional dipertegas kembali sebagai berikut:⁸

- a) Dasar pendidikan adalah falsafah negara Pancasila.
- b) Tujuan pendidikan adalah membentuk manusia Pancasilais sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh pembukaan dan isi UUD 1945.
- c) Isi pendidikan adalah: (1) mempertinggi mental-moral-budi pekerti dan memperkuat keyakinan beragama, (2) mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, dan (3) membina-memperkembangan fisik yang kuat dan sehat.

Rencana Pendidikan 1964 yang diwarnai oleh Panca Wardhana dan Manipol/Usdek tidak sesuai dengan kebijaksanaan pendidikan Orde Baru tersebut. Kurikulum 1968 disusun dengan bertitik tolak dari dasar dan tujuan pendidikan nasional tersebut dalam konteks pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Konsep inilah yang merupakan pemikiran utama tentang pembaharuan pendidikan dalam masa Orde Baru yang mendasari pemikiran-pemikiran dalam pembaharuan pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

5.2 Pembaharuan Pendidikan dan Kebudayaan

5.2.1 Periode Kabinet Ampera (1966–1968)

Dalam periode ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh dua menteri berturut-turut, yaitu Ki Sarino Mangunpranoto dari PNI yang menjadi Menteri P dan K pada saat Kabinet Ampera, dari tanggal 25 Juli 1966 sampai 11 Oktober 1967 dan Sanusi Hardjadinata dari PNI yang menjadi Menteri P dan K pada Kabinet Ampera yang disempurnakan dari tanggal 11 Oktober 1967 sampai tanggal 6 Juni 1968.

Konsep pemikiran pembaharuan pendidikan dan kebudayaan yang muncul dalam periode ini merupakan tantangan atau jawaban terhadap konsep pemikiran pendidikan dan kebudayaan pada periode Demokrasi Terpimpin. Hal ini sesuai dengan lahirnya Orde Baru yang bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Untuk mengetahui latar belakang pemikiran tentang pembaharuan pendidikan dan kebudayaan pada masa ini dapat

dilihat pernyataan yang dikemukakan oleh Sarino Mangunpranoto sebagai berikut:

"Situasi kenegaraan yang berdjalan seperti diatas, dimana banjak peraturan tiap kali berobah dan tidak konstitusional itu, membawa pengaruh kurang adanja tata tertib dalam dunia pendidikan. Situasi ekonomi mempengaruhi hidup dan kehidupan masyarakat Bangsa yang menular kepada djalannya Pendidikan bagi anak-anak. System persekolahan tidak mendjamin dan memberi harapan akan kemampuan tiap individu untuk menjelenggarakan sesuatu baginja. Achirnja Pendidikan menghasilkan urbanisasi dan inflasi intelek hingga terjadi pengangguran disana-sini.

Dunia Pendidikan tetap beredar dan harus berputar melalui prinsip "growth and change". sesuai dengan kodrat alamnja. Kita kembalikan ia kepada alam pikir, bahwa manusia adalah subject guna mentjapai pembangunan mental, spiritual dan material setjara individual. Mendidik harus diartikan memberi kemampuan untuk mengadakan sesuatu bagi keperluan hidupnja (een ieder in staat te maken om iets tot stand te brengen)".⁹

Pemikiran pendidikan sosial modern yang menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat sangat memegang peranan dalam pemikiran tentang pembaharuan pendidikan dan kebudayaan. Konsep-konsep pendidikan dari Ki Hajar Dewantara banyak yang diambil oleh Ki Sarino Mangunpranoto dalam mengemukakan dasar pikir politik pendidikannya. Agar dapat mengikuti secara jelas pokok-pokok pikiran Sarino Mangunpranoto dalam mengadakan pembaharuan pendidikan dan kebudayaan, di bawah ini dikemukakan pokok-pokok pikirannya sebagai berikut:¹⁰

5.2.4.1 Filsafat pendidikan

- 1) Kebudayaan suatu bangsa dapat diukur tinggi rendahnya dari sifat atau karakter bangsa itu sendiri. Begitu pula ukuran manusia sebagai individu dapat dilihat pada sifat atau karakter kebudiannya.
- 2) Usaha pendidikan tidak lain adalah memelihara individu menjadi pribadi yang tahu akan hak asasinya dengan me-

- nuntut adanya hak untuk mengatur diri sendiri dengan penuh tanggung jawab.
- 3) Pengakuan hak asasi pribadi dapat melahirkan prinsip demokrasi dalam pendidikan.
 - 4) Pendemokratisasian akan berhasil bila pertumbuhan (*growth*) dalam diri individu tidak dikekang, tetap bebas merdeka melalui kekuatan hidup yang dimiliki sejak manusia dilahirkan.
 - 5) Hidup yang bebas tidak berarti bebas sebebas-bebasnya tanpa batas. Oleh karena itu harus ada sistem "*among*" di mana individu dibina dan diarahkan dengan "*tut wuri handayani*", artinya mengarahkan dan memelihara pertumbuhan jiwa menurut saluran "Suci Tata" dan "Tertib Damai".
 - 6) Kesucian, ketaatan, dan kedamaian diukur berdasarkan kebuidan serta keadaban dan martabat bangsa itu sendiri.
 - 7) Adat istiadat suatu bangsa biasanya dipakai sebagai ukuran nilai kepribadian bangsa itu. Akan tetapi, adat-istiadat itu tidak bisa dipertahankan terus-menerus karena pada hakikatnya hidup manusia itu selalu mengalami pertumbuhan dan perubahan.
 - 8) Hidup atas dasar prinsip tri-kon (kontinu, konsentris, konvergen) dapat mengatur hubungan kehidupan kebudayaan yang berkembang secara universal. Dengan demikian, terjadilah hubungan antara suku-suku bangsa di Indonesia dan hubungan antara bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain.
 - 9) Pendidikan merupakan suatu upaya untuk mengembangkan dan mengadakan perubahan agar tercapai suatu tujuan, baik untuk pribadi, untuk kepentingan bangsa, maupun untuk kepentingan dunia.

5.2.1.2 Pendidikan adalah pembangunan

- 1) Konsep pemikiran bahwa manusia sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat adalah saling bergantung untuk

mewujudkan suatu kehidupan yang akan melahirkan suatu usaha pendidikan yang timbal balik.

- 2) Pendidikan adalah suatu usaha memelihara setiap jiwa individu untuk tumbuh dan berubah bagi kebaikan dirinya maupun kebaikan bangsanya serta untuk kepentingan umat manusia.
- 3) Dengan adanya pendemokratisasian pendidikan dapat ditumbuhkan jiwa individu yang berkembang tanpa terkekang, sehingga membuahkan hasil yang sesuai dengan bakatnya masing-masing.
- 4) Mendidik adalah usaha mengurangi sifat yang tidak baik (menipiskan) dan menambah (menebalkan) sifat-sifat yang baik. Inilah yang disebut pendidikan untuk mempribadikan seseorang, yaitu tahu akan harga diri, tidak merasa congkak tetapi juga tidak merasa rendah diri.
- 5) Usaha pendidikan tersebut di atas adalah suatu penerapan pembangunan mental melalui prinsip demokrasi, di mana semua pihak merasa memiliki hak dan kewajiban yang sama.
- 6) Pembangunan mental yang dilengkapi dengan pembangunan spiritual mendorong manusia kepada suatu kecerdasan yang tertuju kepada rasio. Kecerdasan membawa suatu rasionalitas yang dapat menumbuhkan kreativitas di dalam daya pikir seseorang. Dengan demikian, ia dapat menghasilkan sesuatu.
- 7) Mendidik tidak hanya menanamkan jiwa demokrasi dan sosial terhadap sesama saja, tetapi juga memberikan penghargaan guna kecerdasan otak seseorang.
- 8) Kecerdasan tidak mengarah ke intelektualisme, tapi yang dapat melahirkan spirit sebagai suatu kemampuan untuk menyelenggarakan pembangunan materil.
- 9) Pendidikan harus dimulai dari lingkungan keluarga, kemudian sekolah, lalu masyarakat. Pendidikan dalam keluarga mula-mula ditekankan pada pendidikan mental, kemudian spiritual, akhirnya pendidikan materil. Dalam lingkungan

sekolah dimulai dari pendidikan spiritual, materil dan kemudian pendidikan mental. Di lingkungan masyarakat arah pendidikan berjalan secara simultan, baik mental, spiritual, maupun materil.

- 10) Atas dasar prinsip bahwa pendidikan adalah pembangunan, sedangkan pembangunan tercermin pada kehidupan ekonomi yang hanya dapat berkembang bila dilengkapi dengan teknologi, maka usaha pendidikan baru lengkap bila dilakukan bersama-sama dengan usaha di bidang ekonomi dan teknologi.
- 11) Pendidikan yang dimulai sejak di lingkungan keluarga dan dilanjutkan dengan tambahan pengajaran dengan sistem sekolah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat yang menghadapi pembangunan ekonomi dan penyempurnaan teknologi.
- 12) Pendidikan harus menganut suatu falsafah bahwa manusia sendiri yang mengadakan (membangun) industri, perdagangan, transportasi, dan bukan ekonomi yang melahirkan manusia. Oleh karena itu, mendidik harus diartikan memberi kemampuan untuk mengadakan sesuatu bagi keperluan hidup.
- 13) Pendidikan dengan sistem persekolahan secara prinsipiel harus diubah dari "*theorie school*" menjadi "*doe school*", artinya mengusahakan sifat *vocational* dari keilmuan yang bersifat teoretis. Orientasi anak harus diubah dari kota sentris menjadi memakmurkan desa dengan industri agraris. Desa merupakan ruang sekolah.
- 14) Kurikulum harus ditinjau secara menyeluruh; harus diadakan sinkronisasi dari SD sampai Perguruan Tinggi. Karena keadaan geografi, sosial, dan budaya, diperlukan diferensiasi dengan pembangunan daerah masing-masing. Di samping itu ada unit kurikulum dalam beberapa mata pelajaran pokok guna mencapai kesatuan bangsa seperti bahasa, sejarah, ilmu bumi, *civics*.

5.2.1.3 Prasarana pendidikan

- 1) Unsur pokok pendidikan yang dimaksudkan dengan prasarana pendidikan di sini adalah prinsip-prinsip pokok yang dipakai sebagai prasarana pendidikan untuk meneruskan dan mewariskan kebudayaan bangsa Indonesia kepada generasi muda. Prinsip pokok itu terkandung dalam Mukadimah UUD 1945 yang tertulis dalam alinea terakhir. Susunan kata yang dirumuskan menjadi bagian pokok Mukadimah itu ialah suatu pernyataan spontan hasil cetusan jiwa dan nurani bangsa Indonesia. Ia lahir dari kancah penjajahan dan mencakup lima dasar prinsip hidup bangsa Indonesia. Oleh Bung Karno kelima dasar hidup tersebut diuraikan dalam lahirnya Pancasila dan dirumuskan dengan istilah *Pancasila*. Pancasila inilah yang menjadi prasarana bagi pendidikan yaitu, Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 2) Penerapan pendidikan Pancasila

Manusia dapat menghitung dengan kekuatan pikir (otak), akan tetapi dapat pula mengukur sesuatu dengan perasaan. Di samping pikir dan perasaan, manusia memerlukan alat kelengkapan jasmaniah yaitu daya dan gaya. Daya berarti tindak, sedangkan gaya artinya tanduk atau dalam bahasa Jawa disebut "*solah bawa*". Dengan demikian mendidik berarti mengembangkan akal, rasa dan membuahkannya dalam bentuk tindak tanduk atau *solah bawa*.

Dalam penerapan pendidikan Pancasila tidak bisa secara lain kecuali dengan menggunakan akal dan rasa sehingga menghasilkan *solah bawa* (tindak tanduk). Pancasila bukanlah suatu benda khasiat yang dapat diberi secara serah terima (*overgave – overname*) seperti barang-barang inventaris, melainkan suatu prinsip hidup bangsa Indonesia berupa kebudayaan yang harus diwariskan kepada generasi selanjutnya melalui pendidikan. Sebagai dasar untuk usaha

pendidikan dalam abad kedua puluh ini maka penerapan pendidikan Pancasila dilakukan melalui sarana:

- a) Pendidikan agama
- b) Pendidikan perikemanusiaan
- c) Pendidikan kesatuan bangsa
- d) Pendidikan kerakyatan atas dasar musyawarah
- e) Pendidikan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendidikan Pancasila ini dilaksanakan melalui tingkatan-tingkatan umur dan tiga sentra pendidikan.

Materi Pancasila yang merupakan kelima unsur kepribadian bangsa Indonesia dengan alat pikir sudah dapat dijalankan dalam pelbagai mata pelajaran, misalnya ceritera, membaca, ilmu bumi, sejarah, *civics*, mengarang, bahasa, dan lainnya. Agama diajarkan dalam dua bentuk, yaitu sebagai pembentuk mental yang dapat dilakukan bersama-sama dengan materi Pancasila. Materinya dapat dijalin dengan mata-mata pelajaran tersebut di atas serta buku-buku bacaan yang mengandung ajaran-ajaran agama, yang disebut pendidikan agama, sedangkan agar dapat menjalankan syariat-syariat agama menurut keyakinannya masing-masing perlu adanya pelajaran agama.

5.2.1.4 Struktur persekolahan

1) Sistem persekolahan

Di Indonesia pendidikan dibagi atas tiga tingkatan (6+3+3). Enam tahun pertama dibagi dalam dua tahap (3+3), yaitu tiga tahun pertama dipakai sebagai pemberi dasar pengembangan kecerdasan dengan lebih mempertajam panca indera, dan tiga tahun kedua memberikan persiapan untuk memperluas pandangan. Tahap tiga tahun kemudian pendidikannya disesuaikan dengan permulaan kedewasaan anak. Oleh karena masa ini merupakan transisi ke masa dewasa, maka pelajaran yang diberikan harus menekankan pada keterampilan dan kreativitas. Tiga tahun terakhir adalah periode dewasa untuk menginjak alam madya. Periode dewasa ini lebih tampak dalam merenung dari bertindak seara kongkret. Jiwa "*sturm und drang*" mengalir pada alam fantasi yang menimbulkan sifat keberanian. Oleh sebab itu, anak harus dibawa dari alam fantasi ke alam nyata

yang berhubungan dengan cita-cita pembangunan. Dengan demikian, idealisme tidak mengarah pada cita-cita yang utopis.

2) Penyusunan kurikulum

Kurikulum harus disesuaikan dengan penggolongan umur serta periodenya. Penggolongan menurut tingkat umur yaitu, Taman Indria (3–5 tahun), Taman Kanak-kanak (6–9 tahun), Taman Muda (9–12 tahun), Taman Dewasa (12–15 tahun), dan Taman Madya (15–18 tahun). Pada tingkat SMP (Taman Dewasa) digunakan alat-alat keterampilan (*vocational*), sedangkan pada tingkat SMA (Taman Madya) kurikulum yang akan disusun adalah 60% untuk materi keterampilan (menjurus) dan 40% untuk materi kecerdasan (*spiritual*). Bagi lulusan SMA gaya baru tetap dibuka kesempatan untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi dengan jalan menempuh ujian persiapan selama satu tahun. Perguruan tinggi diperuntukkan bagi mereka yang mempunyai bakat keilmuan tinggi, sedangkan bagian terbesar, sejak SMP sudah dipersiapkan untuk keterampilan.

3) Pendidikan guru

Pendidikan guru perlu disesuaikan dengan sistem sekolah gaya baru ini dan dibagi dalam dua tingkat. Pertama, *Yunior College* untuk lulusan SMA ditambah satu tahun atau SMA ditambah empat tahun untuk menjadi guru Taman Kanak-kanak, Taman Muda dan Taman Dewasa. Bila sistem ini tidak mencukupi jumlah guru yang diperlukan, diadakan sistem *upgrading* bertingkat dari SGC1 ke SGC2 ke SGA (atau dari SGLP ke SGLA), ke *Yunior College*, kemudian ke *College*. *Upgrading* ini berjalan terus sehingga hanya ada satu macam guru saja, yaitu lulusan *College* untuk seluruh pendidikan dasar dan menengah.

4) Fungsi IKIP dalam sistem pendidikan baru

IKIP berfungsi menyelenggarakan *College*, *Yunior College*, dan *upgrading-upgrading* yang tersebar di seluruh daerah dengan institut induk yang terdapat di beberapa tempat penting. Kurikulum IKIP lebih banyak disinkronkan dengan kurikulum SMA gaya baru ini.

- 5) Fungsi dan tujuan Perguruan Tinggi Sesuai dengan Undang-undang No. 12 tahun 1961, maka fungsi Perguruan Tinggi adalah:
- Menjadi sumber inspirasi hidup kebudayaan nasional;
 - Pusat pendidikan rakyat untuk memodernisasikan kehidupan masyarakat
 - Mengilmiahkan segala sesuatu untuk mencapai tujuan hidup dan kehidupan bangsa pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.

Adapun tujuannya adalah:

- Meningkatkan skill pada tingkat rendah, menengah sampai tingkat tinggi.
 - Mendidik kader untuk *research-worker*.
 - Menyelenggarakan *rural education* untuk *rural development*.
- 6) Struktur Perguruan Tinggi menurut ruang gerak dan tugas
- Tugas daerah untuk menyiapkan skill dan power
 - Tugas nasional untuk mendidik kader
 - Tugas regional untuk menyelenggarakan riset
 - Tugas internasional untuk berkontinuitas dan konferensi

Adapun tugas IKIP adalah satu, yaitu tugas nasional.

- 7) Mata pelajaran wajib untuk semua jurusan di Perguruan Tinggi
- Filsafat umum yang dapat membawa jiwa ke arah etika, logika, dan metodik
 - Filsafat Pancasila dengan rangkaian seni budaya bangsa Indonesia
 - Filsafat pendidikan agama
 - Pendidikan kewiraan/kepramukaan dengan jalan berolah raga dan olah seni (aktivitas ekstra kurikuler)
 - Filsafat ekonomi yang bukan berdasarkan ekonomi sosialis Marxis/Leninis dan ekonomi kapitalis imperialis

Khusus bagi IKIP perlu ditekankan pada filsafat umum dan khusus, yaitu Pancasila ditambah psikologi umum dan psikologi khusus kanak-kanak dan psikologi masyarakat desa di samping sosiologi desa. Oleh karena IKIP mengarahkan orientasinya kepada memakmurkan desa dengan sistem *rural education*, maka eksperimen dan penelitian ditekankan kepada IKIP.

Semua pokok pikiran pembaharuan pendidikan yang dikemukakan di atas kemudian dijadikan sebagai dasar bagi penyusunan kebijaksanaan dalam pendidikan dan kebudayaan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada masa Kabinet Ampera, khususnya bagi penyusunan Kurikulum 1968.

5.2.2 Periode Kabinet Pembangunan I (1968–1973)

Periode ini merupakan tahap pertama pembangunan nasional sesuai dengan pentahapan pembangunan yang telah digariskan oleh pemerintah Orde Baru. Yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah Mashuri, S.H. dari tanggal 6 Juli 1968 sampai 28 Maret 1973.

Latar belakang pemikiran pembaharuan pendidikan dan kebudayaan pada periode ini seperti yang diungkapkan dalam Repelita I ialah bahwa perkembangan pendidikan yang telah dicapai selama ini kurang menunjang program pembangunan nasional. Hal ini disebabkan oleh beberapa masalah.¹¹

Pertama, keadaan pendidikan yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan antara jumlah penduduk usia sekolah dengan jumlah fasilitas yang dapat disediakan. ketidakseimbangan pendidikan secara horisontal antara jenis atau bidang pendidikan umum dan kejuruan yang menimbulkan kurangnya persediaan tenaga kerja untuk kebutuhan pembangunan. Ketidaseimbangan secara vertikal, yaitu perbandingan antara Sekolah Dasar, Lanuutan dan Perguruan Tinggi/Akademi.

Kedua, masih banyaknya buta huruf karena penambahan penduduk yang berusia sekolah. Ketiga, masih banyaknya *drop out*, terutama di SD dan Perguruan Tinggi. Keempat, mutu pendidikan yang rendah karena kelemahan kurikulum dan kurangnya tenaga pengajar. Kelima, kurangnya tenaga guru yang berwenang untuk mengajar.

Dari latar belakang masalah pendidikan yang kurang menunjang pembangunan tersebut timbul gagasan-gagasan dari para pendidik maupun pejabat di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyesuaikan sistem pendidikan dengan deap pembangunan.

5.2.2.1 *Basic Memorandum tentang pendidikan*

Pemikiran tentang pembaharuan pendidikan yang harus dilaksanakan untuk menunjang pembangunan yang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mashuri, S.H. pada tahun 1970 terdapat dalam *Basic Memorandum* tentang pendidikan.

Untuk mengetahui pokok pikiran dalam memorandum itu dapat diikuti uraian-uraian sebagai berikut:^{1 2}

1) Fungsi dan peranan pendidikan

Pendidikan terdiri atas totalitas pengalaman yang memungkinkan seseorang tumbuh dan berkembang sebagai manusia, sebagai anggota keluarga, sebagai warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia. Setiap masyarakat memberikan kepada sekolah-sekolahnya suatu tanggung jawab untuk merangsang pertumbuhan kepribadian melalui aktivitas-aktivitas berencana dan mempunyai sasaran.

2) Persyaratan-persyaratan bagi sekolah-sekolah di Indonesia

Pertama, sekolah hendaknya merupakan bagian integral dari masyarakat sekitar. Sesuai dengan asas pendidikan seumur hidup, sekolah hendaknya mempunyai dua fungsi, yaitu mampu memberikan pendidikan formal dan juga pendidikan nonformal, baik untuk pemuda maupun orang dewasa.

Kedua, sekolah hendaknya berorientasi pada pembangunan dan kemajuan, sehingga menyiapkan tenaga-tenaga kerja yang memiliki watak, pengetahuan, dan keterampilan untuk pembangunan bangsa dan negara di berbagai bidang.

Ketiga, sekolah harus mempunyai kurikulum, metode mengajar, dan program yang menyenangkan, menantang, dan cocok dengan tujuannya.

3) Dialog antara sekolah, orang tua murid, dan masyarakat

Harus dicari suatu mekanisme untuk menjamin terpeliharanya dialog secara kontinu antara sekolah, orang tua murid, dan masyarakat; juga dialog intra sekolah dan antar-sekolah. Dengan demikian implementasi pendidikan masing-masing unsur pendidikan dapat saling memperkuat untuk mencapai tujuan bersama.

4) Sasaran dan pelaksanaan pendidikan

Tujuan pendidikan dapat dijabarkan dalam set-set sasaran yang khas dalam sasaran-sasaran pendidikan sebagai berikut:

- a) nilai-nilai dan sikap-sikap (*values and attitudes*)
- b) pengetahuan (*knowledge*)
- c) proses-proses kognitif yaitu proses kemampuan dan tindakan untuk mengetahui sesuatu
- d) keterampilan (*skill*)
- e) komunikasi dan ekologi

Sasaran yang kelima ini penting karena di samping pembinaan manusia perlu juga diperhatikan adanya interrelasi antar-manusia dan lingkungannya, baik sosial, fisik, maupun biologis. Ketiga lingkungan ini perlu dikembangkan secara selaras.

5) Pembinaan sasaran pendidikan, kurikulum, dan silabus

Dalam pembinaan kurikulum dan silabus harus ditentukan perimbangan di antara keempat sasaran pendidikan tersebut beserta komponen-komponennya, dengan demikian, dapat ditentukan jenis-jenis mata pelajaran yang mencakup komponen tersebut. Kemudian diadakan penyebaran jenis mata pelajaran secara seimbang pada setiap target dan tahap pendidikan dan setelah itu dapat diberikan isi pelajaran yang paling sesuai. Sebagai contoh pendidikan watak yang bertujuan membentuk manusia Pancasila yang bertanggung jawab, cakap, dan bermanfaat melalui pendidikan kesenian dan jasmani dapat dibentuk apresiasi serta nilai-nilai kesenian dan estetika. Pendidikan kewiraan diberikan untuk memperlengkapi pendidikan kewarganegaraan dalam rangka sila Persatuan Indonesia. Pendidikan pengetahuan merupakan pendidikan untuk mengembangkan kemampuan rasional yang dicapai melalui kelompok ilmu alam

dan matematika serta pengetahuan sosial dan humaniora. Para anak didik harus dapat berpikir yang komunikatif dan kreatif yang dapat dicapai melalui pendidikan matematika dan ilmu-ilmu alam.

6) Proses-proses pengalaman anak di sekolah

Proses-proses utama yang mencakup bagian terbesar dari aktivitas anak didik yang cocok untuk pengalaman sekolah adalah:

- a) mengamati (*observing*)
- b) menggolong-golongkan (*classifying*)
- c) menurunkan (*infering*)
- d) meramalkan (*predicting*)
- e) mengukur (*measuring*)
- f) menafsirkan data (*interpreting data*)
- g) membuat definisi-definisi operasional (*making operational definitions*)
- h) merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan hipotesis (*formulating and questions and hypotheses*)
- i) bereksperimen (*experimenting*)
- j) merumuskan model-model (*formulating models*)

Kemampuan menganalisis ini perlu dilengkapi dengan daya sintesis untuk dapat memanfaatkan lingkungan anak didik bagi suatu kepentingan serta memberi kemampuan kepadanya untuk merealisasikan pemanfaatan tersebut. Dalam pendidikan ilmu-ilmu sosial, misalnya sejarah, geografi, antropologi, sosiologi, ekonomi, dan ilmu politik supaya ditempuh "*ingquiry - centered approach*".

7) Fakta dan konsep, dan generalisasi

Kepada anak didik tidak perlu diajarkan semua fakta, melainkan fakta-fakta disusun dalam konsep-konsep karena konsep adalah wahana pemikiran yang merupakan abstraksi yang digunakan untuk memberi arti dan mengkomunikasikan pengalaman-pengalaman. Dua konsep atau lebih dapat mempunyai hubungan dan timbullah generalisasi. Pengembangan konsep-konsep dan generalisasi serta *conceptual learning* dapat dilakukan melalui *ingquiry approach*.

8) Pendidikan keterampilan

Pendidikan keterampilan tidak hanya mementingkan keterampilannya saja, tetapi juga disertai sikap yang positif. Dengan demikian, ada keseimbangan antara hati-otak-tangan bagi sikap anak didi, sehingga ada kesesuaian antara kemampuan, hasrat, dan bakat anak didik masing-masing. Agar semua pemikiran pendidikan di atas dapat dilaksanakan maka diperlukan perencanaan yang matang, tenaga, alat, dan kurikulum.

9) Kurikulum

Kurikulum mencakup semua pengalaman anak didik di bawah bimbingan sekolah. Kurikulum harus dibangun di atas 2 sumbu:

- a) Sumbu yang menunjuk "*areas of living*", misalnya, melindungi kehidupan dan kesehatan berkomunikasi, memproduksi dan mengkonsumsi jasa, mencari nafkah untuk membina rumah tangga.
- b) Sumbu yang menunjukkan tingkat kematangan anak didik, yang menunjukkan aktivitas belajar dari tahun ke tahun, misalnya untuk SD sampai dengan SM:

tingkat 1 dan 2	-	lingkungan terdekat;
tingkat 3 dan 4	-	lingkungan yang semakin luas;
tingkat 5 dan 6	-	menemukan hal-hal baru;
tingkat 7 dan 8	-	penyesuaian terhadap lingkungan fisik dan biologis;
tingkat 9 dan 10	-	penyesuaian terhadap lembaga sosial dan ekonomis;
tingkat 11 dan 12	-	pembinaan suatu masyarakat demokrasi.

10) Kriteria penyusunan silabus

- a) kebutuhan anak didik;
- b) perkembangan fisik, emosional, intelektual, spiritual anak didik;
- c) kondisi-kondisi nasional dan lokal;
- d) rasionalisasi pilihan mata-mata pelajaran.

11) Interaksi guru - metode - anak didik.

Mengajar adalah memberi stimulus atau perangsang untuk belajar, sedangkan belajar adalah proses aktif yang dijalankan melalui berbuat, mengadakan reaksi, dan mengalami. Anak didik dalam proses belajar harus ikut serta dalam pendidikan dirinya sendiri. Segala sesuatu yang dilakukan untuk merangsang belajar tercakup dalam metode mengajar, yaitu setiap prosedur yang sistematis dan dibentuk untuk menyalurkan aktivitas di luar kegiatan rutin, sedangkan teknik dan cara adalah bagian-bagian dari metode. Dalam hubungannya dengan metode mengajar, maka Indonesia secara lambat laun harus mengikuti sistem yang dikenal dengan istilah "*continuous progress*", yaitu anak didik tidak lagi dinaikkan dari satu kelas ke kelas berikutnya, tetapi kenaikan dilihat dari penyelesaian satu tugas ke tugas lainnya. Kemampuan individual atau kelompoklah yang menentukan kecepatan belajar; jadi, tidak lagi ditentukan oleh silabus atau kemauan guru. Hal ini berarti bahwa asumsi yang menyatakan bahwa kecepatan dan kemampuan belajar anak didik itu adalah sama tidak dapat dipertahankan.

12) Sistem pendidikan

Pada umumnya salah satu kelemahan dari pendidikan adalah kurangnya penyesuaian terhadap masyarakat. Pendidikan akan ketinggalan dari perkembangan yang cepat di bidang ilmu dan teknologi, meskipun pendidikan selalu dianggap sebagai penggerak dari kemajuan ilmu dan teknologi. Sistem pendidikan itu menyangkut banyak aspek, tapi yang disoroti di sini adalah soal jenjang persekolahan.

Dari kenyataan yang ada, pendidikan di Indonesia adalah: pertama, sebagian terbesar dari tamatan SD tidak melanjutkan studinya. Kedua, usia tamatan SD yang tidak melanjutkan studi belum cukup untuk terjun ke dalam angkatan kerja. Ketiga, banyak tamatan SD yang melanjutkan studi ke SLTP dan SLTA, yang berarti bahwa sebagian terbesar dari mereka memasuki sekolah umum.

Hal ini akan menimbulkan masalah yang berhubungan dengan pencarian atau penciptaan lapangan kerja bagi mereka.

Oleh karena itu, merupakan suatu keharusan untuk berani meninjau kembali sistem pendidikan yang masih berlaku.

13) Mendirikan sekolah menengah komprehensif

Dari pengalaman di SD Percobaan IKIP Malang; maka pendidikan SD dapat dipersingkat menjadi 5 tahun. Ini berarti tidak mengurangi mutu, malahan ternyata mutu lebih meningkat asal kurikulum dan interaksi guru – metode – anak didik disesuaikan dengan konsep-konsep modern.

Dalam 3 tahun sesudah SD diberikan keterampilan yang diberikan sebagai *educational training*. Untuk mereka yang melanjutkan setelah SD 8 tahun ada 3 alternatif, yaitu sekolah menengah umum, sekolah menengah kejuruan dan sekolah menengah komprehensif.

Bagi Indonesia untuk masa depan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, kombinasi antara sekolah kejuruan dengan sekolah menengah komprehensiflah yang dapat memberi jawaban terhadap masalah-masalah dan tantangan yang dihadapi oleh bidang pendidikan. Ditiadakannya Sekolah Menengah Umum tidak berarti persiapan untuk melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi itu diabaikan.

SM komprehensif memperhatikan anak didik yang mempunyai bakat dan kemampuan untuk melanjutkan sekolah ke Perguruan Tinggi. SM komprehensif memerlukan waktu 4 tahun sehingga pola SD – SM menjadi 5 – 3 – 4. Dengan demikian, pendidikan prauniversitas tetap memakan waktu 12 tahun. Dalam 4 tahun di SM diberikan keterampilan sebagai *vocational training*.

14) Implementasi

Implementasi dari pemikiran ini memerlukan perencanaan yang mantap serta *try out* dan eksperimen secara bertahap. Selain itu harus pula melalui masa peralihan sebelum penerapan secara nasional.

Beberapa IKIP Negeri diberi tugas untuk menyelenggarakan *pilot project* mengenai sekolah lengkap atau Sekolah Menengah Komprehensif ini.

5.2.2.2 Sekolah Pembangunan

Dari pokok pikiran yang terdapat dalam *Basic Memorandum* yang telah diuraikan di atas ternyata salah satu pokok pikiran yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada periode Kabinet Pembangunan I adalah sekolah komprehensif yang diberi nama Sekolah Pembangunan. Untuk mengetahui pokok pikiran tentang Sekolah Pembangunan dapat diikuti uraian-uraian berikut.¹³

1) Apakah sekolah pembangunan itu

Sekolah pembangunan berorientasi komprehensif yang dapat menampung semua siswa dari semua lapisan masyarakat dan membimbing mereka untuk dapat mencapai perkembangan diri sendiri secara maksimal sesuai dengan kecerdasan, bakat, dan minat masing-masing.

Dengan demikian diharapkan mereka dapat menjadi manusia yang memiliki kepribadian yang seimbang dan warga negara yang berjiwa makarya, yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air.

Berbeda dengan sekolah dengan orientasi kejuruan maka sistem komprehensif pada dasarnya hanya mengenai seist tunggal yang melayani semua anak didik, baik yang akan segera terjun ke dunia kerja maupun yang mempunyai bakat, sikap, dan kemampuan untuk melanjutkan studinya.

2) Mengapa harus Sekolah Pembangunan

Dari identifikasi masalah pendidikan di Indonesia ada beberapa alasan yang mendasari pilihan terhadap sistem komprehensif :

- a) Alasan isi pendidikan. Konsep pendidikan umum yang modern tidak menghasilkan kurikulum yang hanya memusatkan pada bentuk abstrak dari ilmu pengetahuan (teori). Ia mengabaikan sama sekali pengalaman belajar yang berasal dari perbuatan-perbuatan praktis dan perkenalan dengan dunia kerja. Sebaliknya, pemusatan pada segi-segi praktis kejuruan saja bukanlah merupakan pendidikan yang baik.

- b) Alasan perkembangan anak didik. Penjurusan ke arah kejuruan yang terlalu ketat bagi anak-anak adalah prematur. Program pendidikan hendaknya sedemikian rupa sehingga dapat ditemukan dan dikembangkan bakat, sikap, minat yang terpendam dari anak-anak.
 - c) Alasan penggunaan sumber-sumber insani yang terbaik. Pembangunan modern tergantung pada pengembangan sumber-sumber insani yang berbakat, tidak terhalang oleh kelahiran, status sosial, atau tempat domisili.
 - d) Alasan efisiensi dan pembiayaan pendidikan. Konsolidasi dalam suatu sekolah komprehensif memungkinkan pembiayaan per anak didik yang lebih rendah dengan penggunaan tenaga dan prasarana serta sasaran pendidikan yang lebih efisien.
 - e) Alasan demokratis. Dwisistem berguna untuk mengurangi mobilitas sosial dan vocational, serta memperkuat perbedaan kelas. Ia mengurangi munculnya orang-orang berbakat sosial dari strata sosial yang rendah dan mengurangi jahilnya orang-orang tak berbakat dari strata yang lebih tinggi.
 - f) Alasan tidak adanya keseimbangan horisontal disertai kecenderungan untuk memilih menjadi pegawai negeri. Seharusnya pendidikan dan latihan itu dapat memberikan jenis keterampilan dan pengembangan sikap yang merangsang anak didik untuk menciptakan pekerjaan sendiri.
- 3) Bagaimana pokok-pokok Sekolah Pembangunan
- Sekolah Pembangunan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a) Sesuai dengan asas pendidikan seumur hidup (*life long education*) sekolah hendaknya mempunyai dwifungsi, yaitu mampu memberikan pendidikan formal dan latihan informal, baik untuk para pemuda maupun untuk orang dewasa pria maupun wanita.
 - b) Sekolah Pembangunan hendaknya merupakan bagian integral dari masyarakat sekitar dan berorientasi pada pembangunan dan kemajuan.

c) Sekolah hendaknya mempunyai kurikulum, metode mengajar, dan evaluasi, serta program yang menyenangkan, merangsang, dan cocok dengan tujuan pendidikan. Di samping itu dari segi nilai sikap, kecerdasan, keterampilan dan komunikasi serta ekologi pembinaan anak didik harus seimbang. Tidak ada perbedaan antara tekanan akademis dan tekanan kejuruan semata-mata berdasarkan sikap, bakat, dan minat para anak didik. Mereka dibina secara individual atau kelompok jurusan-jurusan dengan tekanan yang berbeda, misalnya prateknologi, pertanian, perdagangan, kesejahteraan keluarga, persiapan pendidikan tinggi, dan sebagainya.

4) Di mana dan bilamana diadakan?

Secara berencana dan bertahap proyek-proyek perintis yang mencakup sekolah-sekolah berada di bawah pengawasan dan asuhan 8 buah IKIP Negeri di Padang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, dan Ujung Pandang yang dimulai sejak tahun 1972.

Selama tahun-tahun 1972-1973 dicari langkah-langkah penanggulangan masa transisi yang akan datang mengenai berbagai hal.

Proyek itu pada saatnya akan menjadi penggerak. Oleh karena itu, Kepala Perwakilan Departemen P & K di propinsi-propinsi bersama dengan para Rektor IKIP Negeri merencanakan penyebarluasannya secara bertahap untuk periode Pelita II (1974-1979) dan Pelita III (1979-1984) di wilayah masing-masing.

Dalam kaitannya dengan pendirian sekolah pembangunan, Bachtiar Rifai sebagai Direktur Jendral Pendidikan waktu itu mengatakan bahwa ada hal-hal yang perlu diteliti dan dicoba di tempat masing-masing.¹³

Pertama, tekanan-tekanan pada kurikulum untuk kota-kota industri dan pusat-pusat perdagangan, kota-kota nonindustri, dan daerah-daerah pedesaan, baik pantai maupun pedalaman. Kedua, organisasi pengajaran, korps guru, kepemimpinan sekolah, prasarana serta sarana pendidikan. Ketiga, fungsi sekolah

untuk memberikan pendidikan informal. Keempat, penanggulangan masalah transisi baik struktural maupun administratif, perundang-undangan dan sebagainya.

5) Dasar dan tujuan sekolah pembangunan

Pengukuhan secara eksplisit Sekolah Menengah Pembangunan ditetapkan secara yuridis melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0172/1971, tentang sekolah pembangunan. Sebagaimana tercantum di dalam surat keputusan itu maka dasar dan tujuan sekolah pembangunan ditetapkan sebagai berikut:^{1 4}

- a) Dasar pembangunan adalah: pertama, pengakuan harga diri manusia sebagai makhluk Tuhan, kedua, kesamaan hak dalam memperoleh kesempatan pendidikan; ketiga, orientasi pada prinsip-prinsip perkembangan yang menyeluruh; keempat, pengakuan adanya perbedaan-perbedaan individu; kelima, orientasi pada prinsip integritas dalam segala usaha; keenam, integrasi dengan masyarakat dan pembangunan; ketujuh, orientasi pada produktivitas dan efisiensi kerja.
- b). Tujuan Sekolah Pembangunan adalah mengembangkan dan membina nilai dan sikap, pengetahuan, kecerdasan, keterampilan anak didi, serta kemampuan berkomunikasi dan kesadaran ekologi dalam rangka pembangunan masyarakat Indonesia modern.

6) Program pendidikan sekolah pembangunan

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0172/1971 tersebut di atas serta sumber pemikiran yang dibangun dan dikembangkan pada *Workshop Nasional Sekolah Pembangunan I* dan rapat-rapat Koordinasi Proyek-proyek Perintis Sekolah Pembangunan Seluruh Indonesia serta kegiatan edukatif lainnya, maka program pendidikan Sekolah Pembangunan dapat diperinci sebagai berikut.^{1 5}

- a) Program pendidikan sekolah dasar 8 tahun dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama, dari tingkat I sampai dengan III, seluruhnya menyelenggarakan program pendidikan

umum. Tahap kedua, dari tingkat IV sampai V, menyelenggarakan program pendidikan 80%, sedangkan program pendidikan keterampilan 20%.

Tahap ketiga, dari tingkat VI sampai dengan VIII, menyelenggarakan 60% program pendidikan umum dan program keterampilan 40%.

b) Program pendidikan sekolah menengah 4 tahun diatur sebagai berikut:

- (1) Komponen kurikulum terdiri atas: pendidikan umum, pendidikan mayor dan pendidikan minor.
- (2) Program pendidikan sekolah menengah menggunakan sistem kredit dengan ketentuan jumlah kredit sebagai berikut:

Pendidikan umum	=	12 kredit
Pendidikan mayor	=	68 kredit
Pendidikan minor	=	40 kredit
	=	120 kredit

- (3). Mata pelajaran pendidikan agama, kewargaan negara, olah raga adalah mata pelajaran yang tidak berkredit.
- (4). Setelah selesai mengikuti program pendidikan umum para siswa diizinkan memilih salah satu jalur studi. Pada dasarnya jalur studi dapat dibedakan atas: jalur studi akademis, yang menyelenggarakan program pendidikan bagi mereka yang bermaksud melanjutkan studinya ke perguruan tinggi, dan jalur studi vokasional, yang menyelenggarakan pendidikan vokasional dan tidak mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studinya ke perguruan tinggi.

c). "Prinsip maju berkelanjutan"

Salah satu prinsip yang dianut dan diusahakan untuk dilaksanakan melalui program pendidikan sekolah pembangunan adalah "prinsip maju berkelanjutan" (*continuous progress*). Yang dimaksudkan dengan prinsip ini ialah prinsip pendidikan yang memberi kemungkinan kepada anak didik untuk mengikuti/menjalankan program pendidikan-

nya sesuai dengan kemampuan yang ada padanya, tanpa terikat pada kemampuan anak didik lain.¹⁶

Prinsip ini merupakan konsekuensi dari pola pemikiran perkembangan anak didik yang bersifat individual, juga untuk menghindarkan anak dari masalah tinggal kelas. Sistem kredit yang diterapkan di sekolah ini memudahkan realisasi dari "prinsip Maju Berkelanjutan."

d) Penggunaan sistem modul

Dalam Proyek Perintis Sekolah Pembangunan, prosedur pengembangan sistem instruksional yang digunakan adalah sistem modul. Modul merupakan suatu unit pelajaran yang terkecil. Unit pelajaran ini harus diselesaikan oleh anak dalam jangka waktu tertentu, misalnya 2 x 45 menit. Sistem modul diharapkan dapat menghasilkan anak yang lebih berprakarsa dan kreatif, sebab sistem ini menekankan pada pendekatan pemecahan masalah dan sebagai pusat perhatian adalah murid. Murid belajar secara individual dan guru berfungsi sebagai fasilitator atau pengarah.

e) Bimbingan dan konseling

Salah satu kegiatan yang merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam realisasi program pendidikan pembangunan adalah adanya bimbingan dan konseling. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan program pendidikan pembangunan tidak menyimpang dari maksud yang sebenarnya. Hasil dari kegiatan Bimbingan dan Konseling dapat membantu penasihat pendidikan untuk menjalankan tugasnya dalam membantu anak didik mengatasi kesulitan belajar; juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka membantu anak memilih jenis pendidikan keterampilan yang akan diikuti atau untuk membantu anak dalam memilih jalur studi pada sekolah menengah. Dalam hubungannya dengan registrasi pendidikan, maka Bimbingan dan Konseling melengkapi data pribadi anak didik sehingga menggambarkan perkembangan anak didik secara menyeluruh.

f) Paket-Paket pendidikan dan keterampilan

Untuk mempermudah penglihatan terhadap unit-unit program pendidikan dengan tujuannya yang jelas, metode yang tepat guna serta sasaran yang fungsional dan evaluasi yang jitu, perlu disusun paket pendidikan. Yang dimaksud adalah suatu kebulatan program studi yang memiliki sasaran yang jelas; juga memiliki kegunaan yang khusus dalam menuju ke satu kejuruan atau kelanjutan studi.

g) Pendidikan nonformal

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0172/1971, sekolah pembangunan melaksanakan juga program pendidikan nonformal. Yang dimaksud adalah program yang disusun tidak begitu mengikat seperti program pendidikan formal. Penjenjangan program nonformal tidak terlihat dengan nyata dan paket pendidikannya disusun terlepas antara satu dengan yang lain.

Pendidikan nonformal ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau anak didik yang tidak sempat mengikuti program pendidikan formal. Materi pendidikan yang diberikan berhubungan dengan bermacam-macam jenis keterampilan; juga berisi materi pendidikan yang berhubungan dengan pendidikan akademik. Program ini diikuti oleh mereka yang berkeinginan untuk melanjutkan studi ke lembaga pendidikan tinggi.

Dalam realisasi pendidikan nonformal sebagai usaha yang tepat guna dapat diadakan pusat-pusat kegiatan belajar (*learning center*). Penanggung jawab program ini adalah direktur sekolah pembangunan yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan kegiatan dapat digunakan tenaga lain yang dianggap mampu melaksanakannya.

Proyek Perintis Sekolah Pembangunan yang telah dilaksanakan sejak tahun 1972 oleh 8 IKIP Negeri di seluruh Indonesia adalah dalam tahap uji coba, seperti yang telah dikemukakan. Pada tahap Pelita II dan III pelaksanaannya akan disebarluaskan ke seluruh wilayah Indonesia dalam rangka kerja sama dengan Kanwil Departemen P dan K. Sampai dengan akhir Pelita III hasilnya belum konklusif, apakah sistem ini akan dilanjutkan atau tidak belum ada keputusan kebijaksanaannya.¹⁷

Bila diteliti kembali pokok-pokok pikiran yang ada dalam politik pendidikan Kabinet Ampera dengan pokok-pokok pikiran yang ada dalam *Basic Memorandum* pendidikan serta penerapannya dalam sekolah pembangunan terdapat satu persamaan yang prinsipal. Persamaan itu terdapat dalam konsep pendidikan keterampilan yang ditekankan untuk menghasilkan tenaga kerja menengah dalam menunjang pembangunan. Perbedaannya terletak pada tingkat pendidikan keterampilan diberikan.

Perbedaan yang jelas dari kedua pokok pikiran tersebut ialah pada sistem persekolahan yang dianut serta penyusunan kurikulum. Pada sekolah pembangunan kurikulum disusun dengan membedakan komponen kurikulum yang terdiri atas pendidikan umum, pendidikan mayor dan pendidikan minor. "Prinsip Maju Berkelanjutan" dengan tidak mengenal adanya prinsip tinggal kelas serta pemakaian sistem modul merupakan unsur-unsur yang baru dalam sistem sekolah pembangunan.

Sambil diadakan uji coba sistem Sekolah Pembangunan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef pada tahun 1978 mulai mengambil langkah-langkah baru dalam usaha menciptakan satu sistem pendidikan nasional yang baru. Pendidikan nasional itu harus bersifat semesta, menyeluruh, dan terpadu.¹⁸ Untuk itu, dibentuk Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional yang dipimpin oleh Prof. Dr. Slamet Iman Santoso. Laporan komisi ini telah selesai disusun tahun 1980.

5.2.3 *Periode Kabinet Pembangunan II (1973–1978)*

Dalam periode ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh dua menteri berturut-turut. Yang pertama adalah Prof. Dr. Ir. Sumantri Brodjonegoro. Oleh karena Sumantri Brodjonegoro meninggal dunia kemudian diganti oleh Prof. Dr. Syarif Thayeb.

Sistem pembaharuan pendidikan yang telah dilaksanakan pada periode Kabinet Pembangunan I dilanjutkan dalam periode ini. Titik tekanannya terletak pada sistem pendidikan yang menunjang pembangunan. Di dalam penjelasan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan di depan komisi DPR diungkapkan adanya 4 masalah pokok yang harus ditanggulangi dalam bidang pendidikan.

Dalam Repelita II dapat dilihat 4 masalah pokok pendidikan yang harus ditanggulangi menurut Garis-garis Besar Haluan Negara, yaitu pemerataan pendidikan, mutu pendidikan, relevansi pendidikan, dan efisiensi pendidikan.¹⁹ Tidak meratanya pendidikan disebabkan karena dari tahun ke tahun negara dihadapkan pada makin banyaknya jumlah para siswa yang memerlukan sekolah, sedangkan daya tampung sekolah dalam hal jumlah gedung, guru, dan fasilitas pendidikan belum sepenuhnya mampu menampungnya.

Pada saat yang sama masyarakat Indonesia yang sedang membangun menuntut mutu kemampuan, sikap, dan pengetahuan yang memadai dari warga negaranya. Kenyataan yang dihadapi adalah banyak penerima lulusan yang tidak merasa puas dengan mutu kemampuan para lulusan, baik mereka yang memasuki lembaga pendidikan yang lebih tinggi maupun lembaga masyarakat yang menerima mereka sebagai tenaga kerja. Ini berarti mutu kemampuan yang dimiliki para lulusan tidak selaras dengan tuntutan masyarakat.

Tidak sesuainya mutu lulusan dengan tuntutan masyarakat penerima diakibatkan karena kualitas proses pendidikan tidak efektif bagi tercapainya suatu mutu kemampuan. Bisa juga diakibatkan karena pengalaman dan kegiatan belajar serta materi pendidikan untuk mereka tidak sesuai dengan kenyataan yang dihadapi dalam masyarakat setelah lulus.

Tidak efektifnya proses pendidikan yang dilaksanakan disebabkan karena sistem pendidikan yang tidak sesuai untuk menunjang pembangunan. Dengan demikian, masalah relevansi pendidikan perlu mendapatkan tekanan pada: pembaharuan sistem pendidikan yang akan dilaksanakan.

5.2.3.1 Ketetapan MPR NO. IV/MPR 1973

Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilihan Umum tahun 1973, dalam ketetapanannya No. IV/MPR/1973 yang di-

kenal dengan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), telah menetapkan tujuan pendidikan nasional yang baru. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam GBHN maka landasan dan arah kebijaksanaan dasar dari pembangunan di bidang pendidikan dan pembinaan generasi muda adalah sebagai berikut:

"Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Oleh karena itu, pembangunan pendidikan didasarkan atas landasan falsafah negara Pancasila dan diarahkan untuk membentuk manusia-manusia pembangunan yang ber-Pancasila dan untuk membentuk manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohaninya, memiliki pengetahuan dan keterampilan, dapat mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab, dapat menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti luhur, mencintai sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945".²⁰

Apabila dalam Ketetapan MPRS No. XXVII tahun 1966 tujuan pendidikan nasional adalah pembentukan manusia Pancasila sejati, maka hal ini disebabkan karena Pancasila sangat diperlukan untuk merubah mental masyarakat yang sudah banyak mendapat indoktrinasi Manipol/Usdek. Permurnian Pancasila dianggap sebagai jaminan untuk tegaknya Orde Baru, sedangkan Ketetapan MPR No. IV 1973 menekankan pada manusia pembangunan yang berjiwa Pancasila.

Agar pendidikan dapat dimiliki oleh seluruh rakyat dan sesuai dengan kemampuan masing-masing individu maka pendidikan menjadi tanggung jawab keluarga dan pemerintah. Peranan keluarga dan pemerintah dalam membina pendidikan ini untuk setiap periode pada masa Orde Baru mendapat tekanan yang sama.

Dalam kaitannya dengan pendidikan formal, GBHN menetapkan bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan di semua tingkat pendidikan, baik negeri maupun swasta, berisikan pendidikan moral Pancasila; juga unsur-unsur yang cukup untuk meneruskan jiwa dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda. Demikian pula pendidikan agama di semua tingkat sekolah.

5.2.3.2 SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 041 Tahun 1974

Mengingat masalah-masalah pendidikan yang telah dikemukakan serta tujuan pendidikan nasional yang ditetapkan dalam GBHN 1973, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Keputusan No. 041 tahun 1974 tentang Pembaharuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam keputusan itu ditetapkan penyusunan suatu sistem pendidikan dasar dan menengah yang:

- 1) efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan individu yang diwujudkan melalui program-program pendidikan yang sesuai;
- 2) merupakan dasar bagi pendidikan seumur hidup;
- 3) efisien dan realistis sesuai dengan tingkat kemampuan pembiayaan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

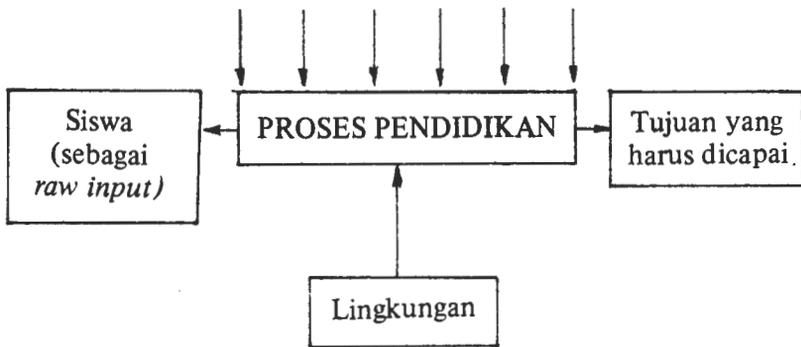
Secara singkat dapat disimpulkan bahwa tujuan segala kegiatan pembaharuan pendidikan adalah terciptanya suatu sistem pendidikan yang meliputi beberapa hal.²¹ Pertama, sanggup melayani kebutuhan masyarakat akan pendidikan dalam arti kuantitatif. Kedua, sanggup menjamin lahirnya para lulusan yang secara kualitatif memenuhi harapan masyarakat. Ketiga, menyelenggarakan pendidikan yang, baik materi maupun jenis kegiatan belajar, selaras dengan dunia yang akan mereka masuki (relevan). Keempat, mendayagunakan segala tenaga, waktu, dana, dan fasilitas secara optimal bagi tercapainya tujuan-tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Hal ini sangat tergantung pada sistem pendidikan yang berlaku.

Sistem pendidikan adalah suatu kesatuan dari berbagai unsur yang satu sama yang lain berhubungan dan tergantung untuk mencapai tujuan. Unsur-unsur itu dapat dikategorikan menjadi unsur instrumental, unsur siswa, unsur tujuan pendidikan, dan unsur lingkungan.²²

Unsur instrumental adalah sistem pengajaran yang meliputi organisasi dan pendekatan kurikulum, yaitu administrasi dan struktur kurikulum, materi kurikulum, metode dan strategi pengajaran, sistem evaluasi; juga ketenagaan, bimbingan dan konseling, serta dana dan fasilitas. Unsur siswa adalah faktor

bahan yang akan berubah sebagai akibat dari proses pendidikan yang berlangsung di dalam sistem. Unsur tujuan pendidikan ialah yang menggambarkan sasaran yang harus dicapai oleh pendidikan sebagai sistem. Unsur lingkungan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap proses pendidikan yang berlangsung di dalam sistem.

Secara diagram sistem pendidikan dapat digambarkan sebagai berikut:



Unsur lingkungan adalah faktor yang tidak terlalu banyak dapat dipengaruhi oleh sistem pendidikan di dalam proses perencanaannya. Akan tetapi, unsur itu harus diperhitungkan agar proses pendidikan yang direncanakan dapat berjalan sebagai yang direncanakan. Unsur tujuan pendidikan sangat menentukan sistem pendidikan karena inilah yang menggambarkan harapan masyarakat akan hasil dari sistem secara kualitatif maupun kuantitatif. Unsur siswa akan mempengaruhi tingkat materi pendidikan yang akan diberikan, metode yang dipakai, dan sifat materi yang akan direncanakan.

Yang lazim disebut sistem pendidikan adalah unsur instrumental karena unsur inilah yang dapat direncanakan dan diprogramkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dari unsur-unsur pendidikan sebagai suatu sistem ini maka dapat ditempuh strategi pembaharuan pendidikan yang berupa program-program pembinaan. Program pembinaan ditujukan untuk memperbaiki

dan melengkapi sistem pendidikan yang sedang berjalan agar lebih efisien dan efektif. Hal ini dapat kita lihat dalam pengembangan kurikulum 1975 sebagai bahagian dari usaha pembaharuan pendidikan.

5.2.3.3 Pembaharuan dalam Kurikulum Tahun 1975

Almarhum Menteri Soemantri Brodjonegoro dalam pidatonya pada tanggal 2 Mei 1973 telah menyatakan bahwa mengubah suatu sistem pendidikan, efeknya akan sangat luas baik terhadap segi-segi kehidupan maupun jangkauan waktu mendatang. Namun demikian, dalam pidato yang sama beliau mengumumkan bahwa sistem pendidikan yang berlaku sekarang jelas tidak sesuai lagi dengan kebutuhan riil dari masyarakat kita, dan oleh karena itu perlu diperbaiki dan disempurnakan sehingga benar-benar dapat membawa tugas bidang pendidikan kepada tujuannya. Hal ini dapat diartikan bahwa pembaharuan pendidikan perlu diteruskan, tetapi program harus disusun secara hati-hati melalui prosedur percobaan dan penelitian yang sistematis. Hasil-hasil pengembangan pendidikan melalui Proyek Perintis Sekolah Pembangunan dan proyek pengembangan lainnya, yang telah dinyatakan mantap setelah dicobakan, diteliti dan dinilai tingkat efisiensi dan efektivitasnya, dan setelah itu barulah dimasukkan ke dalam sistem yang berjalan. Menurut Keputusan Menteri P dan K No. 041 tahun 1974 telah ditegaskan bahwa hanya hal-hal baru yang telah dinilai efisiensi dan efektivitasnya akan dimasukkan dalam sistem sebagai bahagian yang secara operasional akan membantu pelaksanaan sistem tersebut. Pengembangan Kurikulum 1975 menunjukkan suatu bentuk pertemuan antara hasil penelitian dan pengembangan ke dalam sistem yang sedang berjalan. Dalam kata pengantar Buku I Kurikulum 1975 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa:

"Dunia dan masyarakat yang telah mengalami perubahan sejak tahun 1968 belum diperhitungkan pada saat kita menyusun kurikulum 1968. Oleh karena itu pemerintah, c.q. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada bulan Mei tahun 1974, mengatakan betapa kita harus meninjau dan memperbaharui kurikulum yang sudah berjalan

6 tahun itu agar sesuai dengan perkembangan dan tuntutan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

Kebijakan tersebut telah melahirkan serangkaian kegiatan untuk meneliti dan mengembangkan kurikulum baru yang lebih sesuai dengan tuntutan baru. Hasil kegiatan-kegiatan tersebut secara bersama telah dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, telah saya terima dan setujui untuk dibukukan sebagai Kurikulum SMP dan SMA 1975.²³

Pengembangan Kurikulum 1975 akhirnya berlaku juga untuk tingkat TK serta sekolah-sekolah kejuruan seperti SPG dan SMEA sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 15 Januari No. 008/U/1975 untuk Sekolah Dasar, No. 008 d/U/1975 untuk Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas.

Berbeda dengan Kurikulum 1968 kurikulum ini berorientasi pada tujuan seperti telah dikemukakan di atas. Unsur tujuan dalam suatu sistem pendidikan sangat penting karena akan menggambarkan sasaran yang harus dicapai oleh pendidikan sebagai suatu sistem. Di dalam kurikulum ini kemampuan (kecerdasan dan keterampilan), pengetahuan, dan sikap dirumuskan dalam bentuk tujuan pendidikan. Berbagai tingkatan tujuan pendidikan dirumuskan dalam kurikulum ini, baik tujuan institusional yang harus dicapai oleh keseluruhan program sekolah, tujuan kurikulum yang harus dicapai dalam suatu bidang pelajaran, maupun tujuan instruksional yang harus dicapai dalam sesuatu program bidang pelajaran. Makin kecil suatu satuan bidang pelajaran makin khusus suatu rumusan tujuan yang dikenal dengan Tujuan Instruksional Khusus (TIK) atau Tujuan Khusus Pengajaran (TKP). Tujuan-tujuan itu menyangkut aspek-aspek kognitif (pengetahuan), nilai + sikap (*value + attitude*), serta *skill* (keterampilan). Kurikulum ini berjalan sampai akhir Pelita III dan digunakan oleh semua tingkat Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Lanjutan Atas.

Kurikulum ini memiliki 3 program pendidikan, yaitu umum, akademis dan keterampilan. Setelah berjalan kira-kira 6 tahun diadakan evaluasi lagi oleh pihak Pusat Kurikulum dari

BP3K, yang hasilnya dipakai untuk mengembangkan Kurikulum 1984. Dengan demikian, sampai dengan akhir Pelita III berlaku dua kurikulum untuk sekolah-sekolah di Indonesia. Yang satu adalah Kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan yang menggunakan sistem modul. Kurikulum ini telah mengalami dua kali revisi yaitu pada tahun 1975 dan yang terakhir pada tahun 1978. Yang lain adalah Kurikulum 1975 yang berlaku di sekolah-sekolah selain sekolah PPSP di atas, yang biasanya disebut dengan istilah sekolah-sekolah konvensional, yaitu dari tingkat Taman Kanak-kanak yang berlaku pada tahun 1977; tingkat SD, SMP, dan SMA yang berlaku pada tahun 1975; SPG, SMEA, dan STM yang berlaku pada tahun 1976. Kesemuanya menggunakan satuan pelajaran dalam proses belajar-mengajar.

5.2.3.4 Pola Kebijakan Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi

Konsep pemikiran yang melahirkan kebijakan tersebut di atas berasal dari Tim "Strategi Selektif" (Tim SS) yang diketuai oleh Drs. Soedjana Safii.²⁴ Tim yang bernaung di bawah Direktorat Pendidikan Tinggi ini mempunyai tugas dalam rangka membuat penilaian terhadap *master plan* dari berbagai universitas dan institut. Yang terutama dikerjakan ialah menciptakan kriteria penilaian yang akan digunakan untuk membuat penilaian itu. Akhir dari usaha itu adalah lahirnya sebuah dokumen yang kemudian oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang waktu itu dijabat oleh Dr. Syarif Thayeb, dirumuskan dan sekaligus merupakan pengarahan di depan para peserta Rapat Kerja Rektor Universitas dan Institut Negeri Seluruh Indonesia. Rapat ini berlangsung dari tanggal 17 sampai 19 Februari 1975 di Jakarta.

Selain pengarahan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Rapat Kerja Rektor Universitas/Institut Negeri Seluruh Indonesia itu juga mendapatkan pengarahan dari Direktur Jendral Pendidikan Tinggi, yang waktu itu dijabat oleh Prof. Dr. Makaminan Makagiansar. Dalam pengarahannya yang berjudul "Pelaksanaan Kebijakan Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi" itulah Direktorat Jendral Perguruan Tinggi antara lain

mengemukakan perlunya menerapkan Sistem Perencanaan Penyusunan Program dan Penganggaran (SP4) dalam lingkungan Direktorat Pendidikan Tinggi. SP4 ini adalah pendekatan sistem yang diambil dari *Planning Programing Budgeting Sistem (PPBS)* yang dilaksanakan di Amerika Serikat, yang dalam penerapannya di Indonesia disesuaikan dengan keadaan Indonesia. Dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang sama, tertanggal 12 Juli 1975 No. 0140/U/1975, pidato pengarahan Dirjen PT tersebut juga telah dikukuhkan sebagai "Pelaksanaan Pola Kebijaksanaan Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi di Indonesia". Untuk mengetahui konsep pemikiran yang mendasari arah pembinaan dan pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia dapat diikuti pada uraian berikut.^{2 5}

- (1) Pembinaan serta pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia harus berdasarkan pada:
 - a) Undang-undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR.
 - b) Asas-asas Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Hikmat Kebebasan Akademik yang bertanggung jawab. Dasar-dasar tersebut di atas perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - (1) Hasil-hasil yang telah dicapai hingga sekarang
 - (2) Harapan keluarga, masyarakat, dan pemerintah terhadap pendidikan sebagai suatu keseluruhan dan terhadap pendidikan tinggi pada khususnya
 - (3) Implikasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - (4) Dinamika dan perspektif perkembangan kebudayaan nasional
- 2) Dengan dasar-dasar pemikiran pendidikan yang disebutkan di atas dan berpedoman pada konsep pendidikan seumur hidup (*life long education*), maka pembinaan dan pengembangan Perguruan Tinggi harus terarah. Pengembangannya pada dasarnya ditujukan pada suatu sistem pendidikan tinggi di Indonesia secara menyeluruh yang menyangkut perguruan-perguruan tinggi pemerintah maupun swasta di dalam suatu pola pembinaan dengan arah-arrah sebagai berikut:

- a) Pendidikan Tinggi harus merupakan bagian integrasi dari usaha-usaha pembangunan, baik nasional maupun regional.
- b) Pendidikan Tinggi harus merupakan penghubung antara dunia ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat.
- c) Pendidikan Tinggi harus melaksanakan pendidikan berdasarkan pola pemikiran yang analitis dan berorientasi pada pemecahan-pemecahan permasalahan dan disertai oleh suatu pandangan masa depan.
- d) Pendidikan Tinggi harus berpartisipasi dalam perbaikan serta pengembangan:
 - (1) Mutu kehidupan dan mutu kebudayaan;
 - (2) Ilmu pengetahuan dan penerapannya;
 - (3) Pengertian dan kerja sama internasional dalam usaha mencapai perdamaian dunia dan kesejahteraan umat manusia.
- e) Pendidikan Tinggi hendaknya memungkinkan terlaksananya:
 - (1) Pengembangan seluruh kemampuan serta kepribadian manusia;
 - (2) Mobilitas siswa dari satu pengalaman pendidikan ke yang lain;
 - (3) Diversifikasi dalam pendidikan dan proses belajar;
 - (4) Demokrasi dalam pendidikan dan proses belajar;
 - (5) Mobilisasi sumber-sumber masyarakat yang dapat dimanfaatkan dalam pendidikan;
 - (6) Pertumbuhan dan kegairahan riset.

Dengan demikian, pengarahannya pendidikan yang dimaksudkan adalah menyangkut masalah pembinaan Perguruan Tinggi secara menyeluruh, termasuk perencanaan masing-masing Perguruan Tinggi dan menyangkut berbagai kebijaksanaan yang luas ruang lingkupnya. Berbagai kebijaksanaan telah diambil oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, akan tetapi Undang-undang Pendidikan Tinggi yang digunakan oleh pemerintahan Orde Baru masih berdasarkan Undang-undang Pergu-

ruan Tinggi No. 12 tahun 1961 yang dibuat pada masa Orde Lama.

5.2.4 *Periode Kabinet Pembangunan III (1978–1983)*

Dalam periode ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh Dr. Daed Yoesoef. Di samping itu pemerintah mengangkat seorang Menteri Muda Urusan Pemuda yang dijabat oleh dr. Abdul Gafur. Masa jabatan untuk kedua pejabat itu adalah dari tanggal 13 Maret 1978 sampai 19 Maret 1983. Pada saat penelitian ini diadakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang diangkat pada tanggal 19 Maret 1983 yaitu Prof. Dr. Nugroho Notosusanto telah meninggal dunia dan digantikan oleh Prof. Dr. Fuad Hasan sejak tahun 1985.

Pokok-pokok pikiran tentang pendidikan dan kebudayaan serta pembinaan generasi muda dapat kita teliti melalui Ketetapan-ketetapan MPR maupun kebijaksanaan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan serta pembinaan generasi muda.

5.2.4.1 *Ketetapan MPR No. IV Tahun 1978*

Dalam ketetapan ini pendidikan dan pembinaan generasi muda digariskan sebagai berikut:^{2 6}

- 1) Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan bertujuan meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasaa, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.
- 2) Dalam rangka melaksanakan pendidikan nasional perlu diambil langkah-langkah yang memungkinkan penghayatan dan pengamalan Pancasila oleh seluruh lapisan masyarakat.
- 3) Pendidikan Pancasila, termasuk Pendidikan Moral Pancasila dan unsur-unsur yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda, dimasukkan ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah, mulai dari

taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta.

- 4) Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu, pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
- 5) Perguruan swasta mempunyai peranan dan tanggung jawab dalam usaha melaksanakan pendidikan nasional. Untuk itu perlu dikembangkan pertumbuhannya sesuai dengan kemampuan yang ada berdasarkan pola pendidikan nasional yang mantap dengan tetap mengindahkan ciri-ciri khas perguruan yang bersangkutan.
- 6) Pendidikan juga menjangkau program-program luar sekolah, yaitu pendidikan kemasyarakatan, termasuk kepramukaan, latihan keterampilan, dan pemberantasan buta huruf dengan mendayagunakan sarana dan prasarana yang ada.
- 7) Mutu pendidikan ditingkatkan untuk mengejar ketinggalan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutlak diperlukan untuk mempercepat pembangunan.
- 8) Sistem pendidikan perlu disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan di segala bidang yang memerlukan berbagai jenis keahlian dan keterampilan, serta dapat sekaligus meningkatkan produktivitas, mutu, dan efisiensi kerja.
- 9) Titik berat program pendidikan diletakkan pada perluasan pendidikan dasar dalam rangka mewujudkan pelaksanaan wajib belajar yang sekaligus memberikan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan lingkungannya serta peningkatan pendidikan teknis dan kejuruan di semua tingkat untuk dapat menghasilkan anggota-anggota masyarakat yang memiliki kecakapan sebagai tenaga-tenaga pembangunan.
- 10) Pendidikan tinggi dikembangkan dan peranan perguruan tinggi diarahkan kepada usaha sebagai berikut:
 - a) Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemeliharaan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan

- an dan teknologi sesuai dengan kebutuhan pembangunan masa sekarang dan masa datang.
- b) Mendidik para mahasiswa agar berjiwa penuh pengabdian serta memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara Inoonesia.
 - c) Menggiatkan mahasiswa sehingga bermanfaat bagi usaha-usaha pembangunan nasional dan pembangunan daerah.
 - d) Mengembangkan tata kehidupan kampus yang memadai sehingga tampak jelas corak khas kepribadian Indonesia.
- 11) Peranan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian dalam kegiatan pembangunan makin ditingkatkan, antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:
- a) Penggunaan kebebasan mimbar akademik dalam bentuk-bentuk yang kreatif, konstruktif, dan bertanggung jawab tetap dijamin sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan.
 - b) Pengintegrasian dan pengkonsolidasian kegiatan-kegiatan mahasiswa dan cendekiawan sesuai dengan profesinya dalam wadah-wadah yang efektif, sehingga mereka dapat menyumbangkan prestasi serta partisipasi yang positif.
- 12) Sarana dan prasarana pendidikan, termasuk gedung, peralatan, perpustakaan, fasilitas kerja, dan kondisi kehidupan yang layak bagi seluruh tenaga pendidikan dan pengajaran makin disempurnakan dan ditingkatkan.
- 13) Pendidikan dan kegiatan olah raga ditingkatkan dan disebarluaskan sebagai cara pembinaan kesehatan jasmani dan rohani bagi setiap orang dalam rangka pembinaan bangsa.
- 14) Pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia ditingkatkan dan diperluas sehingga mencapai masyarakat luas.

- 15) Kepustakaan nasional, penerbitan dan penerjemahan dikembangkan sehingga dapat lebih menunjang program-program pendidikan.
- 16) Perlu dilanjutkan dan ditingkatkan usaha-usaha pembinaan di bidang pendidikan umum dan kejuruan secara fungsional dan terintegrasi dalam rangka tercapainya suatu sistem pembinaan pendidikan secara nasional, mantap, dan terpadu.
- 17) Pengembangan generasi muda diarahkan kepada mempersiapkan kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional dengan memberikan bekal keterampilan, kepemimpinan, kesegaran jasmani, daya kreasi, patriotisme, idealisme, kepribadian, dan budi pekerti yang luhur. Untuk itu, perlu diciptakan iklim yang sehat sehingga memungkinkan kreativitas generasi muda berkembang secara wajar dan bertanggung jawab. Dalam rangka itu, perlu ada usaha-usaha mengembangkan generasi muda untuk melibatkannya dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara serta pelaksana pembangunan nasional.
- 18) Pengembangan wadah pembinaan generasi muda seperti sekolah, organisasi fungsional pemuda seperti KNPI, Pramuka dan organisasi olah raga perlu terus ditingkatkan. Untuk itu, antara lain diusahakan bertambahnya fasilitas dan sarana yang memungkinkan pengembangan kepemudaan.
- 19) Perlu diwujudkan suatu kebijaksanaan nasional tentang kepemudaan secara menyeluruh dan terpadu.
- 20) Pembinaan, penyempurnaan, dan penertiban aparatur pendidikan, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, dilakukan secara terus-menerus agar dapat mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih dan berwibawa, sehingga mampu melaksanakan tugas pokok pelaksanaan pembangunan pendidikan secara lancar.

5.2.4.2 Kebijakan pendidikan dan kebudayaan serta pembinaan generasi muda

Dari laporan kebijakan yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Muda Urusan Pemuda dapat ditarik beberapa kesimpulan yang merupakan konsep pemikiran tentang kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan serta pengembangan generasi muda sebagai berikut:^{2 7}

- 1) Pengembangan kebudayaan dan kaitannya dengan pendidikan
 - a) Pendidikan bukan hanya merupakan investasi manusiawi (*human investment*) belaka di mana anak Indonesia dididik untuk cerdas, terampil, berbudi luhur, tetapi juga untuk menjadi manusia utuh, yaitu manusia sosial berkebudayaan.
 - b) Melalui pendidikan kita hendak meningkatkan kemampuan berpikir dan berbuat bagi warga masyarakat. Kemampuan berpikir akan melahirkan perubahan yang dituntut oleh perkembangan dan kemajuan dunia modern.
 - c) Falsafah Pancasila merupakan pegangan yang kokoh bagi bangsa agar mampu menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh kehidupan modern yang kompleks dan penuh ketidakpastian.
 - d) Pendidikan merupakan bagian yang integral dari kebudayaan, yang berarti pendidikan adalah cara yang dipakai untuk meneruskan nilai-nilai kebudayaan dari generasi ke generasi. Kebudayaan merupakan semangat yang menjiwai pendidikan.
 - e) Pendidikan pada hakikatnya menyangkut pertumbuhan dan perkembangan manusia; maka kebudayaan pun hidup, tumbuh, dan berkembang. Perkembangan manusia dapat berlangsung apabila terjadi pengembangan kebudayaan seperti halnya pengembangan teknologi.

- f) Kebudayaan tidak boleh dibiarkan membeku sehingga hanya diwariskan tanpa sesuatu yang kreatif demikian maka kebudayaan akan hancur tergeletak dilanda roda kemajuan zaman.
- g) Dengan adanya perkembangan di bidang sosial politik dan sosial ekonomi, maka berbagai unsur baru masuk ke dalam kebudayaan kita. Di samping itu unsur-unsur lama kain ditonjolkan. Dengan demikian, kebudayaan kita berkembang.
- h) Bila perkembangan kebudayaan dibiarkan tanpa perhatian dan tidak adanya jalur konseptual yang jelas dan eksplisit dikuatkan kebudayaan akan banyak merupakan faktor penghambat daripada faktor pendorong bagi perkembangan manusia.
- i) Dalam melaksanakan pembangunan maka kita harus mengolah kebudayaan menjadi peradaban. Pembangunan menimbulkan berbagai efek sampingan. Efek sampingan yang timbul dari pembangunan antara lain pengrusakan lingkungan fisik. Oleh sebab itu, wajar apabila dalam pendidikan ditekankan pada kecintaan akan lingkungan.

2) Normalisasi Kehidupan Kampus

a) Misi Perguruan Tinggi

Perguruan Tinggi sebagai jenjang terakhir dari pendidikan formal mempunyai fungsi yang berdimensi tiga, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Melalui aktivitas pendidikan, dan penelitian, Perguruan Tinggi secara langsung menghasilkan berbagai jenis tenaga ahli. Produksi tenaga ahli ini berarti secara tidak langsung sudah mengabdikan masyarakat apabila keahlian-keahlian tersebut memang sesuai dengan apa yang dituntut oleh usaha pembangunan. Orang yang memiliki keahlian kelak pada waktunya menduduki tempat-tempat yang strategis di setiap bidang kehidupan masyarakat. Mereka berwenang untuk membuat keputusan-keputusan yang menentukan dan berbobot bagi jalannya kehidupan masyarakat. Melalui pengambilan keputusan seperti itulah sebenarnya pekerja yang

memiliki kecerdasan dan keterampilan memegang kendali pimpinan dalam masyarakat.

b). Kedudukan mahasiswa di dalam generasi muda

Secara umum pemuda diartikan sebagai salah satu generasi bangsa yang karena tingkat usianya, fungsi, dan sifat khasnya merupakan angkatan penerus kehidupan dan cita-cita perjuangan bangsa. Berdasarkan lingkungan fungsionalnya generasi muda meliputi tiga kelompok yaitu pelajar, mahasiswa, dan pemuda yang tidak termasuk kelompok pelajar dan mahasiswa.

Apabila generasi muda merupakan bahagian yang penting dari keseluruhan anggota masyarakat, maka mahasiswa merupakan kelompok yang terpenting dari keseluruhan generasi muda. Hal ini disebabkan karena perhatian, dana, dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah demi perkembangan pribadi anggota kelompok ini begitu besar, sedangkan jumlah mahasiswa relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah pemuda secara keseluruhan; juga harapan masyarakat yang dicurahkan kepada kelompok ini jauh lebih besar dari pada terhadap kelompok lainnya bagi kesinambungan generasi di setiap bidang kehidupan, paling tidak yang bersifat politik, idiologis, dan teknis.

c) Tanggung jawab esensial dari mahasiswa

Tanggung jawab mahasiswa tidak dapat dilepaskan dari cita-cita perjuangan bangsa serta kelangsungan hidup bangsa dan negara atas dasar sumpah Pemuda 1928, Proklamasi Kemerdekaan, Undang-undang Dasar 1945, dan pembangunan yang berkeadilan sosial. Tanggung jawab ini meliputi: mempertahankan dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, mengembangkan kepribadian yang sehat dan tangguh, berkemampuan berpikir yang analisis dan sintesis, berilmu tinggi dan berkecakupan serta bermoral Pancasila dan berbudi luhur, meningkatkan partisipasi dalam pembangunan, memelihara dan mengembangkan demokrasi Pancasila serta menjunjung tinggi hak asasi dan kewajiban warga negara dalam rangka mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, dan akhirnya mengembangkan nilai-nilai budaya yang luhur dan relevan guna mendorong dan menampung perubahan serta perkembangan

masyarakat yang positif dalam rangka pembaharuan bangsa dengan tetap mendasarkan diri pada kepribadian bangsa.

Tanggung jawab yang esensial dari mahasiswa adalah membangkitkan penalaran individual sebagai dasar yang menentukan kemampuan berpikir yang analisis dan sintesis seperti yang tersebut di atas. Dengan demikian, mahasiswa adalah manusia pengalisis, dan bukan mahasiswa yang semata-mata memburu ijazah. Mereka seharusnya menjadi penghasil gagasan atau ide yang disajikan dalam bentuk pemikiran yang teratur yaitu sesuai dengan hakikat ilmu. Penalaran yang baik merupakan unsur dasar yang kuat bagi keluhuran dan kemantapan budi pekerti.

Apabila mahasiswa berpolitik dalam arti gagasan atau pikiran mengenai apa yang dianggapnya sebagai kepentingan masyarakat atau nasional, artinya ia melaksanakan hak politiknya sesuai dengan hakikat kemahasiswaannya. Tetapi bila ia berpolitik dalam bentuk aksi dan kebijakan, maka mahasiswa sebenarnya melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan hakikat kemahasiswaan, dan dengan demikian tidak pantas memakai predikat mahasiswa bila mengatasnamakan dunia mahasiswa di dalam melakukan suatu aksi. Kekeliruan seperti itu perlu dikoreksi agar dapat dikembalikan menjadi wajar kembali atau dinormalisasi begitu rupa, sehingga segala sesuatu sesuai dengan hakikatnya.

d) Pengertian normalisasi kampus

Normalisasi kampus adalah redefinisi dari lembaga-lembaga kemahasiswaan secara mendasar, fungsional, dan bertahap. Dalam rangka redefinisi dan penataan kembali diusahakan supaya lembaga-lembaga mahasiswa dapat bekerja ke arah pemenuhan tiga kebutuhan utama mahasiswa, yaitu kesejahteraan mahasiswa (*student welfare*), minat dan kegemaran mahasiswa (*student interest*), dan pengembangan pemikiran dan penalaran mahasiswa (*student ideas and reasoning*).

Untuk melaksanakan normalisasi kehidupan kampus maka perlu ditetapkan bentuk penataan kembali kehidupan kampus. Pada tahap pertama diaktifkan kembali lembaga di tingkat fa-

kultas yaitu Senat Mahasiswa. Senat Mahasiswa ini harus melayani kebutuhan mahasiswa yang telah disebutkan di atas. Senat Mahasiswa perlu juga dibina dan dikembangkan bagi peranan yang lebih besar dalam bidang partisipasi mahasiswa untuk pembangunan. Partisipasi ini dilakukan melalui Ikatan Senat Mahasiswa Sejenis. Pada tahap kedua normalisasi kehidupan kampus dilakukan melalui dua jalur secara simultan, yaitu jalur lembaga mahasiswa pada tingkat fakultas dan jalur pengajaran formal. Dalam tahap ketiga Statuta Perguruan Tinggi perlu disesuaikan dengan misi mahasiswa. Di samping itu penyusunan Undang-undang Pokok Pendidikan Nasional dan Pengembangan Kebudayaan Nasional diusahakan sudah dapat diajukan ke DPR dan dari situ dapat disusun undang-undang tentang pendidikan tinggi. Dalam rangka normalisasi kehidupan kampus penerbitan media tertulis mahasiswa tentu dimungkinkan, namun harus berfungsi sebagai forum manusia penganalisis. Untuk itu, perlu petunjuk serta pengarahan secara akademis dari rektor c.q. pembantu rektor tiga.

3) Pembinaan pemuda

a) Permasalahan pemuda

Masalah-masalah yang dihadapi generasi muda antara lain rasa tidak puas, khawatir, dan merasa tidak aman karena kejadian-kejadian yang berkembang dalam masyarakat, khususnya yang menyangkut kesempatan memperoleh pendidikan dan lapangan kerja, hingga menimbulkan rasa tidak pasti terhadap masa depannya. Di samping itu juga adanya kecenderungan timbulnya perbedaan sistem nilai dan pandangan antara kaum muda dan generasi sebelumnya. Selain itu juga karena masih banyaknya pemuda putus sekolah yang menimbulkan pengangguran serta kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkotika.

b). Tujuan pembinaan

Pertama, mengusahakan terwujudnya generasi penerus pejuang bangsa yang tetap berpegang teguh pada Pancasila sebagai ideologi negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, serta pada Undang-undang Dasar 1945. Kedua, mencetak kader-kader pembangunan yang berbudi pekerti luhur, dinamis, dan

kreatif serta berketrampilan. Ketiga, menciptakan warga negara Indonesia yang berpola kreatif kebudayaan nasional, modern tanpa meninggalkan ciri-ciri kepribadian bangsa. Keempat, mewujudkan warga negara Indonesia sebagai angkatan kerja yang terampil bagi pembangunan nasional. Kelima, mewujudkan warga negara Indonesia yang memiliki kesadaran nasional, menghayati, serta berkesanggupan untuk melanjutkan nilai-nilai dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 1945. Keenam, mewujudkan warga negara Indonesia yang memiliki ketahanan nasional dalam rangka mempertahankan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(c). Strategi dan pendekatan pembinaan

Ketetapan MPR No. IV tahun 1978 telah menetapkan strategi pembinaan bagi generasi muda, sedangkan pendekatan pembinaan pemuda dilakukan melalui program-program yang lebih terarah sesuai dengan GBHN.

(d) Program

Program-program akan diarahkan untuk memberikan bekal patriotisme dan idealisme, kepribadian dan budi pekerti luhur, kesegaran jasmani dan daya kreasi, serta keterampilan dan kepemimpinan.

Program-program tersebut akan dijabarkan dalam bentuk kegiatan nyata disesuaikan dengan kemampuan yang ada.

Pokok-pokok pikiran tentang pendidikan dan kebudayaan pada periode Pelita III ini menjadi dasar bagi kebijakan-kebijakan yang akan diambil.

5.2.4.3 *Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional*

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0283/P/1978 tanggal 25 Agustus 1978 telah dibentuk Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional dengan anggota 21 orang dan diketuai oleh Prof. Dr. Slamet Iman Santoso. Komisi bertugas untuk merumuskan konsep sistem pendidikan nasional semesta, menyeluruh, dan terpadu.

Dari laporan yang telah selesai disusun oleh komisi itu pada tahun 1980 dapat diteliti pokok-pokok pikiran tentang pendidikan dan kebudayaan nasional.^{2 8}

1). Dasar dan haluan pendidikan nasional

Pengalaman menunjukkan dengan jelas bahwa Pancasila seperti dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan kepribadian, tujuan, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pedoman yang harus menjadi dasar sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan bangsa, seperti termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, adalah Pancasila sehingga pendidikan nasional adalah pendidikan Pancasila.

2). Pengembangan bangsa dan pendidikan nasional

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan pernyataan eksplisit mengenai eksistensi bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Pancasila yang merupakan kepribadian, tujuan, dan pandangan hidup bangsa beserta UUD 1945 adalah landasan ideologi dan konstitusional dalam pengembangan bangsa, yang diwujudkan secara nyata dengan usaha-usaha pembangunan sebagai upaya untuk mewujudkan ketahanan nasional dalam rangka mencapai cita-cita bangsa. Pengembangan bangsa merupakan kriteria dasar dalam membangun suatu sistem pendidikan nasional dengan mewujudkan keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara pengembangan kuantitatif serta antara aspek lahiriah dan aspek rohaniah.

Pengembangan suatu sistem pendidikan nasional merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan wawasan nusantara yang mencakup perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi, serta satu kesatuan pertahanan keamanan. Fungsi utama suatu sistem pendidikan ialah mengembangkan manusia, masyarakat, dan lingkungannya. Dengan demikian, sistem pendidikan nasional harus berfungsi mengembangkan bangsa dan kebudayaan nasional. Pendidikan nasional dalam rangka pengembangan bangsa dan kebudayaan nasional adalah usaha untuk mewujudkan tujuan nasional seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

3). Pengembangan kebudayaan dan pendidikan nasional

Pengembangan kebudayaan memiliki hubungan erat dengan pembangunan, yang merupakan interaksi terus-menerus antara pengembangan dua sumber daya: sumber daya manusia dan sumber daya alam berdasarkan hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber segala sumber daya.

Pembangunan pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Pendekatan yang digunakan dalam hal ini adalah pendekatan budaya berdasarkan Pancasila, yang pada hakikatnya ialah usaha mengadakan perubahan-perubahan menuju kepada keadaan yang lebih baik dengan tetap menjaga keselarasan, keseimbangan, dan keserasian dalam hidup manusia sebagai pribadi, hubungan manusia dengan Tuhannya, dalam hubungan manusia dengan masyarakat, dalam hubungan manusia dengan alam, dalam hubungan manusia dalam suatu bangsa dengan bangsa lain, dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohaniah. Dengan demikian, pembangunan, kebudayaan, dan pendidikan selalu mengembangkan dan menjunjung tinggi martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan bertakwa kepada-Nya.

Pendekatan budaya berdasarkan Pancasila harus pula memperhatikan perkembangan sejarah bangsa dan ruang lingkupnya dengan segala permasalahannya. Dalam hubungan ini, pengembangan kebudayaan harus memperhatikan secara terpadu tiga lingkup perkembangan sejarah: lingkup nasional, lingkup kawasan, dan lingkup internasional.

Pengembangan kebudayaan dalam lingkup nasional harus memperhatikan corak dasar masyarakat Indonesia, yaitu corak nusantara, corak bhinneka tunggal ika, corak keagamaan, dan corak kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu pengembangan kebudayaan dalam lingkup nasional juga mempunyai fungsi melestarikan usaha pengembangan generasi muda sebagai penerus kehidupan bangsa.

Pengembangan kebudayaan dalam lingkup kawasan—umpamanya Asia Tenggara—berarti usaha untuk membangun wilayah-wilayah di sekitar Indonesia sehingga menjadi kondisi

habitat yang sebaik-baiknya untuk perkembangan nasional, kawasan, dan internasional.

Pengembangan kebudayaan dalam lingkup internasional merupakan usaha bangsa untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Mengingat letak tanah air Indonesia pada persimpangan jalan raya internasional, bangsa Indonesia harus berusaha menghadapi perkembangan kekuatan-kekuatan dunia, sehingga kekuatan-kekuatan itu tidak membawa akibat yang merugikan bagi pengembangan bangsa dan berusaha mengambil manfaat dari kekuatan-kekuatan itu demi pengembangan bangsa Indonesia. Hal ini berkaitan dengan perkembangan di bidang agama, ideologi, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, politik, keamanan, ekonomi, sosial, kesenian, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Pengembangan kebudayaan berfungsi membangun kualitas sumber daya manusia dalam mewujudkan cita-cita nasional serta memecahkan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam tingkat perkembangan nasional, kawasan, dan internasional masa kini, termasuk juga masalah-masalah yang mungkin timbul di masa yang akan datang. Dalam rangka itu usaha mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari cita-cita kebangsaan dan merupakan kebijaksanaan dasar pengembangan kebudayaan nasional saat ini dan saat mendatang. Pengembangan kebudayaan itu mencakup 3 hal pokok, yaitu pilihan eksistensi, pengembangan pengetahuan, dan praktek komunikasi. Dengan pilihan eksistensi dimaksudkan bahwa pengembangan kebudayaan tidak dilepaskan dari dasar dan cita-cita hidup bangsa. Pengembangan pengetahuan diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan pilihan eksistensi itu. Praktek komunikasi perlu dilaksanakan agar perkembangan kebudayaan yang selaras, seimbang, dan serasi, baik dalam kaitannya dengan pilihan eksistensi maupun dalam kaitannya dengan pengetahuan, dapat diwujudkan.

Karena pendidikan nasional memakai pendekatan budaya Pancasila, maka semua fungsi dan tujuan pengembangan kebudayaan harus pula menjadi tanggung jawab pendidikan nasional.

Dengan latar belakang yang demikian itu, pengembangan kebudayaan nasional dan pengembangan pendidikan nasional mempunyai tujuan sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

4) Dasar, tujuan, fungsi, unsur-unsur pokok dan asas pelaksanaan pendidikan nasional

Pendidikan nasional adalah usaha dasar untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan mengusahakan perkembangan kehidupan beragama, kehidupan berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, nilai budaya, pengetahuan, keterampilan, daya estetik, dan jasmaninya maka ia dapat mengembangkan dirinya dan bersama dengan sesama manusia membangun masyarakatnya serta membudayakan alam sekitarnya.

Pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 berarti bahwa sistem pendidikan nasional adalah pendidikan Pancasila. Pendidikan nasional bertujuan meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan warga negara Indonesia, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat, mengembangkan bangsa Indonesia, dan mengembangkan kebudayaan nasional. Sesuai dengan dasar tujuan dan fungsi pendidikan nasional, unsur-unsur pokok pendidikan nasional terdiri atas pendidikan moral Pancasila berlandaskan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, pendidikan agama, pendidikan watak dan kepribadian, pendidikan bahasa, pendidikan kesegaran jasmani, pendidikan kesenian, pendidikan ilmu pengetahuan, pendidikan keterampilan, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan kesadaran bersejarah.

Pendidikan nasional dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas pelaksanaan sebagai berikut:

- a) Asas semesta menyeluruh dan terpadu;
- b) Asas pendidikan seumur hidup;
- c) Asas tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
- d) Asas pendidikan yang berlangsung dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat;
- e) Asas keselarasan dan keterpaduan dengan ketahanan nasional dan wawasan nusantara;
- f) Asas Bhinneka Tunggal Ika;
- g) Asas keselarasan, keseimbangan, dan keserasian;
- h) Asas manfaat, adil, dan merata;
- i) *Asas ing ngraso sung tulodho, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani;*
- j) Asas mobilitas, efisiensi, dan efektivitas;
- k) Asas kepastian hukum.

Dengan bertitik tolak pada pokok-pokok pikiran tentang sistem pendidikan nasional, diharapkan setiap rakyat Indonesia mempertahankan hidupnya, mengembangkan dirinya, dan secara bersama-sama membangun masyarakat Indonesia. Melalui sistem pendidikan nasional, setiap rakyat Indonesia pada dasarnya harus mampu menghayati nilai-nilai budaya Indonesia dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai itu secara kreatif sehingga dapat meningkatkan kemampuan memperoleh dan menciptakan pekerjaan melalui bermacam-macam kemungkinan.

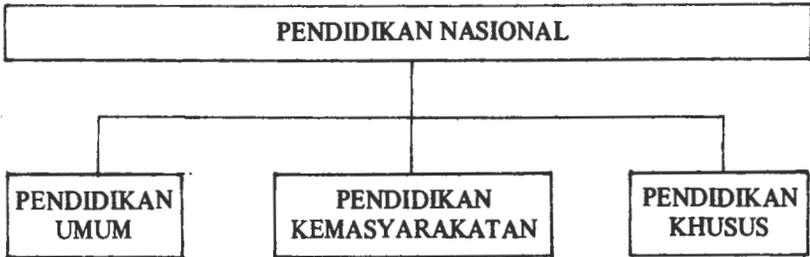
5) Pelaksanaan pendidikan nasional

Dasar, tujuan, fungsi, unsur-unsur pokok, dan asas pelaksanaan pendidikan nasional dituangkan dalam perangkat fungsi dan lembaga pendidikan yang dinamakan struktur pendidikan nasional. Struktur pendidikan nasional sebagai suatu struktur yang terpadu, secara dinamis merupakan jalur-jalur lalu lintas perkembangan kebudayaan. Melalui jalur itu setiap rakyat Indonesia, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat, mengembangkan penghidupan dan kehidupannya.

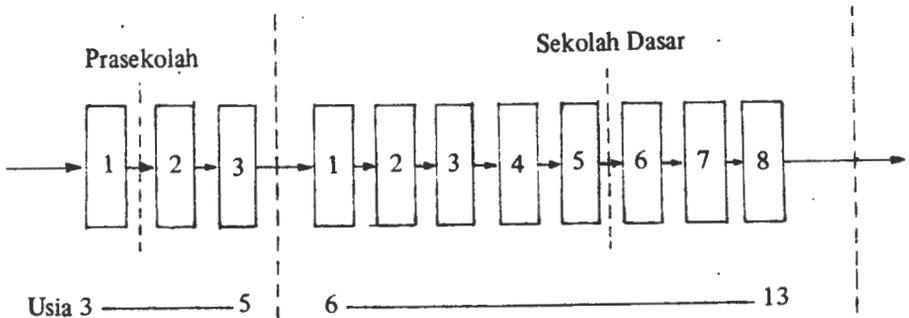
Dalam hubungan dengan struktur pendidikan nasional sebagai susunan perangkat fungsi lembaga pendidikan, dikemukakan jenis-jenis pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan,

jenjang pendidikan, dan mobilitas pendidikan. Kesemuanya dapat dilihat pada bagan-bagan dari Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional ini.

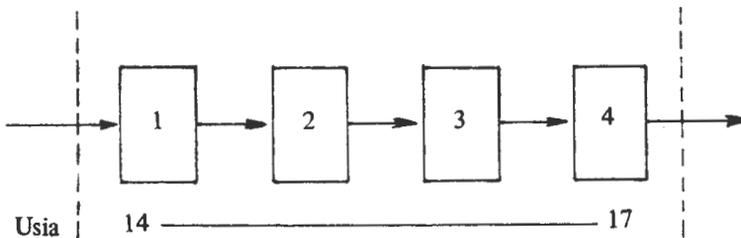
BAGAN JENIS-JENIS PENDIDIKAN NASIONAL



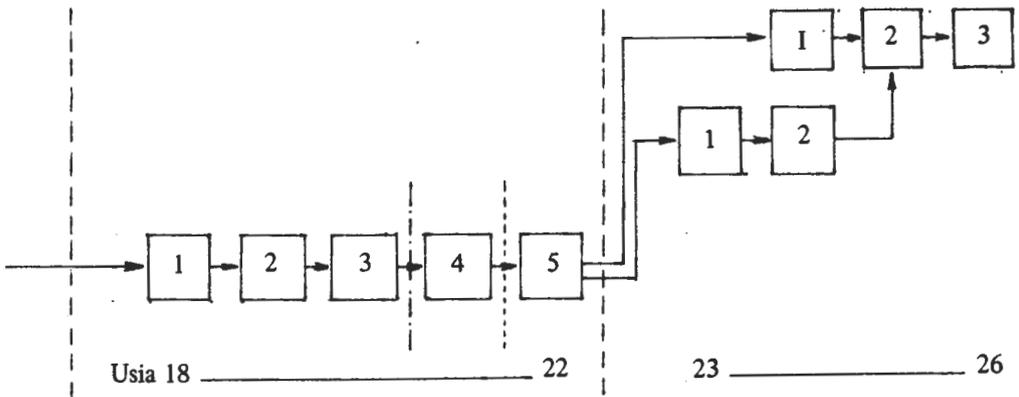
BAGAN JENJANG PENDIDIKAN DASAR



BAGAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH



BAGAN JENJANG PENDIDIKAN TINGGI



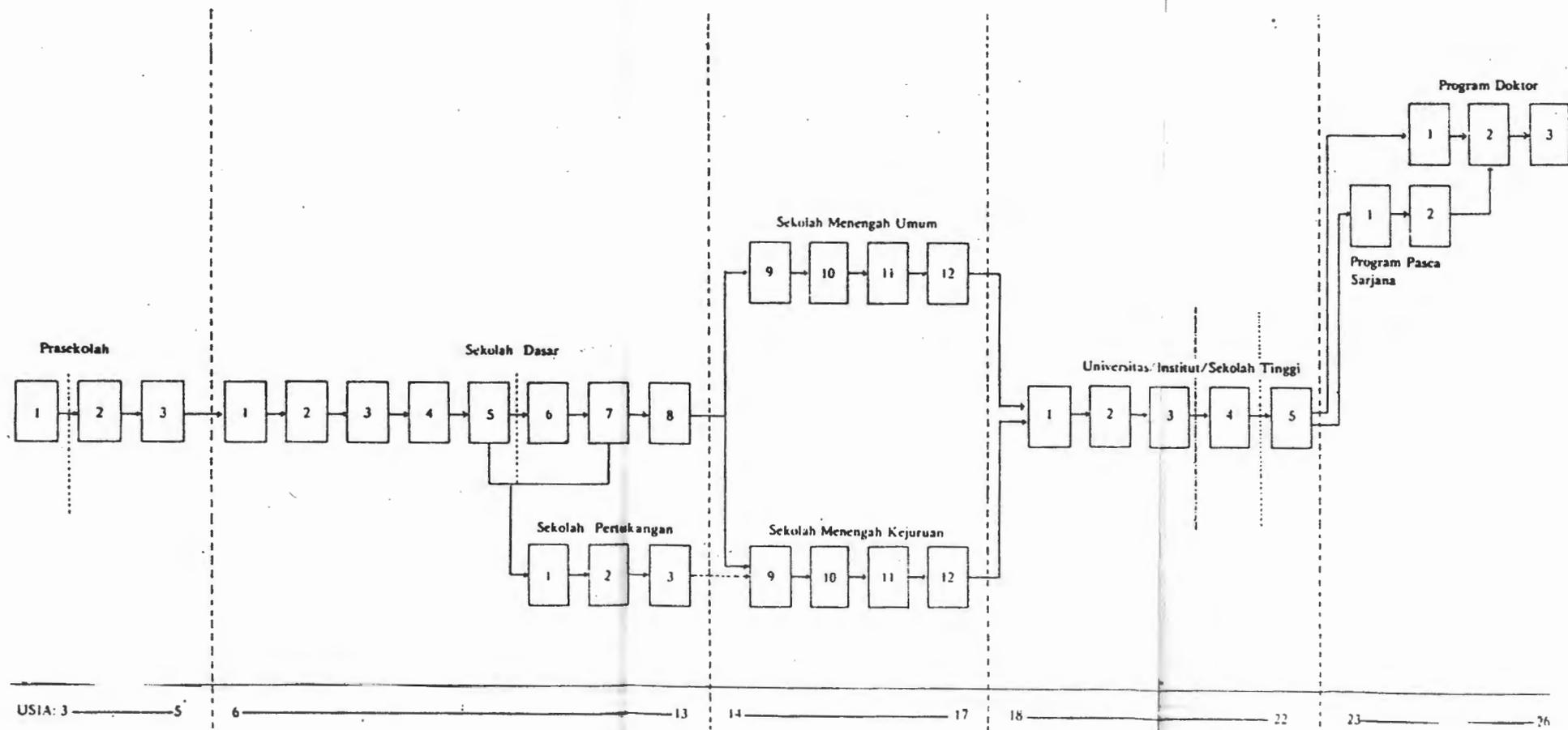
TABEL STRATA DAN JALUR PENDIDIKAN TINGGI

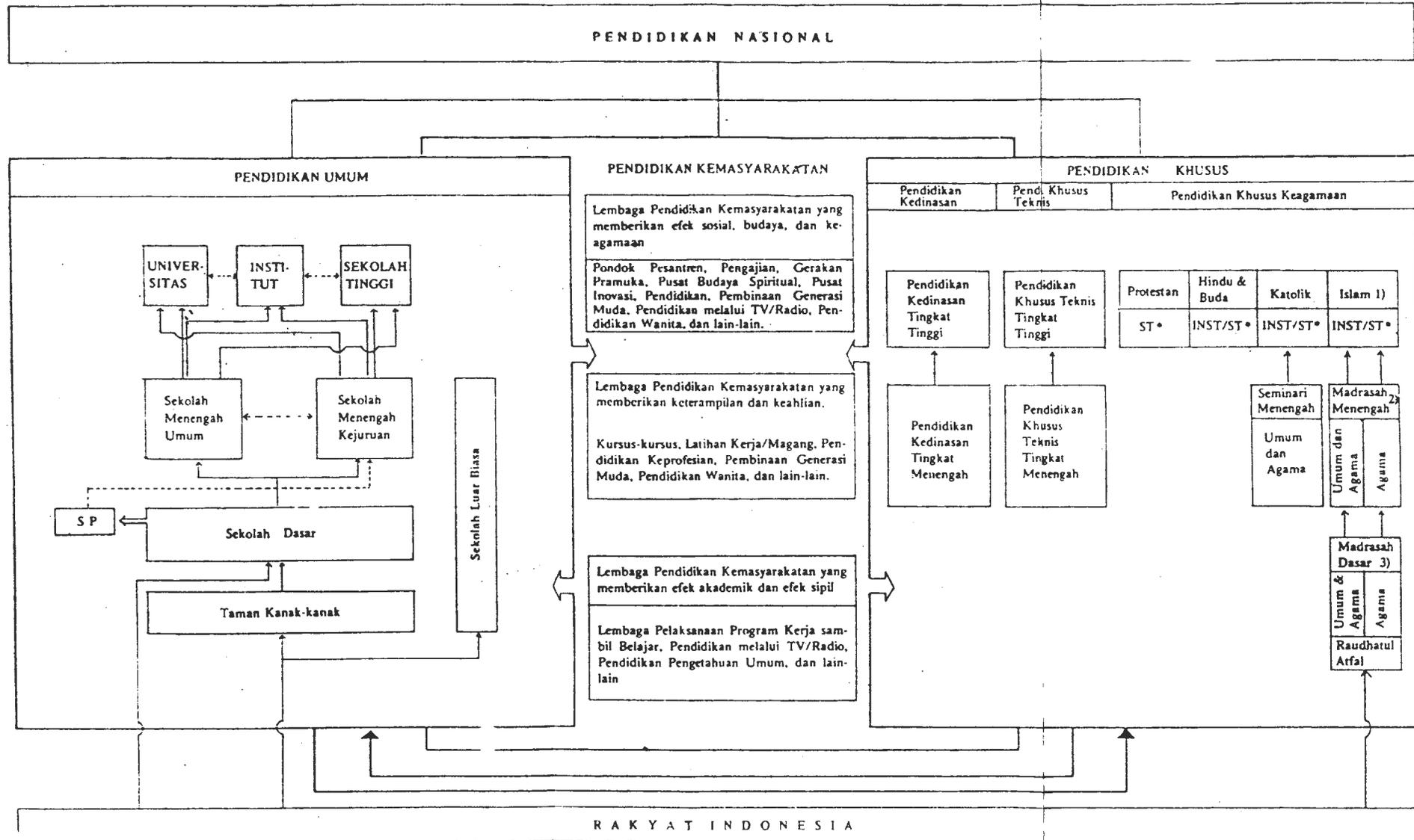
Kode Strata	Jalur		Beban satuan kredit semester (SKS)	Perkiraan lamanya masa program belajar (tahun)	Keterangan
	Gelar	Diploma			
S 4	Doktor	Diploma IV	228 -- 233	8	beban SKS dan perkiraan lamanya masa program belajar dihitung mulai dari tahun pertama.
S 3	Pasca Sarjana	Diploma III	180 -- 194	6 atau 7	
S 2	Sarjana	Diploma II	144 -- 160	4 atau 5	
S 1	Sarjana Muda	Diploma I	110 -- 120	3	

5.3 Kebijakan dan Usaha-usaha Pendidikan dan Kebudayaan

Orde Baru di satu pihak merupakan tatanan baru dalam mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dan di pihak lain merupakan Orde Pembangunan. Dalam merencanakan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan

BAGAN JENJANG PENDIDIKAN





Keterangan

- (1) Termasuk Institut Agama Islam Negeri, Perguruan Tinggi Agama Islam, Pendidikan Guru Agama
- (2) Aliyah, Diniyah Ylya
- (3) Tsanawiyah/Ibtidaiyah
Diniyah Wustha/Diniyah Awaliah

*) Termasuk program pasca sarjana dan program doktor

- > Mobilitas vertikal langsung
- - - - -> Mobilitas horizontal selektif
- =====> Mobilitas horizontal langsung
-> Mobilitas vertikal selektif
- ⇒ dan → Mobilitas Lintas Sektoral

dua tema Orde Baru itulah yang dijadikan dasar untuk menyusun kebijaksanaan. Tujuan, arah, dan sasaran dari kebijaksanaan pendidikan dan kebudayaan dapat dilihat pada setiap periode sesuai dengan konsep pemikiran tentang pembaharuan pendidikan dan kebudayaan dari Kabinet Ampera sampai dengan Kabinet Pembangunan III (akhir Pelita III).

5.3.1 Kebijakan Kabinet Ampera

Sesuai dengan dasar pemikiran politik pendidikan²⁸ yang telah dikemukakan, maka kebijaksanaan yang diambil untuk merealisasikan pemikiran itu adalah:

5.3.1.1 Pembaharuan pendidikan

- 1) Merubah sistem pendidikan pasif yang lebih banyak menitikberatkan pada teori menjadi sistem pendidikan aktif yang lebih mengarah ke keterampilan praktek.
- 2) Pendidikan kecerdasan dengan sistem sekolah yang bersifat umum dibatasi bagi mereka yang betul-betul mempunyai bakat.
- 3) Memperbanyak sekolah kejuruan teknik.
- 4) Materi pendidikan yang diberikan untuk SD adalah persiapan mental ke arah jiwa Pancasila yang sanggup beribadah menurut agamanya masing-masing, dan percaya pada diri sendiri untuk dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, dan juga memiliki ide keterampilan.
- 5) Pada tingkat Sekolah Menengah Pertama dimulai dengan aktivitas dalam keterampilan. Untuk itu, kurikulum harus dirubah menjadi 60% keterampilan dan 40% teori. Di samping itu masih dilanjutkan dengan pendidikan mental.
- 6) Pada tingkat Sekolah Menengah Atas secara aktif sudah dijuruskan ke jurusan yang diperlukan oleh masyarakat.
- 7) Pada Sekolah Tinggi sudah aktif ikut serta dalam penentuan pembangunan di segala bidang.

5.3.1.2 Usaha-usaha yang dilaksanakan

- 1) Dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri diusahakan adanya suatu Pusat Pembinaan Pembaharuan Pendidikan Pedesaan di Semarang, yang bertugas untuk mengadakan survei tentang rural education di Kecamatan Ungaran. Atas dasar survei ini hasilnya akan disebarluaskan ke propinsi-propinsi lain. Pembaharuan pendidikan agraris diperuntukkan bagi daerah-daerah pedesaan terutama di Jawa berdasarkan kerja sama secara teknis konsultatif dengan Departemen Pertanian.
- 2) Kerja sama antara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Departemen Tenaga Kerja di tiap propinsi berupa penyelenggaraan *Training Centre* yang bertugas untuk:
 - a) Mengadakan *training on the job* guna mendapatkan tenaga kerja yang terampil.
 - b) Tempat *upgrading* guru-guru untuk mendidik calon-calon guru Sekolah Teknik.
 - c) Memproduksi alat-alat kecil guna keperluan sekolah-sekolah teknik.
 - d) Memberi bimbingan terhadap pendirian kursus-kursus teknik atau Sekolah Teknik di pusat-pusat industri.
 - e) Memberi pembinaan kepada sekolah politeknik sebagai usaha adanya *vocational education* bagi daerah kota dan kerja sama dengan fakultas-fakultas teknik setempat.
- 3) Direktorat Jendral Pendidikan Dasar mulai mengadakan peninjauan terhadap:
 - a) Kurikulum sekolah dasar sampai menengah dengan perbandingan materi pelajaran 60% untuk keterampilan dan 40% untuk teori. Hal ini dilaksanakan dengan penyusunan Kurikulum 1968 untuk menggantikan Rencana Pelajaran 1964.

- b) Penyelenggaraan berbagai macam kursus keterampilan teknik yang dinilai setingkat dengan Sekolah Teknik setelah diadakan evaluasi secara teknis administratif dengan Kantor Urusan Pegawai (KUP).
 - c) Persiapan Pusat Pembinaan Pendidikan Kerajinan dalam kerja sama dengan Direktorat Jendral Perindustrian Rakyat untuk kemudian disebarluaskan sampai ke propinsi-propinsi lain.
 - d) Peninjauan kurikulum sekolah kejuruan untuk wanita yang diarahkan kepada pengintegrasian kesederhanaan jiwa dengan kehidupan sekelilingnya, untuk mendayagunakan segala benda, alat, maupun ramuan makanan yang terdapat di sekeliling, dan juga untuk kejuruan yang dapat mengisi kekurangan tenaga perawatan orang sakit, anak, gizi, serta pekerjaan sekretariat.
- 4) Direktorat Jendral Perguruan Tinggi mengadakan:
- a) Persiapan dengan Departemen Tenaga Kerja untuk merencanakan tenaga kerja sesuai dengan keseimbangan antara tenaga tingkat rendah, menengah, dan tinggi. Dengan demikian, dapat dipenuhi tenaga kerja yang terampil.
 - b) Peninjauan terhadap struktur Perguruan Tinggi dengan universitas menjadi Universitas Pembina (Induk), Universitas Madya, dan Universitas Muda.
 - c) Peninjauan terhadap kurikulum untuk mengubah ke sistem aktif. Dengan demikian, dapat dihasilkan sarjana yang kreatif, tidak saja memiliki ilmu, tapi dapat menerapkannya dalam kehidupan masyarakat.
 - d) Pengaktifan pengamalan ilmu pengetahuan sehingga dapat diintegrasikan dengan kehidupan masyarakat.
- 5) Direktorat Jendral Kebudayaan Olah Raga, Urusan Pemuda dan Pramuka mengintegrasikan kegiatannya dengan usaha Direktorat-Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Perguruan Tinggi berupa kegiatan ekstra kurikuler yang

berfungsi untuk menempuh kegiatan dan keagairahan hidup di bidang masing-masing.

6) **Pembiayaan**

Oleh karena pemerintah pusat tidak mungkin dapat membiayai seluruh pendidikan bagi rakyatnya, maka bantuan masyarakat sangat diperlukan. Oleh karena sistem *vocational education* dan *rural education* mempunyai sifat pendidikan bekerja sambil belajar dan belajar sambil bekerja, maka dapat digunakan peralatan yang ada di sekeliling. Untuk gedung sekolah pun dapat digunakan rumah yang ada di daerah-daerah. Guru-gurunya diambilkan dari tukang-tukang ahli yang terdapat di daerah itu setelah ditatar dalam hal metode. Juga diperlukan pengumpulan dana, bukan dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk natura (misalnya buah kelapa).

Kebijaksanaan yang diambil serta usaha-usaha yang dilaksanakan oleh Kabinet Ampera di bidang pendidikan dan kebudayaan memberi arti yang penting. Hal ini disebabkan karena meskipun secara kuantitatif hasil yang dicapai masih kurang, akan tetapi dari segi politik Kabinet Ampera telah memberikan sumbangan pemikiran di bidang pembaharuan pendidikan dan kebudayaan untuk periode-periode selanjutnya, karena periode Kabinet Ampera merupakan rehabilitasi dan konsolidasi menuju era pembangunan nasional.

5.3.2 *Kebijaksanaan Kabinet Pembangunan I*

Periode ini merupakan tahap yang menentukan karena merupakan dasar bagi tahap-tahap pembangunan selanjutnya. Dalam konsep pemikiran tentang pembaharuan yang telah dikemukakan terlihat adanya suatu tinjauan yang mendasar dan menyeluruh.

Untuk menentukan kebijaksanaan yang akan diambil serta usaha-usaha yang harus dilakukan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mashuri mengemukakan beberapa masalah pokok yang dihadapi,²⁹ yaitu: pertama, makin laju pertumbuhan penduduk, makin laju pula tekanan aspirasi dan tuntutan masyarakat

kat akan pendidikan. Oleh karena itu, perlu dipikirkan cara-cara mengatasinya; kedua, masalah kurangnya penyediaan tenaga, uang, dan fasilitas; ketiga, masalah banyaknya sistem pendidikan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena penyelenggaraan pendidikan tidak berada dalam satu tangan; keempat, masalah usangnya sistem pendidikan di Indonesia. Orang yang memasuki sekolah bertujuan semata-mata untuk mendapatkan gelar agar menjadi pegawai negeri. Begitu pula sistem sekolah yang mengenal orientasi kejuruan dan orientasi umum (akademik). Hal ini mengakibatkan ketimpangan-ketimpangan dalam sistem pendidikan, yaitu ketimpangan horisontal, vertikal, dan banyaknya *dropped out*. Kurangnya relevansi pendidikan dilihat dari perbedaan antara jenis sekolah dengan jenis mata pelajaran maupun perbedaan antara kecakapan yang dimiliki lulusan dengan kecakapan yang dituntut oleh pekerjaan. Hal itu disebabkan karena kurikulum yang kurang relevan. Kurangnya efisiensi pendidikan terlihat pada banyaknya murid yang mengulang serta jumlah *dropped out* jumlahnya pendidikan dasar. Sampai tahun 1970 jumlahnya ada 65%.

Berdasarkan masalah-masalah yang dihadapi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berusaha untuk mengatasi hambatan yang ada dengan mengambil berbagai kebijaksanaan.

5.3.2.1 Kebijakan dalam pembaharuan pendidikan

- 1) Usaha pembaharuan di bidang pendidikan formal mencakup semua tingkatan pendidikan. Isi mata pelajarannya meliputi bidang-bidang studi kerokhaniaan, ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam, matematika, bahasa dan sastra, teknologi kejuruan, olah raga dan kesenian.
- 2) Usaha pembaharuan di bidang pendidikan nonformal meliputi pendidikan masyarakat, pendidikan kepemudaan, keolahragaan, dan pendidikan kesenian.
- 3) Usaha pembaharuan di bidang kebudayaan.

5.3.2.2 Usaha-usaha yang dilakukan dan hasil yang dicapai

- 1) Bidang kurikulum

- a) Penghapusan ujian negara dan ijazah negara menjadi ujian sekolah dan tanda tamat belajar bagi Sekolah Dasar dan Menengah. Hal ini dilakukan secara bertahap.
- b) Mengusahakan pembaharuan kurikulum dan metode mengajar di tingkat SD melalui beberapa Proyek Kurikulum dan Metode Mengajar (PKMM). Untuk perbaikan kurikulum-kurikulum dan metode mengajar pada Sekolah Menengah penelitiannya dilakukan di 8 Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (SK Menteri P dan K No. 0171/1971 dan SK Menteri P dan K No. 0171a/1971).
- c) Peningkatan mutu pendidikan teknik dilakukan dengan membuka Proyek Perintis STM Pembangunan (di Jakarta, Semarang, dan Yogyakarta).
- d) Menyiapkan kurikulum dan metode mengajar olah raga seperti di SMOA dan STO.
- e) Melengkapi buku-buku pelajaran melalui Proyek Paket Buku.
- f) Menegakkan kembali kebebasan ilmiah dan kebebasan mimbar di perguruan tinggi.
- g) Penentuan standar akademik di perguruan tinggi. Diadakan kategorisasi di lingkungan perguruan tinggi negeri dan diperkenalkannya Fakultas Pembina, Madya, dan Muda.
- h) Penelitian ilmiah dilakukan oleh universitas/institut dan IKIP sebanyak 360 buah, di samping tiga penelitian untuk pengembangan buku.
- i) Kegiatan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (43 kegiatan).
- j) Untuk ukuran kesegeran jasmani (*physical fitness*) telah disiapkan *physical fitness test*.
- k) Dalam bidang kebudayaan telah diadakan penyusunan pendidikan kebudayaan di sekolah-sekolah yang meliputi juga sekolah-sekolah di bidang kebudayaan, seperti Sekolah Tinggi Kesenian, Akademi Seni Karawitan, Akademi Seni Rupa.

- 2) Bidang personel
 - a) Mengadakan berbagai macam penataran bagi guru, dosen, instruktur, dan tenaga teknis, baik untuk pendidikan formal maupun nonformal.
 - b) Pengangkatan tenaga guru baru untuk menggantikan mereka yang terlibat G 30 S/PKI.
 - c) Dibentuk Tim Peningkatan Efisiensi Administrasi Personel.
 - d) Pengumpulan data untuk sensus pegawai.
 - e) Penyelesaian pensiun telah dilakukan dengan lebih baik dan cepat.
 - f) Mengadakan *upgrading coach*, bagi wasit dan wartawan.
- 3) Bidang material
 - a) Telah diusahakan rehabilitasi terhadap sarana pendidikan yang parah keadaannya, misalnya sekolah-sekolah, kantor-kantor perwakilan.
 - b) Telah diadakan standardisasi gedung, alat kantor, alat pendidikan, buku pelajaran, alat untuk bidang kebudayaan dan olah raga bagi kantor pusat, perwakilan, pembinaan kabupaten, pembinaan wilayah, dan sekolah.
 - c) Telah disusun buku-buku pedoman administrasi material.
 - d) Telah dibangun 47.000 m² ruang perpustakaan pada universitas (institut-institut), 35.400 m² ruangan laboratorium, ± 1200 m² ruangan untuk *Tropical Biology*, dan telah disediakan ± 12.000 m² tanah untuk dua universitas.
 - e) Telah direhabilitasi ruang kuliah ± 6.450 m².
 - f) Telah dirintis usaha pembangunan sekolah swasembada untuk menambah fasilitas, khususnya di tingkat Sekolah Menengah.
 - g) Telah dibangun Tempat/Pusat Pendidikan Keterampilan yang diintegrasikan dalam pelaksanaan delapan Proyek Perintis Sekolah Pembangunan.

- h) Telah selesai dibangun STM Pembangunan yang berfungsi sebagai proyek perintis dan masing-masing satu unit pada sembilan proyek instalasi pendidikan teknologi lainnya.
 - i) Telah diadakan dan dikembangkan Proyek-proyek Paket Buku.
- 4) Bidang pembiayaan
- a) Memberikan petunjuk tentang penyusunan anggaran dan alokasi honorarium/vakasi.
 - b) Menerbitkan surat edaran mengenai kenaikan unit bantuan bagi sekolah swasta, jumlah tertinggi bantuan yang dapat diberikan untuk belanja barang sekolah bersubsidi, dan prosedur untuk memperoleh bantuan dan subsidi bagi sekolah swasta.
 - c) Untuk alat-alat laboratorium perguruan tinggi telah dapat disediakan Rp 229.115.000,00.
 - d) Mengadakan penertiban dan penyempurnaan administrasi keuangan.
 - e) Mengadakan penertiban dalam pungutan uang masuk pendidikan dengan mengeluarkan peraturan tentang SPP. SPP berlandaskan ketetapan pemerintah yang diucapkan oleh Presiden di depan sidang DPR/GR pada tanggal 16 Agustus 1969, yaitu bahwa tanggung jawab pendidikan berada di tangan orang tua/keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
- 5) Bidang organisasi, administrasi dan manajemen
- a) Mengadakan reorganisasi dalam Departemen P dan K agar menggambarkan pembagian tugas secara rasional.
 - b) Membentuk Inspektorat Jendral dan Badan Pengembangan Pendidikan.
 - c) Mengadakan desentralisasi wewenang dan tanggung jawab.
 - d) Menggalang kesatuan komando (*unity of command*) di tingkat propinsi.

- e) Bagi pembinaan Pendidikan Tinggi dilakukan usaha-usaha sebagai berikut:
- (1) Mengadakan kategorisasi Fakultas Pembina dan Non-pembina. Fakultas nonpembina dibagi dalam dua kategori, masing-masing Fakultas Madya dan Muda. Segala sesuatu berdasarkan persyaratan minimum.
 - (2) Membentuk konsorsia untuk pembinaan Perguruan Tinggi yang meliputi konsorsia ilmu-ilmu pertanian, *science* dan teknologi, ilmu kedokteran, ilmu-ilmu sosial budaya yang dibagi dalam sub-subkonsorsia ilmu hukum, ekonomi, sosial, sastra, filsafat, dan psikologi serta konsorsium ilmu pendidikan dan keguruan. Dalam perkembangan selanjutnya dibentuk konsorsium antar bidang yang menangani pengembangan mata-mata kuliah ISD, IBD dan IAD sebagai Mata-mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) di samping Agama, Pancasila, dan Kewiraan.³⁰
 - (3) Dalam rangka pembinaan dan penertiban perguruan tinggi kedinasan yang diselenggarakan oleh departemen di luar Departemen P dan K, telah dirintis adanya kerja sama melalui konsultasi.
 - (4) Dalam rangka penertiban perguruan tinggi swasta diusahakan untuk lebih melindungi kepentingan masyarakat; perguruan tinggi swasta yang ternyata bersifat komersial diambil tindakan, sedangkan PTS yang bonafide dijadikan partner pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.
 - (5) dalam rangka koordinasi kegiatan perguruan tinggi yang berhubungan dengan pembangunan, telah didirikan *Scientific and Development Centre (SDC)* di Jakarta dan *Regional Scientific Development Centre (RSDC)* di daerah.
 - (6) Dibentuk Dewan Perhubungan Pendidikan Tinggi (DPPT), yang bertugas memberi saran-saran kepada Menteri P dan K mengenai kebijaksanaan pembinaan pendidikan tinggi secara nasional dan menyeluruh;

juga diadakan penyempurnaan pada Lembaga Perguruan Tinggi Swasta, yang dapat memberi saran kepada Menteri P dan K dalam pembinaan perguruan tinggi swasta.

- 6) Bidang partisipasi masyarakat
 - a) Mengadakan loka karya (*workshop*) untuk mengidentifikasi masalah dan potensi sumber-sumber partisipasi masyarakat.
 - b) Mempersiapkan Rencana Undang-undang Pendidikan dan Rencana Undang-undang Organik.
 - c) Pembangunan sekolah swasembada. Mulai Tahun anggaran 1972/1973, pemerintah pusat melancarkan usaha pembangunan gedung sekolah dengan menggunakan sistem dana imbalan (*matching funds*), yaitu pemerintah pusat akan menyediakan dana permulaan (*initial-funds*) kurang lebih dua pertiga dari biaya pembangunan dan sebagai imbalannya pemerintah daerah dan masyarakat setempat menyediakan tanah dan sepertiga dari seluruh biaya yang digunakan.

Hal ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menempuh partisipasi masyarakat dalam memikul beban pendidikan bagi generasi mudanya; juga agar memasukkan unsur turut memiliki dan pengaturan gedung sekolah secara integral terhadap lingkungan sekitar. Akhirnya dapat terpupuk suatu dana dari para pelayan sekolah yang bersangkutan dengan jalan menyisihkan sebahagian dari dana SPP yang ada.

- 7) Bidang-bidang khusus
 - a) Pengarahan pelajar/mahasiswa mengenai perjuangan Orde Baru.
 - b) Mengarahkan mahasiswa agar ikut serta merealisasikan fungsi dan keaktifan Tridharma Perguruan Tinggi bersama-sama *civitas academica* lainnya. Program yang sama diusahakan untuk pelajar/siswa di Sekolah Menengah.

- c) Mengusahakan hilangnya perang komunikasi dengan generasi muda dan melanjutkan pengarahannya mengenai nilai, sikap, serta kegiatan yang positif, kreatif, dan produktif.
 - d) Merintis penanggulangan kenakalan anak muda dari bahaya narkoba, unsur negatif dari kebudayaan asing, serta bahaya lain yang merugikan kepentingan dunia generasi muda.
 - e) Pengarahan mengenai pembentukan kelompok profesi dalam pembinaan karyawan melalui Korpri sebagai satu-satunya wadah penghimpun bagi karyawan tenaga administratif maupun tenaga educatif (guru) negeri.
- 8) **Bidang Pelita**
- a) Mengadakan koordinasi yang lebih baik di dalam proyek-proyek Pelita.
 - b) Membentuk Team Prarencana Pelita di setiap unit eselon I.
 - c) Membentuk Team Pengendalian Operasional Pelita (TPOP).
 - d) Membentuk prosedur intern dalam persiapan pembuatan DIP.
- 9) **Pembakuan bahasa Indonesia**
- a) Pembakuan (standardisasi) ejaan bahasa Indonesia. Penyempurnaan ejaan harus sudah selesai selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 1973. Ejaan yang disempurnakan dinamakan Ejaan Nasional.
 - b) Diharapkan pemerintah dapat memberikan perhatian khusus pada pembinaan perkembangan bahasa nasional sebagai salah satu unsur pokok dalam pembinaan persatuan bangsa. Untuk itu, pemerintah akan mendirikan suatu Pusat Nasional Pengembangan Bahasa yang ditempatkan langsung di bawah Menteri P dan K.
 - c) Ejaan yang disempurnakan tidak akan mengubah atau menambah huruf yang ada pada mesin tik. Dalam pelaksanaannya, buku yang ditulis dalam ejaan yang sedang berlaku tetap dipergunakan selama kurang lebih lima tahun.

- d) Penulisan kata-kata Arab dalam bahasa Indonesia ditulis sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia. Kecuali kata-kata Arab yang ada hubungannya dengan keagamaan diberi perlakuan khusus. Untuk itu, perlu ada panitia yang dibentuk yang melibatkan Departemen Agama dan Departemen P dan K untuk memikirkan cara penulisan kata-kata Arab dengan huruf Latin.
 - e) Penggunaan huruf c untuk menggantikan tj berdasarkan faktor keilmuan bahasa sesuai dengan alphabet yang berlaku secara internasional serta sudah dipakai dalam pengalihan huruf bahasa-bahasa Timur ke huruf Latin (Jawa Kuno, Melayu Kuno, Sansekerta).
- 10) Program *Back to Campus*

Pengembalian kedudukan dan fungsi Perguruan tinggi pada posisinya yang wajar seperti yang dikemukakan dalam *Basic Memorandum* Direktur Jendral Pendidikan Tinggi tahun 1967. Agar program ini dapat dilaksanakan perlu terlebih dahulu mengembalikan kebebasan ilmiah dan kebebasan mimbar. Dalam hal ini harus dibedakan antara arti kebebasan *an sich* dalam isi, tujuan, ciri, dan fungsi dengan kebebasan dalam penerapannya pada dunia nyata. Kebebasan *an sich* bersifat abstrak universal tidak terikat oleh ruang dan waktu, sedangkan kebebasan dalam penerapan adalah konkret situasional dan terikat pada ruang dan waktu. Dengan demikian, ada keterbatasan dan pembatasan, karena manusia selalu terkait dengan alam sekitarnya. Jadi, kebebasan harus dilakukan dengan mengingat kepentingan dan ketertiban umum.

Beberapa kebijaksanaan yang telah ditempuh dalam periode Kabinet Pembangunan I ini kemudian dilanjutkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kabinet Pembangunan II.

5.3.3 *Kebijaksanaan Kabinet Pembangunan II*

Berbagai masalah yang mendesak dalam bidang pendidikan dan kebudayaan serta pembinaan generasi muda telah diusaha-

kan untuk mengatasinya melalui berbagai kebijaksanaan dalam Kabinet Pembangunan I. Kebijaksanaan-kebijaksanaan pokok dalam Kabinet Pembangunan II ini merupakan sejumlah kegiatan dan perluasan usaha dalam periode ini menyangkut kebijaksanaan yang harus diambil untuk mengatasi sejumlah permasalahan yang masih dihadapi.

Permasalahan di bidang pendidikan dan kebudayaan serta generasi muda menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- a) perluasan dan pemerataan kesempatan belajar,
- b) peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan,
- c) relevansi pendidikan,
- d) efektivitas dan efisiensi pendidikan dan kebudayaan,
- e) kebudayaan nasional, dan
- f) pembinaan generasi muda.

Beberapa kebijaksanaan telah diambil dan usaha-usaha yang dilaksanakan untuk mengatasinya dapat dilihat dalam uraian-uraian berikut.^{3 1}

5.3.3.1 *Kebijaksanaan dalam perluasan dan pemerataan kesempatan belajar*

Masih banyak anak usia sekolah (7 – 12 tahun) yang tidak sempat menikmati pendidikan. Begitu pula masih banyak orang dewasa yang belum pernah turut menikmati pendidikan. Untuk mengatasi masalah-masalah ini Departemen P dan K mengambil kebijaksanaan untuk mengadakan bermacam-macam usaha melalui berbagai kegiatan antara lain:

1) Pembangunan SD Inpres

Presiden mengeluarkan Instruksi tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (Inpres SD) secara bertahap. Tahap pertama dimulai tahun 1973. Sampai dengan tahun 1976 telah dibangun 16.000 gedung dengan 96.000 ruang kelas dilengkapi dengan kamar kecil, pompa air dan sumur, serta perabot sekolah; juga bantuan rehabilitasi gedung SD negeri dan swasta serta Madrasah Ibtidaiyah sejumlah 26.000 buah. Pada

setiap tahap dilaksanakan pengangkatan guru, pengadaan buku pelajaran, dan buku-buku bacaan.

Dengan pelaksanaan Inpres jurang keterlantaran sekolah dapat diatasi. Angka kenaikan netto murid SD pada tahun 1972 (sebelum Inpres) adalah 1,9%, sedangkan kenaikan jumlah penduduk usia sekolah 3,3%. Sejak adanya Inpres SD, kenaikan angka partisipasi pada SD meningkat menjadi 7% setahun atau 3 juta anak, sehingga diperkirakan pada akhir Pelita II akan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 85%.

2) Pembebasan SPP.

Telah dikeluarkan keputusan bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan RI No. 0257/K/1974, No. 221 tahun 1974, dan No. 1606/MK/1/11/1974, tentang Peraturan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Keputusan itu menentukan antara lain bahwa SPP adalah satu-satunya sumbangan yang dibenarkan untuk dipungut oleh sekolah atau perguruan tinggi. Salah satu ketentuan yang lain adalah keringanan yang dapat diberikan atau pembebasan dari kewajiban membayar SPP yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II. Untuk perguruan tinggi, pembebasan atau keringanan diberikan atas usul pimpinan fakultas berdasarkan pertimbangan senat perguruan tinggi yang bersangkutan. Dengan demikian anak-anak dapat menikmati pendidikan tanpa memandang latar belakang sosial ekonominya.

3) Pemberian bea siswa

Beasiswa oleh pemerintah diberikan kepada siswa/mahasiswa, baik dari pendidikan negeri, kedinasan, maupun dari lembaga pendidikan swasta bersubsidi atau diakui. Untuk mengetahui jumlah beasiswa yang diberikan oleh Departemen P dan K sampai dengan Pelita II dapat dilihat pada tabel berikut.

4) Pendidikan guru

Pada tahun 1973 tercatat 13.314.246 anak murid SD. Selama 5 tahun Pelita II harus diusahakan penambahan daya tampung sekurang-kurangnya 7.5 juta. Ini berarti jumlah ruang

belajar harus ditambah, juga alat bantu pendidikan serta pengadaan buku pelajaran harus ditambah pula melalui Proyek Buku. Guru pun harus ditamba. Pada awal Pelita II tercatat ada 425.000 orang guru SD, sedangkan pada akhir Pelita II diperlukan 525.000 orang guru, jadi, kekurangan guru SD berjumlah 100.000 orang. Di sini belum termasuk guru Sd yang pensiun dan meninggal (diperkirakan 4% setahun atau sejumlah 89.000 orang).

Dari data yang dikemukakan berarti setiap tahun harus dihasilkan guru baru sebanyak \pm 38.000 orang, sedangkan SPG negeri dan swasta dalam penambahan lulusan hanya mampu menghasilkan sebanyak 13.000 orang guru. Selama Pelita II direncanakan pengembangan 66 SPG dan 1 SGPLB. Pengembangan SPG selama Pelita II dapat dilihat pada bagan berikut.

**Pemberian beasiswa dari Departemen P dan K
pada tahun 1974/1975 untuk seluruh Indonesia**

Tahun 1974/1975

No	Jenis Sekolah	Dana	Jumlah	Jumlah Biaya	Keterangan
1.	SD (klas V + VI)	5.00,- - 4.00,- (per penerima per bulan)	1269	Rp. 5.116.000,-	
2.	SMP (klas II + III)	6.500,- - 7.500,- (per penerima per bulan)	530	Rp. 3.496.000,-	
3.	SMEA (klas I + III)	6.500,- - 7.500,-	81	Rp. 528.500,-	
4.	ST (klas II + III)	6.500,- - 7.500,-	143	Rp. 934.500,-	
5.	SKKP (klas II + III)	6.500,- - 7.500,-	28	Rp. 185.000,-	
6.	SMA (klas II + III)	9.000,- - 10.000,-	271	Rp. 2.375.000,-	
7.	SMEA (klas II + III)	9.000,- - 10.000,-	122	Rp. 1.017.000,-	
8.	STM (klas II + III)	9.000,- - 10.000,-	96	Rp. 870.000,-	
9.	SKKA (klas II + III)	9.000,- - 10.000,-	15	Rp. 136.000,-	
10.	SPG (klas II + III)	9.000,- - 10.000,-	70	Rp. 623.000,-	
11.	SMOA (klas I + II)	9.000,- - 10.000,-	12	Rp. 109.000,-	
12.	SPSA (klas I + II)	9.000,-	2	Rp. 109.000,-	
13.	SPIK (klas I + II)	9.000,- - 10.000,-	3	Rp. 27.000,-	
14.	Univ/Institut (40) (Tk. II + III + V)	11.500,- - 12.000,-	404	Rp. 5.079.000,-	
	Jumlah		3046	Rp. 20.523.000,-	

**Pemberian beasiswa dari Departemen P dan K
pada tahun 1975/1976 untuk seluruh Indonesia**

Tahun 1975/1976

No	Jenis Sekolah	Dana	Jumlah	Biaya	Keterangan
1.	SD (klas V + VI) (per orang per bulan)	4.000,- - 5.000,-	3274	Rp. 13.176.000,-	
2.	SMP (klas II + III)	6.500,- - 7.500,-	1224	Rp. 8.161.000,-	
3.	SMEP (klas I + II + III)	6.500,- - 7.500,-	179	Rp. 1.167.500,-	
4.	ST (klas I + II + III)	6.500,- - 7.500,-	285	Rp. 1.860.500,-	
5.	SKKP (klas I + II + III)	6.500,- - 7.500,-	67	Rp. 437.500,-	
6.	SMA (klas I + II + III)	9.000,- - 10.000,-	531	Rp. 4.833.000,-	
7.	SMEA (klas I + II + III)	9.000,- - 10.000,-	288	Rp. 2.616.000,-	
8.	STM (klas I + II + III)	9.000,- - 10.000,-	200	Rp. 1.812.000,-	
9.	SKKA (klas I + II + III)	9.000,- - 10.000,-	37	Rp. 334.000,-	
10.	SPG (klas I + II + III)	9.000,- - 10.000,-	185	Rp. 1.671.000,-	
11.	SMOA (klas I + II + III)	9.000,- - 10.000,-	20	Rp. 180.000,-	
12.	SPSA (klas I + II + III)	9.000,- - 10.000,-	5	Rp. 45.000,-	
13.	SPIK (klas I + II + III)	9.000,- - 10.000,-	4	Rp. 36.000,-	
14.	SMP (swasta klas II)	6.500,- - 7.500,-	250	Rp. 1.647.000,-	
15.	SMA, STM, SKKA, SPG (swasta klas II)	9.000,- - 10.000,-	181	Rp. 1.643.000,-	
16.	Universitas/Institut/ Sekolah Tinggi Olah Raga/Akademi (Negeri) = 53	11.500,- - 12.000,-	914	Rp. 11.533.000,-	
17.	Universitas/Institut/ Sekolah Tinggi Swas. ta) Kopertis Wilayah I s/d VII	14.000,- 14.500,- 15.000,-	113	Rp. 1.647.000,-	
	Jumlah		7757	Rp. 52.799.000,-	

Agar kurikulum pendidikan guru relevan dengan kurikulum SD telah dikeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0185/V/76 tanggal 21 Juli 1976 mengenai Pembakuan Kurikulum SPG tahun 1976 yang terdiri atas kurikulum SPG Buku I, II, dan III, SGPLB Buku I dan II, dan kurikulum SGO Buku I dan II. Untuk memenuhi kebutuhan buku pelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum telah disusun dan dicetak 318.250 buku untuk tahun ajaran 1975/1976. Untuk tahun 1977/1978 direncanakan ditulis 30.000 buah naskah dengan rata-rata 180 halaman tiap buku.

**Pengembangan SPG Negeri selama
REPELITA II**

Tipe	Jumlah	Daya tampung	Out-put
A	27	37.800	11.016
B	20	19.200	5.440
C	15	7.200	2.040
D	4	992	272
A - D	66	65.192	18.768

SPG	Jumlah	Daya tampung	Out Put/thn.
Baru	66	65.160	18.780
Lama	138	32.951	10.232
SPG Lama/ Baru	204	98.111	29.000

Pengadaan guru SLP (SMP) dilaksanakan secara bertahap, yaitu untuk tahun 1976/1977 melalui PGSLP Gaya Bary sebanyak 4.000 orang. Guru-guru itu meliputi bidang studi Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam tahun 1977/1978 diharapkan adanya penambahan 6.000 guru, termasuk untuk bidang studi Keterampilan.

Untuk pengadaan guru SLA (SMA), diharapkan tahun 1977/1978 dan 1978/1979 akan menghasilkan sejumlah 2.300 orang guru setiap tahun, yang meliputi bidang studi Matematika, Biologi, Fisika, Kimia, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Pendidikan Kependudukan.

5) Proyek Pembinaan Pendidikan Dasar (P3D)

Sejak tahun 1974 dilaksanakan usaha ke arah peningkatan kemampuan dan keterampilan guru SD dengan menggunakan sistem penataran keliling, yaitu membentuk 120 team Penatar

Keliling (TPK). Sampai dengan tahun 1976 telah dididik anggota TPK untuk bidang studi Bahasa Indonesia, Matematika, IPS, dan IPA.

Di samping bertugas menatar para guru SD, TPK juga menangani pengadaan dan pendistribusian buku-buku mata pelajaran pokok bagi murid SD, baik negeri maupun swasta, termasuk Madrasah Ibtidaiyah.

6) Teknologi Komunikasi untuk Pendidikan dan Kebudayaan (TKPK)

Pada tahun 1972 dimulai eksperimen siaran pendidikan melalui radio di Jawa Tengah. Hal ini dilaksanakan dalam rangka penataran guru-guru SD di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan bantuan *Unesco* dan *Unicef*. Kegiatan ini dilanjutkan berdasarkan pedoman TKPK dengan pengembangan proyek demonstrasi dan perintis untuk menunjang penataran guru SD dalam rangka P3D dan KPG (khusus di Irian Jaya) yang dilaksanakan di 9 propinsi, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat dan Timur, Maluku, dan Irian Jaya. Hal ini juga menunjang program Pendidikan Masyarakat. Pengembangan bahan dan program akan diusahakan antara lain dengan menghasilkan 154 paket program televisi dalam tahun 1976/1977, 40 paket program ppan, dan 400 paket program radio. Sarana dan fasilitas akan diusahakan antara lain berupa peralatan latihan untuk ditempatkan di ITB dan peralatan produksi, yang sebahagian ditempatkan di IKIP Semarang dan sebahagian di Jakarta.

7) Pendidikan luar sekolah

Berhubung dengan terbatasnya kemampuan unit sekolah dan besarnya kekuatan di luar, timbul beberapa gagasan tentang pendidikan seumur hidup dengan mengerahkan seluruh sumber tenaga luar sekolah menjadi kekuatan atau sumber belajar dan mewajibkan kemerdekaan dan kedaulatan manusia untuk menggunakan kreativitasnya dalam proses belajar.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan agar manusia menjadi keranjang belajar, pemerintah menyelenggarakan berbagai kursus, antara lain kursus PBM Fungsional, KPD, Kader Perpustakaan Masyarakat/Desa, dan Pembimbing Masyarakat. Juga diadakan latihan guru KPD, Panti Karya Pembangunan, Panti Keterampilan Wanita, serta kursus melalui Pusat Latihan Pendidikan Masyarakat (PLPM).

Agar masyarakat gemar belajar, dengan terbentuknya kelompok belajar itu maka pemerintah menerbitkan buku bacaan yang digolongkan sebagai Buku Paket A. Paket ini merupakan alat pendidikan bagi rakyat yang buta huruf Latin dan putus SD kelas I, II, dan III. Dengan Paket A diharapkan seseorang dapat menerima dan mengerti keterangan dan pendapat orang lain dan juga peka menghadapi keadaan dan masalah dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Manusia menggunakan keterampilannya untuk memproduksi barang dan jasa guna memenuhi hidup sehari-hari.

8) Proyek Pamong

Dalam rangka membantu anak yang tidak dapat mengikuti pendidikan sekolah, pemerintah bekerja sama dengan *Innotech (Seanico)* yang telah melakukan penelitian dan percobaan melalui Proyek Pendidikan Anak oleh Masyarakat, Orang Tua, dan Guru (Proyek Pamong) di Kecamatan Kebakramat Solo. Eksperimen ini telah berakhir pada tahun 1976 dan hasilnya menunjukkan bahwa proyek ini dapat memperbesar daya tampung murid dan menghemat biaya.

Kalau di SD terdapat rasio guru-murid 1 : 50, maka melalui sistem ini rasio pembina-murid adalah 1 : 100.

5.3.3.2 *Kebijaksanaan dalam peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan*

1) Kurikulum

Pendidikan sebagai sistem merupakan kesatuan dari berbagai unsur yang saling berhubungan dan bergantung. Kurikulum sebagai komponen sistem pendidikan harus memperhatikan unsur siswa, tujuan pendidikan, dan unsur lingkungan.

Kurikulum 1975 yang menggantikan Kurikulum 1968 merupakan suatu usaha pembaharuan di bidang pendidikan dan pengajaran. Hal ini disebabkan karena Kurikulum 1975 bila dibandingkan dengan Kurikulum 1968 terdapat beberapa perbedaan, antara lain dalam orientasi tujuan, jumlah mata pelajaran, dan jam pelajaran. Kurikulum 1975 berorientasi pada tujuan. Terdapat berbagai tujuan yang dirumuskan secara jelas: tujuan institusional harus dicapai oleh keseluruhan program sekolah; tujuan kurikuler pencapaiannya dibebankan pada program studi; dan tujuan instruksional pencapaiannya dibebankan pada program pengajaran suatu bidang studi.

Materi pelajaran meliputi agama, bahasa, matematika, IPA, IPS, kesenian, olah raga, kesehatan, keterampilan, dan Pendidikan Moral Pancasila. Dalam pelaksanaan di kelas, guru menggunakan Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI).

2) Proyek Buku

Sambil menunggu hasil penelitian dan percobaan yang sedang dilakukan oleh sekolah-sekolah perintis pembangunan, maka diperlukan adanya kelengkapan alat-alat pendidikan dalam menunjang pelaksanaan kurikulum. Penyediaan buku pelajaran bermutu yang meliputi pelajaran bahasa Indonesia, matematika, IPS, IPA, sejak Pelita I telah diadakan. Sampai dengan Pelita II telah dihasilkan buku-buku untuk SD sejumlah 123.647.800 buah, SLTP 20.356.895 buah, dan untuk SLTA 2.689.411 buah.

3) Penataran guru

Dalam usaha meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru perlu diadakan penataran, baik di daerah maupun di pusat. Sejak dari Pelita I sampai Pelita II telah ditatar sebanyak 299.388 guru SD, 305 guru SLTP, 650 guru SLA, dan 1025 dosen di dalam maupun di luar negeri. Melalui program doktor akan dihasilkan 40 orang doktor.

4) Peranan perguruan tinggi swasta

Dalam dokumen Kebijakan Dasar Pengembangan Pendidikan serta Pelaksanaan Kebijakan Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi telah disebutkan berbagai pokok yang menyangkut perguruan tinggi swasta serta pembinaannya. Pokok-pokok itu antara lain menyangkut pembentukan dan pengembangan sistem pendidikan tinggi nasional, di mana pembinaannya dilakukan dengan satu pola pembinaan.

Pembinaan perguruan tinggi swasta meliputi unsur bantuan, bimbingan, dan penyantunan. Bantuan adalah usaha penunjang hal-hal yang diperlukan bagi penyelenggara pendidikan tinggi agar diadakan pengembangan lebih lanjut oleh pihak perguruan tinggi swasta. Bimbingan adalah usaha pengarahan serta penunjangan kegiatan penyelenggaraan perguruan tinggi swasta menuju ke arah pemantapan. Penyantunan adalah usaha memperoleh umpan balik, mengadakan monitoring, serta evaluasi secara rutin agar kemandirian kehidupan perguruan tinggi swasta dapat terpelihata sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Data sementara tentang perguruan tinggi swasta di Indonesia sampai dengan Pelita II menunjukkan jumlah 333 buah perguruan tinggi dengan perincian: Kopertis Wilayah I - 30 buah, Wilayah II 77 buah, Wilayah III 52 buah, Wilayah IV 26 buah, Wilayah V 41 buah, Wilayah VI 54 buah, dan Wilayah VII membawahi 53 buah.

5) Kerja sama luar negeri

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan telah dirintis beberapa kerja sama dengan pihak luar negeri, antara lain kerja sama dengan Amerika, Australia, Belanda, Belgia, Inggris, Jerman Barat, Jepang, New Zealand, dan Perancis.

5.3.3.3 Kebijakan dalam relevansi pendidikan

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi, maka sistem pendidikan disesuaikan dengan keperluan pembangunan. Lulusan pendidikan benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat. Untuk

memenuhi harapan itu sejak Pelita I sampai dengan Pelita II telah diadakan beberapa usaha antara lain:

- 1) **Pembaharuan dalam sistem pendidikan**
 - (a) Mengadakan pembaharuan dalam sistem pendidikan melalui Proyek Perintis Sekolah Pembangunan di 8 IKIP.
 - (b) Dalam jangka pendek menyusun Kurikulum 1975 untuk SLP dan SLA, sedangkan untuk Perguruan Tinggi merintis program sarjana 4 tahun yang dicobakan di IPB, ITBm dan Universitas Gadjah Mada.
 - (c) Menerapkan teknik-teknik modern dalam administrasi dan manajemen pendidikan, terutama dalam perencanaan dengan menggunakan "Analisis Sistem" serta penerapan sistem PPBS atau SP4 dalam penyusunan anggaran pendidikan.

2) **Relevansi dalam bidang pendidikan kejuruan**

Pendidikan kejuruan bertujuan untuk menyediakan tenaga kerja terampil yang terlatih dan terdidik pada tingkat menengah, juga yang memenuhi persyaratan jabatan yang diperlukan di dalam industri perdagangan dan jasa atau mampu berusaha sendiri. Usaha-usaha yang diadakan antara lain:

- (a) Sekolah Menengah Teknologi dan Kejuruan tingkat pertama akan diintegrasikan dengan SMP sehingga menjadi SMP yang disempurnakan.
- (b) Sekolah Kesejahteraan Keluarga Tingkat Atas (SKKA) telah ditingkatkan menjadi Sekolah Menengah Teknik Kerumahtangaan (SMTK), sehingga memungkinkan terbukanya lapangan kerja bagi lulusan SMTK dalam bidang industri.
- (c) Peningkatan Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) melalui 100 SMEA Pembina yang tersebar di seluruh Indonesia.
- (d) Di samping 8 STM Pembangunan dan 5 Pusat Latihan Pendidikan Teknik, dalam tahun 1976 ini telah dibuka pula

4 buah Sekolah Teknologi Pertanian yang diarahkan pada teknologi pedesaan.

(e) Khusus dalam rangka relevansi dalam sistem pendidikan telah dilakukan pula usaha-usaha:

- (1) Penyempurnaan dan penyesiaian kurikulum untuk STM Pembangunan, STM Pertanian, STM-PLPT, SMEA Pembina, SMEA, SKKA, SPSA dan SPIK.
- (2) Mengatasi kekurangan guru-guru teknologi dan kejuruan, baik segi kualitas maupun kuantitasnya khususnya dalam praktek dan pengalaman industri, antara lain, melalui penataran.
- (3) Dalam pembukaan dan penerangan sekolah kejuruan benar-benar dipertimbangkan aspek-aspek yang menyangkut keperluan tenaga kerja dalam dunia usaha dan pembangunan.
- (4) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pendidikan kejuruan, tujuan yang bersifat ganda pada kurikulum lama untuk sekolah-sekolah kejuruan (mempersiapkan anak didik untuk dunia kerja dan mempersiapkan mereka untuk melanjutkan pelajaran ke perguruan tinggi) ditiadakan sehingga lulusan STM umpamanya belum dibenarkan melanjutkan ke perguruan tinggi.

Sasaran yang dicapai sampai akhir Pelita II dapat dilihat pada bagan berikut ini.

3) Penelitian dan pengabdian masyarakat

Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat meliputi kegiatan pendidikan yang bermanfaat untuk masyarakat, antara lain di bidang Bimas, pendidikan, dan pertanian. KKN merupakan salah satu bentuk kegiatan pengabdian pada masyarakat yang terutama dilaksanakan oleh mahasiswa. Pelaksanaan KKN di bawah pembinaan dan bimbingan universitas/institut dan pemerintah daerah dilaksanakan secara interdisipliner dan intra kurikuler. Mulai tahun 1976 program KKN resmi dijadikan kegiatan intra kurikuler untuk program tingkat sarjana. Diharapkan setiap tahun terdapat 23.000 mahasiswa mengikuti program KKN ini.

**Hasil Sekolah Kejuruan yang hendak dicapai pada akhir
PELITA II**

Jenis	Jurusan	Jumlah
1. STM	Juru teknik	22.500 orang
2. STM Pemb.	Teknik Industri	1.600 orang
3. SMEA Pembina	Pengatur Tingkat juru	8.400 orang 22.500 orang
4. SMTK	Teknologi kerumah tang- gaan Guru	750 orang 12.000 orang
5. SMPS	Pelayanan sosial dan pe- ngembangan masyarakat	450 orang
6. SMIK	Industri Kerajinan	150 orang
7. Sekolah Kesenian	Pembina Kesenian	600 orang

4) Pusat Panti Kegiatan Belajar (PKB)

Panti ini merupakan suatu sistem pendidikan luar sekolah yang didasarkan atas kebutuhan belajar dengan sumber belajar dalam masyarakat. Karena perkembangan teknologi maka Pusat Latihan Pendidikan Masyarakat (PLPM) diganti dengan PKB. Dalam Pelita II tiap-tiap kabupaten memiliki sebuah PKB. Untuk itu, pada tahun 1975 dengan kerja sama dengan *World Education New York* telah diselenggarakan praktek eksperimentasi PKB di Jakarta, Lembang, Gudo - Jombang, Jabrowang-Jombang, dan Bungaro di Sulawesi Selatan.

5.3.3.4 *Kebijaksanaan dalam efektivitas dan efisiensi pendidikan dan kebudayaan*

Efektivitas menyangkut masalah bagaimana rencana pendidikan dan kebudayaan itu dilaksanakan secara tepat sehingga hasilnya sesuai dengan rencana, sedangkan efisiensi menyangkut masalah bagaimana mencapai hasil yang tinggi dengan sumber modal (tenaga, alat, biaya, dan waktu) yang serendah-rendahnya.

Untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien telah diadakan beberapa usaha antara lain:

1) Perencanaan

Sejak tahun 1969 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah mengadakan perencanaan yang sistematis dan terarah. Meskipun demikian, masih diperlukan penangan yang terarah secara bertahap dalam Pelita II. Hal ini disebabkan karena menurut Keputusan Menteri P dan K nomer 079/0/1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen P dan K, penyusunan DUP menjadi tanggung jawab Biro Perencanaan, sedangkan DIP menjadi tanggung jawab Biro Keuangan.

2) Organisasi

Untuk mengatur pembagian kerja dan tata hubungan kerja di Departemen P dan K, pada tahun 1975 telah diadakan reorganisasi dalam struktur organisasi departemen. Hal ini berdasarkan Keputusan Presiden No. 44 dan 45 Tahun 1979 dan Keputusan Menteri P dan K No. 079/0/Tahun 1975.

3) Pembiayaan pendidikan

Sejak tahun 1973 telah diterapkan Sistem *Planning, Programming, Budgeting* atau SP4. Penerapan dimaksudkan agar dapat menyempurnakan pengelolaan anggaran pemerintah melalui prinsip anggaran berimbang.

5.3.3.5 *Kebijaksanaan dalam pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional*

Pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional dalam periode ini meneruskan pembinaan kebudayaan periode Kabinet Pembangunan I. Pembinaan kebudayaan nasional disesuaikan dengan norma-norma Pancasila. Pembinaan kebudayaan nasional ditingkatkan untuk memperkuat kepribadian bangsa, kebanggaan nasional, dan kesatuan nasional. Kebudayaan daerah juga digali dan dipupuk sebagai unsur-unsur yang memperkaya kebudayaan nasional; demikian juga unsur-unsur kebudayaan luar yang bersifat positif. Dalam kaitannya dengan pembinaan

kebudayaan nasional termasuk juga pembinaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas telah diadakan serangkaian usaha pembinaan dalam bidang-bidang sebagai berikut:

1) Kegiatan di bidang bahasa

Telah diresmikan Ejaan Yang Disempurnakan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1972 dengan Keppres No. 57 tahun 1972. Telah pula dilaksanakan langkah-langkah untuk pembaharuan peristilahan yang dimulai pada simposium awal Desember 1972. Juga telah diselenggarakan loka-karya mengenai ejaan bahasa daerah. Pedoman Ejaan Yang Disempurnakan lebih disempurnakan dan juga telah diadakan penyesuaian ejaan-ejaan baru untuk bahasa-bahasa daerah. Telah dimulai pula dengan penyusunan buku-buku pedoman dan buku-buku sumber kebahasaan termasuk tata bahasa, istilah, berbagai kamus, pemetaan, dan perekaman bahasa-bahasa daerah. Juga tidak lupa telah diadakan usaha penyelamatan buku-buku dan naskah-naskah berharga. Di samping itu juga telah diadakan penelitian dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah, yang meliputi 28 aspek bahasa dan sastra. Selanjutnya telah dilakukan: persiapan lanjutan Wisma Seni Nasional; penyusunan biografi pahlawan-pahlawan nasional; pengembangan sistem perpustakaan nasional dan pengadaan buku-buku bacaan kanak-kanak dan remaja.

2) Kegiatan di bidang kesenian

Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi seni tari, seni teater, seni rupa, dan seni musik.

- (a) Penggalian unsur-unsur kesenian yang meliputi inventarisasi dan dokumentasi survei, pengumpulan penerbitan.
- (b) Pembinaan dan peningkatan mutu yang meliputi loka karya, pekan seni atau pergelaran lomba seni dan sarasehan.
- (c) Penataran bagi para tenaga pembina kesenian seluruh Indonesia, serta pengisian kuesioner kesenian oleh petugas Bidang Kesenian di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

- (d) Pendidikan dan pengembangan kesenian dengan menciptakan sisten: penghargaan yang dapat merangsang penciptaan baru; juga menampung dan memelihara karya-karya seni yang bermutu dengan mendirikan Wisma Seni Nasional. Untuk mengikuti kegiatan pembinaan dan pengembangan di bidang kesenian pada periode Kabinet Pembangunan II dapat dilihat pada statistik di bawah ini.

**STATISTIK KESENIAN DARI PROPINSI SELURUH INDONESIA
TAHUN 1975/1976**

No.	Nama Propinsi	Jumlah Kab/ Kodya	Jumlah Organisasi Kesenian	Jumlah Jenis Kesenian	Jumlah Seniman/ Seniwati	Dari Kab/ Kodya	Jumlah Poster
1.	DI Aceh	8	9	9	-	1	-
2.	Sumatra Utara	17	159	7	46	1	-
3.	Sumatra Barat	14	-	-	-	-	-
4.	Sumatra Barat	7	-	-	-	-	-
5.	Jambi	6	-	-	-	-	-
6.	Lampung	4	48	12	4	1	-
7.	Riau	5	316	8	23	1	-
8.	Bengkulu	4	302	26	54	4	-
9.	DKI Jakarta	5	437	35	7	1	71
10.	Jawa Barat	24	14.976	7	214	23	-
11.	Jawa Tengah	35	6.209	55	2.709	6	-
12.	Jawa Timur	38	-	-	-	-	-
13.	DI Yogyakarta	-	-	-	-	-	-
14.	Kalimantan Barat	7	-	-	-	-	-
15.	Kalimantan Tengah	6	-	-	-	-	-
16.	Kalimantan Timur	6	-	-	-	-	-
17.	Kalimantan Selatan	10	-	-	-	-	-
18.	Nusa Teng. Barat	6	-	-	-	-	-
19.	Nusa Teng. Timur	12	-	-	-	-	-
20.	Bali	8	-	-	-	-	-
21.	Sul. Tenggara	4	55	12	4	4	-
22.	Sul. Utara	6	-	-	-	-	-
23.	Sul. Selatan	-	-	-	-	-	-
23.	Sul Tengah	4	254	18	30	1	-
24.	Sul. Selatan	23	-	-	-	-	-
25.	Maluku	4	-	-	-	-	-
26.	Irian Jaya	4	2	2	-	1	-
Jumlah		272	22.767	191	3.091	44	71

Catatan: Tanda-tanda kosong menunjukkan belum memberi laporan yang sempurna.

3) Kegiatan di bidang sejarah dan purbakala

Dalam usaha menanggulangi masalah di bidang ini telah dilakukan usaha-usaha antara lain:

- (a) Penyusunan daftar inventaris peninggalan sejarah dan purbakala di seluruh Indonesia.
 - (b) Pemeliharaan peninggalan sejarah dan purbakala di seluruh Indonesia yang meliputi 1000 bangunan.
 - (c) Perlindungan/pengumuman terhadap benda-benda sejarah dan purbakala serta situs-situsnya.
 - (d) Pengembangan benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala.
 - (e) Pemugaran peninggalan sejarah dan purbakala antara lain, pemugaran Candi Borobudur, Candi Cangkuang, Candi Jawi, dan candi-candi di Muara Jambi. Di samping itu juga dilakukan pemugaran kraton, istana, dan rumah peribadatan, antara lain Istana Maimun, Sultan Deli di Medan, Masjid Raya Kesultanan Deli, Kraton Sri Sultan Jogya serta Istana Mangkunegara dan Sri Paku Alam.
 - (f) Penataran tenaga bidang kepurbakalaan, antara lain penataran kepurbakalaan yang diperuntukkan bagi para Kepala Bidang Permuseuman, Sejarah dan Kepurbakalaan, Kepala Suaka Sejarah dan Purbakala seluruh Indonesia. Selain itu telah diselenggarakan pula seminar kepurbakalaan untuk ahli-ahli purbakala serta penataran bagi tenaga teknis ke-sejarahan dan kepurbakalaan.
- Pada akhir periode ini sudah terdapat 84 buah museum, sedangkan jumlah museum pada tahun baru sebanyak 39 buah. Selain itu juga telah dihasilkan penulisan dan penerbitan 27 buah buku ceritera rakyat.

5.3.3.6 Kebijakan dalam pembinaan generasi muda

Tujuan yang hendak dicapai secara umum telah digariskan dalam GBHN, yaitu membina generasi muda sebagai tunas-tunas bangsa agar mereka dapat menjadi generasi yang lebih baik, lebih bertanggung jawab, dan lebih mampu mengisi dan

membina kemerdekaan bangsa. Pembinaan ini dilakukan melalui program kerja yang meliputi program pembinaan para pembina generasi muda dan penelitian untuk pembinaan permasalahan generasi muda. Adapun sistem pembinaan yang dipolakan adalah "Sistem Among". Untuk melaksanakan cara pendidikan tersebut perlu dikembangkan sikap dan laku among dari sang pendidik atau pamong. Sikap pamong ini dikenal dengan *Hing ngarso sung tulodho, hing madya mangun karso, tut wuri handayani*.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- 1) Mengintensifkan lembaga-lembaga pembinaan generasi muda, seperti, Gelanggang Remaja, Wisma Remaja, Sanggar Bhakti Pramuka, serta Pusat Latihan Keterampilan.
- 2) Mengadakan loka karya dan seminar untuk memantapkan pola pembinaan dan pengembangan yang lebih terkoordinasi dan terintegrasi. Hal ini disebabkan karena pembinaan generasi muda merupakan usaha bersama dari berbagai departemen dan nondepartemen termasuk juga organisasi masyarakat dan organisasi pemuda dan remaja itu sendiri. Untuk itu, dibentuk Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) pada tahun 1974. Pembinaan dan pengembangan dari tingkat pusat sampai ke daerah diusahakan secara terus-menerus.
- 3) Dengan anggaran biaya yang tersedia melalui Pelita kepada para pemuda dan remaja diberi kesempatan untuk memperoleh berbagai keterampilan yang produktif, misalnya, latihan keterampilan bagi pemuda terutama untuk kelompok umur 15–24 tahun yang ingin menciptakan lapangan kerja sendiri. Kurang lebih ada 6.200 peserta yang memanfaatkan latihan kerja semacam itu. Pelaksanaannya dikoordinasi oleh Bidang Pembinaan Generasi Muda Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi di seluruh Indonesia. Latihan itu meliputi usaha perbengkelan, las, pertukangan kayu, peternakan ayam, bengkel sepeda motor, montir radio, fotografi, dan tukang batik.

Selain itu dilakukan pula usaha-usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok di bidang kesehatan, pendidikan sekolah dan di luar sekolah, serta kehidupan keagamaan.

- 4) Pembinaan mahasiswa yang merupakan bahagian dari program pembinaan generasi muda tetapi mempunyai ciri-ciri khusus, mempunyai program tersendiri karena sangat luas dan fundamental. Hal ini menyangkut:

a) Pola Dasar Pendidikan Tinggi

Dengan pola ini telah ditetapkan arah pembinaan kemahasiswaan. Pembinaan kemahasiswaan diarahkan pada pertumbuhan manusia Indonesia yang berwatak dan bertanggung jawab, baik untuk mahasiswa yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Pembinaan ini harus sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang memungkinkan pertumbuhan suasana yang serasi dengan peranan akademik dalam pengembangan ilmu dan budaya.

Berdasarkan landasan dan tujuan ini, maka pembinaan mahasiswa secara integral menjadi satu kesatuan dalam sistem pendidikan tinggi. Kegiatan kemahasiswaan harus meliputi pembinaan sikap-sikap ilmiah, keahlian, kepemimpinan, dan kependidikan.

b) Program pembinaan kemahasiswaan

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pembinaan mahasiswa dituangkan dalam program berjangka Direktorat Kemahasiswaan yang terdiri atas program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Aspek-aspek pembinaan yang ditekankan untuk mencapai tujuan adalah:

- (1) Pembinaan aspek studi mahasiswa yang meliputi kegiatan Pekan Orientasi Studi dan Kemahasiswaan (POSMA), Bimbingan dan Konseling (BK), Pembinaan Kelompok Belajar (PKB), seminar dan diskusi, serta widya wisata.
- (2) Pembinaan aspek moral Pancasila dan kehidupan beragama yang meliputi program peringatan hari besar nasional, pembinaan beragama dan kerukunan antar-

- umat beragama, serta penghayatan nilai-nilai luhur bangsa.
- (3) Pembinaan aspek keterampilan yang meliputi cara berkomunikasi dengan bahasa yang baik dan benar serta cara mengorganisasikan acara kegiatan bersama.
 - (4) Pembinaan aspek organisasi yang meliputi pembinaan Dewan Mahasiswa dan Senat Mahasiswa.
 - (5) Pembinaan aspek kesejahteraan mahasiswa yang meliputi asrama, cafetaria, bursa buku, koperasi mahasiswa.
 - (6) Pembinaan aspek olah raga dan seni.
 - (7) Pembinaan aspek didikan yang meliputi kecintaan kepada nusa dan bangsa, kecintaan pada almamater, kerja sosial dan penyuluhan kepada masyarakat.
 - (8) Pembinaan aspek kepeloporan pembangunan dan ketahanan nasional yang meliputi program mahasiswa teladan, KKN, resimen mahasiswa dan pramuka.
 - (9) Pembinaan aspek persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang meliputi program pembinaan kerukunan hidup mahasiswa, antarumat beragama, antarsuku, antarmahasiswa pribumi dan nonpribumi. Pola pembinaan dan program kegiatan tersebut di atas terus dikembangkan dalam Repelita-repelita selanjutnya.

5.3.4 Kebijakan Kabinet Pembangunan III

Berdasarkan kebijakan dasar tentang pembangunan pendidikan dan kebudayaan serta generasi muda yang digariskan dalam GBHN tahun 1978, maka Repelita III menjabarkan serangkaian kebijakan dan program utama. Hal ini dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah pokok yang berkaitan satu dengan yang lain.

Pertama, menyangkut pemerataan kesempatan belajar terutama dalam rangka persiapan kewajiban belajar. Kedua,

peningkatan mutu pendidikan pada semua tingkat dan jenis pendidikan. Ketiga, relevansi pendidikan agar mampu menghasilkan tenaga pembangunan. Keempat, persiapan generasi muda sebagai penerus perjuangan dan pembangunan bangsa. Kelima, efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan untuk terlaksananya tujuan pembangunan pendidikan dan pengembangan nasional secara keseluruhan.

Bila kita memperhatikan masalah-masalah di atas, maka masalah pemerataan, efisiensi dan efektivitas, serta relevansi pendidikan merupakan masalah-masalah pendidikan dan kebudayaan serta pembinaan generasi muda yang selalu dihadapi pada setiap periode sejak lahirnya Orde Baru. Dengan demikian, kebijaksanaan dan usaha-usaha yang dilaksanakan dalam pembinaan dan pengembangannya merupakan usaha lanjutan. Namun demikian, pembinaan generasi muda dalam periode ini lebih bervariasi dalam pengembangannya. Begitu pula dalam pembinaan dan pengembangannya di bidang pendidikan tinggi terdapat usaha-usaha baru, baik menyangkut tenaga pengajar, program pendidikan, maupun kemahasiswaan. Dalam pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional, di samping usaha-usaha lanjutan terdapat pula unsur baru yang masuk yaitu pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kebijaksanaan yang diambil serta usaha-usaha yang dilaksanakan dapat dilihat pada uraian berikut ini.

5.3.4.1 Kebijakan dan usaha-usaha dalam bidang pendidikan

- 1) Kebijakan dan usaha-usaha dalam peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan di tingkat sekolah dasar dan menengah.

Kebijakan dan usaha yang dilaksanakan berhubungan erat dengan pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun. Dari hasil sensus dapat dilihat rata-rata pertumbuhan penduduk Indonesia dalam tahun 1961-1971 sebesar 2,1%, sedangkan tahun-tahun 1971-1980 sebesar 2,32% (Tabel 2).

Searah dengan pertambahan jumlah penduduk, maka jumlah anak usia sekolah juga meningkat setiap tahun. Dalam tahun 1980 di seluruh Indonesia terdapat anak usia sekolah sekitar 84%. Peningkatan yang lebih drastis ialah pada umur 13-15 dan 16-18 tahun, yaitu 60% dan 30%, sedangkan sebelumnya hanya berkisar antara 28% dan 16%.

Penyediaan sarana fisik maupun tenaga, umur merupakan tuntutan yang sangat berat. Penambahan gedung SD tetap dilanjutkan dengan adanya Inpres SD di samping perehabilitasian gedung, baik untuk SD negeri maupun swasta. Demikian pula penambahan jumlah SMTP dan SMTA untuk menampung jumlah lulusan dari SD yang setiap tahun selalu bertambah.

Di samping peningkatan sarana fisik harus disertai pula dengan pengadaan tenaga guru. Peningkatan mutu guru dilakukan melalui penataran-penataran maupun pendidikan lanjutan. Peningkatan jumlah sekolah dasar pada tahun 1979/1980 sebanyak 98 ribu buah, pada dua tahun berikutnya menjadi 110 ribu, tahun 1982/1983 120 ribu, dan pada tahun 1983/1984 menjadi 129 ribu (lihat Tabel 4). Ini berarti setiap tahun selama Pelita III terjadi peningkatan SD sebanyak 10 ribu. Peningkatan SMP pada tahun 1979/1980 sebanyak 8.860, pada tahun 1981/1982 menjadi 11.619 ribu, dan pada tahun 1983/1984 menjadi 14.172 ribu. Jumlah ST dan SKKP selama Pelita III mengalami penurunan sebagai akibat kebijaksanaan pemerintah yang mengarahkan sekolah kejuruan pada tingkatan SMKTA.

Peningkatan jumlah murid SD dari 21.123.482 anak pada tahun 1979/1980 menjadi 25.876.139 anak pada tahun 1983/1984, yang berarti dalam setiap tahun murid SD bertambah 1 juta anak. Begitu pula halnya dengan peningkatan jumlah murid SMP, yang pada tahun 1979/1980 berjumlah 2.741.197 anak menjadi 4.676.139 pada tahun 1983/1984, dan jumlah murid SMA meningkat pula dari 776.122 menjadi 4.601 ribu anak. Untuk sekolah-sekolah kejuruan penambahan murid tidak terlampau menyolok, sedangkan untuk SPG dan SGO jumlah muridnya menurun (Tabel 4).

Penambahan jumlah guru pada setiap tingkat sekolah juga meningkat. Guru SD yang pada tahun 1979/1980 berjumlah 637.236 orang menjadi 925.834 pada tahun 1983/1984. Jumlah guru SMP yang pada tahun 1979/1980 berjumlah 154.791 menjadi 925.834 orang pada tahun 1983/1984. Guru SMA dari 51.731 pada tahun 1979/1980 menjadi 116.568 orang. Jumlah guru sekolah kejuruan juga mengalami peningkatan baik untuk STM, SKKA, SPG, SGO, maupun SMEA.

2) Kebijakan dan usaha-usaha dalam peningkatan belajar di tingkat pendidikan tinggi

Apabila kita melihat perkembangan pendidikan tinggi maka terdapat peningkatan, baik dalam jumlah universitas negeri dan swasta maupun dalam jumlah mahasiswa dan tenaga pengajarnya. Dari 40 perguruan tinggi pada tahun ketiga Pelita I meningkat jumlahnya menjadi 49 buah pada tahun keempat Pelita III. Jumlah mahasiswa perguruan tinggi negeri pada tahun ketiga Pelita I berjumlah 102.403 orang dan pada akhir Pelita III menjadi 272.965 orang.

Di samping peningkatan dalam prasarana dan sarana pendidikan, ada beberapa kebijakan di bidang pendidikan tinggi yang dilaksanakan dalam periode Kabinet Pembangunan III.

a) Struktur organisasi universitas/institut

Untuk meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi, sesuai dengan perkembangan universitas/institut negeri, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 tahun 1980 (1) No. 5 tahun 1980) tentang Pokok-pokok Organisasi universitas/institut negeri. Peraturan ini memperlihatkan adanya struktur organisasi pada universitas dan institut negeri (lihat lampiran). Kedudukan tugas pokok serta tata kerja telah dijelaskan pula untuk setiap unit kerja yang ada pada setiap universitas/institut. PP No. 5 tahun 1980 ini merupakan salah satu peraturan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah di samping Undang-undang No. 22 Tahun 1961 yang mengatur tentang struktur dan sistem pendidikan tinggi.

Struktur organisasi universitas dan institut serta bimbingan tata kerja dalam setiap unit dapat dilihat pada lampiran.

b) Penataran fakultas dan jurusan pada universitas/institut negeri

Sebagai pelaksanaan PP No. 5 tahun 1980 lahir pula Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1981 tentang Penataan Fakultas pada Universitas/Institut Negeri. Tindak lanjut dari PP No. 27 Tahun 1981 itu adalah penataan jurusan pada fakultas di lingkungan universitas/institut negeri. Penataan ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Daoed Joesoef No. 0174/0/1973.

Setahun kemudian pada periode Kabinet Pembangunan IV, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nugroho Notokusanto mengadakan perubahan pada Lampiran Keputusan No. 0174/0/1975. Perubahan ini diadakan karena dalam surat keputusan tersebut pada sub a belum ditetapkan jenis-jenis jurusan pada Fakultas Kesenian dan Fakultas Non-Gelar Kesenian. Selain itu juga diubah nama jurusan pada Fakultas Seni Rupa dan Desain dan menambah jurusan pada Fakultas Kedokteran.

Berdasarkan PP No. 5 Tahun 1980 dan PP No. 27 Tahun 1981 dan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0174/0/1975 yang diubah dengan Keputusan Menteri No. 033/0/1984, jumlah fakultas yang ditata pada universitas/institut negeri ada 40 buah, sedangkan jumlah jurusan yang ditata pada fakultas berjumlah 235 buah. Dengan demikian, semua universitas dan institut negeri di seluruh Indonesia dapat menata fakultas dan jurusannya masing-masing sesuai dengan keputusan tersebut.

c) Jenjang program pendidikan tinggi dan sistem penyelenggaraannya

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, sistem pendidikan tinggi di Indonesia perlu mendapatkan peninjauan dan penyesuaian kembali. Penyesuaian ini dilakukan dengan berorientasi pada kebutuhan pembangunan. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 124/U/1979 yang di-

ubah dan disempurnakan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0211/U/1982 menetapkan peninjauan dan penataan kembali jenjang program dan sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi dibagi dalam program gelar dan nongelar. Tujuan umum program gelar adalah memberikan pengalaman belajar menuju suatu keahlian akademik dalam suatu bidang ilmu, teknologi, dan seni; sedangkan tujuan umum program nongelar adalah memberikan pengalaman belajar menuju pembentukan keahlian profesional dalam suatu ilmu teknologi dan seni.

Jenjang pada program gelar terdiri atas jenjang pendidikan Sarjana dengan kode S_1 , Pasca Sarjana dengan kode S_2 dan Program Doktor dengan kode S_3 . Program nongelar dengan jenis diploma sifatnya terminal dengan jenjang pendidikan Diploma I dengan kode DI, Diploma II dengan kode DII, Diploma III dengan kode DIII, Diploma IV dengan kode DIV. Adapun program nongelar jenis spesialis mempunyai jenjang pendidikan Spesialis I dengan kode $SP_p I$, Spesialis II dengan kode $SP_p II$. Di samping itu terdapat pula dalam keputusan ini Program Akta yang memberikan kewenangan mengajar atau kewenangan mengajar tambahan yang lebih tinggi melalui pembentukan kompetensi profesional yang diperlukan. Jenjang pendidikan dan pemberian kewenangan itu terdiri atas Akta I, II, III, IV, dan V.

Program Akta V bagi kelompok profesi nonkependidikan pada dasarnya ditujukan untuk memberikan kemampuan (kompetensi) mengelola proses belajar mengajar di perguruan tinggi. Program Akta V bagi kelompok profesi kependidikan ditujukan untuk memberikan pendalaman dan pengayaan di bidang studi nonkependidikan yang akan diajarkan. Melalui program uji coba, program Akta V telah dilaksanakan sejak tahun 1981. Beberapa universitas dan institut negeri telah ditunjuk untuk melaksanakan program ini. Setelah berjalan kurang lebih 4 tahun, program ini kemudian ditunda penyelenggaraannya mulai tahun ajaran 1985–1986.

Sistem penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan yang dituntut dalam jenjang-jenjang program tersebut

° adalah penggunaan sistem kredit semester. Karakteristik dari sistem ini adalah penyajian program pendidikan yang bervariasi dan fleksibel. Mahasiswa dapat memilih program menuju satu macam jenjang profesi tertentu. Karakteristik yang lain adalah meningkatkan penggunaan sarana pendidikan dengan lebih efisien meskipun penyelenggaraan pendidikan meliputi berbagai jenis program serta jenjang program.

Ketentuan tentang jenis program, jenjang program, dan bobot kredit semester dapat dilihat pada lampiran.

Dalam kenyataannya penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan sistem semester masih mengalami hambatan. Hal ini disebabkan karena faktor sarana penunjang penyelenggaraan yang berupa faktor fisik maupun nonfisik, baik yang berupa gedung, alat-alat pendidikan, dan yang paling penting adalah faktor manusia. Karena manusia yang akan menyelenggarakan sistem yang baru ini, maka manusialah yang harus disiapkan lebih dahulu. Untuk itu telah diadakan bermacam-macam penataran, baik untuk pihak pengelola maupun staf pengajarnya, baik di dalam maupun ke luar negeri. Proyek penataran ini dilaksanakan, misalnya, dengan biaya *World Bank* yang sampai tahun ini masih berlangsung.

Bagaimana hasil dari proyek-proyek seperti ini harus diadakan penelitian tersendiri.

d) Kurikulum pendidikan tinggi

° Untuk meningkatkan penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan tinggi maupun penyajian program pendidikan yang beragam, maka diperlukan pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi. Dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0212/U/1982 telah ditetapkan Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi. Dalam keputusan ini ditetapkan tujuan dari setiap jenjang program dari S_0 (Program Diploma) sampai dengan S_3 (program Doktor). Juga ditetapkan komponen dasar umum dan komponen dasar keahlian serta keahlian dalam setiap program.

Berdasarkan keputusan tersebut Direktur Jendral Pendidikan Tinggi, atas pertimbangan Konsorsium Pendidikan Tinggi masing-masing bidang, menetapkan kurikulum inti bagi masing-masing program pendidikan. Kurikulum-kurikulum inti inilah yang menjadi pdoman bagi setiap perguruan tigggi dalam penyelenggaraan pneididkannya. Dalam kenyataannya semua perguruan tinggi belum mengikuti kurikulum inti berdasarkan masing-masing program yang telah disusun.

e) Normalisasi Kehidupan Kampus

Pergolakan mahasiswa yang terjadi di berbagai perguruan tinggi pada akhir Pelita III dan permulaan Pelita IV memengaruhi pula kehidupan kampus. Dalam rangka pemeliharaan ketenangan, ketertiban, dan dinamika lingkungan perguruan tinggi dan adanya Surat Keputusan Pangkopkamtib I/1978, maka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Syarif Thayeb telah mengeluarkan satu instruksi menteri. Instruksi ini ditujukan kepada pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta dan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 1/U/1978 tanggal 31 Januari 1978, antara lain menetapkan agar rektor dan Kopertis membekukan seluruh kegiatan Dewan Mahasiswa, Senat Mahasiswa, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa dan badan-badan yang sejenis.

Kemudian Daoed Joesoef sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Pembangunan III mengeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0156/U/1978, tentang Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK).

Keputusan ini menetapkan, antara lain, bahwa Normalisasi Kehidupan Kampus adalah redefinisi dan penataan kembali kehidupan kampus secara mendasar, fungsional, dan bertahap. Dalam penataan kembali itu diharapkan Badan Kekeluargaan Mahasiswa di perguruan tinggi dapat bekerja ke arah pemenuhan kebutuhan utama mahasiswa, yaitu kesejahteraan mahasiswa (*student welfare*), minat dan kegemaran mahasiswa (*student interest*) dan pengembangan pemikiran serta penalaran mahasiswa (*student ideas and reasoning*).

Berdasarkan surat keputusan tersebut di atas, Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Tinggi Prof. Dr. D.A. Tisna Amijaya mengeluarkan Instruksi No. 02/DJ/Inst/1978 tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Penataan Kembali Lembaga-Lembaga Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. Dalam instruksi yang ditujukan kepada para Rektor Perguruan Tinggi dan Koordinatrr Perguruan Tinggi Swasta di seluruh Indonesia ditetapkan agar mengaktifkan kembali Senat Mahasiswa dan Badan Perwakilan Mahasiswa di tingkat fakultas. Di samping itu hendaknya persyaratan-persyaratan pembentukan Senat dan BPM dipatuhi. Di tingkat universitas/institut dibentuk Badan Koordinasi Kemahasiswaan yang diketuai oleh Pembantu Rektor III dengan beranggotakan para PD III, dosen-dosen pembimbing dan tokoh-tokoh mahasiswa. Struktur organisasi kelembagaan mahasiswa intra universitas dapat dilihat pada lampiran.

f) Ujian seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri

Searah dengan kebijaksanaan pemerintah dalam meluaskan kesempatan belajar untuk anak usia sekolah, maka tamatan sekolah dasar sampai sekolah lanjutan atas setiap tahun makin meningkat. Tuntutan masyarakat untuk memasuki tingkat pendidikan yang lebih tinggi makin terasa. Hal ini lebih-lebih dirasakan pada akhir Pelita II dan permulaan Pelita III sampai sekarang.

Keinginan untuk memasuki dunia pendidikan tinggi pun tambah meningkat. Tiap-tiap perguruan tinggi membuat kebijaksanaan untuk menyeleksi calon mahasiswanya masing-masing. Di samping untuk menyaring calon mahasiswa yang benar-benar mempunyai kemampuan, juga untuk menyesuaikan penerimaan jumlah calon mahasiswa dengan daya tampung perguruan tinggi masing-masing.

Dalam masa Orde Baru kita mengenal 2 model tes masuk ke perguruan tinggi. Yang pertama tes masuk ke perguruan tinggi dengan nama tes Skalu. Tes ini dilaksanakan oleh 5 perguruan tinggi negeri pembina untuk menyaring calon mahasiswanya, Kelima perguruan tinggi itu adalah Universitas Indonesia, Uni-

versitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Institut Pertanian Bogor, dan Institut Teknologi Bandung. Model tes obyektif ini telah dilaksanakan sejak permulaan Pelita II sampai akhir Pelita II. Model tes yang kedua adalah tes melalui Proyek Perintis yang dilaksanakan pada Pelita III.

Pada tahun 1979 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengadakan ujian masuk ke perguruan tinggi negeri dengan membentuk Tim Studi Nasional Pola Seleksi dan Penerimaan Mahasiswa Baru. Tim ini dibentuk dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Pendidikan Tinggi. Tim ini mengkoordinasikan 4 Proyek Perintis yang mengelola ujian seleksi penerimaan mahasiswa baru.

Proyek Perintis tersebut di atas adalah Proyek Perintis Satu, Proyek Perintis Dua, Proyek Perintis Tiga, dan Proyek Perintis Empat. Proyek Perintis Satu menyelenggarakan ujian seleksi pada 10 perguruan tinggi negeri serta mempunyai lingkup nasional, artinya, mahasiswa yang mengikuti ujian seleksi pada Proyek Perintis Satu dapat memilih tempat studi pada salah satu perguruan tinggi dari 10 perguruan tinggi itu. Ujian diadakan secara serentak pada sepuluh perguruan tinggi. Proyek Perintis Dua mengadakan seleksi melalui pemanduan bakat untuk bidang matematika dan sains untuk Universitas Gadjah Mada dan Institut Teknologi Bandung; sedangkan untuk Institut Pertanian Bogor seleksi pemanduan bakat ini meliputi semua bidang pilihan. Proyek Perintis Tiga mengkoordinasikan ujian seleksi di 23 perguruan tinggi negeri yang bersifat lokal, artinya, pendaftaran dan ujian masuk di perguruan tinggi tertentu hanya berlaku untuk perguruan tinggi tersebut. Proyek Perintis Empat menyelenggarakan ujian seleksi untuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Lembaga pendidikan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan dalam bidang kesenian melaksanakan ujian seleksi secara tersendiri dan tidak tergabung dalam Proyek Perintis.

Proyek Perintis Satu, Tiga, dan Empat menyelenggarakan ujian dalam dua kelompok. Kelompok ujian IPA hanya dapat diikuti oleh lulusan SMTA umum dan kejuruan Paspal sedang-

kan kelompok ujian IPS dapat diikuti oleh semua lulusan SMTA umum dan kejuruan, baik jurusan Paspal, IPS, maupun bahasa.

Salah satu persyaratan yang perlu dipenuhi oleh para lulusan SMTA kejuruan yang akan mengikuti ujian seleksi adalah nilai rata-rata dalam ijazah atas STTB. Untuk Proyek Perintis Satu calon harus mempunyai nilai rata-rata paling rendah 7,0 (tujuh koma nol) atau telah bekerja dalam bidangnya selama paling sedikit dua tahun setelah tamat dan dikukuhkan dengan bukti. Untuk Proyek Perintis Tiga nilai rata-rata paling rendah 6,5 (enam koma lima) atau telah bekerja dalam bidangnya paling sedikit dua tahun setelah tamat dan dikukuhkan dengan bukti. Adapun bagi Proyek Perintis Empat calon harus mempunyai nilai rata-rata paling rendah 6,0 (enam koma nol) atau telah bekerja dalam bidangnya selama paling sedikit dua tahun dan dikukuhkan dengan bukti.

Dilihat dari persyaratan nilai rata-rata STTB, maka para calon mahasiswa yang mengikuti Proyek Perintis Empat adalah yang paling lemah. Hal ini sangat memprihatinkan karena Proyek Perintis Empat menyelenggarakan tes untuk menerima mahasiswa yang akan menjadi guru. Dengan demikian, persyaratan ini kurang tepat. Di samping itu memang hasrat untuk masuk ke IKIP sangat kurang bila dibandingkan dengan perguruan tinggi lainnya.

Waktu pelaksanaan ujian tidak sama untuk ketiga Proyek Perintis itu. Oleh karena itu, satu orang calon dapat mengikuti ujian seleksi pada ketiga proyek ini. Prioritas pertama biasanya ditujukan untuk perguruan tinggi yang masuk dalam Proyek Perintis Satu, baru kemudian Proyek Perintis lainnya. Sistem ujian seleksi seperti ini mengakibatkan adanya penerimaan calon yang sama pada 2 perguruan tinggi yang berbeda, misalnya, calon diterima pada Proyek Perintis Satu dan diterima pula pada Proyek Perintis Empat. Hal ini pun mengakibatkan adanya pengumuman penerimaan susulan bagi mahasiswa yang termasuk dalam kategori bisa diterima.

Untuk Proyek Perintis Satu dan Tiga, mata-mata ujian yang diberikan adalah bahasa Indonesia, IPS, matematika IPS,

bahasa Inggris untuk kelompok ujian IPS; sedangkan untuk kelompok ujian IPA adalah biologi, matematika IPA, kimia, dan fisika. Khusus untuk Proyek Perintis Satu mulai tahun 1982 dilaksanakan ujian IPA dan IPS Terpadu. Tes ini merupakan tes pemahaman yang bertujuan mengukur sampai seberapa jauh peserta ujian dapat memecahkan persoalan dengan latar belakang berbagai pengalaman belajar yang telah diperolehnya. Untuk Proyek Perintis Empat mata-mata ujian seleksi untuk kelompok ujian IPA adalah PMP, IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan matematika IPA; sedangkan untuk kelompok ujian IPS adalah PMP, IPS, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Tes Khusus atau Tes Minat dan Bakat Kependidikan dilaksanakan oleh IKIP setempat.

Seluruh pengolahan data dalam penyelenggaraan ujian Proyek Perintis dilakukan dengan komputer. Dengan demikian, penyimpangan data seleksi dan penerimaan tidak akan mungkin terjadi.

Pada permulaan Pelita IV (tahun 1984) ujian seleksi masuk perguruan tinggi negeri ini diganti namanya dengan Sipenmaru, yaitu singkatan dari Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru. Pelaksanaan ujian Sipenmaru ini berbeda dengan Proyek Perintis karena ujian diadakan secara serentak, secara nasional dengan bentuk soal yang sama, baik untuk universitas maupun IKIP. Ujian pun dipaksakan pada hari yang sama, dengan demikian calon hanya dapat mengikuti satu kali ujian seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri, baik untuk Program Diploma maupun Program Sarjana (S1).

Dilihat dari asas pemerataan, proyek Sipenmaru lebih memberikan pemerataan dan kesempatan dalam penerimaan mahasiswa untuk seluruh perguruan tinggi negeri. Hal ini disebabkan karena mahasiswa hanya bisa mengikuti salah satu kelompok ujian yaitu IPS atau IPA, sehingga tidak terdapat lagi penerimaan ganda untuk satu calon mahasiswa di perguruan tinggi negeri.

g) Peranan perguruan tinggi swasta

Dalam rangka peningkatan dan perluasan kesempatan

belajar di tingkat pendidikan tinggi, peranan perguruan tinggi swasta sangat penting. Hal ini disebabkan karena arus calon mahasiswa yang akan mengikuti pendidikan tinggi tidak dapat ditampung oleh perguruan tinggi negeri.

Dalam dokumen Kebijakan Dasar Pendidikan Tinggi serta Pelaksanaan Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi disebutkan berbagai pokok kebijakan yang menyangkut perguruan tinggi swasta serta pembinaannya. Dalam Pelita II berbagai usaha pembinaan telah diadakan. Dari inventarisasi data perguruan tinggi ternyata pada Pelita II terdapat 333 perguruan tinggi swasta dalam 7 wilayah Kopertis dan 40 buah perguruan tinggi negeri pada 23 propinsi. Sampai akhir Pelita III jumlah perguruan tinggi negeri menjadi 49 buah di 25 propinsi.

Salah satu kegiatan pembinaan terhadap perguruan tinggi swasta adalah sistem akreditasi. Sistem ini secara efektif dilaksanakan dalam Pelita III. Kepada perguruan tinggi swasta diberikan status dari "Tercatat" sampai status "Disamakan". Untuk memperoleh status "Terdaftar", "Diakui", dan "Disamakan" harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik dari segi organisasi dan administrasi maupun dari segi akademik. Salah satu kegiatan yang banyak dilaksanakan dalam Pelita III adalah evaluasi aktif terhadap perguruan tinggi swasta. Yang dimaksudkan dengan evaluasi aktif adalah kegiatan evaluasi yang diadakan terhadap perguruan tinggi swasta oleh Kopertis tanpa diminta oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.

Tujuan dari evaluasi aktif ini adalah untuk meneliti keadaan perguruan tinggi swasta dari segi organisasi, sarana fisik maupun nonfisik, serta pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Dari hasil evaluasi aktif inilah dapat dinilai apakah sesuatu perguruan tinggi swasta dapat ditingkatkan statusnya atau tidak. Bisa juga terjadi perguruan tinggi diturunkan statusnya, bila persyaratan-persyaratan yang diperuntukkan bagi status tertentu tidak dipenuhi, misalnya, dari status "Diakui" ke "Terdaftar" atau dari status "Disamakan" ke status "Diakui". Salah satu keuntungan dari akreditasi ini bagi perguruan tinggi swasta ialah calon mahasiswa akan lebih banyak memilih

perguruan tinggi swasta yang telah mendapat status "Diakui" atau "Disamakan". Sejalan dengan hal itu perguruan tinggi swasta yang telah disamakan ijazahnya dengan perguruan tinggi negeri berusaha untuk meningkatkan pembayaran uang kuliahnya setiap tahun. Hal ini sangat memberatkan calon mahasiswa bila dibandingkan dengan biaya yang dibebankan kepada mahasiswa yang masuk ke perguruan tinggi negeri. Bagaimanapun juga, penyelenggaraan suatu pendidikan tinggi yang modern sangat memerlukan biaya yang cukup besar. Yang penting untuk diteliti ialah apakah dengan sistem akreditasi mutu pendidikan swasta makin ditingkatkan ataukah sebaliknya.

Di satu pihak perguruan tinggi swasta mendapat perlindungan hukum dari pemerintah, tetapi di pihak lain justru dengan sistem akreditasi perguruan tinggi swasta tidak berusaha untuk meningkatkan mutu, melainkan hanya mencari popularitas. Sekali lagi, untuk hal ini masih perlu penelitian yang khusus.

3) Penyusunan Rancangan Undang-undang tentang ketentuan pokok pendidikan dan pembinaan kebudayaan

Pada tahun 1967 untuk pertama kali Pemerintah Orde Baru mengajukan suatu Rancangan Undang-undang Pokok Pendidikan dan Pembinaan Kebudayaan kepada DPR. Namun demikian, RUU itu tidak terlesaikan sampai terjadi perubahan kabinet. Kemudian pada tahun 1969 persoalan ini dibicarakan lagi dalam DPR, namun belum sampai selesai terjadi lagi perubahan kabinet. Pada tahun 1974 penyusunan Rancangan Undang-undang Pokok ini telah ditetapkan sebagai salah satu kebijaksanaan yang strategis di antara kebijaksanaan lainnya yang perlu segera diselesaikan.

Pada periode Kabinet Pembangunan III (Repelita III) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0283/P/1978 tentang pembentukan Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional. Komisi ini bertugas untuk merumuskan konsep sistem pendidikan nasional yang bersifat semesta, me-

nyeluruh, dan terpadu. Komisi yang diketuai oleh Prof. Dr. Slamet Iman Santoso ini telah menyelesaikan tugasnya pada tahun 1980. Laporan Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional sudah berhasil disusun dengan melibatkan semua pihak di dalam masyarakat. Sayangnya, konsep ini mengalami nasib yang sama dengan konsep-konsep sebelumnya. Sampai berakhirnya periode Kabinet Pembangunan III, konsep dari Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional tidak pernah dibahas dalam rangka penyusunan suatu Rancangan Undang-undang Pendidikan dan Kebudayaan.

Dengan demikian, sampai akhir Pelita III Rancangan Undang-undang Pendidikan belum dibahas dalam DPR. Hal ini membuktikan bahwa menyusun suatu undang-undang sangatlah sulit dikerjakan. Karena masalah pendidikan menyangkut hari depan bangsa serta perkembangan masyarakat yang begitu cepat, menyebabkan permasalahan pendidikan menjadi lebih bersifat kompleks. Bagaimanapun juga, suatu Undang-undang Pokok Pendidikan Nasional sudah harus diadakan. Karena banyaknya kebijaksanaan yang diambil dalam bidang pendidikan, maka dari tahun ke tahun sistem pendidikan berkembang dan berbeda satu dengan yang lain. Hal ini disebabkan karena belum adanya satu undang-undang pokok sebagai payung bagi peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan tentang kebijaksanaan dalam pendidikan dan kebudayaan. Peraturan-peraturan pemerintah yang ada tentang pendidikan dan kebudayaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan pendidikan dalam era pembangunan sekarang. Laporan Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional merupakan *input* yang berharga bagi penyusunan suatu rancangan undang-undang pendidikan, di samping banyaknya perkembangan baru dalam dunia pendidikan sekarang ini.

4) Peningkatan pendidikan masyarakat

Program Peningkatan Pendidikan Masyarakat dititikberatkan pada pembinaan mental dan peningkatan kemampuan warga masyarakat untuk bekerja dan belajar sendiri dengan penekanan pada kemampuan belajar bersama dari sumber belajar

setempat. Pelaksanaan program ini dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pemberantasan buta huruf gaya baru atau pemberantasan tiga buta. Usaha pemberantasan buta huruf gaya lama ditujukan untuk pengenalan aksara dan angka, sehingga banyak penduduk yang sudah mengenal huruf menjadi buta huruf kembali. Hal ini disebabkan karena pengenalan huruf dan angka tidak mempunyai guna dalam kehidupan sehari-hari. Usaha pemberantasan gaya baru ini bukan hanya ditujukan pada pemberantasan buta aksara latin dan angka, tetapi juga memberantas buta bahasa Indonesia dan buta pendidikan dasar. Oleh sebab itu, disebut dengan istilah pemberantasan tiga buta.

Dalam Pelita III pendidikan masyarakat ini dilakukan melalui Kelompok Belajar (Kejar) dengan menggunakan Paket A. Paket A ini merupakan sekumpulan bahan belajar minimum yang meliputi semua bidang kehidupan (Ipoleksosbudhankam). Bahan ini perlu dimiliki oleh setiap warga negara yang tidak berkesempatan memasuki sekolah. Mereka itu agar dibantu untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan produktif. Di samping itu terdapat Kelompok Belajar Pendidikan Kesejahteraan Keluarga serta Kelompok Belajar Pendidikan Kejuruan. Mereka yang telah menyelesaikan Paket A dikembangkan kegiatannya menjadi Kejar Usaha (Kelompok Belajar Usaha) dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarga.

Selama Pelita III pembinaan pendidikan masyarakat meliputi pembinaan kegiatan belajar pada kelompok dengan jumlah 3.409.385 orang, yang terdiri atas Kejar Paket A, Kejar PKK, Kejar Pendidikan Keterampilan, dan Kejar Usaha. Penyediaan sarana pendidikan yang berupa buku Paket A dan buku pedoman sebanyak 51.165.477 buku; pembangunan dan rehabilitasi gedung sejumlah 81 buah; serta penataran bagi petugas dan pembina meliputi jumlah 41.869 orang.

5) Pembinaan generasi muda

Pembinaan generasi muda merupakan salah satu faset universal yang dihadapi oleh semua bangsa. Dari segi pembangunan nasional maupun kebutuhan nasional, maka pemuda merupakan

sumber potensi bangsa yang sangat diperlukan pada masa mendatang. Dari segi aspek regenerasi, maka pemuda merupakan generasi penerus bagi cita-cita perjuangan bangsa.

Dengan demikian, pemuda harus disiapkan sedemikian rupa sehingga merupakan jaminan bagi kelangsungan hidup negara dan bangsa serta kesinambungan pembangunan nasional. Oleh karena pentingnya pembinaan pemuda ini, Ketetapan MPR No. IV tahun 1978 menggariskan suatu strategi pembinaan generasi muda. Pelaksanaannya dijabarkan dalam program yang terarah.

Secara makro kelompok pemuda terorganisasi dalam 3 jalur.

- a) Jalur SLTP – SLTA, yang tergabung dalam Organisasi Intra Sekolah (OSIS).
- b) Jalur kampus, yang terdiri atas organisasi mahasiswa intra universitas, termasuk Senat Mahasiswa, Badan Permusyawaratan Mahasiswa (BPM), dan Pengurus Mahasiswa Jurusan (PMJ).
- c) Jalur kemasyarakatan, yaitu Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), organisasi ekstra universiter, dan organisasi pemuda, pramuka, olah raga, klub-klub seni budaya.

Berdasarkan anatomi pemuda ini, peranan dan fungsi masing-masing organisasi dipertegas. Khususnya di dalam lembaga-lembaga kemahasiswaan dalam kampus, peranan dan fungsinya mengalami redefinisi seperti yang telah dikembangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Daoed Joesoef dalam Normalisasi Kehidupan Kampus.

Organisasi ekstra universiter yang ruang lingkup kegiatannya berada di luar kampus tidak merupakan organisasi mahasiswa. Organisasi pemuda di luar kampus jelas lebih menjalankan peranan dan fungsi kepemudaan karena ruang lingkup kegiatannya lebih ditekankan pada program operasional, sedangkan kedudukan organisasi mahasiswa merupakan manusia-manusia penganalisis yang mempunyai misi menciptakan kekuatan penalaran individual.

Atas dasar inilah pembinaan dan pengembangan pemuda lebih diarahkan pada sasaran-sasaran yang akan dicapai. Kelompok pemuda yang tidak terorganisasi bahagian terbesar terdapat di pedesaan. Ini merupakan sasaran pembinaan penting dalam strategi pembinaan pemuda pada periode Kabinet Pembangunan III.

Usaha-usaha di bidang pendidikan yang dilaksanakan selama Pelita III, antara lain, latihan perintis pemuda, latihan pemuka pemuda dan penuntun pemuda, penataran P4 di tingkat pusat dan tingkat daerah, penataran penatar pemuda, penataran penyegaran penatar pemuda, penataran pengelola gelanggang pemuda, serta penataran pembinaan teknis pemuda. Dibangun 4 buah Pondok Pemuda, masing-masing di Bukittinggi (Sumatra Barat), Ambarwinangun (Yogyakarta), Nusa Dua (Bali), dan Cibubur di DKI Jaya.

Di bidang pengembangan keterampilan dan daya kreasi diadakan pertukaran pemuda antarnegara (Kanada, Singapura, Malaysia, dan Jepang), pembinaan Pasukan Pengibar Bendera, penyelenggaraan festival tahunan, dan pembinaan Kelompok Kerja Produktif. Penyelenggaraan festival tahunan dan perkemahan kerja pemuda berlangsung di berbagai Bumi Perkemahan Pemuda/Pramuka.

Pengembangan wadah generasi muda dilaksanakan dengan pemberian bantuan kepada KNPI dan Pramuka. Bantuan juga diberikan bagi pengembangan dan pengendalian operasional generasi muda secara terpadu di 27 propinsi.

Dalam pengadaan dan peningkatan fasilitas dan sarana dibangun Gedung Pusat Komunikasi Pemuda, Gedung Pusat Latihan Kepemimpinan dan Keterampilan Pemuda di Cirebon, serta Balai Latihan Keterampilan Kepemimpinan Regional di Pandeglang dan Solok. Bantuan juga diberikan bagi pengembangan beberapa desa pemuda di desa Damuli (Sumatra Utara), Mandawalangi (Jawa Barat), desa Pungaluku (Sulawesi Tenggara), dan Pusat Latihan Perintis Pembangunan Regional Pemuda/Pramuka di desa Rajabasa Lama (Lampung).

Media komunikasi bulanan diterbitkan dengan nama Forum Pemuda yang bertujuan untuk menggiatkan komunikasi antarpemuda dengan instansi lain yang terlibat dalam pembinaan generasi muda.

Latihan dan peningkatan keterampilan di bidang perdagangan, kesejahteraan sosial, misalnya, diselenggarakan melalui Karang Taruna. Di bidang agama, untuk meningkatkan kehidupan keagamaan, para pemuda dibina melalui latihan keterampilan kewiraswastaan yang dikaitkan dengan ajaran-ajaran agama. Pembinaan ini terutama diperuntukkan bagi remaja dan pemuda di pedesaan.

Di bidang transmigrasi dilaksanakan latihan keterampilan melalui Kerja Praktek Lapangan, misalnya, di Sababam (Kalimantan Barat), Way Hitam (Sumatra Selatan), Sanganloda (Kalimantan Barat), Bungo Dua (Sulawesi Utara), dan Air Mas I (Irian Jaya).

6) Program keolahragaan

Pembinaan keolahragaan dalam periode ini bertujuan untuk meningkatkan olah raga di kalangan masyarakat luas. Agar masyarakat luas dapat turut serta dalam kegiatan olah raga dicanangkan panji olah raga, yaitu "memasyarakatkan olah raga dan mengolahragakan masyarakat" dalam Musyawarah Keolahragaan Nasional (Musornas) IV tahun 1981.

Usaha-usaha yang dilaksanakan adalah olah raga massal pelajar, mahasiswa, dan masyarakat; peningkatan mutu kemampuan tenaga teknis edukatif pembina olah raga baik di dalam maupun di luar negeri. pembibitan olahragawan berbakat di daerah Salatiga, Ujung Pandang, Palembang, Jambi, dan Maluku; pengembangan kerja sama internasional keolahragaan dalam bentuk seminar, kursus, atau pertemuan olah raga.

Prasarana dan sarana olah raga (lapangan volley, basket, dll.) maupun pembangunan gedung olah raga ditingkatkan. Untuk mereka yang cacat dan lanjut usia diadakan kesegaran jasmani dan rekreasi untuk bermacam-macam kelompok.

7) Pembinaan kebudayaan nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Mahaesa.

Apabila pada periode Pelita II Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa masuk dalam bidang agama, maka dalam Pelita III unsur itu akan dimasukkan dalam aspek kebudayaan. Hal ini disebabkan karena Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan merupakan agama seperti agama-agama lainnya yang berada di bawah Departemen Agama.

Dalam GBHN tahun 1978 dinyatakan bahwa pembinaan kepada penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan dalam rangka pembangunan kebudayaan, oleh karena dalam kenyataannya kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa memang merupakan bagian dari kebudayaan nasional yang hidup dan dihayati oleh sebahagian bangsa Indonesia. Pembinaan terhadap penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa diarahkan pada pembinaan budi luhur bangsa.

Pengembangan kebudayaan nasional diarahkan pada nilai-nilai yang mencerminkan kepribadian bangsa dan meningkatkan nilai-nilai yang luhur. Dengan adanya kesadaran akan kepribadian bangsa dapat ditanggulangi pengaruh kebudayaan asing yang negatif, sekaligus mengembangkan kemampuan masyarakat untuk menyaring dan menyerap nilai-nilai dari luar yang positif. Hal ini dibutuhkan bagi pembaharuan dalam proses pembangunan nasional.

a) Kebijakan-kebijaksanaan yang ditempuh

Untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam GBHN, maka ditempuh pokok-pokok kebijakan dalam pembangunan kebudayaan nasional dan pembinaan penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai berikut:

- (1) meningkatkan usaha di bidang kepurbakalaan, kesejarahan, dan permuseuman untuk menjaga warisan budaya sebagai satu sarana pembinaan bangsa bagi generasi sekarang dan yang akan datang.
- (2) meningkatkan dan mengembangkan usaha di bidang seni budaya untuk menciptakan kondisi sosial budaya yang menunjang tumbuhnya kreativitas seni.

- (3) meningkatkan usaha di bidang pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra dengan mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (4) meningkatkan usaha di bidang inventarisasi kebudayaan untuk memantapkan penghayatan nilai-nilai budaya bangsa, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, kepribadian bangsa, serta ketahanan nasional.
- (5) meningkatkan dan mengembangkan kemampuan teknis petugas di bidang kebudayaan serta meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan tugas pengembangan kebudayaan.
- (6) meningkatkan partisipasi masyarakat dengan cara men-daerahkan bidang-bidang garapan budaya tanpa meninggal-kan asas pembinaan teknis yang diperlukan.
- (7) meningkatkan kemampuan daya seleksi masyarakat terhadap nilai-nilai budaya secara terencana, sistematis, dan terarah.
- (8) menginventarisasi aspek-aspek budaya dan nilai-nilai tra-disional sebagai sarana pemetaan budaya bangsa dalam mempertinggi identitas bangsa ke arah pemantapan keta-hanan nasional.
- (9) menggugah minat baca masyarakat melalui peningkatan pelayanan perpustakaan umum.
- (10) memantapkan usaha di bidang pembinaan penghayat Ke-percayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk mem-pertinggi budi pekerti dalam kehidupan pribadi masya-rakat.
- (11) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dan pelayanan administratif, pengawasan, serta penelitian dan pengembangan.

b) Usaha-usaha yang dilaksanakan

Untuk merealisasikan kebijaksanaan-kebijaksanaan ter-sebut di atas ditempuh berbagai kegiatan, antara lain:^{3 4}

- (1) di bidang kepurbakalaan, kesejarahan, serta permuseuman diadakan kegiatan-kegiatan: pemugaran dan pemeliharaan serta penyelamatan peninggalan sejarah dan purbakala; melakukan inventarisasi, registrasi, dan dokumentasi tentang khasanah peninggalan sejarah dan purbakala di propinsi-propinsi di Indonesia. Hasil yang dicapai sebanyak 67 lokasi termasuk melanjutkan pemugaran Monumen Nasional (Monas); pengamanan dan pemeliharaan situs-situs sejarah purbakala di 26 propinsi sejumlah 1342 situs dan satu studi kelayakan; pembentukan Satpam dalam rangka pengamanan tempat-tempat peninggalan sejarah dan purbakala; pembangunan 3 buah laboratorium arkeologi serta peralatannya di Bandung, Yogyakarta, dan Bali.

Dalam rangka kerja sama di bidang purbakala dan sejarah antar-Asean telah diikuti kegiatan-kegiatan, antara lain *Workshop on the Preservation of Traditional Programming Arts in Modern Environment in Bali* dan *Consultative Workshop on Archeological and Environmental Studies on Sriwijaya* di Jakarta, Palembang, dan Jambi.

- (2) dalam rangka pengembangan di bidang seni budaya telah diadakan peningkatan sosio drama di 27 propinsi; mengadakan inventarisasi, penggalian, serta konservasi dan penyebarluasan 7 jenis seni di semua propinsi, yaitu seni rupa, seni musik, seni tari, seni teater, seni pedalangan, seni kerawitan dan seni sastra; pembinaan seni dan karya seni di kalangan masyarakat luas dilakukan melalui penyuluhan, serasehan, pameran, pegelaran, dan pertukaran duta seni; pemberian bantuan kepada seniman atau organisasi kesenian daerah termasuk di 19 daerah transmigrasi; penyelesaian rencana induk masing-masing taman budaya serta kerja sama antarnegara ASEAN; penataran tenaga kesenian sebanyak 107 orang.
- (3) pengembangan di bidang kebahasaan, kesastraan, perbukuan, dan perpustakaan dilakukan melalui kegiatan-kegiatan antara lain: sayembara karang-mengarang dalam bahasa Indonesia bagi murid SD, SMTP, dan SMTA, serta

perguruan tinggi dan guru. Hasil yang dicapai adalah 200 naskah; penerbitan hasil penelitian sastra Indonesia dan sastra daerah, misalnya, struktur bahasa Suwawa (Sulawesi Utara), bahasa Banjar Kuala (Kalimantan Selatan), bahasa Sekak (Sumatra Selatan), bahasa Simelue (Sumatra Utara); serta sastra lisan Minangkabau; penysunan 6 judul kamus; pembinaan bahasa Indonesia melalui TVRI dan RRI.

Di bidang perpustakaan disiapkan perpustakaan nasional tahap akhir serta peningkatan fungsi 25 perpustakaan wilayah dengan 72.900 eksemplar buku; juga perpustakaan daerah tingkat 2 dan tingkat kecamatan dengan jumlah masing-masing 146.900 eksemplar buku dan 23.400 eksemplar buku; perpustakaan keliling dan perpustakaan percontohan dengan masing-masing memiliki 40.070 eksemplar buku.

Di bidang perbukuan dilaksanakan Pekan Buku Nasional sebanyak 1 kali setahun untuk tingkat nasional dan 5 kali setahun untuk tingkat daerah. Untuk karya yang menonjol dalam rangka penulisan buku ilmiah maupun fiksi serta sastra remaja diberikan hadiah berupa penghargaan.

- (4) pengembangan di bidang inventarisasi kebudayaan dalam rangka usaha-usaha yang dilaksanakan antara lain: menghimpun 5 aspek sejarah yaitu aspek sejarah daerah, adat istiadat, ceritera rakyat, aspek geografi budaya daerah, yang meliputi 130 naskah dan terbitan sebanyak 91 judul makalah; penelitian sastra Indonesia dan daerah yang berjumlah 102 jenis laporan penelitian dan pencetakan naskah penelitian sebanyak 138.000 eksemplar; penulisan biografi pahlawan nasional dan tokoh nasional masing-masing berjumlah 75 tokoh.
- (5) pembinaan penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam GBHN telah dinyatakan bahwa Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan merupakan agama; jadi, pembinaannya ditujukan agar tidak mengarah pada

pembentukan agama baru. Harus pula diambil langkah-langkah yang perlu agar pelaksanaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan dasar ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Usaha-usaha yang dilaksanakan antara lain: inventarisasi dan dokumentasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan menghasilkan 26 naskah; penerbitan pedoman pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebanyak satu naskah; mengadakan serasehan sebanyak 7 kali serta peningkatan tenaga pembina dan bimbingan pinisepuh sebanyak 50 orang; juga diadakan bimbingan dan siaran melalui radio dan televisi.

(6) pendidikan kedinasan tenaga kebudayaan

Dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis para tenaga kebudayaan sebagai kegiatan khusus, telah diadakan penataran teknik grafika sebanyak 400 orang dan penerbitan buku-buku pedoman teknik grafika dan penyuluhan grafika sebanyak 7.500 dan 16.000 eksemplar. Untuk peningkatan mutu penataran teknik pusat grafika Indonesia diadakan penambahan peralatan di bidang grafika, alat-alat komposing, foto reproduksi, cetak offset besar, kecil, dan cetak tinggi.

5.4 Struktur Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Sejak lahirnya Orde Baru sampai dengan akhir Pelita III telah terjadi 3 kali penggantian Kabinet Pembangunan di samping Kabinet Ampera yang merupakan kabinet pada fase rehabilitasi dan stabilisasi pada tahun 1966–1968. Bila penggantian kabinet pada masa sebelum masa Orde Baru sering terjadi, maka pada masa Orde Baru penggantian kabinet dilakukan pada jangka waktu yang tertentu. Hal ini disebabkan karena penggantian kabinet dikaitkan dengan kebijaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahunan (Repelita).

Penggantian kabinet pada umumnya membawa perubahan pada nama maupun struktur organisasi pada suatu departemen.

Perubahan ini disebabkan karena perubahan dalam beban tugas yang perlu dilaksanakan dalam Pembangunan Lima Tahunan. Perubahan bisa bersifat pengembangan atau penyempitan dalam struktur organisasi.

Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam perkembangannya sejak Pelita I telah mengalami beberapa kali perubahan dalam struktur organisasinya. Hal ini dapat dilihat pada beberapa Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

5.4.1 Susunan Organisasi Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 39 Tahun 1969 dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0141/1969

5.4.1.1 Di tingkat pusat

- 1) pimpinan departemen adalah menteri
- 2) Sekretariat Departemen
- 3) Badan Pengembangan Pendidikan
- 4) Inspektorat Jendral
- 5) Direktorat Jendral Pendidikan
- 6) Direktorat Jendral Olah Raga dan Pemuda
- 7) Direktorat Jendral Kebudayaan
- 8) badan/lembaga lainnya menurut kebutuhan.

5.4.1.2 Di tingkat daerah

- 1) perwakilan di ibu kota propinsi dan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta beserta unsur-unsur pelaksanaannya di ibu kota kabupaten, kotamadya, dan di ibu kota kecamatan/kota-praja diadakan menurut kebutuhan;
- 2) badan/lembaga lainnya diadakan menurut kebutuhan. Dalam melaksanakan tugasnya, menteri dibantu oleh sekretaris jendral, Ketua Badan Pengembangan Pendidikan, inspektur jendral dan direktur jendral. Menteri bertanggung jawab kepada presiden. Dalam melaksanakan tugasnya di bidang administrasi dan koordinasi seluruh kegiatan administrasi departemen maka Sekretariat Jendral mempunyai susunan sebagai berikut:

- a) **Biro Organisasi dan Operasi** terdiri atas:
 - (1) **Bagian Perencanaan Administrasi**
 - (2) **Bagian Pencatatan dan Pengolahan**
 - (3) **Bagian Organisasi dan Metode**
 - (4) **Bagian Khusus**
 - (5) **Bagian Umum**

- b) **Biro Menteri** terdiri atas:
 - (1) **Bagian Sekretaris**
 - (2) **Bagian Hubungan Masyarakat**
 - (3) **Bagian Hubungan dengan Lembaga-lembaga Negara**
 - (4) **Bagian Hukum**
 - (5) **Bagian Umum.**

- c) **Biro Personalia** terdiri atas:
 - (1) **Bagian Penempatan Tenaga Edukatif**
 - (2) **Bagian Penempatan Tenaga Administratif**
 - (3) **Bagian Registrasi**
 - (4) **Bagian Pengembangan Tenaga**
 - (5) **Bagian Umum**

- d) **Biro Material** terdiri atas:
 - (1) **Bagian Bangunan**
 - (2) **Bagian Alat Kantor**
 - (3) **Bagian Alat Teknis**
 - (4) **Bagian Pengadaan Buku**
 - (5) **Bagian Umum**

- e) **Biro Tata Usaha** terdiri atas:
 - (1) **Bagian Administrasi**
 - (2) **Bagian Rumah Tangga**
 - (3) **Bagian Material dan Keuangan**
 - (4) **Bagian Personalia**
 - (5) **Bagian Umum**

- f) **Biro Hubungan Luar Negeri** terdiri atas:
 - (1) **Bagian Hubungan dengan Badan-badan Internasional**
 - (2) **Bagian Hubungan Antar-Negara**
 - (3) **Bagian Pembinaan Atase Kebudayaan**

- (4) Bagian Pengiriman
- (5) Bagian Umum
- g) Badan Pengembangan Pendidikan terdiri atas:
 - (1) Sekretariat Bagian Pengembangan Pendidikan
 - (2) Lembaga Pengembangan Kurikulum
 - (3) Lembaga Pengembangan Guru dan Tenaga Teknis
 - (4) Lembaga Pengembangan Alat-alat Pendidikan
 - (5) Lembaga Pengembangan Fasilitas Pendidikan
 - (6) Lembaga Penelitian dan Evaluasi Pendidikan
 - (7) Lembaga Pengembangan Perpustakaan Pendidikan.

Inspektorat Jendral terdiri atas:

- a) Inspektorat Bidang Proyek-proyek
- b) Inspektorat Bidang Personalia
- c) Inspektorat Bidang Material dan Keuangan
- d) Inspektorat Bidang Organisasi dan Metode
- e) Bagian Tata Usaha Inspektorat Jendral

Direktorat Jendral Pendidikan terdiri atas:

- a) Sekretariat Direktorat Jendral
- b) Direktorat Pendidikan Dasar, Prasekolah, dan Pendidikan Luar Biasa
- c) Direktorat Pendidikan Menengah Umum
- d) Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan
- e) Direktorat Pendidikan Guru dan Tenaga Teknis
- f) Direktorat Pendidikan Tinggi
- g) Direktorat Khusus
- h) Lembaga-lembaga dan badan-badan lain yang pembentukannya ditentukan oleh Menteri menurut kebutuhan.

Direktorat Jendral Olah Raga dan Pemuda terdiri atas:

- a) Sekretariat Direktorat Jendral
- b) Direktorat Olah Raga Pendidikan
- c) Direktorat Keolahragaan
- d) Direktorat Kepanduan
- e) Direktorat Pendidikan Masyarakat

- f) Direktorat Pendidikan dan Pengajaran.
- g) Direktorat Khusus
- h) Lembaga Penelitian Kesegaran Jasmani
- i) Lembaga Penelitian dan Pengembangan Prasarana

Direktorat Jendral Kebudayaan terdiri atas:

- a) Sekretariat Direktorat Jendral
- b) Direktorat Kesenian
- c) Direktorat Pendidikan Kesenian
- d) Direktorat Museum
- e) Lembaga Bahasa Nasional
- f) Lembaga Sejarah dan Antropologi
- g) Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional
- h) Lembaga Musikologi dan Koreografi.

Badan atau lembaga lainnya dibentuk sesuai kebutuhan.

5.4.2 Susunan Organisasi Departemen Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 44 Tahun 1974 dan No. 45 Tahun 1974 serta Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 079/0/1975

- a) Menteri
- b) Sekretariat Jendral
- c) Inspektorat Jendral
- d) Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah
- e) Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi
- f) Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah dan Olah Raga
- g) Direktorat Jendral Kebudayaan
- h) Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan.
- i) Pusat
- j) Instansi Vertikal di Wilayah

Sekretariat Jendral terdiri atas:

- 1) Biro Perencanaan
- 2) Biro Kepegawaian
- 3) Biro Keuangan

- 4) Biro Perlengkapan
- 5) Biro Organisasi
- 6) Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
- 7) Biro Kerja Sama Luar Negeri
- 8) Biro Tata Usaha

Inspektorat Jendral terdiri atas:

- 1) Sekretariat Inspektorat Jendral
- 2) Inspektorat Kepegawaian
- 3) Inspektorat Keuangan
- 4) Inspektorat Perlengkapan
- 5) Inspektorat Tugas Umum
- 6) Inspektorat Proyek Pembangunan

Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah terdiri atas:

- 1) Sekretariat Direktorat Jendral
- 2) Direktorat Pendidikan Dasar
- 3) Direktorat Pendidikan Menengah Umum
- 4) Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan
- 5) Direktorat Pendidikan Guru dan Tenaga Teknis
- 6) Direktorat Sarana Pendidikan

Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi terdiri atas:

- 1) Sekretariat Direktorat Jendral
- 2) Direktorat Pembinaan Sarana Akademis
- 3) Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
- 4) Direktorat Perguruan Tinggi Swasta
- 5) Direktorat Kemahasiswaan

Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah dan Olah Raga terdiri atas:

- 1) Sekretariat Direktorat Jendral
- 2) Direktorat Pendidikan Masyarakat
- 3) Direktorat Keolahragaan
- 4) Direktorat Pembinaan Generasi Muda
- 5) Direktorat Pendidikan Tenaga Teknis

Direktorat Jendral Kebudayaan terdiri atas:

- 1) Sekretariat Direktorat Jendral
- 2) Direktorat Pembinaan Kesenian

- 3) Direktorat Pengembangan Kesenian
- 4) Direktorat Museum
- 5) Direktorat Sejarah dan Purbakala

Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas:

- 1) Sekretariat Badan
- 2) Pusat Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan
- 3) Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan dan Kebudayaan
- 4) Pusat Pengolahan Data, Statistik, dan Konsepsi
- 5) Pusat Pengembangan Inovasi dan Teknologi Pendidikan

Pusat terdiri atas:

- 1) Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai
- 2) Pusat Pembinaan Perpustakaan
- 3) Pusat Kesegaran Jasmani dan Rekreasi
- 4) Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
- 5) Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional
- 6) Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya

Instansi vertikal terdiri atas Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di wilayah.

5.4.3 Susunan Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 27 dan 40/1979 dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0145/0/1979

Pada dasarnya susunannya sama yang sebelumnya, hanya mengalami perubahan pada beberapa pasal dan ayat sebagai berikut:

- a) Pada pasal 3 ayat 6 diubah sehingga berbunyi "Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olah Raga."
- b) Pada pasal 5 ayat 5 diubah sehingga berbunyi "Inspektorat Pendidikan Dasar dan Menengah." Pada Pasal 5 ditambah ketentuan baru setelah ayat 5 menjadi ayat 6, ayat 7, dan ayat 8 yang berbunyi sebagai berikut:

ayat 6 : "Inspektorat Pendidikan Tinggi"

ayat 7 : "Inspektorat Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga"

ayat 8 : "Inspektorat Kebudayaan"

ayat 6 : lama diubah menjadi ayat 9 baru.

- c) Pada pasal 6 ditambahkan ketentuan baru menjadi ayat 7 baru yang berbunyi "Direktorat Sekolah Swasta".
- d) Pada pasal 8 kata-kata "Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah dan Olah Raga diubah menjadi "Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga".
- e) Pada pasal 9 ditambah ketentuan baru menjadi ayat 6 baru yang berbunyi "Direktorat Pembinaan Penghayatan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa."
- f) Pada pasal 11 ditambah 2 ketentuan baru menjadi ayat 7 baru dan ayat 8 baru yang berbunyi sebagai berikut:
 ayat 7 : "Pusat Teknologi Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan."
 ayat 8 : "Pusat Grafika Indonesia."

5.4.4 Susunan Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 47 tahun 1979

Berdasarkan keputusan di atas susunan Organisasi Departemen P dan K mengalami perubahan dalam beberapa pasal dan ayat sebagai berikut:

- a) Pada pasal 6 ditambah 1 ketentuan baru menjadi ayat 8 yang berbunyi "Direktorat Pembinaan Kesiswaan."
- b) Pada pasal 9 ayat 2 diubah sehingga berbunyi "Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional".
 Ayat 3 diubah sehingga berbunyi "Direktorat Kesenian".
 Ayat 4 diubah sehingga berbunyi "Direktorat Permuseum-an".
 Ayat 5 diubah sehingga berbunyi "Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala".
- c) Pada pasal 10 ayat 3 diubah sehingga berbunyi "Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan".

Ayat 4 diubah sehingga berbunyi "Pusat Informatik untuk Pengelolaan Pendidikan dan Kebudayaan".

Ayat 5 diubah sehingga berbunyi "Pusat Pengembangan Inovasi Pendidikan dan Kebudayaan".

Ditambah 1 ketentuan baru menjadi ayat 6 yang berbunyi "Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Pengujian".

- d) Pada pasal 11 ayat 5 diubah sehingga berbunyi "Pusat Penelitian Arkeologi Nasional".

Ayat 6 dihapus.

Ayat 7 lama dijadikan ayat 6 baru.

Ayat 8 lama dijadikan ayat 7 baru.

Susunan organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang terakhir inilah yang berlaku sampai dengan akhir Pelita III.

CATATAN BAB V

1. Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman, hal: 115-116.
2. Strategi Dasar Era Pembangunan 25 Tahun, hal: 40.
3. Perjuangan Menegakkan Pancasila dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hal: 56.
4. Lembaran Negara Tahun 1965, No. 81.
5. Pembaharuan Kurikulum Sekolah Dasar di Indonesia, hal: 130.
6. Lembaran Negara 1961, No. 302.
7. Ketetapan-ketetapan MPRS. Tonggak Konstitusional Orde Baru, hal: 21- - 22.
8. Ketetapan MPRS No. XXVII tahun 1966, tentang Pendidikan dan Kebudayaan, pasal 2, 3, 4.
9. Dasar Pikir Politik Pendidikan, hal: 13-14.
10. *Ibid.*, hal: 5-27.
11. Buku Repelita I Bab X, tentang Pendidikan dan Tenaga Kerja.
12. Basic Memorandum tentang Pendidikan. Himpunan Hasil Persidangan Minggu I Konperensi Kerja Departemen P dan K tahun 1971.
13. Ceramah Prof. Dr. Ir. T.B. Bachtiar Rifai pada Kongres Taman Siswa di Jogjakarta.

14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0172/1971 pasal 2 dan 3.
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0172/1971 pasal 6.
16. Mengenal Sistem Pendidikan Pembangunan di Indonesia Jilid 1 hal: 21.
17. Pembaharuan Kurikulum Sekolah Dasar di Indonesia, hal: 131.
18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0283/P/1978.
19. Buku Repelita I Bab X.
20. Buku III Repelita II Bab 22.
21. Kurikulum 1975, Latar Belakang Proses Pengembangan Ciri-cirinya dan Implikasi Pelaksanaan, hal: 4.
22. *Ibid.*, hal: 5.
23. Kurikulum 1975, Buku I Ketentuan-ketentuan Pokok.
24. Sistem Penyusunan Program dan Penganggaran (SP 4), hal: 2-3.
25. Kebijakan Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi.
26. Buku II Repelita III Bab 17.
27. Dikutip seluruhnya dari Laporan Konni Pembaharuan Pendidikan Nasional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1980.
28. Satu Tahun Kabinet Ampera Masalah Pendidikan, Departemen Kebudayaan, hal: 8.
29. Himpunan Hasil Persidangan Minggu Pertama dalam Konferensi Kerja Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1971.
30. Kurikulum, Inti Mata Kuliah Dasar Umum, Direktorat Pendidikan Sarana Akademis Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1983.
31. Data diambil dari Buku Pendidikan dan Kebudayaan dalam Pembangunan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 1977. Buku III Repelita II Bab 22 Pendidikan dan Pembinaan Generasi Muda.

BAB VI PENUTUP

6.1 Periode Akhir Penjajahan Belanda

Pada masa VOC, yang diperhatikan oleh para penguasanya adalah masalah mencari keuntungan belaka. Masalah pendidikan bumiputra tidak diperhatikan. Pendidikan bumiputra ditangani oleh zending/misi. Akan tetapi, pokok perhatian mereka yang sebenarnya adalah penyebaran agama Protestan dan Katolik. Jadi, murid-murid yang diterima sudah barang tentu mereka yang bersedia masuk agama tersebut.

Setelah kekuasaan VOC diganti oleh Pemerintah Hindia Belanda, barulah sekolah-sekolah mulai didirikan, tetapi hanya diperuntukkan bagi anak-anak Belanda dan anak-anak peranakan Belanda. Anak-anak bumiputra belum diberi kesempatan.

Sekitar abad kedua puluh barulah didirikan sekolah-sekolah untuk bumiputra dengan menggunakan bahasa Melayu atau bahasa daerah sebagai bahasa pengantar. Pelajaran yang diutamakan hanyalah membaca dan berhitung karena tujuan sekolah ini hanya untuk mendapatkan tenaga administrasi rendah. Di sini kelihatan adanya diskriminasi dalam pendidikan. Tidak sembarang anak dapat masuk sekolah, lebih-lebih untuk sekolah Belanda.

Dalam rangka politik "Etis" oleh Pemerintah Belanda didirikan pula Sekolah Menengah Pertama/*MULO*, Sekolah Menengah Atas/*AMS*, Sekolah Guru, Sekolah Pertukangan, dan Sekolah Perdagangan. Juga didirikan Sekolah Tinggi Teknik, Sekolah Tinggi Hakim, Sekolah Dokter.

Menyadari bahwa sekolah-sekolah yang didirikan oleh belanda semata-mata bertujuan untuk memperkuat kedudukannya sebagai penjajah, maka timbullah pemikiran dari tokoh-tokoh pergerakan untuk mendirikan sekolah yang bersifat nasional, yaitu yang berorientasi kepada rakyat banyak, merata ke seluruh tanah air, yang dapat membangkitkan rasa nasionalisme guna menuju kemerdekaan.

Berdirilah sekolah-sekolah swasta yang berhaluan politik maupun agama, namun keduanya ada kesamaan tujuan, yaitu memajukan rakyat demi kesejahteraan rakyat untuk akhirnya menuju kemerdekaan. Sekolah-sekolah yang berhaluan politik antara lain: Tamansiswa, Sarekat Rakyat di Semarang, Institut Kesatrian di Bandung; sedang sekolah-sekolah yang berhaluan agama antara lain: Perguruan Isla, Perguruan Muhammadiyah, Perguruan Nadhatul Ulama, Perguruan Sumatra Tawallib di Padang.

Di kalangan kaum wanita juga timbul pemikiran untuk memajukan kaum wanita; maka didirikan sekolah gadis di Jepara oleh R.A. Kartini, Sekolah Isteri di Pasundan oleh Dewi Sartika, Rohana Kudus di kota Gedang.

6.2 *Periode Pendudukan Tentara Jepang*

Setelah menguasai Indonesia, Jepang segera berusaha untuk menanamkan ideologinya kepada bangsa Indonesia. Langkah yang ditempuh ialah merombak semua sekolah ciptaan Belanda itu dengan segala peraturannya yang bersifat diskriminatif. Pada zaman Jepang sekolah rendah hanya ada satu macam dengan lama belajar selama enam tahun, sedangkan sekolah menengah lama belajarnya tiga tahun, dan sekolah menengah tinggi tiga tahun. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Bahasa Jepang dijadikan mata pela-

jaran pokok, sedangkan bahasa Belanda ditiadakan. Kecuali itu, murid-murid diberi pelajaran keprajuritan dengan tujuan untuk membantu Jepang menghadapi Sekutu.

Di bidang kebudayaan, Jepang berusaha menyingkirkan kebudayaan Barat dan berusaha menghidupkan kebudayaan daerah. Semuanya ini diarahkan untuk kemenangan perang Asia Timur Raya.

Sekolah swasta, terutama yang berbau politik, diawasi ketat. Subsidi banyak dicabut, bahkan sekolah swasta ada yang ditutup.

6.3 Periode Revolusi Fisik

Setelah Proklamasi, masalah pendidikan di Indonesia diurus oleh Kementerian Pengajaran yang segera mengambil kebijakan: *menghapuskan pendidikan yang berbau kolonial*. Untuk tujuan itu Menteri Pengajaran mengeluarkan instruksi umum sbb:

- (1). Pengibaran bendera merah putih tiap-tiap hari di halaman sekolah.
- (2). Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
- (3). Menghentikan pengibaran bendera Jepang dan menghapuskan nyanyian *Kimigayo* (lagu kebangsaan Jepang).
- (4). Menghapuskan pelajaran bahasa Jepang serta segala upacara yang berasal dari Jepang.
- (5). Memberi semangat kebangsaan kepada semua murid.

Yang menjadi landasan pendidikan ialah Pancasila dan UUD 1945, pasal 31 dan pasal 32.

Meskipun bangsa Indonesia berada dalam situasi peperangan untuk mempertahankan kemerdekaan melawan penjajah Belanda, namun pemerintah senantiasa berusaha untuk menciptakan pedoman sistem pendidikan nasional yang pada waktu itu belum ada secara resmi. Dalam rangka usaha untuk itu, maka pada tahun 1946 dibentuk Panitia Penyelidik Pendidikan Pengajaran Republik Indonesia (PPPRI), yang tugasnya untuk meninjau usaha pendidikan dan pengajaran.

Kemudian pada tahun 1947 diselenggarakan Kongres Pendidikan di Solo untuk meninjau dan menyempurnakan berbagai masalah pendidikan dan pengajaran.

Pada tahun 1948 dibentuk Panitia Pembantu Pembentukan Undang-undang Pokok Pendidikan Pengajaran. Hasil kerja panitia ini, setelah disempurnakan BPKNIP pada tahun 1950, disahkan sebagai Undang-undang Pokok Pendidikan Republik Indonesia, dan pada tahun 1954 diresmikan sebagai undang-undang yang berlaku di seluruh Republik Indonesia (bekas Republik Indonesia Serikat).

Sejak tahun 1950 asas, tujuan, dan jenjang pendidikan sudah tergambar dalam UUPP tahun 1950, antara lain:

Asas (pasal 4): pendidikan dan pengajaran berdasar atas asas-asas yang termaktub dalam Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia, dan atas kebudayaan kebangsaan Indonesia.

Tujuan (pasal 3): tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air.

Jenjang pendidikan: pendidikan taman kanak-kanak, pendidikan rendah, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

6.4 Periode Liberal

Periode ini terkenal dengan sebutan periode liberal. UUD 1945 diganti dengan UUD Sementara tahun 1950 yang mempunyai sifat liberal.

Dalam masalah pendidikan sudah tidak dipikirkan lagi tentang sistem pendidikan. Yang dipikirkan ialah mengenai usaha-usaha untuk meningkatkan pendidikan, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Itulah sebabnya maka pada masa ini banyak sekali dibuka sekolah baru dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Demikian juga dibuka kursus-kursus keterampilan dan pemberantasan buta huruf.

Dalam bidang kebudayaan orang dengan bebas mengusahakan kebudayaan. Di samping mempertunjukkan kebudayaan daerah, orang juga dengan bebas mengusahakan kebudayaan

yang berasal dari luar. Anak-anak muda banyak yang memilih kebudayaan asing ini, sehingga timbullah sikap kebarat-baratan dan kurang menghargai kebudayaan sendiri.

Dalam bidang pendidikan masyarakat pun bebas mengusahakannya. Akibatnya ialah banyak sekolah swasta didirikan dengan tujuan mencari untung belaka. Para pemuda berusaha untuk mendapatkan ijazah, karena ijazah ini sangat dihargai. Akibatnya ialah pelajaran menjadi bersifat verbalistis artinya, pendidikan hanya mementingkan intelek, kurang memperhatikan perkembangan jasmani dan akhlak, sehingga mengakibatkan timbulnya intelektualisme.

6.5 *Periode Demokrasi Terpimpin*

Dalam masa Demokrasi Terpimpin, pendidikan dan kebudayaan menjadi alat revolusi mental, yaitu untuk melaksanakan revolusi seperti yang digariskan dalam Manipol.

Berbagai usaha memanipolkan pendidikan dan kebudayaan dilaksanakan melalui jalur sekolah, pendidikan masyarakat, kebudayaan dan kesenian, guru dan dosen, dan semua aparatur pendidikan dan kebudayaan.

Pendidikan masa liberal dinyatakan telah merusak mental para pemuda. Mereka menjadi kebarat-baratan, timbul rasa individualisme dan priyayiisme. Untuk memperbaiki keadaan itu maka dicetuskan Sistem Pendidikan Panca Wardhana. Dalam pelaksanaannya dikeluarkan instruksi-instruksi antara-lain: Sapta Usaha Tama atau Hari Krida.

Semua usaha ini akhirnya gagal setelah peristiwa G 30 S/ PKI dan lahirnya Orde Baru.

6.6 *Periode Orde Baru sampai dengan Akhir Pelita III*

Orde Baru merupakan tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang diletakkan kembali pada kemurnian

Orde Baru merupakan tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang diletakkan kembali pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan Orde Baru ada-

lah menyusun kembali kekuatan bangsa dan negara serta menentukan cara-cara yang tepat untuk menumbuhkan stabilitas dalam jangka panjang. Dengan demikian, pembangunan bangsa dan negara di segala bidang dapat dipercepat, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Oleh karena itu, Orde Baru disebut juga Orde Pembangunan.

Pendidikan sebagai salah satu unsur sosial budaya ditata sesuai dengan strategi dasar Era Pembangunan 25 tahun. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap melalui Rencana Pembangunan Lima Tahunan (Repelita). Setiap Repelita menggariskan pemikiran dan kebijaksanaan tentang tujuan, dasar, dan isi pendidikan nasional; begitu pula tujuan dasar dan isi kebudayaan nasional.

Pembinaan dan pengembangan pendidikan nasional serta kebudayaan nasional berorientasi pada tujuan pembangunan nasional. Manusia Indonesia yang diinginkan untuk pembangunan nasional dirumuskan dalam setiap ketetapan MPR. Sejak lahirnya Orde Baru sampai sekarang profil manusia pembangunan Indonesia yang dirumuskan dapat dilihat pada ketetapan-ketetapan sebagai berikut:

- 1) Dalam Tap MPRS No. XXVII tahun 1966, profil manusia Indonesia yang dikehendaki ialah manusia Pancasilais sejati yang memiliki mental, moral, budi pekerti yang luhur dan kuat keyakinan agamanya, tinggi kecerdasan dan keterampilannya, serta kuat jasmaninya.
- 2) Dalam Tap MPR No. IV/MPR/1973, profil yang diinginkan adalah manusia pembangunan yang berpancasila, sehat jasmani, dan rohaninya, yang memiliki pengetahuan dan keterampilan, dapat mengembangkan kreativitas sikap demokrasi dan penuh tanggung jawab, tenggang rasa, budi pekerti luhur, mencintai bangsa dan sesama manusia.
- 3) Dalam Tap MPR No. IV/MPR/1978, sesuai dengan tujuan pendidikan yang dirumuskan maka profil manusia yang dikehendaki adalah manusia yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, terampil, berbudi pekerti yang tinggi, berkepribadian kuat, serta memiliki semangat ke-

bangsaan yang tebal untuk menumbuhkan manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

- 4) Dalam Tap MPR tahun 1983 tentang perumusan tujuan pendidikan nasional sama dengan perumusan tahun 1978 dan ditambah dengan kata-kata mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Penambahan inilah yang melahirkan mata pelajaran PSPB sebagai bidang studi baru yang berdiri sendiri dan berlaku pada tahun 1984 (kurikulum 1984).

Perubahan-perubahan yang terjadi pada tujuan pendidikan untuk mencapai profil manusia yang diinginkan pada setiap periode membawa akibat pada perubahan sistem pendidikan, khususnya bidang kurikulum, misalnya, Kurikulum 1968, 1975, dan terakhir 1984. Adanya perubahan dalam kurikulum yang sering terjadi ini menunjukkan belum mantapnya suatu sistem pendidikan nasional dalam rangka menunjang pembangunan bangsa. Namun, usaha-usaha ke arah pemantapan itu terus-menerus digalakkan.

Salah satu contoh yang dapat dikemukakan adalah belum ditetapkannya satu undang-undang pendidikan nasional. Undang-undang tentang pendidikan yang sampai sekarang masih berlaku adalah Undang-undang No. 4 tahun 1950 jo. Undang-undang No. 12 tahun 1954 tentang dasar-dasar pendidikan di sekolah, dan Undang-undang No. 22 tahun 1961 tentang pendidikan tinggi.

Dalam pelaksanaannya diatur oleh Keputusan Presiden No. 34 tahun 1972 tentang pembinaan seluruh pendidikan dan latihan, yang disusul pula dengan Instruksi Presiden No. 15 tahun 1974 tentang pedoman pelaksanaan Keppres No. 34 tahun 1972. Untuk sekolah-sekolah tujuannya diuraikan dalam Surat Keputusan Menteri P dan K tentang pembakuan kurikulum No. 008c/U/1975, No. 008d/U/1975, No. 008e/U/1975, No. 0318/U/1975, No. 0185/U/1976, No. 0320/U/1975, yang berturut-turut berlaku untuk SD, SMP, SMA, SMEA, SPG dan STM.

Pada akhir Pelita III telah diadakan serangkaian evaluasi oleh pihak BP3K terhadap pelaksanaan masing-masing kurikulum tersebut. Atas dasar hasil evaluasi inilah diadakan lagi pembaharuan terhadap kurikulum dengan nama Kurikulum 1984 dalam masa Kabinet Pembangunan IV. Pada saat penelitian ini dilakukan pemantapan terhadap Kurikulum 1984 ini sedang dilakukan oleh Pusat Kurikulum dan Sarana Akademik BP3K bagi berbagai jenis sekolah.

Untuk pendidikan tinggi, dasar dan arah pembinaan serta pengembangannya diuraikan dalam kebijaksanaan dasar pengembangan pendidikan tinggi berdasarkan Surat Keputusan Menteri P dan K No. 0140/U/1975. Untuk melaksanakan kebijaksanaan itu keluarlah SK Menteri P dan K No. 0124/U/1979 yang diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri No. 0211/U/1982 tentang program pendidikan tinggi dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Berbagai usaha yang dilaksanakan dalam pembaharuan pendidikan pada periode ini antara lain pendirian sekolah-sekolah pembangunan, pendirian SD Inpres, perbaikan sarana baik berupa gedung maupun alat pendidikan lainnya. Usaha ini meliputi baik sekolah negeri maupun sekolah swasta dari tingkat sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Untuk meratakan pendidikan bagi seluruh warga negara telah diberikan pembebasan pembayaran SPP bagi yang orang tuanya tidak mampu. Begitu pula beasiswa telah diberikan kepada siswa-siswa dan mahasiswa yang memiliki prestasi yang tinggi. Berdasarkan asas pendidikan sepanjang hayat (*long life education*) pendidikan masyarakat telah diperluas dengan berbagai-bagai usaha, baik untuk warga negara yang buta aksara dan angka, buta pengetahuan dasar, maupun untuk pemuda-pemuda putus sekolah.

Dalam pembinaan dan pengembangan generasi muda, berbagai kebijaksanaan telah diambil dan berbagai usaha telah dilaksanakan, baik dalam segi pengelolaan organisasi pemuda maupun dalam pembinaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menunjang pembangunan.

Pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional diarahkan pada nilai-nilai yang mencerminkan kepribadian bangsa

dan meningkatkan nilai-nilai yang luhur. Kebudayaan nasional harus bersifat dinamis dan sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan pembangunan bangsa. Oleh sebab itu, perlu dicegah nilai-nilai sosial budaya yang bersifat feodal dan kedaerahan yang sempit, serta perlu dikembangkan kemampuan masyarakat untuk menyaring dan menyerap nilai-nilai dari luar yang sifatnya positif, terutama penerimaan ilmu dan teknologi dalam rangka modernisasi bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Yasin DR, *Pembaharuan Kurikulum Sekolah Dasar di Indonesia*, Fakultas Pasca Sarjana IKIP – Jakarta, 1982
- Almanak Teis, *Antara*, Jakarta, 1976
- Aserani Drs, *Mohamad Syafei, Perintis Pembaharuan Pendidikan*, Mutiara Jakarta, 1983
- Abu Hanifah MD. *Renungan Perjuangan Bangsa Dulu dan Sekarang*. Jakarta Yayasan Idayu, 1977
- Baharuddin M, *Putus Sekolah, Masalah Penanggulangan*. Jakarta, Yayasan Kesejahteraan Keluarga Pemuda '66", 1982
- BP3 PPSP IKIP Jakarta, *Mengenal Sistem Pendidikan di Indonesia Jilid I dan II*, 1973
- BP3K Dep. P dan K, *Laporan Tahap I Hasil Evaluasi Kurikulum TK, SD, SMP, SMA, SMEA, SPG, STM*, 1983
- Chalid Rasjidi bersama Tim, *Seperempat Abad Dep. P dan K*. Jakarta, Dep. P dan K, 1970
- D.A. Tisna Amidjaya, *Pola Pembaharuan Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan di Indonesia*. Dirjen Pendidikan Tinggi Dep. P dan K, 1980
- D.A. Tisna Amidjaya, *Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang*. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Dep. P dan K, 1980

- Dep. P dan K, *Duapuluh Tahun Indonesia merdeka*. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta, 1965
- Dep. P dan K, *Himpunan Hasil Persidangan Minggu Pertama Konferensi Kerja Nasional Tahun 1971 di Jakarta*, 1971
- Dep. P dan K, *Pendidikan di Indonesia dari zaman ke zaman*, 1979
- Dep. P dan K, *Himpunan Beberapa Kebijakan Pemerintah Tentang Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK)*, 1979
- Dep. P dan K, *Manusia Pembangunan Dan Modernisasi, Pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pembukaan Rapat Rektor Dalam Rangka Konker Dep. P dan K 28 Maret 1972*, 1972
- Dep. P dan K, *Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Pertemuan Dengan Pers di Tugu Bogor 22 Mei 1972*, 1972
- Dep. P dan K, *Kumpulan Undang-Undang Di Bidang Pendidikan*. Diperbanyak oleh BP3K, 1975
- Dep. P dan K, *Buku I Ketentuan-Ketentuan Pokok Kurikulum SMA tahun 1975*. PN Balai Pustaka, 1979
- Dep. P dan K, *Buku I Ketentuan-Ketentuan Pokok Kurikulum SD tahun 1975*, 1976
- Dep. P dan K, *Buku I Ketentuan-Ketentuan Pokok Kurikulum TK 1976*, 1981
- Dep. P dan K, *Buku II A Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan Materi Dasar Pendidikan Program Akta Mengajar V*, 1982
- Dep. P dan K, *Penjelasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Muda Urusan Pemuda Tentang Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan serta Pembinaan Generasi Muda Dalam Rapat Kerja Perkenalan dengan Komisi IX DPR. R.I. 30 Mei 1978*, 1978
- Dep. P dan K, *Petunjuk Pelaksanaan Sistem Kredit Untuk Perguruan Tinggi (3 buku)*, 1983
- Dep. P dan K, *Laporan Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional*, 1980
- Dep. P dan K, *Resume Garis Besar Repelita II Departemen P dan K*, 1972
- Dep. P dan K, *UUD 1945, P4 dan GBHN 1983*, 1984

- Dep. P dan K, *Himpunan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Organisasi dan Instansi Vertikal Di Lingkungan Departemen P dan K*, 1981
- Dep. P dan K, *Pedoman Tertib Administrasi Sekolah Dasar (Buku I—III)*, 1983
- Dep. P dan K, *Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Pembangunan*, 1977
- Dep. P dan K, *Memo Program Koordinatif Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi*, 1978
- Dep. P dan K, *Paket A. Alat Program Kejar Untuk Meratakan Pendidikan*, 1978
- Dep. P dan K, *Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan Dan Pembinaan Kelembagaan Buku II Modul. Program Akta Mengajar V—B Komponen Dasar Kependidikan*, 1982
- Dep. P dan K, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 1980, Tentang Pokok-Pokok Organisasi Universitas/Institut Negeri*, 1980
- Dep. P dan K, *Pokok Pikiran Politik Pendidikan Indonesia*, 1967
- Dep. P dan K, *Satu Tahun Kabinet Ampera Masalah Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, 1967
- Djawatan Pendidikan Umum, *Kementerian Pendidikan Pengajaran Dan Kebudayaan, Pikiran-pikiran dalam Pembahasan Pendidikan di Sekolah*, 1958
- Hankam, *Strategi Dasar Era Pembangunan 25 tahun*, Penerbit CV. Sumadajaja Bandung, 1973
- Hardjono Notodihardjo, *Sistem Perencanaan Penyusunan Program dan Penganggaran di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi BP3K Dep. P dan K*, 1980
- Kompas, 16 Agustus 1985,
- LIPI/LKN, *Bahder Djohan Pengabdian Kemanusiaan*. Jakarta, PT Gunung Agung, 1980
- M.D. Mansur Drs (et.al), *Sejarah Minangkabau Bhratara*, Jakarta, 1970
- M. Said Prof. DR, *Pendidikan Abad Kedua Puluh Dengan Latar Belakang Kebudayaan*, Mutiara Jakarta, 1981

- M. Said Drs. D. Mansur Drs, *Mendidik Dari Zaman Ke Zaman*, Dian Rakyat Jakarta, 1963
- Mardanas Safwan Drs, Sutrisno Kutoyo (editor), *Sejarah Pendidikan Daerah Sumatera Barat*, Kanwil Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Sumatera Barat, Padang, 1983
- Mahmud Yunnus Prof. H, *Sejarah Pemerintahan Islam di Indonesia*, Mutiara Jakarta, 1979
- Moh. Touchid Bersama Tim, *Karya Ki Hadjar Dewantara*, Yogyakarta Majelis Luhur Taman Siswa, 1961
- Muhamad Yamin Mr, *Usaha-Usaha Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan*. Jakarta, Departemen P dan K, 1954
- Makaminan Makagiansar, *Pelaksanaan Kebijakan Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi*, 1980
- Makaminan Makagiansar, *Memorandum Akhir Jabatan*, Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen P dan K, 1980
- Nugroho Notosusanto (et.al), *Sejarah Nasional Indonesia VI, Jaman Jepang dan Jaman Republik Indonesia*, Jakarta, Dep. P dan K, 1975
- Nugroho Notosusanto Prof. DR (editor), *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Dep. P dan K Jakarta, 1982
- Nugroho Notosusanto Prof. DR (editor), *Menegaskan Wawasan Atmamater*. Penerbit Universitas Indonesia, 1985
- Pipitseputra, *Beberapa Aspek Dari Sejarah Indonesia, Aliran Nasionalis-Islam-Katolik Sampai Akhir Zaman Perbedaan Paham 1973*, Ende Flores: Nusa Indah, 1973
- Perkembangan Seni Lukis di Indonesia, *Majalah Kebudayaan Indonesia Tahun I*, 1949
- Pusara* (bulletin) 1984
- Republik Indonesia, Repelita I Bab X, *Pendidikan dan Tenaga Kerja*
- Republik Indonesia, Repelita II Buku III Bab 21, *Pendidikan dan Generasi Muda*
- Republik Indonesia, Repelita III Buku III Bab 20, *Pendidikan dan Generasi Muda*
- Soepardjo (et.al), *Manusia Dan Masyarakat Baru Indonesia (Civics)*. Dinas Penerbitan Balai Pustaka, 1962
- Syarief Thayeb, *Kebijaksanaan Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi*, 1980

- Soeharto, *Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Di Depan Sidang Perwakilan Rakyat 16 Agustus 1983, 1978, 1984*
- Sartono Bersama Tim, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Jakarta Dep. P dan K, 1976
- Setijadi, *Cita-Cita Pendidikan, Aspirasi Masyarakat dan Tuntutan Kerja Bab V Konsep Akhir PPNP BPP Dep. P dan K*
- Soedijarto, *Kurikulum 1975, Latar Belakang, Proses Pengembangan, Ciri-Ciri dan Implikasi Pelaksanaannya*. BP3K Dep. P dan K
- Trisno Sumarjo, *Kedudukan Seni Rupa Kita*, Almanak Seni, 1957
- Tim Penatar Pegawai R.I, *Undang-Undang Dasar, Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila, Garis-Garis Besar Haulan Negara*, Jakarta, 1980
- Waskito Tjiptosasmito (et. al), *Perjuangan Menegakkan Pancasila Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan (Peristiwa Di Jalan Cilacap 4 Jakarta antara tahun 1964–1966)*. Jakarta: Tanpa Penerbit, 1983
- Yusmar Basri Drs (editor), *Sejarah Nasional Indonesia V*, Dep. P dan K, 1982

Lampiran 1 :

UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1950 DARI REPUBLIK INDONESIA TENTANG DASAR-DASAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN DI SEKOLAH UNTUK SELURUH INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG : Bahwa perlu ditetapkan dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah di dalam Negeri Republik Indonesia, agar pendidikan dan pengajaran itu dapat diselenggarakan sesuai dengan cita-cita nasional bangsa Indonesia.

MENINGAT : Akan pasal 20, 31, pasal II dan IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1954 Nomor X.

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan Peraturan sebagai berikut

**UNDANG-UNDANG TENTANG DASAR-DASAR
PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN DI SEKOLAH**

**BAB I
ATURAN UMUM
Pasal - 1**

1. Undang-Undang ini berlaku untuk pendidikan dan pengajaran di sekolah.
2. Yang dimaksud dengan pendidikan dan pengajaran di sekolah ialah pendidikan dan pengajaran yang diberikan

bersama-sama kepada murid-murid yang berjumlah sepuluh orang atau lebih.

Pasal - 2

1. Undang-Undang ini tidak berlaku untuk pendidikan dan pengajaran di sekolah agama dan pendidikan masyarakat.
2. Pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah agama dan pendidikan masyarakat masing-masing ditetapkan dalam Undang-Undang lain.

BAB II TENTANG TUJUAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Pasal - 3

Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air.

BAB III TENTANG DASAR-DASAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Pasal - 4

Pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang termaktub dalam "Pancasila", Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan atas Kebudayaan Kebangsaan Indonesia.

BAB IV TENTANG BAHASA

Pasal - 5

1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan adalah bahasa pengantar di sekolah di seluruh Republik Indonesia.
2. Di Taman Kanak-Kanak dan tiga kelas yang terendah di sekolah rendah bahasa daerah boleh dipergunakan sebagai bahasa pengantar.

BAB V
TENTANG JENIS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN DAN
MAKSUDNYA

Pasal - 6

1. Menurut jenisnya, maka pendidikan dan pengajaran dibagi atas:
 - a. pendidikan dan pengajaran taman kanak-kanak.
 - b. pendidikan dan pengajaran rendah.
 - c. pendidikan dan pengajaran menengah.
 - d. pendidikan dan pengajaran tinggi.
2. Pendidikan dan pengajaran luar biasa diberikan dengan khusus untuk mereka yang membutuhkan.

Pasal - 7

1. Pendidikan dan pengajaran taman kanak-kanak bermaksud menuntun tumbuhnya rokhani dan jasmani kanak-kanak sebelum ia masuk sekolah rendah.
2. Pendidikan dan pengajaran rendah bermaksud menuntut tumbuhnya rokhani dan jasmani kanak-kanak, memberikan kesempatan kepadanya guna mengembangkan bakat dan kesukaannya masing-masing, dan memberikan dasar-dasar pengetahuannya, kecakapannya dan ketangkasan, baik lahir maupun bathin.
3. Pendidikan dan pengajaran menengah (umum dan vak) bermaksud melanjutkan dan meluaskan pendidikan dan pengajaran yang diberikan di sekolah rendah untuk mengembangkan cita-cita hidup serta membimbing kesang-gupan murid sebagai anggota masyarakat, mendidik tenaga-tenaga ahli dalam pelbagai lapangan khusus sesuai dengan bakat masing-masing dan kebutuhan masyarakat dan/atau mempersiapkannya bagi pendidikan dan pengajaran tinggi.
4. Pendidikan dan pengajaran tinggi bermaksud memberi kesempatan kepada pelajar untuk menjadi orang yang dapat memberi pimpinan di dalam masyarakat dan yang

dapat memelihara kemajuan ilmu dan kemajuan hidup kemasyarakatan.

5. Pendidikan dan pengajaran luar biasa bermaksud memberi pendidikan dan pengajaran kepada orang-orang yang dalam keadaan kekurangan, baik jasmani maupun rohani, supaya mereka dapat memiliki kehidupan lahir bathin yang layak.

Pasal - 8

Peraturan khusus untuk tiap jenis pendidikan dan pengajaran ditetapkan dalam Undang-Undang.

BAB VI TENTANG PENDIDIKAN JASMANI

Pasal - 9

Pendidikan jasmani yang menuju kepada keselarasan antara tumbuhnya badan dan perkembangan jiwa dan merupakan suatu usaha untuk membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sehat dan kuat lahir bathin, diberikan pada segala jenis sekolah.

BAB VII TENTANG KEWAJIBAN BELAJAR

Pasal - 10

1. Semua anak-anak yang sudah berumur 6 tahun berhak, dan yang sudah berumur 8 tahun diwajibkan belajar di sekolah, sedikitnya 6 tahun lamanya.
2. Belajar di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar.
3. Kewajiban belajar itu diatur dalam Undang-Undang yang tersendiri.

BAB VIII
TENTANG MENDIRIKAN DAN MENYELENGGARAKAN
SEKOLAH-SEKOLAH

Pasal - 11

1. Sekolah yang didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Daerah, disebut sekolah Negeri.
2. Sekolah yang didirikan dan diselenggarakan oleh orang-orang atau badan-badan partikelir disebut sekolah partikelir.

Pasal - 12

1. Sekolah-sekolah negeri selain kursus-kursus dan sekolah-sekolah pulisi didirikan dan ditutup oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, atau Pemerintah Daerah, jika sekolah-sekolah itu didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
2. Untuk mendirikan suatu sekolah Negeri harus ada sekurang-kurangnya 30 orang murid.
3. Dalam keadaan istimewa Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dapat mengadakan peraturan yang menyimpang dari ayat 2.

BAB IX
TENTANG SEKOLAH PARTIKELIR

Pasal - 13

1. Atas dasar kebebasan tiap-tiap warga negara menganut agama atau keyakinan hidup, maka kesempatan leluasa diberikan untuk mendirikan dan menyelenggarakan sekolah-sekolah partikelir.
2. Peraturan-peraturan yang khusus tentang sekolah-sekolah partikelir ditetapkan dalam Undang-undang.

Pasal - 14

1. Sekolah-sekolah partikelir yang memenuhi syarat, dapat menerima subsidi dari Pemerintah untuk pembiayaan.
2. Syarat-syarat tersebut dalam ayat 1 dan peraturan pemberian subsidi ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

**BAB X
TENTANG GURU-GURU**

Pasal - 15

1. Syarat utama untuk menjadi guru, selain ijazah dan syarat-syarat yang mengenai kesehatan jasmani dan rokhani, ialah sifat-sifat yang perlu untuk dapat memberikan pendidikan dan pengajaran seperti yang dimaksud dalam pasal 4, dan pasal 5 Undang-undang ini.

Pasal - 16

Di dalam sekolah guru-guru harus menghormati tiap-tiap aliran agama atau keyakinan hidup.

**BAB XI
TENTANG MURID-MURID**

Pasal - 17

Tiap-tiap warganegara Republik Indonesia mempunyai hak yang sama untuk diterima menjadi murid suatu sekolah, jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk pendidikan dan pengajaran pada sekolah itu.

Pasal - 18

Peraturan-peraturan yang memuat syarat-syarat tentang penerimaan, penolakan dan pengeluaran murid-murid ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Pasal - 19

1. Murid-murid yang ternyata pandai, tetapi tidak mampu membayar biaya sekolah, dapat menerima sokongan dari

- pemerintah, menurut aturan-aturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.
2. Untuk beberapa macam sekolah dapat diadakan peraturan pemberian sokongan kepada murid-murid, dengan perjanjian bahwa murid-murid itu sesudah tamat belajar akan bekerja dalam jawatan pemerintah untuk waktu yang ditetapkan.

BAB XII
TENTANG PENGAJARAN AGAMA DI SEKOLAH-SEKOLAH
NEGERI
Pasal - 20

1. Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama; orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut.
2. Cara menyelenggarakan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, bersama-sama dengan Menteri Agama.

BAB XIII
TENTANG PENDIDIKAN CAMPURAN DAN
PENDIDIKAN TERPISAH
Pasal - 21

1. Sekolah-sekolah negeri menerima murid-murid laki-laki dan perempuan kecuali sekolah-sekolah kepandaian (keahlian) yang khusus untuk murid-murid laki-laki atau murid-murid perempuan.
2. Kalau geadaan menghendakinya diadakan pendidikan dan pengajaran yang terpisah.

BAB XIV
TENTANG UANG SEKOLAH DAN
UANG ALAT-ALAT PELAJARAN
Pasal - 22

Di sekolah-sekolah rendah dan sekolah-sekolah luar biasa

tidak dipungut uang sekolah maupun uang alat-alat pelajaran.

Pasal - 23

Di semua sekolah negeri, kecuali sekolah rendah dan sekolah luar biasa, murid-murid membayar uang sekolah yang ditetapkan menurut kekuatan orang tuanya.

Pasal - 24

Untuk pendidikan pada beberapa sekolah menengah dan sekolah kepandaian (keahlian) murid-murid membayar sejumlah uang pengganti pemakaian alat-alat pelajaran.

Pasal - 25

Murid-murid yang ternyata pandai, tetapi tidak mampu membayar uang sekolah dan uang alat-alat pelajaran, dapat dibebaskan dari pembayaran itu. Aturan tentang pembebasan ini ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

BAB XV TENTANG LIBURAN SEKOLAH DAN HARI SEKOLAH

Pasal - 26

1. Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan menetapkan untuk tiap jenis sekolah negeri hari-hari liburan sekolah dengan mengingat kepentingan pendidika, faktor musim, kepentingan agama dan hari-hari raya kebangsaan.
2. Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan menetapkan untuk tiap jenis sekolah negeri jumlah sekurang-kurangnya dari pada sekolah satu tahun.
3. Sekolah-sekolah partikelir dapat mengatur hari liburnya dengan mengingat yang termaktub dalam ayat 1 dan 2 pasal ini.

BAB XVI
TENTANG PENGAWASAN DAN PEMELIHARAAN
PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Pasal - 27

1. Pengawasan pendidikan dan pengajaran berarti memberi pimpinan kepada para guru untuk mencapai kesempurnaan dalam pekerjaannya.
2. Untuk tiap-tiap jenis sekolah beberapa jenis sekolah yang menurut isi pendidikannya termasuk dalam satu golongan dibentuk badan pemeriksa sekolah, yang disertai pengawasan pendidikan dan pengajaran sebagai yang tersebut dalam ayat 1.
3. Susunan dan kewajiban badan pemeriksa sekolah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Pasal - 28

1. Hubungan antara sekolah dan orang-orang tua murid dipelihara sebaik-baiknya.
2. Untuk mewujudkan hubungan itu dibentuk Panitia Pembantu Pemeliharaan Sekolah, terdiri atas beberapa orang tua murid-murid.
3. Susunan dan kewajiban Panitia Pembantu Pemeliharaan Sekolah, ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

BAB XVII
ATURAN PENUTUP

Pasal - 29

Peraturan-peraturan tentang pendidikan dan pengajaran yang ada, yang bertentangan dengan isi Undang-undang ini, batal sejak Undang-undang ini mulai berlaku.

Pasal - 30

Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Agar Undang-undang ini diketahui umum, maka diperintahkan supaya diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 2 April 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

(ASSAAT)

Menteri Pendidikan, Pengajaran
dan Kebudayaan,

ttd.

(S. Mangoensarkoro)

Diundangkan pada tanggal 5 April 1950
Menteri Kehakiman,

ttd.

(A.G. Pringgodigdo)

Catatan penyusun: Mr. Assaat pada waktu itu bertindak sebagai acting Presiden.

Demikianlah bunyi UU Pendidikan negeri kita yang pertama-tama.

Sesuai dengan status negara kita pada waktu itu, maka UU ini hanya berlaku di wilayah Republik saja.

(Catatan: pada tahun 1950 wilayah Republik Indonesia belum-lah seperti sekarang ini, dari Banda Aceh sampai Jayapura).

Lampiran 2 :**INSTRUKSI PENYELENGGARAAN TATA-TERTIB
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN P.P. DAN K.**

Untuk sekolah-sekolah :

Instruksi ini berlaku bagi sekolah-sekolah kursus negeri dan sekolah kursus swasta sokongan.

A. Hal-hal Umum:

1. Semua sekolah harus dimulai dan diakhiri pada waktu yang telah ditentukan.
2. Masuk dan keluar kelas harus diatur sebaik-baiknya.
3. Kepala Sekolah dibantu oleh para guru bertanggung jawab atas kebersihan sekolah. Harus diusahakan agar tiap-tiap murid ikut serta memikul tanggung jawab itu.
4. Pada hari kerja pertama tiap pekan, sekolah mengadakan upacara menaikkan bendera kebangsaan, berupa:
 - a. Menaikkan bendera, memberi hormat kepada bendera.
 - b. Mengucapkan Sumpah Pemuda.
 - c. Pidato Kepala Sekolah/Guru 1.k. 5 @ 10 menit lamanya.
5. Hari terakhir tiap pekan setelah jam pelajaran diadakan upacara penurunan bendera.
6. Hari-hari Nasional harus diperingati dengan upacara:
 - a. Menaikkan bendera,
 - b. Memberi hormat kepada bendera,
 - c. Mengheningkan cipta,
 - d. Melagukan Indonesia Raya,
 - e. Pidato Kepala Sekolah/Guru,
 - f. Menyanyikan 1 @ 2 lagu yang sesuai.

Hari-hari Nasional itu ialah:

- a. Hari Proklamasi,
- b. Hari Pahlawan,

- c. Hari Kartini,
- d. Hari Kebangkitan Nasional,
- e. Hari Kemenangan Buruh,
- f. dan hari-hari lain yang ditentukan kemudian.

B. Hal-hal yang mengenai murid sekolah ialah:

1. Selambat-lambatnya 15 (limabelas) menit sebelum pelajaran dimulai murid sudah harus berada di sekolah.
2. Terhadap murid yang datang terlambat diambil tindakan, kecuali ada alasan sah tentang kelambatan itu.

C. Hal-hal yang mengenai Kepala Sekolah/Guru-guru:

1. Kepala Sekolah bertanggung jawab atas ketertiban keadaan sekolah. Untuk itu semua guru wajib memberi bantuan.
2. Selambat-lambatnya 15 (limabelas) menit sebelum pelajaran dimulai Kepala Sekolah/Guru-guru sudah harus berada di sekolah, kecuali guru jaga yang harus datang 30 (tigapuluh) menit sebelumnya.
3. Selama waktu pelajaran, dari jam pelajaran pertama hingga jam pelajaran yang terakhir, Kepala Sekolah dan Guru-guru wajib bersedia di sekolah. Apabila Kepala Sekolah perlu meninggalkan sekolah, ia harus memberitahukannya kepada Wakilnya. Guru hanya boleh meninggalkan sekolah dengan ijin Kepala Sekolah.
4. Untuk memegang jabatan lain di samping jabatan Kepala Sekolah/Guru yang resmi, harus diminta persetujuan Inspeksi, jika hal itu menyebabkan Kepala Sekolah/Guru tidak dapat menjalankan kewajibannya sepenuhnya.
5. Adalah menjadi tugas yang pokok bagi Kepala Sekolah/Guru untuk mendidik murid menjadi manusia yang bertata-susila dalam perhubungan dan pergaulan dengan sesamanya;

6. Kepala Sekolah/Guru mengatur bagaimana murid harus menghormati Guru-gurunya, tamu yang datang dan sebagainya;
 7. Kepala Sekolah/Guru dilarang memberi pelajaran-pelajaran ekstra di luar jam pelajaran kepada murid-murid sendiri dengan mengutip upah.
- D. Sanksi atas pelanggaran:
Terhadap mereka yang melanggar tata tertib diambil tindakan sebagai berikut:
1. Bagi murid:
 - a. teguran
 - b. diberi peringatan yang keras
 - c. dilarang mengikuti pelajaran untuk waktu yang ditentukan.Tindakan-tindakan yang diambil itu harus diberitahukan kepada orang tua murid.
 2. Bagi Guru: Diambil tindakan-tindakan administratif.
- E. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1959.

Lampiran 3 :

**INSTRUKSI PENYELENGGARAAN KEGIATAN KESENIAN
DAN OLAH RAGA DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN P.P. DAN K.**

Kegiatan Kesenian (nyanyian):

1. Diwajibkan kepada semua murid sekolah/kursus/universitas untuk mempelajari dan dapat menyanyikan Lagu-lagu Nasional selain Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, yaitu:

1. Bagimu Negeri	—	Ciptaan Kusbini
2. Maju Tak Gentar	—	Ciptaan C. Simandjuntak
3. Satu Nusa Satu Bangsa	—	Ciptaan L. Manik
4. Dari Barat Sampai Ke Timur	—	Ciptaan R. Surarjo
5. Bebaskan Irian	—	Ciptaan G.W.R. Sinsu, teks oleh Derachman
6. Sang Merah Putih	—	Ciptaan Ibu Sud
2. Cara menyanyikan harus menurut irama dan jiwa yang telah ditentukan oleh pencipta.
3. Pada akhir Desember 1959, lagu kebangsaan Indonesia Raya dan ke-6 lagu-lagu nasional tersebut harus sudah diketahui dan dapat dinyanyikan oleh semua murid sekolah/kursus/universitas.
4. Pelaksanaan serta berhasilnya yang tercantum dalam No. 3 dipercayakan sepenuhnya kepada tiap Kepala Sekolah/kursus dan pimpinan universitas.
5. Atas pelanggaran atau kelalaian terhadap kewajiban ini, baik terhadap murid/pelajar/mahasiswa ataupun terhadap guru dan pejabat yang bersangkutan dikenakan sanksi seperlunya.

Kegiatan Olah Raga Masyarakat :

1. Kepada Jawatan Pendidikan Masyarakat diperintahkan untuk mengusahakan adanya:

- a. perlombaan sepak bola
 - b. perlombaan volley ball.
2. Perlombaan antar-desa diadakan oleh regu/kesebelasan desa untuk memilih juara Kecamatan dan kemudian juara Daerah Swatntra tingkat II.
 3. Perlombaan antara pemenang daerah Swatantra tingkat II untuk menentukan juara Daerah Swatantra tingkat I.
 4. Perlombaan-perlombaan dimulai segera dan hadiah kejuaraan akan diberikan pada tanggal 20 Mei 1960.
 5. Hadiah-hadiah berupa:
 - Piala bergilir Kepala Jawatan Pendidikan Masyarakat untuk juara Daerah Swatantra tingkat II.
 - Piala bergilir Menteri Muda P.P. dan K untuk juara Daerah Swatantra tingkat I.

Lampiran 4 :**INSTRUKSI PENYELENGGARAAN USAHA HALAMAN
DI LINGKUNGAN DEP. P.D. DAN K.****A. Untuk sekolah-sekolah**

1. Yang dimaksudkan dengan Usaha Halaman (U.H.) ialah segala usaha yang dapat dilakukan di halaman rumah dan/atau di sekolah, yang hasilnya dapat membantu "sandang-pangan";
2. Pada pokoknya U.H. itu ditujukan kepada penanaman bahan makanan (singkong, jagung, ubi, kacang dan sebagainya), sayur-sayuran (bayam, tomat, sawi, terung, lombok, kangkung dan sebagainya) dan buah-buahan (pepaya, pisang, nenas, dan sebagainya). Dalam pada itu di tiap-tiap halaman sekolah dan di tiap-tiap halaman rumah yang memungkinkan, paling sedikit harus ditanam sebatang pohon pepaya;
3. Jika penanaman tersebut pada pasal 2 sukar atau tak dapat dijalankan, maka dapat diusahakan peternakan (ayam, bebek, kambing, dan sebagainya), perikanan (mujair, tawes, gurami, ikan mas, dan sebagainya), atau kerajinan tangan (anyaman-anyaman, perkayuan, ukir-ukiran, dan sebagainya);
4. Jika keadaan mengijinkan, maka usaha-usaha tersebut pada pasal 2 dan 3 dapat sama-sama dilakukan;
5. Semua sekolah dan kursus tingkat dasar dan menengah, baik yang pemerintah maupun yang swasta-sokongan harus ikut serta dalam U.H. ini;
6. Kepada sekolah/kursus swasta dianjurkan untuk menggerakkan pula U.H. itu;
7. U.H. dilakukan oleh semua murid di bawah pimpinan Kepala Sekolah dan guru-gurunya di halaman sekolah atau di tanah yang disediakan untuk keperluan itu;

8. Tiap murid diwajibkan meneruskan U.H. itu di halaman rumahnya masing-masing;
9. Kepala Sekolah mengatur U.H. manakah yang terbaik bagi sekolahnya dan bagi murid-muridnya, dengan mengingat pertimbangan/bantuan para ahli (dalam pertanian, peternakan, perikanan atau perindustrian) dan masyarakat;
10. Teori dan praktek U.H. sebagian dilakukan dalam jam pelajaran dan sebagian lagi di luar jam pelajaran. Untuk ini Kepala Sekolah diberi kuasa menyesuaikan daftar pelajaran.
11. Kepala Sekolah dengan dibantu oleh guru-guru meneliti apakah murid-muridnya dengan sungguh-sungguh melakukan U.H. di halaman rumahnya masing-masing. Dalam keadaan luar biasa, Kepala Sekolah dapat membebaskan muridnya daripada U.H.
12. Terhadap murid yang tidak melakukan U.H. di rumahnya, diambil tindakan:
 - a. teguran
 - b. angka kurang dalam hal kerajinan atau
 - c. dilarang masuk sekolah untuk waktu yang tidak melebihi 7 hari.
13. Kepala Sekolah wajib memberi laporan triwulan kepada instansi atasannya tentang perkembangan U.H.
14. Semua inspeksi wajib meneliti apakah sekolah-sekolah /kursus-kursus benar-benar melakukan U.H. itu;
15. Terhadap Kepala Sekolah Negeri atau guru-gurunya yang tidak melakukan U.H. diambil tindakan:
 - a. teguran
 - b. pemindahan atau
 - c. penangguhan kenaikan gaji/pangkat.
16. Terhadap sekolah swasta-sokongan tindakan itu berupa:
 - a. teguran

- b. pencabutan sokongan atau
- c. larangan mengikuti ujian-negara bagi murid-muridnya.

B. Jawatan Pendidikan Masyarakat

I. 1. Penyusun Organisasi Kerja

1. Tiap-tiap inspeksi Jawatan Pendidikan Masyarakat Kabupaten membicarakan di dalam lingkungannya sendiri tentang "Usaha Halaman" semasak-masaknya sesuai dengan instruksi ini;
2. Kemudian diadakan pembicaraan organisatoris dan teknis dengan jawatan-jawatan lain, khususnya Jawatan Teknis setempat yang bersangkutan (Jawatan Pertanian, Jawatan Kehewanan, Jawatan Perindustrian dan lain-lain);
3. Pendapat yang diperoleh pada ayat 2 dibawa kepada Rapat Antar Jawatan tingkat Swatantra II dan ketentuan-ketentuan yang di dalam rapat Antar Jawatan tersebut disampaikan kepada Panitia-panitia Pendidikan Masyarakat Kecamatan (P.P.M.K.);
4.
 - a. P.P.M.K. mengambil inisiatif dengan membentuk Badan Pekerja terdiri atas tenaga-tenaga yang kemudian akan memimpin gerakan "Usaha Halaman" dalam Kecamatan masing-masing;
 - b. Oleh Badan Pekerja diusahakan terbentuknya Badan Penyelenggara di desa-desa yang diketuai oleh Kepala Desa;
5. Untuk penggerakan selanjutnya agar diperhatikan:
 - a. Pimpinan teknis ada pada Jawatan Teknis yang bersangkutan
 - b. Kekuatan-kekuatan masyarakat yang berupa kursus-kursus, panitia-panitia desa, kader-kader masyarakat, Ikatan-ikatan siswa

Kursus Kader Masyarakat ((K.K.M.), Kursus Kemasyarakatan Orang Dewasa (K.K.O.D.), Kursus Rumah Tangga (K.R.T.), Teruna Karya merupakan kelompok penggerak utama yang disertai oleh masyarakat.

- c. Kekuatan-kekuatan lain yang ada dalam desa, baik yang merupakan organisasi masyarakat, maupun yang mempunyai tugas dalam bidang pemerintahan lain selalu diajak serta
- d. Panitia Pendidikan Masyarakat Kecamatan mengumpulkan laporan bulanan tentang perkembangan usaha dan diteruskan kepada inspeksi Pendidikan Masyarakat Kabupaten. Pengumuman hasil yang pertama: pada perayaan Lustrum II tanggal 24 Nopember 1959
- e. Inspeksi Pendidikan Masyarakat Kabupaten dengan penilik/pengamat-pengamatnya menempatkan masalah "Usaha Halaman" pada tempat pertama untuk mendapat pembinaan dan pengawasan.

II. Yang dapat dikerjakan

Pemilihan jenis "Usaha Halaman" disesuaikan dengan tempat dan waktu:

A. Dalam lapangan pangan :

- a. Dapat ditanam bersama-sama, beregu, atau perseorangan: ubi kayu, ubi jalar, uwi, gambili, ganyong, erut, tales, jagung dan sebagainya; bayam, kangkung, sawi, tomat, terung, lombok, bawang, sleri, dan sebagainya; pepaya, pisang, jambu, jeruk, mangga, dan sebagainya; jahe, laos, kunyit, temu lawak, sere, dan sebagainya.

- b. Dapat dipelihara: mujair, tawes, ikan mas, gurami, ayam, itik, kambing, lebah dan sebagainya.
- c. Tempat yang digunakan: kebun, halaman, bidang-bidang tanah yang kosong, galengan, tepi jalan, tepi sungai
- d. Perusahaan-perusahaan kecil di rumah: pembuatan tempe, tahu, taoco, makanan awet dan sebagainya

B. Dalam lapangan sandang :

- a. Penanaman kapas, sedikitnya 2 batang di halaman rumah untuk dijadikan benang.
- b. Menghidupkan kembali pertenunan di rumah
- c. Memperbanyak pertukangan: menjahit, membuat sepatu, bengkel blek (kaleng), seng, tembaga untuk perkakas dapur dan sebagainya.

Penyaluran kelebihan hasil dilakukan melalui koperasi penjualan dan produksi.

III. Usaha-usaha untuk menggiatkan dan memberi dorongan:

- a. Untuk setiap Panitia Pendidikan Masyarakat Kecamatan oleh Jawatan Pendidikan Masyarakat disediakan sekedar tambahan uang administrasi.
- b. Atas dasar laporan dan peninjauan akan dipilih: "Desa Juara Usaha Halaman" se-Daerah Swatantra Tingkat II dan "Kecamatan Juara Usaha Halaman" se-Daerah Swatantra Tingkat I. Untuk ini oleh Departemen P.D. dan K. disediakan hadiah-hadiah Pemberian hadiah yang pertama kali dijatuhkan pada tanggal 20 Mei 1960 (Hari Kebangkitan Nasional).
- c. Kepada Panitia Lustrum Jawatan Pendidikan Masyarakat setempat di mana mungkin diharap

memberikan penghargaan pula pada tanggal 24
Nopember 1959.

Semboyan penutup:

Dalam Negara yang alamnya kaya raya,
Rakyatnya tak boleh hidup sengsara,
Perbendaharaan yang tersembunyi,
Menunggu tangan kita yang akan menggali

Lampiran 5 :**INSTRUKSI PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN
MENABUNG OLEH MURID SEKOLAH DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN P.D. DAN K**

1. Tiap murid diwajibkan menabung pada Bank Tabungan Pos/Kantor Pos Kantor Pos Pembantu.
2. Kewajiban menabung ini sementara berlaku untuk murid-murid S.R. dan S.I.
3. Cara menabung ini diatur oleh Departemen P.D. dan K. bersama-sama dengan Direksi Bank Tabungan Pos.
4. Kewajiban menabung akan dimulai pada saat yang akan diumumkan.
5. Kepala Sekolah bertanggung jawab atas kelancaran kewajiban menabung ini dan inspeksi bertanggung jawab terhadap pengawasannya.
6. Jumlah uang tabungan harus disesuaikan dengan kemampuan orang tua/wali murid dan tidak boleh merupakan beban yang berat.
7. Atas pelanggaran terhadap kewajiban menabung ini, baik terhadap murid maupun terhadap guru dan pejabat yang bersangkutan dikenakan sanksi seperlunya.

Lampiran 6 :

**INSTRUKSI PENYELENGGARAAN KOOPERASI
SEKOLAH DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN
P.D. DANK**

1. Kooperasi sekolah diwajibkan terhadap murid Sekolah Rakyat dan Sekolah Lanjutan.
2. Harus dimulai dengan uang pangkal dari anak-anak sendiri. Jumlah uang pangkal bergantung pada keadaan setempat dan keadaan sekolah.
3. Pengurus Kooperasi ialah murid-murid sekolah sendiri.
4. Kepala Sekolah dan Guru-guru menjadi penasehat dan pengawas.
5. Penyimpanan uang dilakukan oleh seorang guru yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah sendiri, atau instansi lain yang bertindak sebagai penyimpanan.
6. Barang-barang yang perlu dijual/dibeli oleh Kooperasi:
 - a. makanan (nasi, roti, kue, dan lain-lain)
 - b. alat-alat sekolah
 - c. pakaian (seragam), sepatu, sikat gigi, pasta gigi, sisir, sabun mandi, sabun cuci, dan lain-lain.
7. Barang-barang yang dijual oleh Kooperasi Sekolah harus lebih murah daripada di luar sekolah.
8. Apabila murid pindah ke sekolah/kota lain, uangnya harus dapat diminta kembali dan diterimakan kepadanya dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang mudah.
9. Dalam pimpinan dan administrasi harus ada keseragaman dan kesederhanaan tentang pembukuan uang/barang, formulir-formulir, laporan-laporan dan sebagainya.
10. Pengawasan dilakukan terus menerus.
11. Pada 1 Nopember 1959 sudah ada kooperasi di tiap-tiap sekolah.

12. Kepala Sekolah bertanggung jawab atas kelancaran usaha koperasi ini dan inspeksi bertanggung jawab atas pengawasannya. Atas pelanggaran kewajiban ini dilakukan sanksi seperlunya.
13. Kepala Jawatan yang berkepentingan ditugaskan membuat peraturan-peraturan yang diperlukan.

Lampiran 7 :

**INSTRUKSI PENYELENGGARAAN
"KELAS MASYARAKAT"
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN P.D. DAN K.**

I. Pendahuluan

Bertambah banyaknya Sekolah Rakyat dapat mempunyai akibat:

- a. yang menyulitkan
- b. yang membahagiakan
 - a. Arus yang terlampau besar untuk memasuki sekolah yang bersifat umum, tidak lain menambah pengangguran, hal mana mengganggu keseimbangan dalam masyarakat.
 - b. Untuk menghindarkan kesulitan tersebut di atas harus disediakan tempat-tempat pendidikan, yang memberi kesempatan/kecakapan/ketrampilan kepada murid menjalankan usaha-bebas (professions) yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat sekelilingnya.

Salah satu tempat pendidikan ini adalah "Kelas Masyarakat", tempat untuk mempersiapkan para lulusan Sekolah Rakyat dan pemuda-pemuda lainnya ke tujuan sebagai termaksud di atas.

II. Ketentuan-ketentuan Dasar

1. Kelas Masyarakat didirikan:
 - a. dengan tujuan mempersiapkan para lulusan Sekolah Rakyat memperoleh kecakapan/ketrampilan, sehingga dapat berdiri sendiri dan dapat berguna bagi masyarakatnya atau lingkungan hidupnya, dan pada khususnya desanya;
 - b. atas inisiatip masyarakat, sehingga usaha itu bersifat swasta (berdiri sendiri);
 - c. oleh sesuatu panitia atau sesuatu organisasi atau badan lain;

2. Bantuan:
 - a. dapat diperoleh dari instansi-instansi dalam lingkungan Departemen P.P. dan K terutama dari Jawatan Pendidikan Umum, yang berupa:
 - bantuan teknis
 - bantuan dengan tenaga pengajar (jika diperlukan)
3. Instansi yang bertanggung jawab:
 - a. Pertanggungjawaban pada dasar dan pokoknya terletak pada Inspeksi Pusat Pengajaran Rendah termasuk Urusan Kewajiban Belajar.
 - b. Pertanggungjawaban penyelenggaraannya diserahkan kepada Inspeksi Pengajaran Rendah Propinsi yang untuk itu dapat ditugaskan seorang Pengawas Sekolah Rakyat.

III. Pedoman Pelaksanaan

1. Kelas Masyarakat memberikan pelajaran dalam waktu kurang lebih 2 tahun yang pada dasarnya meliputi pelajaran:
 - a. pengetahuan umum yang disesuaikan dengan keperluan pelajarannya dan masyarakatnya misalnya: pelajaran tentang koperasi, bahasa Indonesia praktis (surat menyurat, membuat laporan rapat, dan sebagainya), pengetahuan administrasi/organisasi, berhitung dagang sederhana, pengetahuan tentang kewarganegaraan dan tak boleh dilupakan pelajaran budi pekerti dan pelajaran tentang kesehatan praktis.
 - b. yang memberikan kecakapan/ketrampilan, yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat, misalnya:
 - pertanian/peternakan/perikanan
 - pertukangan/perbengkelan
 - perindustrian kecil/kerajinan tangan
 - perkebunan
 - dan lain sebagainya

- c. Rekreasi :
- permainan rakyat
 - kesenian rakyat
 - olah raga

Catatan:

1. Pelajaran-pelajaran dalam daftar tersebut di atas diberikan dengan perbandingan sebagai berikut: a : b : c = 2 : 5 : 1
 2. Tenaga-pengajar diambil dari tenaga setempat. Tidak ditekankan kepada pemegang ijazah, melainkan pada mereka yang memiliki suatu kecakapan/ketrampilan, misalnya tukang sepatu, penganyam keranjang, pengukir kayu dan sebagainya. Untuk pengetahuan umum dapat diminta bantuan dari guru-guru Sekolah Rakyat atau orang yang cakap dan bersedia.
- IV. Diperintahkan kepada para petugas dalam lingkungan Departemen P.D. dan K., terutama dari Jawatan Pendidikan Umum dan Jawatan Pendidikan Masyarakat memberikan bantuan sekuat tenaga agar "Kelas Masyarakat" dapat didirikan dengan dimulai dengan menciptakan suasana yang bisa memberikan hidup dan berkembangnya Kelas Masyarakat itu.

Lampiran 8 :

**INSTRUKSI MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN
KEBUDAYAAN
No. 2**

Para Pelajar dan
Para Petugas
dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Setelah pada tanggal 5 Juli 1959, P.J.M. Presiden/Panglima Tertinggi mendekritkan kita kembali kepada Undang-Undang Dasar '45, maka pada tanggal 17 Agustus 1959 saja mengeluarkan Instruksi No. 1, yaitu instruksi tentang Sapta Usaha Tama sebagai penyongsongan terhadap dekrit P.J.M. Presiden/Panglima Tertinggi tersebut dalam bidang pendidikan nasional.

Sesudah amanat negara P.J.M. Presiden/Panglima Tertinggi pada tanggal 17 Agustus 1959, yang berjudul: "Penemuan kembali revolusi kita", yang kemudian terkenal sebagai "Manifesto Politik Republik Indonesia" (Manipol) dan disetujui oleh Dewan Pertimbangan Agung dan disahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara sebagai Haluan Negara, maka sebagai kelanjutan Sapta Usaha Tama, untuk memberikan dasar-dasar dalam pendidikan nasional yang sesuai dengan Haluan Negara, saja instruksikan:

1. Menegaskan Pancasila dengan Manipol sebagai pelengkap-nya, sebagai asas pendidikan nasional
2. Menetapkan Panca Wardhana sebagai sistem pendidikan yang berisikan prinsip-prinsip:
 - a. perkembangan cinta bangsa dan tanah air, moral nasional/internasional/keagamaan
 - b. perkembangan kecerdasan
 - c. perkembangan emosional-artistik atau rasa keharuan dan keindahan lahir-batin
 - d. perkembangan keprigelan atau kerajinan tangan
 - e. perkembangan jasmani

3. Menyelenggarakan "Hari Krida" atau hari untuk kegiatan-kegiatan dalam lapangan kebudayaan, kesenian, olah raga dan permainan pada tiap-tiap hari Sabtu.

Untuk melaksanakan instruksi ini Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dalam waktu singkat akan menyampaikan pengumuman-pengumuman yang bertalian dengan hal-hal tersebut.

Saya yakin, bahwa instruksi ini dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya, lebih-lebih setelah saya mengetahui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh semua jawatan dan instansi-instansi lainnya dalam lingkungan Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan.

Jakarta, 17 Agustus 1961

MENTERI
PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

PRIJONO

Lampiran 9 :

**INSTRUKSI
MENTERI PENDIDIKAN, PENGETAHUAN DAN
KEBUDAYAAN
No. 3**

- I. Dalam rangka penertiban aparatur dan usaha-usaha dalam bidang P.P. dan K. semua rencana tidak mungkin akan dapat dilaksanakan dengan sempurna apabila tidak ada bahan-bahan sebagai petunjuk guna memperoleh gambaran yang nyata dari usaha-usaha tersebut;
- II. Petunjuk-petunjuk seperti dimaksudkan pada ayat 1 di atas hanya dapat diperoleh dengan menggunakan bahan statistik. Sebab statistik sebagai pengetahuan/alat bantu bagi pimpinan mempunyai 3 fungsi penting, yaitu:
 1. memberikan bahan atau rangka petunjuk guna menentukan kebijaksanaan pimpinan, terutama dalam bidang perencanaan dan penyelidikan;
 2. memberikan petunjuk tentang pengawasan terhadap pelaksanaan dari kebijaksanaan yang telah ditentukan oleh pimpinan;
 3. memberikan petunjuk mengenai penilaian terhadap hasil-hasil pelaksanaan dari kebijaksanaan tersebut.
- III. Mengingat akan pentingnya statistik sebagai alat bantu bagi pimpinan seperti diterangkan di atas, maka dengan ini diinstruksikan:
 1. kepada semua Kepala Sekolah, instansi-instansi dan para petugas dalam lingkungan Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan untuk menyusun bahan-bahan/angka-angka statistik yang setepat-tepatnya dan teratur mengenai segala kegiatan dalam bidang dan daerah kewenangannya masing-masing;
 2. supaya pada semua instansi taraf pusat dan taraf daerah (perwakilan dan I.P.R. Kabupaten) diadakan/

- ditunjuk petugas-petugas khusus yang akan mengurus dan bertanggung-jawab mengenai masalah statistik dalam daerah lingkungan kewenangannya masing-masing;
3. supaya bahan-bahan/angka statistik sudah sampai ke Seksi Statistik Departemen P.D. Dan K., Jalan Cilacap 4, Jakarta, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum penutupan tiap-tiap tahun pelajaran, yaitu pada bulan Juni.
- IV. Bagi daerah-daerah yang oleh karena sulitnya perhubungan dan jauh letaknya pengiriman bahan-bahan/angka-angka statistik harus dikirimkan melalui pos udara.
 - V. Koordinasi pengawasan dan petunjuk-petunjuk mengenai pelaksanaan seluruh masalah statistik akan dilakukan oleh Kepala Seksi Statistik dan Dokumentasi Bagian Penerangan Departemen P.D. Dan K. atas nama Pimpinan Departemen P.D. Dan K.
 - VI. Kepada Pimpinan Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan diminta memberikan instruksi yang sejalan dengan instruksi untuk Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan.
 - VII. Demikianlah agar instruksi ini dijalankan dengan sesungguhnya.

Jakarta, 17 Agustus 1961

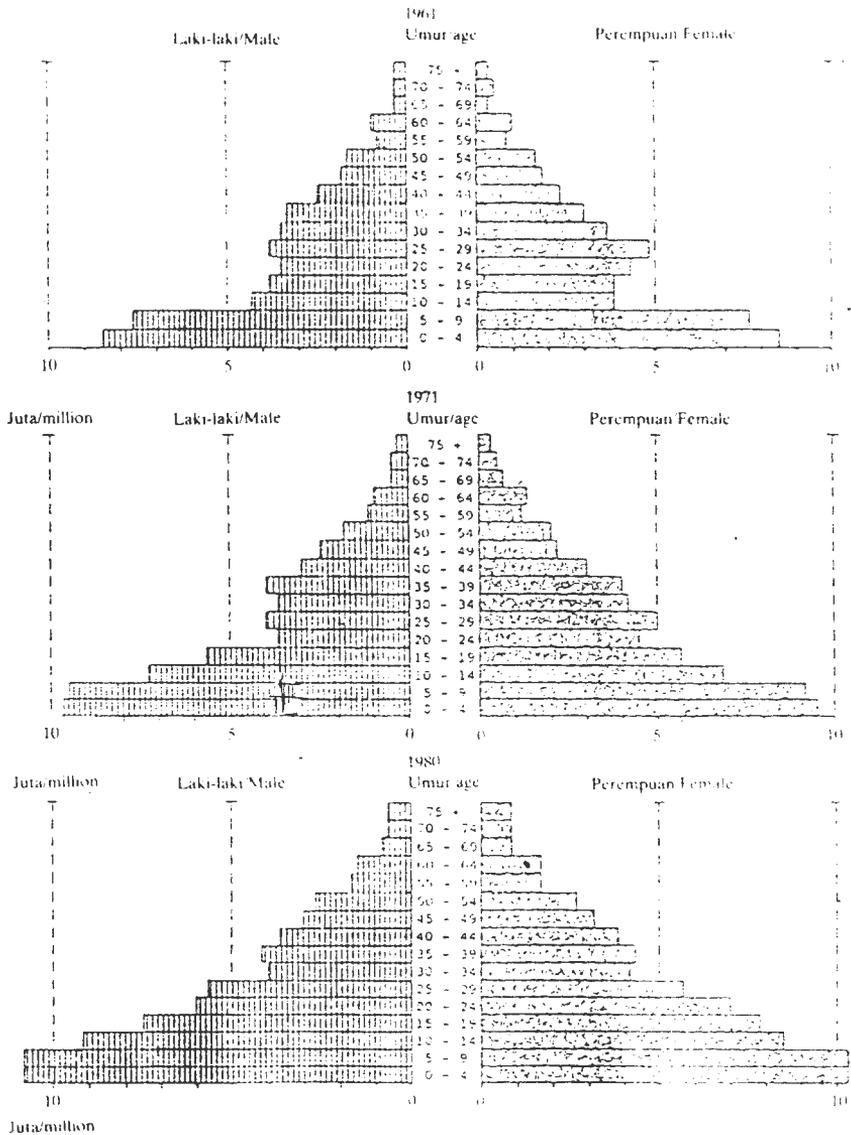
MENTERI
PENDIDIKAN, PENGETAHUAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

PRIJONO

Gambar
Figure

Piramida penduduk Indonesia, 1961, 1971 dan 1980
Population pyramids of Indonesia, 1961, 1971, and 1980



Sumber : BP3K

TABEL : PERBANDINGAN JUMLAH PENDUDUK LAKI-LAKI TERHADAP PENDUDUK PEREMPUAN (SEX RATIO) BERDASARKAN SENSUS PENDUDUK TAHUN 1961, 1971, DAN 1980
TABLE SEX RATIO BY PROVINCE, RESULT OF 1961, 1971, AND 1980 POPULATION CENSUS.

PROPINSI PROVINCE	TAHUN / YEAR		
	1961	1971	1980 ^{s)}
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Daerah Istimewa Aceh	101.89	100.21	101.43
2. Sumatera Utara	102.61	101.32	100.81
3. Sumatera Barat	93.03	93.69	95.47
4. R i a u	106.55	104.63	104.04
5. J a m b i	107.77	107.45	105.66
6. B e n g k u l u	103.52	101.99	102.70
7. L a m p u n g	103.52	102.33	106.62
8. Sumatera Selatan	103.52	99.51	101.81
S U M A T E R A	101.88	100.55	101.84
9. D.K.I. Jakarta	103.86	102.13	102.84
10. Jawa Barat	96.66	96.79	99.84
11. Jawa Tengah	95.00	95.25	96.61
12. Daerah Istimewa Yogyakarta	95.07	94.28	96.23
13. Jawa Timur	94.49	94.32	95.54
J A W A	95.68	95.74	97.51
14. B a l i	98.28	97.94	98.40
15. Nusa Tenggara Barat	97.72	97.45	98.23
16. Nusa Tenggara Timur	100.16	101.99	99.58
17. Timor Timur	104.02	104.02	104.02
NUSA TENGGARA	99.20	99.56	99.08

(1)	(2)	(3)	(4)
18. Kalimantan Barat	102.95	104.22	103.39
19. Kalimantan Tengah	102.49	101.75	106.29
20. Kalimantan Selatan	97.16	96.31	98.84
21. Kalimantan Timur	108.78	106.96	111.16
KALIMANTAN	101.52	101.58	103,71
22. Sulawesi Utara	102.72	100.57	102.20
23. Sulawesi Tengah	102.72	104.63	107.27
24. Sulawesi Selatan	95.13	94.77	94.90
25. Sulawesi Tenggara	95.13	91.31	96.95
SULAWESI	97.22	96.63	98.01
26. Maluku	104.00	103.00	104.41
27. Irian Jaya	97.89	141.43	110.04
MALUKU & IRIAN JAYA	100.96	107.01	106.93
INDONESIA	97.31	97.22	98.88

Sumber : BP3K

TABEL
TABLE

LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK INDONESIA
MENURUT PROVINSI/PULAU

ANNUAL POPULATION GROWTH OF INDONESIA
BY PROVINCE/ISLAND
1961 - 1984

PROVINSI/PULAU PROVINCE/ISLAND	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun Annual Population Growth Rate					
	1961-1971	1971-1980	1980-1981	1981-1982	1982-1983	1983-1984
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Daerah Istimewa Aceh	2.14	2.93	2.68	2.76	2.73	2.73
2. Sumatera Utara	2.95	2.60	2.42	2.39	2.41	2.40
3. Sumatera Barat	1.90	2.21	2.07	2.03	2.02	2.02
4. R i a u	2.92	3.11	2.85	2.93	2.92	2.92
5. J a m b i	3.09	4.07	3.66	3.88	3.88	3.87
6. Sumatera Selatan	2.20	3.32	3.32	3.03	3.14	3.13
7. Bengkulu	2.51	4.39	3.94	4.21	4.19	4.20
8. Lampung	5.29	5.77	5.11	5.59	5.58	5.57
S U M A T E R A	2.86	3.32	3.09	3.22	3.23	3.23
9. D.K.I. Jakarta	4.46	3.93	3.61	3.83	3.82	3.80
10. Jawa Barat	2.09	2.66	2.46	2.49	2.48	2.47
11. Jawa Tengah	1.76	1.64	1.59	1.48	1.46	1.45
12. D.I. Yogyakarta	1.07	1.10	1.13	0.94	0.92	0.91
13. Jawa Timur	1.59	1.49	1.46	1.32	1.31	1.30
J A W A	1.91	2.02	1.94	1.89	1.88	1.88

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14. B a l i	1.77	1.69	1.63	1.52	1.51	1.50
15. Nusa Tenggara Barat	2.02	2.36	2.20	2.19	2.17	2.16
16. Nusa Tenggara Timur	1.57	1.95	1.85	1.78	1.77	1.77
17. Timor Timur	-	-	1.85	1.78	1.77	1.77
NUSA TENGGARA	1.78	2.01	1.90	1.84	1.82	1.82
18. Kalimantan Barat	2.51	2.31	2.15	2.13	2.12	2.11
19. Kalimantan Tengah	3.56	3.43	3.12	3.26	3.25	3.23
20. Kalimantan Selatan	1.45	2.16	2.03	1.99	1.98	1.97
21. Kalimantan Timur	2.94	5.73	5.09	5.59	5.57	5.57
K A L I M A N T A N	2.34	2.96	2.78	2.89	2.90	2.91
22. Sulawesi Utara	2.78	2.31	2.16	2.14	2.13	2.08
23. Sulawesi Tengah	2.83	3.86	3.48	3.67	3.67	3.67
24. Sulawesi Selatan	1.40	1.74	1.67	1.58	1.56	1.55
25. Sulawesi Tenggara	2.49	3.09	2.85	2.92	2.90	2.91
S U L A W E S I	1.90	2.22	2.10	2.08	2.07	2.06
26. M a l u k u	3.31	2.88	2.70	2.64	2.70	2.69
27. Irian Jaya	2.01	2.67	2.46	2.50	2.48	2.47
MALUKU + IRIAN JAYA	2.69	2.79	2.59	2.58	2.60	2.59
I N D O N E S I A	2.10	2.32	2.22	2.21	2.21	2.21

Sumber : BP3K

Lampiran 13

TABEL
TABLE

**BANYAKNYA SEKOLAH, GURU DAN MURID
MENURUT JENIS SEKOLAH
NUMBER OF SCHOOLS, TEACHERS AND PUPILS
BY KIND OF SCHOOL
1979/1980**

P E N D I D I K A N E D U C A T I O N	SEKOLAH SCHOOLS	GURU TEACHERS	MURID PUPILS	RATA-RATA/AVERAGE	
				GURU PER SEKOLAH/ TEACHERS PER SCHOOL	MURID PER SEKOLAH/ PUPILS PER SCHOOL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. T.K.K. / Kindergaten	16.026	29.358	754.474	1.83	73.29
II. S.D. / Elementary School	98.036	627.336	21.123.482	6.40	215.49
III. Pendidikan Umum/ General Education	10.982	206.522	3.517.319	18.80	320.28
1. S.M.P. / Junior High School	8.860	154.791	2.741.197	17.47	309.39
2. S.M.A. / Senior High School	2.122	51.731	776.122	17.47	309.39
IV. Pendidikan Guru (SPG) dan SGO / Teacher Education & Sport Teacher Training.	630	14.858	227.965	23.58	361.85
V. Pendidikan Tehnik / Technological Education	928	25.238	304.496	27.20	328.12

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. S.T. / Junior Technological School.	283	6.610	68.910	23.36	243.50
2. S.T.M. Senior Technological School.	645	18.628	235.586	28.88	365.25
VI. Pendidikan Kejuruan lain / Other Vocational Education	964	36.877	249.252	38.25	258.56
A. Menengah Pertama/ Junior Level	154	2.177	17.009	14.14	110.45
1. S.M.E.P./Junior Economic High School	14	226	4.502	16.14	321.57
2. S.K.K.P./Junior Homa Economic High School	140	1.195	12.507	13.94	89.34
B. Menengah Atas/ Senior Level	810	17.350	232.243	21.42	286.72
1. S.M.E.A./Senior Economic High School	673	14.375	211.223	21.36	313.85
2. S.K.K.A./Senior Home Economic High School	137	2.975	21.019	21.72	153.42
VII. Perguruan Tinggi Negeri/ State University	41	24.426	195.994	884.44	4.780.34

Sumber/Source : BP3K. Dept. P & K/Office of Educational and Culture Research and Development, Dept. of Education and Culture.

Lampiran 14

Tabel Sekolah, Guru dan Murid

Jenis Sekolah	Jumlah sekolah			Jumlah Guru		
	1981/1982	1982/1983	1983/1984	1981/1982	1982/1983	1983/1984
SD	110.050	120.024	129.388	713.222	382.738	925.834
SMP	11.619*	12.361	14.172	207.844	238.828	267.561
ST	280	264	268	6.356	1.709	6.357
SKKP	117	114	104	1.679	1.707	1.672
SMA		3.667	4.601		97.508	116.568
STM		709	698		21.708	23.107
SKKA		153	145		2.984	2.853
SPG		621	624		16.277	15.686
SGO		70	78		1.969	1.902
SMEA		753	771		17.174	19.831

Tabel Jenis Sekolah dan Jumlah Murid

Jenis	Jumlah Murid		
	1981/1982	1982/1983	1983/1984
SD	23.862.488	24.701.288	25.804.380
SMP	3.763.020	4.192.913	4.676.139
ST	63.134	68.942	69.715
SKKP	10.194	11.012	11.754
SMA		1.504.318	1.835.251
STM		233.960	245.973
SKKA		20.520	21.225
SPG		211.565	226.391
SGO		22.103	27.304
SMEA		269.096	297.675

Sumber : BP3K Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Lampiran 15

Tabel
Table

**BANYAKNYA PERGURUAN TINGGI NEGERI, FAKULTAS
DAN MAHASISWA MENURUT PROVINSI
NUMBER OF STATE UNIVERSITIES, FACULTES AND
STUDENTS BY PROVINCE
1982/1983 ***

PROVINSI PROVINCE	Jumlah Number of Universities	Jumlah Mahasiswa/Total Students		
		Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
1. Daerah Istimewa Aceh	1	5.617	2.238	7.855
2. Sumatera Utara	2	10.743	4.205	14.948
3. Sumatera Barat	3	5.666	3.366	9.032
4. R i a u	1	2.737	1.260	3.997
5. Jambi	1	1.539	361	1.900
6. Sumatera Selatan	1	4.354	3.022	6.376
7. Bengkulu	—	—	—	—
8. Lampung	1	3.195	1.522	4.747
9. DKI Jakarta	2	10.132	7.330	17.462
10. Jawa Barat	5	28.147	11.344	39.491
11. Jawa Tengah	5	18.478	9.197	37.675
12. D.I. Yogyakarta	5	19.869	8.965	28.834
13. Jawa Timur	6	21.703	10.327	32.030
14. Bali	2	8.009	2.457	10.466
15. Nusa Tenggara Barat	1	2.985	786	3.771
16. Nusa Tenggara Timur	1	3.519	509	4.028
17. Kalimantan Barat	1	3.330	982	4.312
18. Kalimantan Tengah	1	1.353	412	1.765
19. Kalimantan Selatan	1	5.316	2.084	7.400
20. Kalimantan Timur	1	3.611	770	4.381
21. Sulawesi Utara	2	6.811	5.679	12.490
22. Sulawesi Tengah	1	1.808	692	2.500
23. Sulawesi Selatan	2	13.351	5.435	18.786
24. Sulawesi Tenggara	1	1.052	305	1.357
25. Maluku	1	3.580	1.354	4.934
26. Irian Jaya	1	2.099	329	2.428
27. Timor Timur	—	—	—	—
INDONESIA	49	189.004	83.961	272.965

Catatan : *) Angka sementara keadaan 5 September 1982

Sumber/Source : Departemen P & K / Department of Education and Culture.

Lampiran 16

Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 26 Juni 1982 No. 0211/U/1982

PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI DALAM LINGKUNGAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JENJANG GELAR	PROGRAM GELAR DAN NON-GELAR					PROGRAM AKTA					
	JENJANG NON GELAR		SKS PER JENJANG	SKS KUMULATIF	PAKET KURIKU- LUM (SEMESTER)	PERKIRAAN LAMA STUDI MAHASISWA/ SEMESTER	JENJANG AKTA	SKS PERSYARATAN	SKS PER JENJANG	PAKET KURIKU- LUM (SEMES- TER)	PERKIRAAN LAMA STUDI MAHASISWA/ SEMESTER
	DIPLOMA	SPELIALIS									
	D I	-	40 - 50	40 - 50	2	2 - 4	A I	20	20	2	2 - 4
	D II	-	-	80 - 90	4	4 - 6	A II	60	20	2	2 - 4
SM **)	D III	-	-	110 - 120	6	6 - 10	A III	90	20	2	2 - 4
S ₁	D IV*)	-	-	144 - 160	8	8 - 14	A IV	120	20	2	2 - 4
S ₂	-	Spl *)	40 - 50	180 - 194	12	12 - 18	A V	160	20	2	2 - 4
S ₃	-	Spll *)	40 - 50	228 - 233	16	16 - 22	-	-	-	-	2 - 4

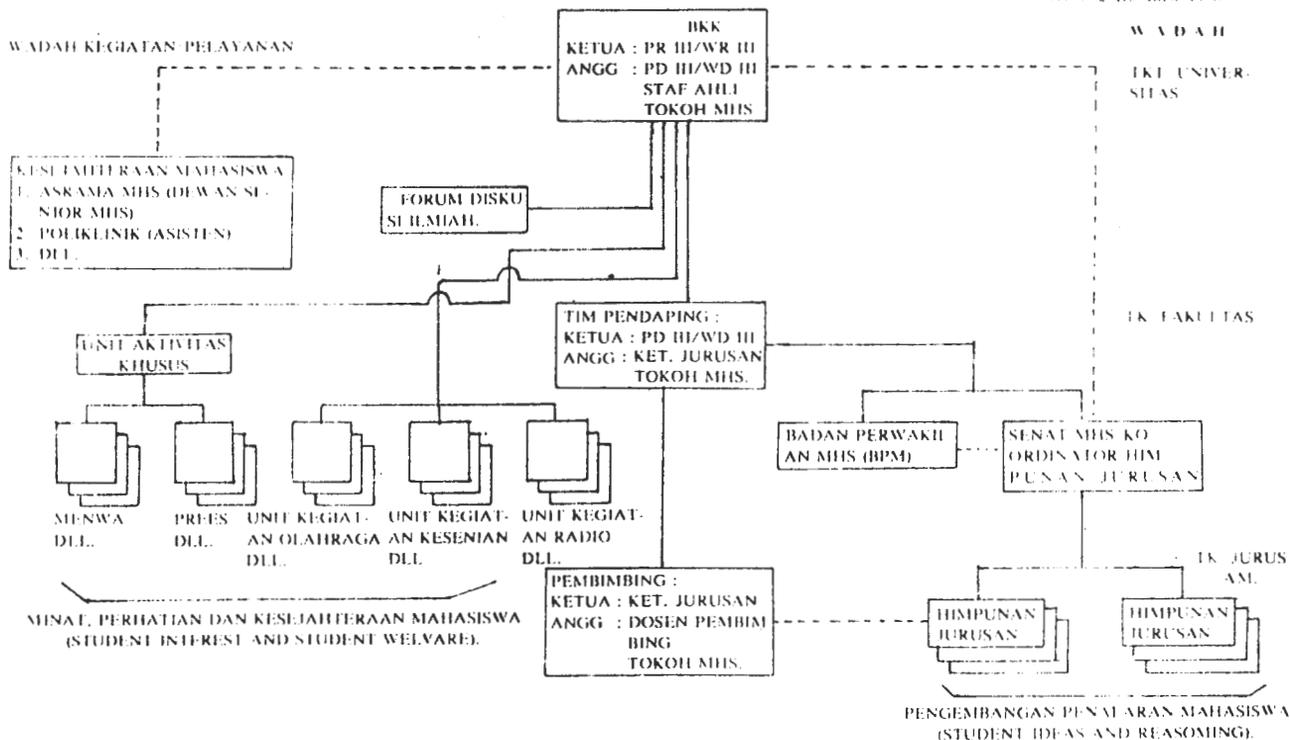
Keterangan : *) Program kelompok profesi kependidikan tidak mempunyai jenjang ini.

***) SM adalah Program pendidikan yang merupakan bagian utuh dari program S₁ dan tidak bersifat terminal.

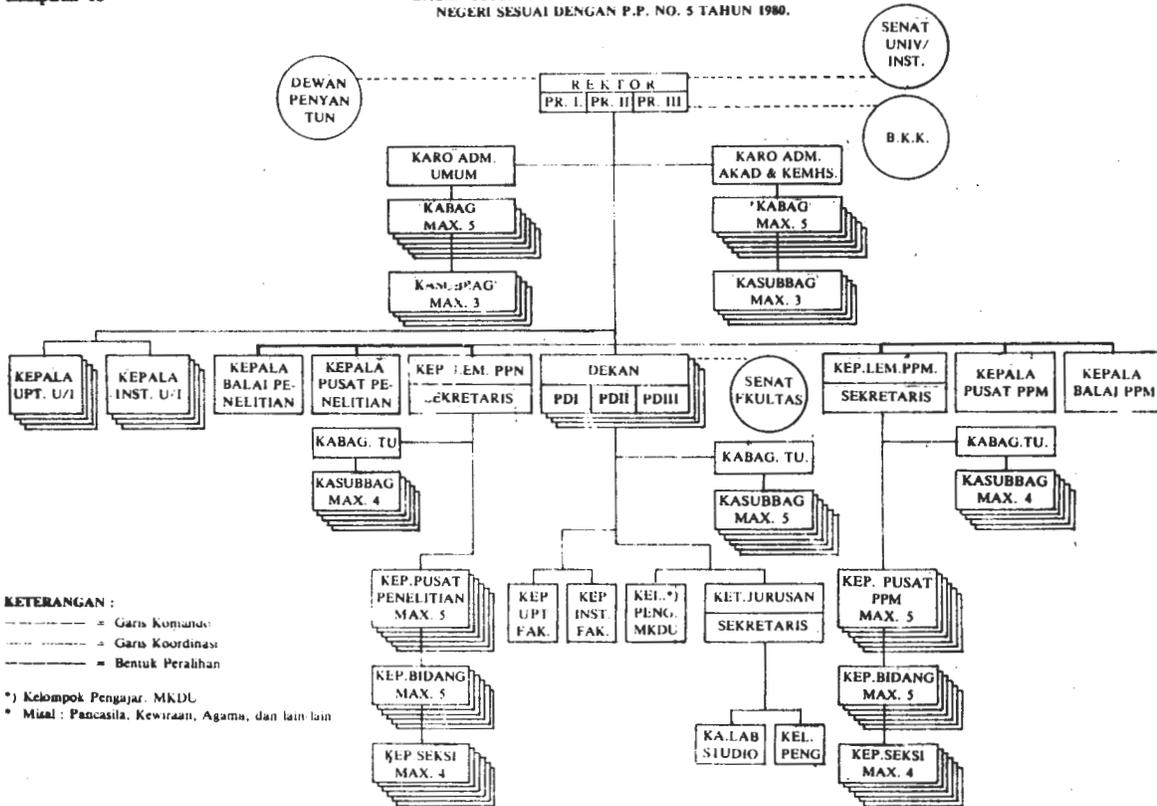
Lampiran 17

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELEMBAGAAN MAHASISWA INTRA UNIVERSITAS
 PEMBINAAN

LAMPIRAN :
 INSTRUKSI DIRJEN PUNDI
 NO. 002/DT/Instr. 1978



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS/INSTITUT
NEGERI SESUAI DENGAN P.P. NO. 5 TAHUN 1980.



**DAFTAR MENTERI-MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEJAK TAHUN 1945 – 1983**

No.	N A M A	TANGGAL LAHIR/ MENINGGAL.	MASA JABATAN	K A B I N E T
1.	Ki Hadjar Dewantara	2 Mei 1889 – 26 April 1959	19 Agustus 1945 – 14 Nopember 1945	Menteri Pengajaran Kabinet Presidential.
2.	Dr.Mr.T.S.G. Mulia.	21 Januari 1896 – 11 Nopember 1966.	14 Nopember 1945 – 12 Maret 1946 12 Maret 1946 – 2 Oktober 1946.	Menteri Pengajaran Kabinet Syahrir I Menteri Muda Pengajaran dalam Kabinet Syahrir II.
3.	Moh. Sjafei	1896 – 1969	12 Maret 1946 – 2 Oktober 1946.	Menteri Pengajaran.
4.	Wikana	-	12 Maret 1946 – 2 Oktober 1946.	Menteri Negara Urusan Pemuda, Kabinet Syahrir II.
5.	Mr. Suwandi	Oktober 1899 – 6 Maret 1964.	2 Oktober 1946 – 27 Juni 1947.	Menteri Pengajaran Kabinet Syahrir III.
6.	Ir. R. Gunarto	22 Oktober 1908	2 Oktober 1946 – 27 Juni 1947.	Menteri Muda Pengajaran Kabinet Syahrir III.
7.	Mr. Ali Sastroamidjojo	21 Mei 1903 – 13 Maret 1975	3 Juli 1947 – 11 Nopember 1947 11 Nopember – 29 Januari 1948. 29 Januari 1948 – 4 Agustus 1949.	Menteri Pengajaran Kabinet Amir Syarifuddin I. Menteri pengajaran Kabinet Amir Syarifuddin II. Menteri P.P dan K Kabinet Hatta I.
8.	Supeno	Meninggal 24 Pebruari 1949.	29 Januari 1948 – 4 Agustus 1949.	Menteri Pembangunan Pemuda Kabinet Hatta
9.	Mr. Teuku Moh. Hassan	1906	19 Desember 1948 – 13 Juli 1949	Menteri P.P. dan K Kabinet Darurat
10.	Dr. Abu Hanifah	1906	20 Desember 1949 – 6 September 1950.	Menteri P.P. dan K Kabinet R.I.S.

No.	N A M A	TANGGAL LAHIR/ MENINGGAL	MASA JABATAN	K A B I N E T
11.	S. Mangunsarkoro	1904 - 1959	4 Agustus 1949 - 20 Desember 1949. 20 Desember 1949 - 21 Januari 1950. 21 Januari 1950 - 6 September 1950.	Menteri P.P. dan K Kabinet Hatta II. Menteri P.P. dan K Kabinet Peralihan. Menteri P.P. dan K Kabinet Halim.
12.	Dr. Bahder Djohan	30 Juli 1902	6 September 1950 - 27 April 1951. 3 April 1952 - 30 Juli 1953.	Menteri P.P. dan K Kabinet R.I. Kesatuan Pertama. Menteri P.P. dan K Kabinet R.I. Kesatuan ketiga.
13.	Mr. Wongsonegoro	1897	2 April 1951 - 3 April 1952	Menteri P.P. dan K Kabinet R.I. Kesatuan Kedua.
14.	Prof.Ir.R.M. Suwandi	25 Oktober 1904	12 Agustus 1955 - 24 Maret 1956.	Menteri P.P. dan K Kabinet R.I. Kesatuan Kelima.
15.	Mr. Muhd Yamin	23 Agustus 1903 - 17 Oktober 1962.	30 Juli 1953 - 12 Agustus 1953.	Menteri P.P. dan K Kabinet R.I. Kesatuan ke IV.
16.	Sarino Mangun Pranoto	1911	24 Maret 1956 - 14 Maret 1957. 27 Maret 1966 - 25 Juli 1966. 27 Maret 1966 - 25 Juli 1966. 25 Pebruari 1966 - 11 Oktober 1967.	Menteri P.P. dan K Kabinet Alisastro Ami- djojo, II. Menteri P.P. dan K Kabinet Dwikora yang di- sempurnakan lagi. Menteri Kebudayaan (ai) Kabinet Dwikora yang disempurnakan lagi. Menteri P dan K Kabinet Ampera.
17.	Prof.Dr.Prijono	20 Juli 1907 - 6 Maret 1969.	9 April 1957 - 10 Juli 1059. 10 Juli 1959 - 18 Pebruari 1960.	Menteri P.P. dan K Kabinet Karya. Menteri P.P. dan K Kabinet Kerja ke I.

No.	N A M A	TANGGAL LAHIR/ MENINGGAL	MASA JABATAN	K A B I N E T
18.	Prof. Iwa Kusuma Sumantri SH	31 Mei 1899 - 27 Nopember 1977.	18 Pebruari 1960 - 6 Maret 1962 6 Maret 1962 -- 13 Nopember 1962. 13 Nopember 1963 - 27 Agustus 1964. 27 Agustus 1964 - 21 Pebruari 1966. 21 Pebruari 1966 - 17 Maret 1966. 18 Pebruari 1960 6 Maret 1962.	Menteri Koordinator P. P. dan K Kabinet Kerja ke II. Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, Kabinet Kerja ke III. Menteri P.D. dan K Kabinet Kerja ke IV. Menteri Koordinator P.P. dan K Kabinet Dwikora. Menteri Koordinator Kabinet Dwikora yang disempurnakan. Menteri PTIP, Kabinet Kerja ke II.
19.	Prof. Dr. Ir. Thojib Hadiwidjaja	12 Mei 1919.	6 Maret 1962 - 13 Nopember 1964. 13 Nopember 1963 - 27 Agustus 1964.	Menteri PTIP Kabinet Kerja ke III. Menteri PTIP Kabinet Kerja ke IV.
20.	Brig. Jen. TNI. Dr. Sjarif Thajeb	7 Agustus 1920.	27 Agustus 1964 - 21 Pebruari 1966.	Menteri PTIP Kabinet Dwikora.
21.	Ny. Artati Marzuki Sudirdjo	15 Juni 1921	27 Agustus 1964 - 21 Pebruari 1966.	Menteri P.P. dan K Kabinet Dwikora.
22.	Maladi	31 Agustus 1912	6 Maret 1962 - 13 Nopember 1963. 13 Nopember 1963 - 27 Agustus 1964. 27 Agustus 1964 - 21 Pebruari 1966. 21 Pebruari 1966 - 27 Maret 1966.	Menteri Olah Raga Kabinet Kerja ke III. Menteri Olah Raga Kabinet Kerja ke IV. Menteri Olah Raga Kabinet Dwikora. Menteri Olah Raga Kabinet Dwikora yang disempurnakan.

No.	N A M A	TANGGAL LAHIR/ MENINGGAL	MASA JABATAN	K A B I N E T
23.	Dr.J. Leimena	6 Maret 1905 -- 29 Maret 1977.	27 Maret 1966 -- 25 Juli 1966. 21 Pebruari 1966 -- 27 Maret 1966.	Deputy Menteri Olah Raga Kabinet Dwikora yang disempurnakan. Menteri PTIP ai Kabinet Dwikora yang disempurnakan.
24.	Sumardjo		21 Pebruari 1927 -- 27 Maret 1966.	Menteri P.D. dan K Kabinet Dwikora yang disempurnakan.
25.	Moh. Said	21 Januari 1917	27 Maret 1966 -- 25 Juli 1966.	Deputy Menteri Pendidikan Dasar Kabinet Dwikora yang disempurnakan lagi.
26.	Sanusi Hardjadinata	24 Juni 1914	11 Oktober 1967 -- 6 Juni 1968.	Menteri P dan K Kabinet Ampera yang disempurnakan.
27.	Mashuri SH.	19 Juli 1925	27 Maret 1966 -- 25 Juli 1966. 6 Juni 1968 -- 1 April 1972.	Deputy Menteri Perguruan Tinggi Kabinet Dwikora yang disempurnakan lagi. Menteri P dan K, Kabinet Pembangunan ke I.
28.	Prof.Dr.Ir. Sumantri Brodjonegoro	3 Juni 1926 -- 18 Desember 1975.	1 April 1972 -- 18 Desember 1973.	Menteri P dan K Kabinet Pembangunan II.
29.	Let.Jen.Dr. Sjarif Thajeb.	7 Agustus 1920	22 Januari 1974 -- 12 Maret 1978.	Menteri P dan K Kabinet Pembangunan II.
30.	Dr. Daoed Yoesoef		13 Maret 1978 -- 18 Maret 1983.	Menteri P dan K Kabinet Pembangunan III.
31.	dr. Abdul Gafur		13 Maret 1978 -- 18 Maret 1983.	Menteri Muda Urusan Pemuda Kabinet Pembangunan III.

Lampiran 20 :

PANCA WARDHANA

Untuk memperbaiki sistem pendidikan yang masih terlampau intelektualitis dan pada hakikatnya masih bersifat sistem pendidikan yang diwariskan oleh zaman kolonial, maka telah kami coba mencari jalan baru agar supaya sistem pendidikan nasional kita bukan hanya lebih sesuai dengan cita-cita nasional kita, akan tetapi juga sesuai dengan taraf revolusi kita sekarang ini. Yang kami maksudkan ialah bahwa di samping cita-cita nasional yang sifatnya tetap, pada taraf Revolusi kita sekarang ini kita masih dalam permulaan penyempurnaan pembangunan bangsa atau *nation building* yang maha penting. Dengan pembangunan bangsa itu yang dimaksud bukan hanya pembangunan dalam bidang materiil, tetapi juga atau lebih-lebih pembangunan dalam bidang spirituil.

Walaupun secara ilmu kenegaraan sesuatu bangsa atau *nation* itu adalah sekelompok manusia yang mempunyai negara merdeka sendiri dan mempunyai pemerintah sendiri yang berdaulat ke dalam dan ke luar, akan tetapi tidak dapat disangkal bahwa dipandang dari sudut lain bangsa itu adalah sesuatu jiwa. Sesuatu jiwa yang menyebabkan sekelompok manusia ingin hidup bersama dalam satu negara yang berdaulat dan berpemerintah sendiri.

Jika dibanding-bandingkan, maka mungkin sekali pembangunan bangsa secara spiritual itu agak lebih mendesak daripada pembangunan bangsa secara materiil. Hal ini sebetulnya telah dibuktikan sendiri oleh sejarah kita. Keinginan kita, manusia-manusia Indonesia, untuk menjadi bangsa dalam arti *nation* itu timbul lebih dahulu daripada keinginan kita untuk mengadakan pembangunan dalam bidang materiil. Keinginan itu telah meletus dalam bentuk Revolusi Kemerdekaan yang kita jalankan dengan alat-alat yang serba sederhana. Dan setelah kemerdekaan kita diakui oleh dunia, barulah dengan sungguh-sungguh kita memikirkan pembangunan dalam lapangan materiil.

Mungkin orang akan bertanya demikian: jika dengan mengadakan Revolusi Kemerdekaan itu telah terbukti bahwa ke-

lompok manusia Indonesia sudah merupakan bangsa dalam arti kejiwaan, dan sekarang ini setelah mempunyai negara yang berdaulat dan berpemerintah sendiri, kita sudah merupakan bangsa dalam segala arti, apakah *nation building*, pertama-tama dalam arti kejiwaan, masih perlu?

Jawab kami: masih, oleh karena yang menjalankan Revolusi itu hanya sebagian dari bangsa Indonesia yang sekarang ini, walaupun bagian itu tidak kecil juga. Yang menjadi tugas dari pimpinan Revolusi dan pemerintah pada umumnya, Departemen P.P. dan K. pada khususnya, ialah mengusahakan supaya patriotisme dan nasionalisme yang menyala dalam dada pimpinan Revolusi dan dada semua mereka yang telah mempertaruhkan jiwa-raga mereka untuk merebut kembali kemerdekaan kita itu menyala juga di dalam dada tiap-tiap warganegara Indonesia. Patriotisme, cinta kepada tanah-air (*la patrie*). Nasionalisme yang bagi kita antara lain atau pertama-tama berarti bahwa semua suku-suku yang hidup di tanah-air Indonesia berhasrat merupakan suatu kelompok besar yang tidak terpisah-pisah, yaitu kelompok kebangsaan Indonesia yang juga tidak dapat dipisahkan dari tanah-air yang bernama Negara Republik Indonesia, yang kemerdekaannya akan kita jaga, kita bela dan kita sempurnakan bersama-sama. Selama keinsafan kesukuan kita masih terlampau kuat dan merupakan dasar moral yang kuat juga, maka relatif keinsafan kebangsaan kita akan kurang kuat. Oleh karena itu maka jika mungkin kita harus melenyapkan keinsafan kesukuan itu dan menaikkan keinsafan itu menjadi keinsafan nasional. Di mana hal ini belum mungkin, sekurang-kurangnya kita harus memberantas syaitan suku-isme yang dicanangkan oleh P.J.M. Presiden dalam pidato beliau yang sekarang terkenal sebagai Manifesto Politik Republik Indonesia. Bagaimanapun juga, keinsafan nasional haruslah menjadi keinsafan yang paling kuat diantara keinsafan-keinsafan lain, jadi lebih kuat daripada keinsafan kesukuan. "Bhinneka Tunggal Ika" bukan berarti bahwa kita boleh mempunyai keinsafan nasional yang berbeda-beda, melainkan bahwa kita hanya mempunyai satu keinsafan nasional, satu kebangsaan Indonesia, walaupun nama dan rupa kita sebagai suku dan sebagai kebudayaan sedikit berbeda-beda. Menurut pendapat kami hal itu

tidak dapat ditawar-tawar lagi. Oleh karena itulah maka *nation building*, juga dalam arti kejiwaan, masih harus kita kerjakan dengan sekuat tenaga dan secara bertekun.

Sesuatu hal yang harus segera ditambahkan ialah keterangan bahwa nasionalisme Indonesia yang dalam Pancasila disebut dengan istilah kebangsaan, dalam Pancasila itu juga dibarengi dengan istilah perikemanusiaan yang, sesuai dengan keterangan P.J.M. Presiden Soekarno, meliputi paham internasionalisme, sehingga nasionalisme kita itu tidak bertentangan dengan internasionalisme. Jika kita sekalian setia kepada Pancasila, maka nasionalisme kita tidak akan memburuk menjadi *chauvinisme*, ialah penempatan bangsanya sendiri di atas segala bangsa sebagaimana telah kita lihat di salah satu negara di Eropa Barat. Selain daripada itu Kedaulatan Rakyat yang tercantum dalam Pancasila menjamin pula bahwa nasionalisme kita adalah nasionalisme yang demokratis dan tidak anti adanya Dewan Perwakilan Rakyat. Fasisme atau Naziisme tidak akan bisa hidup di Indonesia, asal kita tetap setia kepada Pancasila.

Di samping *nation building* dalam arti kejiwaan, ialah meninggalkan keinsafan kesukaan ke taraf keinsafan kebangsaan, kita harus pula berusaha membentuk moral nasional atau paham-paham kebaikan umum yang harus diterima oleh seluruh bangsa Indonesia. Adapun paham-paham kebaikan umum itu perlu kita miliki untuk mengatasi paham-paham kebaikan suku, partai atau golongan-golongan lain yang kadang-kadang bertentangan dengan moral nasional oleh karena merugikan kehidupan kita sebagai suatu bangsa yang tidak terpisah-pisahkan. Sekali lagi di sini diterangkan bahwa jika kita setia kepada jiwa Pancasila, maka moral nasional kita itu tidak akan bertentangan dengan moral internasional yang baik dan hanya bertentangan dengan moral internasional yang tidak baik.

Adapun moral internasional yang tidak baik ialah moral kolonialis, moral kapitalis dan moral imperialis internasional. Akan tetapi, baik bersifat internasional maupun nasional (artinya hanya berhubungan dengan satu bangsa), kolonialisme — imperialisme dan kapitalisme itu harus kita anggap sebagai ber-

tentang dengan moral nasional kita jika kita setia terhadap tujuan Revolusi Kemerdekaan kita. Masih ada satu hal yang sudah terang tidak boleh hidup berdampingan dengan istilah Kerakyatan dalam Pancasila kita.

Seterusnya kita telah melihat bahwa di semua tanah jajahan, sipenjajah tentu menghidup-hidupkan feodalisme dengan maksud mendapatkan bantuan yang kuat dari sebagian kecil dari pada bangsa yang terjajah untuk dapat melangsungkan penjajahannya. Salah satu akibat daripada jiwa feodalisme yang dihidup-hidupkan oleh penjajah itu ialah bahwa kaum intelektual yang terpaksa dididik oleh sipenjajah untuk mendapatkan tenaga administrasi yang murah, sedapat mungkin dijauhkan dari pekerjaan tangan dengan semboyan bahwa pekerjaan tangan (kecuali sebagai juru tulis atau klerk) itu tidak sesuai dengan kepriyayan. Untuk mengubah pandangan ini maka pekerjaan tangan atau manual work harus kita jadikan mata pelajaran yang penting di sekolah-sekolah.

Cinta kepada bangsa dan tanah-air tidak cukup hanya diperkembangkan dengan pelajaran-pelajaran mengenai kewarganegaraan, *Staatsbürgerkunde* atau *Civics* saja, akan tetapi harus diperkuat dengan perkembangan emosional-artistik yang pertama-tama dihubungkan dengan kebebasan sejarah nenek moyang kita, keindahan tanah air kita, kebudayaan dan kesenian kita, bukan hanya sebagai pengetahuan yang dihafalkan, akan tetapi juga sebagai ide yang dicintai dan kecakapan yang dipraktikkan.

Salah suatu hal yang penting sekali untuk memperkuat keinginan kita untuk hidup bersama sebagai suatu bangsa yang tidak terpisah-pisahkan ialah apa yang dengan istilah Inggris disebut "common cultural goods" jadi hal-hal kebudayaan yang kita miliki bersama sebagai bangsa atau unsur-unsur yang bersama-sama merupakan Kebudayaan Nasional Umum kita. Hal ini menjadi lebih urgent lagi oleh karena sebagai warisan dari sejarah kita dan sebagai akibat dari demokrasi dan toleransi kita, bangsa Indonesia itu mempunyai atau menganut berbagai-bagai agama dan berbagai-bagai ideologi politik. Oleh karena itu ha-

ruslah dicari ikatan-ikatan yang kuat, yang di dalam ikatan-ikatan itu seluruh bangsa Indonesia dari agama, ideologi atau suku manapun juga merasa dirinya senang dan merdeka. Menurut keyakinan kami ikatan-ikatan itu dapat diwujudkan dengan kebudayaan nasional Indonesia dalam arti yang seluas-luasnya. Kebudayaan nasional yang diterima, dicintai dan dijiwai oleh seluruh bangsa Indonesia, sekalipun agama, ideologi dan kesukaan mereka berbeda-beda. Oleh karena itulah maka pembentukan kebudayaan nasional umum menjadi tugas yang sangat penting bagi pemerintah dan rakyat kita pada umumnya, Departemen P.P. dan K. pada khususnya. Oleh karena itulah di sekolah-sekolah atau di luar sekolah Departemen P.P. dan K. harus menjalankan usaha ke arah itu, walaupun kebudayaan dan kesenian daerah, selama ia tidak membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, tidak boleh diabaikan. Di sinilah letaknya kepentingan pendidikan emosional-artistik.

Seterusnya berdasarkan atas hasrat kita untuk mengadakan persahabatan yang baik dengan semua bangsa di muka bumi sebagai tercantum dalam Manipol, kita harus mendekati bangsa-bangsa itu kepada anak-anak kita dengan paling sedikit memperkenalkan kepada mereka hasil-hasil kesusastraan mereka dan hasil-hasil dari lain-lain bidang kebudayaan yang indah-indah dan bermanfaat. Sudah barang tentu sejarah mereka, walaupun secara global, harus diajarkan kepada anak-anak kita.

Bahwa masyarakat adil dan makmur yang kita cita-citakan bersama hanya dapat dikerjakan oleh orang-orang yang sehat badannya dan jiwanya, hal itu sudah wajar. Di samping itu tiap-tiap manusia normal menginginkan untuk diri sendiri dan untuk keluarganya, anak-anaknya dan cucu-cucunya keadaan badan dan jiwa yang sehat wal'afiat. Oleh karena itulah ilmu kesehatan dan olah raga tidak dapat diabaikan dalam jenis sekolah apapun.

Berhubung dengan segala apa yang diuraikan di atas maka "Panca Wardhana" atau "Lima (Pokok) Perkembangan" yang oleh Kepala Misi UNESCO untuk Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan "The Five Principles of Education", dan yang telah lama kita bicarakan di kalangan Departemen P.P. dan K, berisikan segi-segi sebagai berikut:

- 1) Perkembangan cinta bangsa dan tanah-air moral nasional internasional keagamaan;
- 2) Perkembangan intelegensi;
- 3) Perkembangan emosional-artistik atau rasa keharuan dan keindahan lahir-bathin;
- 4) Perkembangan keprigelan (kerajinan) tangan;
- 5) Perkembangan jasmani.

Untuk mencapai perkembangan ke-1 harus diajarkan kewarganegaraan atau civics, ialah inti dari buku yang disusun oleh Panitia 7 yang diketuai Sekretaris Jenderal Departemen P.P. dan K., Mr. Supardo. Di samping itu pelajaran mengenai sejarah nasional kita, istimewa zaman kebesaran kita yang lampau antara lain zaman Sriwijaya dan Majapahit, akan tetapi juga yang mengenai penderitaan kita lahir batin dalam zaman penjajahan, harus diajarkan sebaik-baiknya. Kebesaran nenek kita zaman dahulu menimbulkan kepercayaan dalam hati kita dan hati murid-murid kita bahwa bangsa kita mampu membangun zaman baru yang gilang-gemilang juga, malah lebih gemilang lagi dari zaman dulu oelh karena kita sudah bersatu-padu merupakan suatu bangsa yang besar . Sejarah penderitaan kita dalam zaman kolonial yang hebat sekali dan menurunkan derajat rakyat Indonesia ke taraf yang serendah-rendahnya, akan memperkuat rasa senasib di antara bangsa kita dan menimbulkan keyakinan bahwa nasib yang celaka itu hanya tidak akan terulang lagi jika seluruh bangsa Indonesia tetap bersatu.

Di samping segi-segi yang baik dan membangun, sayang sekali sejarah nenek-moyang kita itu mempunyai segi-segi yang kurang baik juga, yang seyogyanya kita lupakan atau paling sedikit tidak kita tonjolkan. Yang kami maksud ialah sejarah mengenai percecokan dan perkelahian antara nenek-moyang kita sendiri, antara suku-suku kita atau daerah-daerah kita. Demi kepentingan nation building kita sejarah yang mengenai hal-hal semacam itu tidak boleh kita tonjol-tonjolkan atau jika perlu harus disebut secara sangat hati-hati, supaya jangan sampai melukai sesuatu pihak.

Bahwa Ilmu Bumi nasional penting sekali untuk menimbulkan rasa cinta bangsa dan tanah-air; hal itu kiranya sudah terang.

Untuk mengusahakan perkembangan kedua dapat dipakai alat-alat klasik menulis, membaca, berhitung dan sebagainya sehingga hal itu tidak usah diterangkan lebih lanjut.

Perkembangan ketiga, perkembangan emosional-artistik dapat diusahakan dengan pelajaran mengenai kesusastraan dan membaca buah-buah kesusastraan yang indah-indah baik isinya maupun bahasanya, dengan pelajaran menyanyi, baik menyanyi nasional maupun nyanyian-nyanyian daerah, dan pelajaran cabang-cabang kesenian yang lain menggambar, melukis, membutsir (boetseren), menari, memukul gamelan, bermain musik, main sandiwara dan sebagainya, baik di dalam rangka mata pelajaran yang biasa (curriculair) maupun dalam pelajaran di luar curriculair biasa (ekstra-curriculair).

Tentu saja pelajaran kesenian itu pertama-tama harus kita hubungkan dengan kesenian Indonesia, baik yang nasional umum, maupun yang daerah. Tapi berhubung dengan hasrat perdamaian internasional kita, buah-buah kesenian internasional harus kita ajarkan juga.

Perkembangan keempat diusahakan dengan pelajaran pekerjaan tangan yang lazimnya kita sebut dengan istilah kerajinan tangan, dan dengan bercocok-tanam di halaman sekolah, bila keadaan memungkinkan.

Maksud dari pelajaran ini bukanlah semata-mata untuk memperkembangkan keprigelan tangan, akan tetapi juga untuk menanamkan cinta dan hormat dalam hati murid kepada pekerjaan tangan. Sebagaimana kita ketahui dalam zaman feodal atau dalam suasana feodalisme pekerjaan tangan itu dianggap sesuatu pekerjaan yang tidak terhormat. Anggapan sebagai itu harus kita musnahkan sama sekali.

Perkembangan kelima, ialah perkembangan jasmani kita usahakan dengan pelajaran tentang ilmu kesehatan dan dengan olah raga.

Perimbangan antara jam dan jumlah mata pelajaran-mata pelajaran dalam masing-masing bidang pokok perkembangan tentu saja harus kita sesuaikan dengan jenisnya sekolah. Misalnya saja dalam sekolah teknik titik berat tentunya harus diletakkan pada mata pelajaran-mata pelajaran yang erat hubungannya dengan teknik, termasuk pekerjaan tangan yang banyak. Dalam sekolah kesenian misalnya, titik berat harus diletakkan pada perkembangan emosional-artistik, baik teori-teorinya, prakteknya dan penghayatannya. Dalam sekolah-sekolah umum harus dicari keseimbangan setepat-tepatnya sesuai dengan maksud pembaharuan pendidikan kita pula. Sudah barang tentu perimbangan-perimbangan itu harus kita bicarakan bersama secara teliti dan mendalam.

Seterusnya kita harus mulai berani mencocokkan pendidikan kita di Sekolah-sekolah Rakyat dan Sekolah-sekolah Menengah yang sebagian besar dari muridnya akan terus terjun ke dalam masyarakat, dengan kebutuhan-kebutuhan yang khas bagi masyarakat sekeliling sekolah-sekolah kita beri pelajaran tentang ilmu perikanan, di daerah pertanian murid-murid harus banyak kita beri pelajaran tentang ilmu pertanian dan begitu seterusnya.

Kecuali itu demi perkembangan jiwa patriot yang lengkap atau komplit, ialah patriotik dalam lapangan politik, dalam lapangan sosial-ekonomi dan dalam lapangan kebudayaan, maka darmawisata kemuseum-museum, tempat-tempat keramat sebagai makam-makam pahlawan, tempat yang indah-indah, daerah-daerah atau pulau-pulau lain daripada tempat tinggal murid, pabrik-pabrik, tempat-tempat pertambangan dan sebagainya harus dijalankan dengan teratur.

Akhirnya masih ada satu soal yang harus kita beri keterangan walaupun secara pendek, ialah mengenai moral nasional. Jika kita ini semuanya mendukung Pancasila beserta Manifesto Politik Republik Indonesia dan USEDK-nya, maka sebetulnya tidak sukarlah bagi kita untuk mencari pokok-pokok moral nasional.

Bolehlah di sini dicatat dahulu bahwa Pancasila tanpa Manipol beserta USDEK-nya, artinya tanpa penjelasan yang di-

berikan P.Y.M. Presiden Soekarno dalam pidato tahunan beliau pada tanggal 17 Agustus 1959, terbukti telah dapat hidup juga dalam suasana liberalisme dan kapitalisme. Sekarang dengan penjelasan satu-satunya yang sah yang berupa Manipol itu, maka Pancasila hanya dapat hidup dalam suasana USDEK saja, dan sekali-kali tidak boleh dibiarkan hidup dalam suasana liberalisme dan kapitalisme maupun individualisme.

Jika hal ini telah kita insafi bersama, maka moral nasional yang harus kita bentuk dan kita perkembangkan secara filsafah harus berpedoman pada Pancasila dan secara praktis harus berdasarkan atas Manipol beserta USDEK-nya atau lebih tegas lagi: moral nasional yang sesuai dengan tujuan Revolusi Kemerdekaan kita, ialah kerangka yang bersegi tiga yang termaktub dalam Manipol, yaitu:

- 1) Pembentukan negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis dan meliputi wilayah yang membentang dari Sabang sampai ke Merauke;
- 2) Di dalam negara Kesatuan itu membentuk masyarakat adil dan makmur materiil dan spirituil atau masyarakat sosialis Indonesia;
- 3) Mengadakan persahabatan dengan seluruh bangsa di muka bumi, khususnya dengan negara-negara Asia-Afrika atas dasar saling menghormati, dan mengusahakan susunan dunia baru tanpa penghisapan dan penjajahan ke arah perdamaian internasional yang sejati dan abadi.

Dengan demikian maka moral nasional Indonesia itu bukan hanya tidak bertentangan dengan perikemanusiaan, akan tetapi tidak juga bertentangan dengan internasionalisme yang anti kolonialisme dan anti imperialisme.

Bung Karno sendiri dalam Manipol sudah berkata: "Dasar dan tujuan Revolusi Indonesia adalah kongruen (congkruent) dengan Social Conscience of Man" artinya dasar dan tujuan Revolusi kita itu sama dan serupa dengan hasrat sosial yang baik dari manusia, bukan manusia Indonesia saja, melainkan manusia di seluruh dunia.

Dengan penjelasan di atas itu sekiranya tidak usah diterangkan lagi pokok-pokok moral nasional Indonesia ialah:

- 1) Mengusahakan pembebasan Irian Barat dari penjajahan dan memasukkan ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia;
- 2) Menentang individualisme, liberalisme, kapitalisme, kolonialisme, imperialisme, feodalisme dan segala macam penghisapan dan penindasan, atau secara positif: dengan bergotong-royong mengusahakan keadilan materiel dan spiritual untuk tiap-tiap warganegara, tidak peduli keturunannya dan kepercayaannya, kesukumannya, jenis kelaminnya dan sebagainya;
- 3) Mengusahakan saling menghargai dan saling mencintai antara seluruh bangsa di muka bumi sehingga terwujudlah keadilan dan persahabatan internasional dengan saling bantu-membantu dalam mengusahakan kebahagiaan seluruh umat manusia.

Menurut perasaan saya dengan adanya Manipol beserta USDEK-nya sebagai garis besar dari Haluan Negara kita, maka tugas kita sebagai pendidik sudah sangat terang dan menjadi gampang, sebab kita tidak usah mencari arah lagi. Yang perlu kita cari ialah jalan atau metode yang sebaik-baiknya untuk membawa anak didik kita secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya ke arah itu.

Sekianlah penjelasan kami mengenai "Panca Wardhana". Mudah-mudahan pokok-pokok pikiran sebagaimana diutarakan di atas itu dapat menjadi bahan pemikiran dalam mencari perinciannya bagi semua kawan dalam lingkungan Departemen P.P. dan K.

Jakarta, 10 Oktober 1960

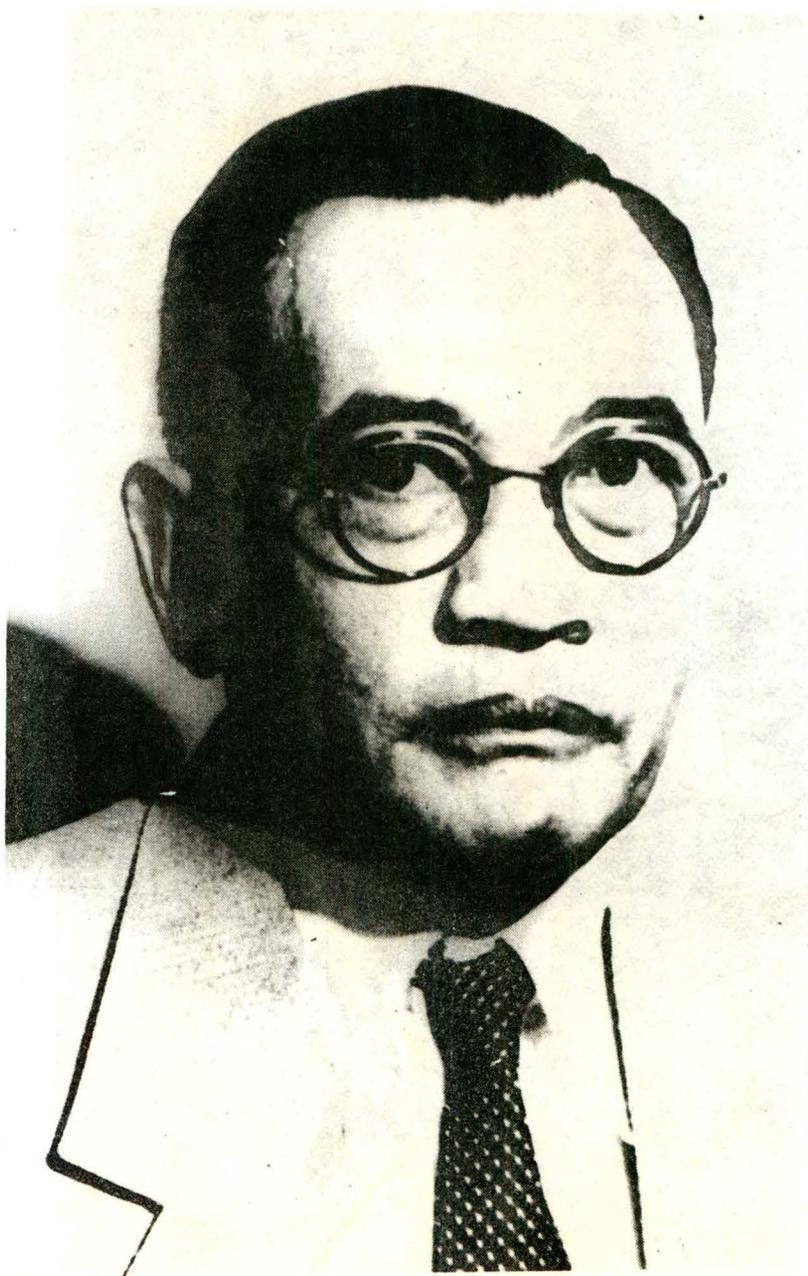
Menteri Pendidikan, Pengajaran dan
Kebudayaan,

ttd.

PRIJONO.



Ki Hajar Dewantara



Dr. Mr. T.S.G. Mulla



Wikana



Mr. Suwandi



Ir. R. Gunarso



Mr. Ali Sastroamidjojo



Mr. Teuku Moh. Hassan



Prof. Dr. Abu Hanifah



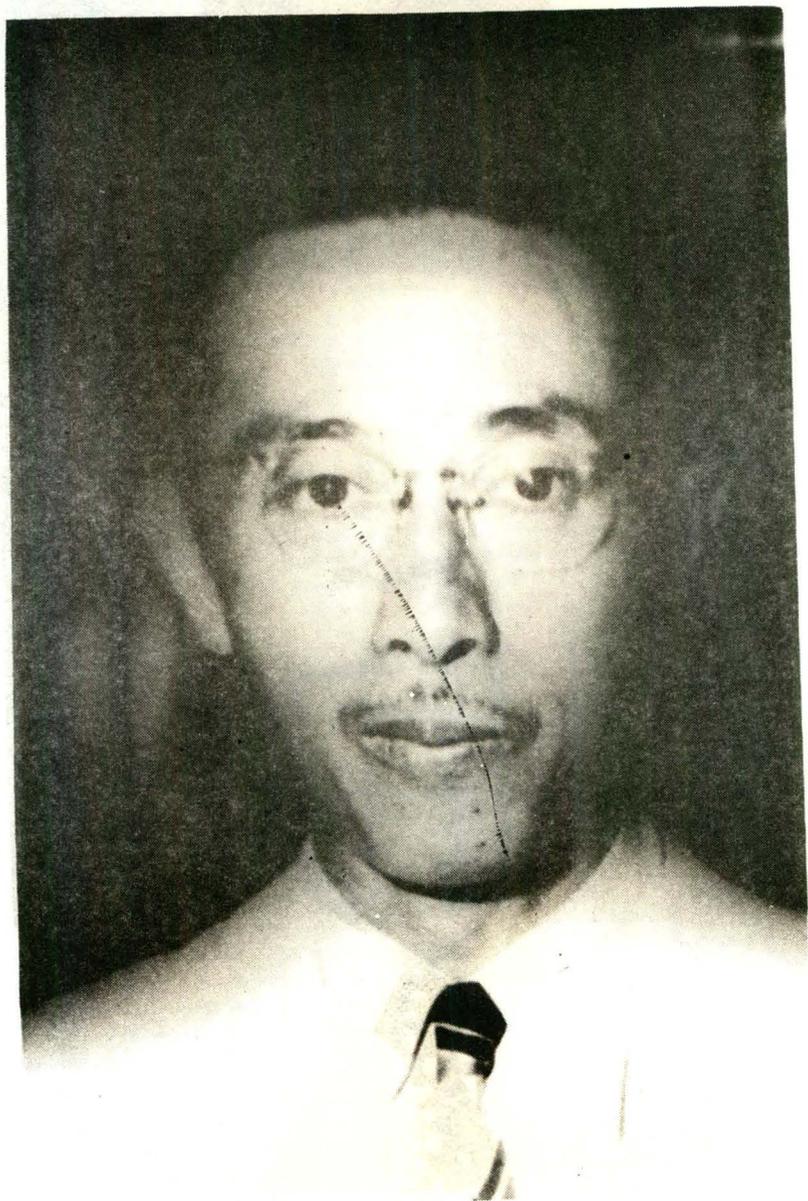
Ki-S. Mangunsarkoro



Dr. Bahder Djohan



Mr. Wongsonegoro



Prof. Ir. R.M. Suwandi



Prof. Mr. Muhd. Yamin



Sarino Mangun Pranoto



Prof. Dr. Priyono



Prof. Iwa Kusuma Sumantri, SH.



17. *Prof. Dr. Ir. Tojib Hadiwidjaja*



18. *Prof. Dr. Sjarif Thayeb*



19. *Ny. Artati Marzuki Sudirdjo*



Moh. Said



21. *Samusi Hardjadinata*



Mashuri, SH.



Prof. Dr. Ir. Sumantri Brodjonegoro



24. *Dr. Daoed Yoesoef*

PERMISSION TO REPRODUCE THIS
COPY OF THE MANUSCRIPT
HAS BEEN GRANTED BY
THE NATIONAL ARCHIVES
AT COLLEGE PARK, MARYLAND

PERPUSTAKAAN

DIREKTORAT PENINGGALAN PURBAKALA
DIREKTORAT JENDERAL SEJARAH DAN PURBAKALA
DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

